Kata Pengantar

Penyusunan laporan Kinerja Pelaksanaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan pinjaman dan hibah luar negeri, serta merupakan pelaksanaan amanat dari ketentuan Pasal 77 ayat 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah.Penyusunan laporan ini bertujuan untuk menyampaikan perkembangan kinerja pelaksanaan pinjaman dan hibah luar negeri, identifikasi permasalahan dan tindak lanjut, serta evaluasi terhadap pelaksanaan proyek yang telah selesai pelaksanaannya berdasarkan laporan akhir proyek atau *Project Completion Report* (PCR). Kinerja pelaksanaan pinjaman dan hibah luar negeri dalam laporan ini dilihat dari realisasi pencapaian *output*/fisik dan tingkat penyerapan dana.

Laporan Kinerja Pelaksanaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri edisi Triwulan IV Tahun 2014 disusun berdasarkan i) hasil rapat pemantauan Triwulan IV Tahun 2014 yang dilaksanakan di Bappenas pada bulan Januari 2015, ii) hasil laporan pelaksanaan kegiatan yang disampaikan kepada Bappenas dari Kementerian/Lembaga selaku instansi pelaksana sampai dengan tanggal 31 Desember 2014; dan iii) hasil kunjungan lapangan. Proyek-proyek yang dipantau dalam laporan ini merupakan proyek yang sudah efektif masa berlakunya dan belum melewati tanggal berakhirnya pinjaman (*closing date),* yang dibiayai dari pinjaman luar negeri dengan sumber pembiayaan dari Kreditor Multilateral, Kreditor Bilateral, Kreditor Swasta Asing, serta hibah luar negeri, antara lain Hibah Bank Dunia, Hibah Pemerintah Amerika Serikat (*Millennium Challenge Corporation*/MCC), dan Hibah Pemerintah Jerman.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pelaksanaan proyek yang dibiayai dari pinjaman dan hibah luar negeri termasuk permasalahan yang dihadapi oleh setiap proyek pada Triwulan IV Tahun 2014. Laporan ini juga diharapkan dapat memberikanpelajaran dan pengalaman (*lesson learned*)yang berguna untuk meningkatkan kinerja kegiatan pinjaman dan hibah luar negeri baik dalam pelaksanaan maupun perencanaan selanjutnya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

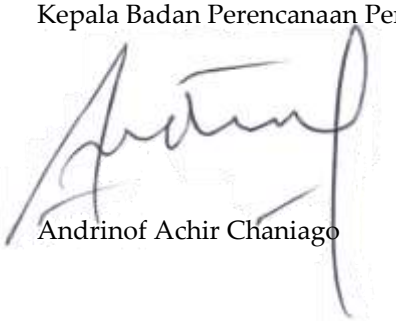

Andrinof Achir Chaniago

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL ..... **iii**

DAFTAR GAMBAR ..... **v**

BAB I GAMBARAN UMUM **1**
Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sumber Pinjaman 1
Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab 3
Permasalahan Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri 6
Pelaksanaan Hibah Luar Negeri 6

BAB II KINERJA PELAKSANAAN PINJAMAN LUAR NEGERI **9**
Kreditor Multilateral 9
Bank Dunia 10
ADB 34
IDB 49
Multilateral Lain 65
Kreditor Bilateral 68
Jepang 70
Australia 87
Jerman 88
Korea 91
Perancis dan AFD 94
RR Tiongkok 99
Spanyol 102
Proyek Lembaga Penjamin Kredit Ekspor/Kredit Swasta Asing(LPKE/KSA) 104

BAB III KINERJA PELAKSANAAN HIBAH LUAR NEGERI **109**
Hibah Bank Dunia 110
Hibah Lembaga PBB 114
United Nations Development Programme (UNDP) 114
Hibah Pemerintah Amerika Serikat 123
Program Millennium Challenge Corporation (MCC) Compact 123
Hibah Pemerintah Jerman 133
Forest Programme 133

BAB IV LAPORAN PELAKSANAAN PROYEK YANG TELAH SELESAI **137**
Rural Empowerment and Agricultural Development (READ) 137

BAB V PENUTUP **141**
Kesimpulan 141
Tindak Lanjut 142

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sumber Pinjaman 2
Tabel 1.2 Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab 4
Tabel 1.3 Pelaksanaan Hibah Luar Negeri Triwulan IV Tahun 2014 Berdasarkan Bentuk dan Jenis Hibah..... 7
Tabel 2.1 Rekapitulasi Pinjaman Luar Negeri Multilateral 9
Tabel 2.2 Rekapitulasi Pinjaman Luar Negeri Multilateral Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab 9
Tabel 2.3 Proyek Bank Dunia yang Berakhir pada Triwulan IV TA 2014..... 11
Tabel 2.4 Penyerapan Pinjaman Bank Dunia Menurut Instansi Penanggung Jawab Pada Triwulan IV TA 2014..... 12
Tabel 2.5 Realisasi Penyerapan Pinjaman ADB Menurut Instansi Penanggung Jawab Triwulan IV TA 2014 35
Tabel 2.6 Perbandingan Nilai PV Kegiatan Pinjaman ADB dengan Kinerja Penyerapan Rendah (PV ≤-30,00) padaTriwulan I, Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV TA 2014..... 36
Tabel 2.7 Penyerapan Pinjaman IDB Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab pada Triwulan IV TA 2014 51
Tabel 2.8 Penyerapan Pinjaman dari Lembaga Multilateral Lain Menurut Instansi Penanggung Jawab..... 65
Tabel 2.9 Rekapitulasi Pinjaman Luar Negeri Bilateral 68
Tabel 2.10 Rekapitulasi Pinjaman Luar Negeri Bilateral Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab . 69
Tabel 2.11 Daftar Pinjaman Proyek Jepang yang Berakhir Masa Lakunya Pada TA 2014 dan Status Dana Pinjaman yang Belum Ditarik 70
Tabel 2.12 PinjamanProyek yang Dibiayai Jepang sampaidenganTriwulan IV TA 2014 71
Tabel 2.13 Perbandingan Penyerapan Pinjaman sampai dengan Triwulan IV TA 2013 dan 2014 72
Tabel 2.14 *Progress Varian* Proyek Pinjaman Jepang 72
Tabel 2.15 Perbandingan Penyerapan Pinjaman sampai dengan Triwulan IV TA 2013 dan 2014 73
Tabel 2.16 Perbandingan Penyerapan Pinjaman sampai dengan Triwulan IV TA 2013 dan 2014..... 78
Tabel 2.17 Perbandingan Penyerapan Pinjaman sampai dengan Triwulan IV TA 2013 dan 2014 79
Tabel 2.18 Perbandingan Penyerapan Pinjaman sampai dengan Triwulan IV TA 2013 dan 2014 81
Tabel 2.19 Perbandingan Penyerapan Pinjaman sampai dengan Triwulan IV TA 2013 dan 2014 82
Tabel 2.20 Perbandingan Penyerapan Pinjaman s.d Triwulan IV Tahun Anggaran 2013 dan 2014 . 83
Tabel 2.21 Perbandingan Penyerapan Pinjaman PT. PLN sampai dengan Triwulan IV TA 2013 dan 2014..... 84
Tabel 2.22 Perbandingan Penyerapan Pinjaman sampai dengan Triwulan IV TA 2013 dan 2014 ... 87
Tabel 2.23 Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman Jerman Triwulan IV TA 2014 Menurut Instansi Penanggung Jawab 88
Tabel 2.24 Pinjaman Jerman dengan PV <-30 (Status Pada Triwulan III dan Triwulan IVTA 2014).. 89
Tabel 2.25 Daftar Pinjaman Proyek Korea Yang Berakhir Masa Lakunya Pada TA 2014 91
Tabel 2.26 Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman Korea menurut Instansi Penanggung Jawab 92
Tabel 2.27 Perbandingan Penyerapan Pinjaman sampai dengan Triwulan IV TA 2013 dan 2014 92
Tabel 2.28 *Progress Variant* Proyek Pinjaman Korea..... 92
Tabel 2.29 Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman Perancis Triwulan IV TA 2014 Menurut Instansi Penanggung Jawab 95

Tabel 2.30 Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman AFD Triwulan IV TA 2014 Menurut Instansi Penanggung Jawab 95
Tabel 2.31 RekapitulasiPelaksanaanPinjaman RR Tiongkok menurutInstansiPenanggungjawab 99
Tabel 2.32 Perbandingan Penyerapan Pinjaman TA berjalan sampai dengan Triwulan IV TA 2013 dan 2014. 100
Tabel 2.33 *Progress Variant* Proyek Pinjaman RR Tiongkok 100
Tabel 2.34 Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman Spanyol Pada Triwulan IV TA 2014 Menurut Instansi Penanggung Jawab 102
Tabel 2.35 Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman LPKE/KSA Pada Triwulan IV TA 2014Menurut Instansi Penanggung Jawab 104
Tabel 2.36 Total Alokasi, Komitmen Pinjaman, dan Penyerapan Kumulatif Pinjaman Proyek LPKE/KSA 105
Tabel 2.37 Target dan Realisasi Penyerapan TA 2014 105
Tabel 2.38 Rekapitulasi Proyek KSA/LPKE Kepolisian Republik Indonesia 106
Tabel 2.39 Rekapitulasi Proyek KSA/LPKE PT PLN 107
Tabel 3.1 Hibah Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab 109
Tabel 3.2 Daftar Kegiatan Hibah UNDP yang Disetujui dan Kegiatan yang Berakhir pada Tahun 2014. 115
Tabel 3.3 Daftar Kegiatan Hibah UNDP yang Diperpanjang 115
Tabel 3.4 Gambaran umum Hibah Program Compact 123
Tabel 3.5 Komponen Pembiayaan Program Compact 123
Tabel 3.6 Penyerapan Anggaran Compact Berdasarkan Laporan CPS (*Common Payment System*) 124
Tabel 3.7 Lokasi Proyek Kemakmuran Hijau 124
Tabel 3.8 Wilayah-wilayah Proyek Manager Program Hibah 126
Tabel 3.9 Pengesahan Hibah Langsung Program Implementation Agreement-Grant Agreement MCC 132
Tabel 3.10 Penyerapan Anggaran Satker Pengelola Hibah MCC TW IV Tahun 2014 133
Tabel 3.11 Rencana Penyerapan Anggaran Satker Pengelola Hibah MCC TW I Tahun 2015 133
Tabel 3.12 Gambaran Umum Hibah *Forest Programme* 134
Tabel 3.13 Capaian Kinerja Hibah *Forest Programme* 134
Tabel 4.1 Profil Proyek*Rural Empowerment and Agricultural Development*(READ) 137

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Komposisi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sumber Pinjaman 3
Gambar 1.2 Komposisi dan Besaran Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab 5
Gambar 2.1 Pinjaman Proyek Bank Dunia Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab 10
Gambar 2.2 *Key Output Indicators* Proyek DOISP 13
Gambar 2.3 Jumlah Pinjaman Kegiatan ADB pada Triwulan IV TA 2014 Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab 34
Gambar 2.4 Jumlah Pinjaman Kegiatan ADB pada Triwulan IV TA 2014 Berdasarkan Sektor Kegiatan 35
Gambar 2.5 Jumlah Pinjaman Proyek IDB pada Triwulan IV TA 2014 Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab 50
Gambar 2.6 Jumlah Pinjaman Proyek IDB pada Triwulan IV TA 2014 Berdasarkan Sektor Kegiatan 50
Gambar 3.1 Hibah Bank Dunia Menurut Sektor, Triwulan IV TA 2014 110
Gambar 3.2 Portal *Online* Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan 111
Gambar 3.3 Dokumen MDGs *Acceleration Framework* (MAF) di Beberapa Provinsi 116
Gambar 3.4 Website Akses terhadap Keadilan (*Access to Justice)* 117
Gambar 3.5 Jumlah Pengaduan Masyarakat pada Unit Pelayanan Pengaduan Masyarakat (UP3) Periode Jan-Sept 2014 118
Gambar 3.6 Contoh Brosur Sosialisasi Peradilan Adat di Aceh (Kiri) dan Pedoman Peradilan Adat Sulawesi Tengah (Kanan) 119
Gambar 3.7 Pedoman Perencanaan dan Penganggaran yang Peka Perdamaian (Sensitif Konflik) ... 121
Gambar 3.8 Pelatihan dan Workshop mengenai Perdamaian dan Penanggulangan Konflik 121
Gambar 3.9 Lingkup dan Target Capaian Kegiatan Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat 129

BAB I
GAMBARAN UMUM

Pada akhir Triwulan IV Tahun 2014 (posisi 31 Desember 2014), nilai pinjaman luar negeri yang sedang berjalan sebesar ekuivalen USD 17.172,59 juta, yang terdiri dari 125 proyek yang berasal dari kreditor bilateral dan multilateral, dan 54 proyek dari KSA/LPKE. Penyerapan kumulatif sampai dengan Triwulan IV Tahun 2014 sebesar ekuivalen USD 7.098,03 juta atau 41,33%. Realisasi penyerapan untuk target tahun 2014 (USD 3.867,19 juta) adalah 75,6% (USD 2.923,74 juta).

Dibandingkan dengan Triwulan III Tahun 2014, terdapat perubahan nilai pinjaman proyek dari USD 18.042,89 juta menjadi USD 17.172,59 juta. Perubahan disebabkan karena adanya 3 proyek yang selesai pada Triwulan III Tahun 2014 dengan nilai pinjaman sebesar ekuivalen USD 501,47 juta dan adanya 1 proyek baru senilai ekuivalen USD 100 juta.

Pelaksanaan pinjaman luar negeri dapat dilihat dari sisi pemberi pinjaman dan dapat pula dilihat dari pelaksanaannya pada masing-masing instansi.

PELAKSANAAN PINJAMAN LUAR NEGERI BERDASARKAN SUMBER PINJAMAN

Pinjaman luar negeri dapat berasal dari 3 kelompok sumber pinjaman luar negeri, yaitu Kreditor Multilateral, Kreditor Bilateral, dan Kreditor Swasta Asing (KSA)/Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE).

Kreditor Multilateral merupakan lembaga keuangan internasional yang beranggotakan beberapa negara, seperti Bank Dunia, *Asian Development Bank* (ADB), *Islamic Development Bank* (IDB), *International Fund for Agricultural Development* (IFAD), dan *Saudi Fund*.

Kreditor Bilateral merupakan pemerintah negara asing atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah negara asing atau lembaga yang bertindak untuk pemerintah negara asing, seperti Jepang, Australia, Jerman, Korea, Perancis, AFD, RR Tiongkok, dan Spanyol.

Kreditor Swasta Asing (KSA) diwakili oleh lembaga keuangan nasional dan lembaga non-keuangan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Indonesia, seperti PT. BNI cabang Singapura, Tokyo, dan Hongkong. Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE) merupakan lembaga yang ditunjuk negara asing untuk memberikan jaminan, asuransi, pinjaman langsung, subsidi bunga, dan bantuan keuangan untuk meningkatkan ekspor negara yang bersangkutan serta melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Indonesia, seperti BNP Paribas, *Exim Bank of Korea*, *Export-Import Bank of China*, dan *Fortis Bank Belanda*.

Tabel 1.1 Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sumber Pinjaman

(Ekuivalen Juta USD)

No	Sumber Pinjaman	Jumlah Proyek	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan IV TA 2014	Pinjaman Belum Ditarik	TA 2014		
						Target	Realisasi	%
I	**Kreditor Multilateral**	**59**	**6.259,62**	**1.686,82**	**4.572,80**	**1.052,66**	**604,58**	**57,43**
	Bank Dunia	23	3.804,85	1.124,34	2.680,51	617,44	416,40	67,44
	ADB	14	1.214,67	340,18	874,49	165,20	95,56	57,85
	IDB	17	1.041,89	115,91	925,98	226,52	64,85	28,63
	IFAD	4	162,21	101,50	60,71	26,96	22,88	84,88
	Saudi Fund	1	36,00	4,89	31,11	16,54	4,89	29,74
II	**Kreditor Bilateral**	**66**	**6.166,19**	**2.317,29**	**3.848,90**	**1.031,34**	**665,25**	**64,50**
	Jepang	41	4.539,42	1.642,85	2.896,57	677,56	403,62	59,57
	Australia	1	246,42	217,58	28,84	30,21	23,51	77,81
	Jerman	3	76,37	41,67	34,71	29,43	12,55	42,64
	Korea	7	345,94	66,22	279,71	36,38	13,91	38,23
	Perancis	4	248,53	26,53	222,00	20,24	8,60	42,48
	AFD	3	129,50	74,31	55,19	33,11	35,30	106,62
	RR Tiongkok	5	531,89	206,91	324,98	176,21	145,41	82,52
	Spanyol	2	48,12	41,22	6,91	28,20	22,35	79,22
III	**KSA/LPKE**	**54**	**4.746,77**	**3.093,93**	**1.652,84**	**1.783,19**	**1.653,91**	**92,75**
Total		**179**	**17.172,59**	**7.098,03**	**10.074,54**	**3.867,19**	**2.923,74**	**75,60**

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan IV Tahun 2014 (diolah)

Pada akhir Triwulan IV Tahun 2014 terdapat 59 proyek yang berasal dari Kreditor Multilateral dengan nilai pinjaman sebesar ekuivalen USD 6.259,62 juta, dan penyerapan kumulatif adalah sebesar ekuivalen USD 1.686,82 juta. Realisasi penyerapan untuk target tahun 2014 (USD 1.052,66 juta) adalah 57,43% (USD 604,58 juta).

Rendahnya penyerapan diakibatkan permasalahan pada beberapa proyek IDB dan *Saudi Fund*, antara lain terhambat proses perijinan lokasi pembangunan di lokasi Cagar Budaya (*heritage*) pada proyek The *Development of Medical Research and Two University Hospitals* (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), keterlambatan pencairan anggaran pada proyek *Development and Quality Improvement of State University of Semarang* (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), dan lemahnya kapasitas tim pengelola proyek (PMU) pada proyek *Support to Development of Islamic Higher Education* (Kementerian Agama).

Proyek yang berasal dari Kreditor Bilateral berjumlah 66 proyek dengan nilai pinjaman sebesar ekuivalen USD 6.166,19 juta, dan penyerapan kumulatif adalah sebesar ekuivalen USD 2.317,29 juta. Realisasi penyerapan untuk target tahun 2014 (USD 1.031,34 juta) adalah 64,50% (USD 665,25 juta). Realisasi penarikan terendah pada kelompok Kreditor Bilateral terjadi pada pinjaman Korea karena adanya dua proyek yang belum melakukan penyerapan, yaitu proyek *Development of Sewerage System in Batam Island* dan proyek *Fast Patrol Boats of Indonesia National Police*. Kedua proyek tersebut belum melakukan penyerapan karena masih dalam proses pengadaan jasa konsultan.

Jumlah proyek KSA/LPKE adalah sebanyak 54 proyek dengan nilai pinjaman sebesar ekuivalen USD 4.746,77 juta. 50 (lima puluh) proyek yang berasal dari LPKE dikelola oleh 2 (dua) instansi, yaitu Kementerian Pertahanan sebanyak 44 proyek dan Kepolisian RI sebanyak 6 proyek. Sedangkan 4 proyek yang berasal dari KSA dikelola oleh PT. PLN.

Pada Triwulan IV Tahun 2014 ini terjadi penyesuaian target penyerapan TA 2014 untuk KSA/LPKE dari USD 1.083,91 juta menjadi USD 1.783,19 juta. Penyesuaian target tersebut karena adanya penambahan pagu anggaran Kementerian Pertahanan untuk TA 2014 dari USD 1.045,61 juta menjadi USD 1.744,89 juta. Penyerapan kumulatif adalah ekuivalen USD 3.093,93 juta. Realisasi penyerapan untuk target tahun 2014 (USD 1.783,19 juta) adalah 92,75% (USD 1.653,91 juta).

Komposisi dan besaran (*share*) pinjaman luar negeri pada Triwulan IV TA 2014 berdasarkan sumber pinjaman dapat dilihat pada gambar berikut ini:

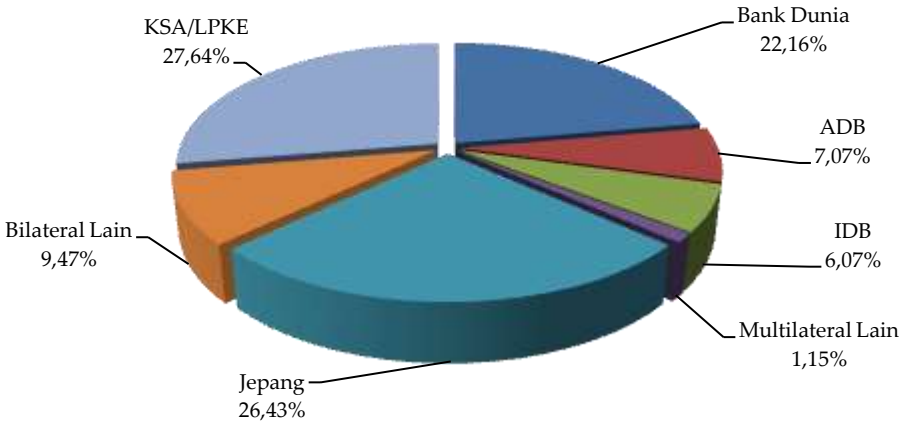

Gambar 1.1 Komposisi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sumber Pinjaman

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan IV Tahun 2014 (diolah)

Keterangan:
- *Pinjaman Multilateral lain terdiri pinjaman yang bersumber dari pinjaman IFAD dan Saudi Fund*
- *Pinjaman Bilateral lain terdiri dari pinjaman yang bersumber dari pinjaman Australia, Jerman, Korea, Perancis, AFD, RR Tiongkok dan Spanyol*

PELAKSANAAN PINJAMAN LUAR NEGERI BERDASARKAN INSTANSI PENANGGUNG JAWAB

Pada Triwulan IV Tahun 2014, proyek yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga berjumlah 150 proyek, proyek yang diteruspinjamkan kepada BUMN berjumlah 27 proyek, dan proyek yang diterushibahkan kepada Pemda DKI berjumlah 2 proyek.

Tabel 1.2 Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab

(Ekuivalen Juta USD)

Instansi Penanggung Jawab	Jumlah Proyek	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan IV TA 2014		Pinjaman Belum Ditarik	TA 2014		
			Nilai	%		Target	Realisasi	%
Kementerian/ Lembaga	**150**	**13.062,52**	**6.308,32**	**48,29**	**6.754,21**	**3.398,36**	**2.662,84**	**78,36**
Kemendagri	2	513,20	204,89	39,92	308,31	138,26	88,40	63,94
Kemenhan	44	4.617,94	3.054,58	66,15	1.563,36	1.744,89	1.635,31	93,72
Kemenkeu	1	59,97	38,19	63,68	21,78	21,23	19,59	92,28
Kementan	3	147,07	53,48	36,36	93,59	36,69	22,12	60,29
Kemenhub	8	1.161,13	193,16	16,64	967,97	206,14	72,81	35,32
Kemendikbud	13	789,27	195,63	24,79	593,64	195,85	45,36	23,16
Kemenkes	3	73,82	72,79	98,61	1,03	1,04	8,84	853,11
Kemenag	4	172,05	13,28	7,72	158,77	45,77	12,58	27,49
Kemen KP	5	186,76	41,64	22,30	145,12	34,92	25,26	72,34
Kemen PU-Pera	44	4.472,24	2.186,90	48,90	2.285,34	830,82	662,74	79,77
Kemenristek	1	95,00	0,17	0,18	94,83	12,02	0,16	1,33
Kemenakertrans	1	32,50	0,03	0,09	32,47	0,38	0,03	7,89
BPS	1	47,00	0,66	1,40	46,34	5,25	0,66	12,57
Bappenas	4	280,97	129,50	46,09	151,48	35,03	33,40	95,34
Kemenkominfo	3	82,79	15,56	18,80	67,22	11,90	2,84	23,86
Kepolisian RI	8	115,96	12,46	10,75	103,50	35,47	8,41	23,72
Badan Otorita Batam	1	48,95	0,00	0,00	48,95	1,47	0,00	0,00
BPKP	1	57,75	8,61	14,91	49,14	13,63	6,71	49,23
BMKG	1	36,86	26,53	71,98	10,33	11,47	8,60	74,97
LIPI	1	17,88	11,24	62,86	6,64	5,81	0,07	1,26
BIG	1	53,41	49,01	91,77	4,40	10,30	8,96	87,03
Diteruspinjamkan (SLA)	**27**	**3.690,91**	**668,07**	**18,10**	**3.022,82**	**314,21**	**231,31**	**73,62**
PT. PLN	22	2.960,33	438,41	14,81	2.521,90	243,48	170,95	70,21
PT. Pertamina	2	525,98	32,22	6,13	493,76	36,17	29,52	81,61
PT. SMI	2	200,00	196,66	98,33	3,34	33,40	30,06	90,00
PT. PII	1	4,60	0,78	16,96	3,82	1,16	0,78	67,24
Diterushibahkan	**2**	**419,17**	**121,64**	**29,02**	**297,53**	**154,62**	**29,59**	**19,14**
Pemda DKI	2	419,17	121,64	29,02	297,53	154,62	29,59	19,14
Total	**179**	**17.172,59**	**7.098,03**	**41,33**	**10.074,54**	**3.867,19**	**2.923,74**	**75,60**

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan IV Tahun 2014 (diolah)

Pada akhir Triwulan IV Tahun 2014, nilai pinjaman proyek yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga mencapai ekuivalen USD 13.062,52 juta, dan penyerapan kumulatif adalah sebesar USD 6.308,32 juta. Realisasi penyerapan untuk target tahun 2014 (USD 3.398,36 juta) adalah

78,36% (USD 2.662,84 juta). Terdapat 4 (empat) Kementerian/Lembaga yang persentase penyerapan pinjamannya kurang dari 10%. Rendahnya penyerapan diakibatkan permasalahan pada beberapa proyek, antara lain adanya keterlambatan penyelesaian *Annual Work Plan*, sehingga proyek baru mulai berjalan pada bulan Juni 2014 yaitupada proyek *Research and Innovation in Science and Technology*(Kementerian Riset dan Teknologi), adanya keterlambatan pelaksanaan *start-up workshop*, sehingga pelaksanaan kegiatan proyek baru dapat dilakukan pada awal tahun 2015 yaitu pada proyek *Revitalization of Vocational Training Center*(Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi), adanya keterlambatan dalam proses pengadaan jasa konsultan yaitu pada proyek *Development of Sewerage System in Batam Island*(Badan Otorita Batam), adanya permasalahan administrasi pembayaran pada proyek *Animal Husbandry Technology and Practices Improvement (*Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia).

Proyek yang diteruspinjamkan kepada BUMN nilainya mencapai ekuivalen USD 3.690,91 juta, dan penyerapan kumulatif adalah USD 668,07 juta. Realisasi penyerapan untuk target tahun 2014 (USD 314,21 juta)adalah 73,62% (USD 231,31 juta). Pada tahun 2014, persentase penyerapan pinjaman dari semua BUMN menunjukkan peningkatan yang cukup baik. Persentase penyerapan pinjaman PT. Pertamina melonjak menjadi 81,61% dari 3,40% pada Triwulan III Tahun 2014. PT. PII sudah melakukan penyerapan pinjaman sebesar 67,24%, hal ini disebabkan karenapada Triwulan IV Tahun 2014 disepakati untuk tidak memasukkankomponen *stand by loan* sebesar USD 25 juta, sehingga yang diperhitungkan sebagai pinjaman kegiatan hanya sebesar USD 4,6 juta.

Proyek yang diterushibahkan kepada Pemerintah Propinsi DKI Jakarta nilainya mencapai ekuivalen USD 491,17 juta, dan penyerapan kumulatif adalah USD 121,64 juta. Realisasi penyerapan untuk target tahun 2014 (USD 154,62 juta) adalah 19,14% (USD 29,59 juta).

Komposisi dan besaran (*share*) pinjaman luar negeri dari masing-masing Kementerian/Lembaga, BUMN dan Pemda DKI selaku instansi penanggung jawab dapat dilihat pada gambar berikut ini:

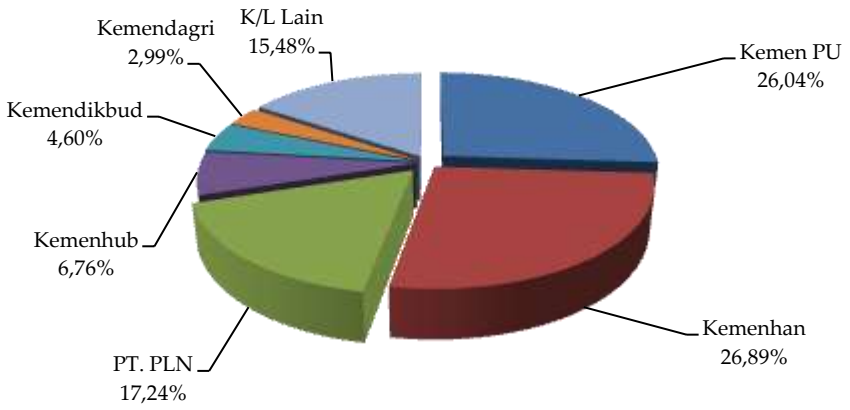

Gambar 1.2 Komposisi dan Besaran Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan IV Tahun 2014 (diolah)

Keterangan: - K/L lain terdiri Kemenkeu, Kementan, Kemenkes, Kemenag, Kemen KP, Kemenristek, Kemenakertrans, BPS, Bappenas, Kemenkominfo, Kepolisian RI, Badan Otorita Batam, BPKP, BMKG, LIPI, BIG, PT. Pertamina, PT. SMI, PT. PII, dan Pemda DKI

PERMASALAHAN PELAKSANAAN PINJAMAN LUAR NEGERI

Meskipun secara umum pelaksanaan pinjaman luar negeri pada Triwulan IV Tahun 2014 sudah menunjukkan perkembangan yang cukup baik, tetapi masih ditemukan permasalahan pada pelaksanaan beberapa proyek, antara lain :

- Permasalahan pengadaan lahan, antara lain:
  - Anggaran untuk pembebasan lahan belum dialokasikan dalam DIPA TA 2014 pada proyek *Urban Flood Control System Improvement in Selected Areas*(Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).
  - Belum adanya kesepakatan ganti rugi, adanya penolakan warga dan masalah sosial lainnya, pada proyek Peusangan *Hydroelectric Power Plant Construction*dan proyek *North-West Sumatera Inter-Connection Transmission Line Construction* (PT. PLN).
  - Lambatnya proses perijinan pemakaian lahan di kawasan hutan (ijin tukar menukar kawasan hutan dan ijin pinjam pakai kawasan hutan) pada proyek *Java Sumatera Interconnection 500 kV Line (HVDC) Stage II* danproyek *Upper Cisokan Pumped Storage Hydro-Electrical Power (1040MW)*(PT. PLN).
- Permasalahan pengadaan barang dan jasa, antara lain:
  - Adanya perbedaan pandangan antara pemberi pinjaman dengan pengelola proyek mengenai penerapan sistem *e-procurement* pada proyek *Western Indonesia National Road Improvement*, proyek *Urgent Disaster Reduction for Mount Merapi and Lower Progo River Area Phase II*, proyek *Countermeasure for Sediment in Wonogiri Multipurpose Dam Reservoir Phase II*, dan proyek *Community Based Sanitation* (Sanimas) (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).
  - Adanya kegagalan proses lelang karena kurangnya peminat atau tidak ada peserta lelang yang memenuhi standar pada proyek *Strengthening Accountability Revitalization* (STAR) (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), proyek *Indramayu Coal Fired Power Plant*(PT. PLN), danproyek *Construction of Karian Multipurpose Dam (*Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).
- Permasalahan dalam pemrosesan pinjaman SLA, antara lain karena adanya proses persetujuan DPR dan alokasi anggaran yang kurang memadai dibanding dengan kebutuhan pada*Upper Cisokan Pumped Storage Hydro-Electrical Power (1040MW)* (PT. PLN).

PELAKSANAAN HIBAH LUAR NEGERI

Hibah luar negeri yang dilaporkan pelaksanaannya pada Triwulan IV Tahun 2014 berjumlah 229 proyek. Pelaksanaan hibah luar negeri tersebut dilaporkan oleh 24 Kementerian/Lembaga dengan total nilai sebesar ekuivalen USD 1.479,50 juta.

Berdasarkan bentuk dan jenis hibah yang diterima dan dikelola oleh masing-masing Kementerian/Lembaga tersebut, pelaksanaan hibah luar negeri pada Triwulan IV Tahun 2014 dapat dikelompokkan dalam 3 kategori sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.3 Pelaksanaan Hibah Luar Negeri Triwulan IV Tahun 2014 Berdasarkan Bentuk dan Jenis Hibah

(Ekuivalen Juta USD)

Hibah	Jumlah	Nilai
Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang	147	798,22
Hibah Langsung Dalam Bentuk Barang Jasa/Surat Berharga	69	464,00
Hibah Terencana	13	217,28
Total	**229**	**1.479,50**

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan IV Tahun 2014 (diolah)

BAB II
KINERJA PELAKSANAAN PINJAMAN LUAR NEGERI

Kinerja pelaksanaan pinjaman luar negeri yang sedang berjalan dalam Triwulan IV Tahun 2014 dipaparkan secara rinci dalam bab ini, dan dikelompokkan sesuai sumbernya, yaitu Kreditor Multilateral, Kreditor Bilateral, dan Kreditor Swasta Asing (KSA)/Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE).

KREDITOR MULTILATERAL

Pada akhir Triwulan IV Tahun 2014 terdapat 59 proyek pinjaman luar negeri yang sedang berjalan dengan nilai sebesar ekuivalen USD 6.259,62 juta. Proyek-proyek tersebut terdiri dari 23 proyek Bank Dunia, 14 proyek ADB, 17 proyek IDB, 4 proyek IFAD, dan 1 proyek *Saudi Fund*. Realisasi penyerapan kumulatif adalah 26,95(USD 1.686,82 juta), dan nilai realisasi pada triwulan ini sebesar ekuivalen USD 604,58 juta.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Pinjaman Luar Negeri Multilateral

(Ekuivalen Juta USD)

No	Sumber Pinjaman	Jumlah Proyek	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan IV TA 2014		Pinjaman Belum Ditarik	Penyerapan TA 2014		
				Nilai	%		Target	Realisasi	%
1	Bank Dunia	23	3.804,85	1.124,34	29,55	2.680,51	617,44	416,40	67,44
2	ADB	14	1.214,67	340,18	28,01	874,49	165,20	95,56	57,85
3	IDB	17	1.041,89	115,91	11,13	925,98	226,52	64,85	28,63
4	IFAD	4	162,21	101,50	62,57	60,71	26,96	22,88	84,88
5	*Saudi Fund*	1	36,00	4,89	13,58	31,11	16,54	4,89	29,74
Total		**59**	**6.259,62**	**1.686,82**	**26,95**	**4.572,80**	**1.052,66**	**604,58**	**57,43**

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan IV Tahun 2014 (diolah)

Berdasarkan instansi penanggung jawab, sebanyak 49proyek pinjaman dari Kreditor Multilateral dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dengan total nilai mencapai ekuivalen USD 4.216,52 juta dan penyerapan kumulatif hingga triwulan ini mencapai ekuivalen USD 1.364,98 juta atau setara dengan 32,37%.Proyek diteruspinjamkan (*Subsidiary Loan Agreement*/SLA) berjumlah 10 proyek dengan total nilai mencapai ekuivalen USD 2.043,1 juta dan penyerapan hingga triwulan ini mencapai ekuivalen USD 321,83 juta atau setara dengan 15,75%.

Tabel 2.2 Rekapitulasi Pinjaman Luar Negeri Multilateral Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab

(Ekuivalen Juta USD)

No.	Instansi Penanggung Jawab	Jumlah Proyek	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan IV TA 2014		Pinjaman Belum Ditarik	Penyerapan TA 2014		
				Nilai	%		Target	Realisasi	%
Dilaksanakan oleh K/L		**49**	**4.216,52**	**1.364,98**	**32,37**	**2.851,54**	**907,39**	**498,49**	**54,94**
1	Kemendagri	2	513,20	204,89	39,92	308,31	138,26	88,40	63,94
2	Kemenkeu	1	59,97	38,19	63,68	21,78	21,23	19,59	92,28

No.	Instansi Penanggung Jawab	Jumlah Proyek	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan IV TA 2014		Pinjaman Belum Ditarik	Penyerapan TA 2014		
				Nilai	%		Target	Realisasi	%
3	Kementan	3	147,07	53,48	36,36	93,59	36,69	22,12	60,29
4	Kemenhub	1	87,55	0,80	0,91	86,75	2,62	0,32	12,21
5	Kemendikbud	9	530,67	88,81	16,74	441,86	135,31	20,39	15,07
6	Kemenag	4	172,05	13,28	7,72	158,77	45,77	12,58	27,49
7	Kemen KP	4	156,76	21,68	13,83	135,08	23,24	13,87	59,68
8	Kemen PU-Pera	19	2.176,75	867,89	39,87	1.308,86	444,77	288,60	64,89
9	Kemenristek	1	95,00	0,17	0,18	94,83	12,02	0,16	1,33
10	Kemenakertrans	1	32,50	0,03	0,08	32,47	0,38	0,03	6,60
11	BPS	1	47,00	0,66	1,40	46,34	5,25	0,66	12,57
12	Bappenas	2	140,25	66,50	47,42	73,76	28,21	25,06	88,83
13	BPKP	1	57,75	8,61	14,91	49,14	13,63	6,71	49,23
Diteruspinjamankan (SLA)		**10**	**2.043,10**	**321,83**	**15,75**	**1.721,27**	**145,26**	**106,11**	**73,05**
14	PT. PLN	6	1.538,50	107,35	6,98	1.431,15	86,91	58,23	67,00
15	PT. Pertamina	1	300,00	17,04	5,68	282,96	23,79	17,04	71,63
16	PT. SMI	2	200,00	196,66	98,33	3,34	33,40	30,06	90,00
17	PT. PII	1	4,60	0,78	16,96	3,82	1,16	0,78	67,24
Total		**59**	**6.259,62**	**1.686,82**	**26,95**	**4.572,80**	**1.052,66**	**604,59**	**57,43**

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan IV Tahun 2014 (diolah)

Bank Dunia

Pada Triwulan IV Tahun 2014 jumlah pinjaman kegiatan (*project loan*) dari Bank Dunia yang sedang berjalan adalah 23 proyek. Sebanyak 17 proyek diantaranya dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga sedangkan 6proyek lainnya diteruspinjamkan. Total komitmen pinjaman kegiatan tersebut adalah USD 3.804,85 juta. Berikut pinjaman kegiatan dari Bank Dunia menurut instansi pelaksana:

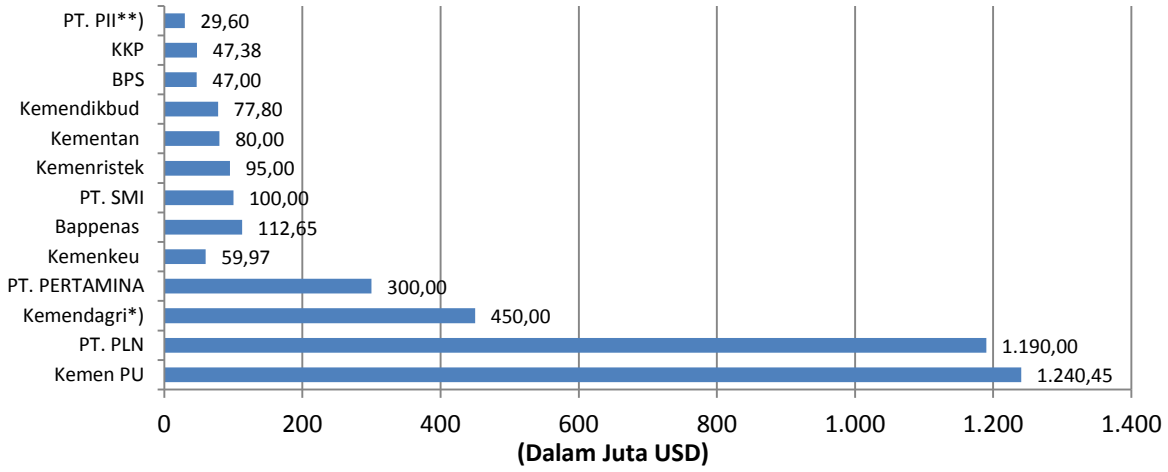

Gambar 2.1 Pinjaman Proyek Bank Dunia Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab
Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan IV Tahun 2014 (diolah)
Catatan:
*) *Tidak termasuk komponen refinancing sebesar USD 200 juta*
**) *Jumlah pinjaman pada proyek IIGF yang dilaksanakan PT. PII tidak termasuk standby loan sebesar USD 25 juta*

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyatmerupakan instansi dengan komitmen pinjaman terbesar, proporsi jumlah pinjamannya mencapai 32,6%dari total nilai pinjaman kegiatan dari Bank Dunia. Instansi dengan komitmen pinjaman terbesar selanjutnya adalah PT. PLNdengan proporsi sebesar 31,28% dari total jumlah pinjaman kegiatan dari Bank Dunia.

Proyek Baru dan Proyek Tutup

Pada Triwulan IV Tahun 2014 terdapat 4 proyek pinjaman dari Bank Dunia yang berakhir dan tidak ada proyek yang baru efektif. Empat proyek pinjaman yang berakhir tersebut terdiri dari 3 proyek yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta KaryaKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan 1 proyek yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) Kementerian Pendidikan. Informasi akhir mengenai penyerapan dana diharapkan dapat dijelaskan dengan rinci pada laporan akhir proyek (*Project Completion Report*/PCR) begitu juga dengan pencapaian target PDO maupun *intermediate result*, pembelajaran beserta keberlanjutan kegiatan.

Tabel 2.3 Proyek Bank Dunia yang Berakhir pada Triwulan IV TA 2014

(Dalam Juta USD)

No	Nama Proyek	Masa Laku	Jumlah Pinjaman
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Ditjen Cipta Karya)			
1	4204-IND *Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities Project* (WSSLIC/PAMSIMAS)	06/06/2008- 31/12/2014	146,35
2	7664-IND *Add Financing for the National Community Empowerment Program in Urban Areas* (PNPM *Urban*) 2	07/01/2009- 31/12/2014	115,00
3	7730-ID *Urban Water Supply and Sanitation Project* (UWSSP)	25/11/2009- 31/12/2014	23,56
Kementerian Pendidikan (Ditjen. Dikti)			
4	7737-ID *Health Professional Education Quality Project* (HPEQ)	12/09/2009-31/12/2014	77,80
Total			**362,71**

Realisasi Penyerapan Pinjaman dan Pencapaian Indikator Kinerja

Sumber data yang digunakan untuk realisasi penyerapan dana pinjaman dan perkembangan pelaksanaan kegiatan adalah data yang disampaikan oleh penanggung jawab kegiatan dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (LPKPHLN). Sementara itu, informasi kemajuan pencapaian indikator kinerja kegiatan menggunakan data*Implementation Status and Result* (ISR) *Report* Bank Dunia. Semua data dan informasi tersebut kemudian dikonfirmasi kepada pelaksana kegiatan pada saat rapat pemantauan dan evaluasi PHLN Triwulan IV.

Sampai dengan akhir tahun 2014 penyerapan kumulatif proyek-proyek pinjaman Bank Dunia telah mencapai USD 1.124,34 juta (29,55%). Penyerapan dana pada tahun anggaran 2014 mencapai USD 416,40 juta atau sebesar 67,44%. Instansi dengan persentase penyerapan paling tinggi adalah Kementerian Keuangan dengan realisasi sebesar 92,28%, diikuti oleh Bappenas dengan realisasi

sebesar 90,45%. Sementara itu, instansi dengan kinerja penyerapan paling rendah adalah Kementerian Riset dan Teknologi dengan realisasi hanya sebesar 1,33%.

Tabel 2.4 Penyerapan Pinjaman Bank Dunia Menurut Instansi Penanggung Jawab Pada Triwulan IV TA 2014

(Dalam Juta USD)

No	Instansi Pelaksana	Jumlah Proyek	Jumlah Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan IV TA 2014		Pinjaman Belum Ditarik	Penyerapan Tahun 2014		
				Nilai	%		Target	Realisasi	%
Dilaksanakan oleh K/L		**17**	**2.210,25**	**945,48**	**42,78**	**1264,77**	**502,70**	**340,41**	**67,72**
1.	Kemen PU-Pera	9	1.240,45	621,35	50,09	619,10	264,69	191,13	72,21
2.	Kementan	1	80,00	17,95	22,44	62,05	24,69	10,91	44,19
3.	Kemendikbud	1	77,80	67,45	86,70	10,35	13,00	7,64	58,77
4.	Kemendagri	1	450,00[1])	152,06	33,79	297,94	136,44	87,50	64,13
5.	Kemenkeu	1	59,97	38,19	63,68	21,78	21,23	19,59	92,28
6.	Kemenristek	1	95,00	0,17	0,18	94,83	12,02	0,16	1,33
7.	KKP	1	47,38	1,31	0,00	46,07	1,60	1,31	81,88
8.	Bappenas	1	112,65	46,34	41,14	66,31	23,78	21,51	90,45
9.	BPS	1	47,00	0,66	1,40	46,34	5,25	0,66	12,57
Diteruspinjamkan (SLA)		**6**	**1.594,60**	**178,86**	**11,22**	**1415,74**	**114,74**	**75,99**	**66,23**
10.	PT. PLN	3	1.190,00	63,86	5,37	1126,14	61,79	32,99	53,39
11.	PT. Pertamina	1	300,00	17,04	5,68	282,96	23,79	17,04	71,63
12.	PT.SMI	1	100,00	97,18	97,18	2,82	28,00	25,18	89,93
13.	PT. PII	1	4,60[2])	0,78	16,96	3.82	1,16	0,78	67,24
Total		**23**	**3.801,85**	**1.124,34**	**29,55**	**2.680,51**	**617,44**	**416,40**	**67,44**

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan IV Tahun 2014 (diolah)

Catatan:

*)*Dilakukan penyesuaian data dengan LPKPHLN Triwulan IV TA 2014 sebagai data terbaru yang disampaikan oleh instansi penanggung jawab proyek, penyesuaian meliputi data target (DIPA) dan data penyerapan pinjaman.*

[1]) *Tidak termasuk komponen refinancing sebesar USD 200 juta*

[2]) *Jumlah pinjaman pada proyek IIGF yang dilaksanakan PT. PII tidak termasuk standby loan sebesar USD 25 juta*

- **Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**

  Jumlah proyek pinjaman Bank Dunia yang sedang berjalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Triwulan IV Tahun 2014 adalah 9 proyek yang terdiri dari 3 proyek yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, 1 proyek dilaksanakan oleh Direkrorat Jenderal Bina Marga dan 5 proyek lainnya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya. Tiga proyek yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya berakhir pada Triwulan IV (31 Desember 2014), yaitu:1) *Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities Project (WSSLIC/PAMSIMAS);* 2) *Additional Financing for the National Community Empowerment Program in Urban Areas (PNPM Urban) 2; dan* 3) *Urban Water Supply and Sanitation Project (UWSSP).*

  Total komitmen pinjaman di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencapai USD 1.240,45 juta, dengan nilai pinjaman yang sudah direalisasikan hingga

Triwulan IV Tahun 2014 sebesar USD 621,34 juta atau sebesar 50,09% dari komitmen pinjaman. Sementara itu, kinerja penyerapan pinjaman selama tahun 2014 adalah 72,21%, nilai tersebut meningkat sangat signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang hanya mencapai 23,72%.

Ditjen Sumber Daya Air

- ***Dam Operational Improvement and Safety Project*/DOISP (7669-ID)**

  Realisasi Penyerapan Dana

  Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2014 penyerapan kumulatif proyek DOISP telah mencapai USD 35,69 juta atau sebesar 71,37% dari komitmen pinjaman. Kinerja penyerapan pada tahun 2014 adalah USD 6,04 juta atau hanya mencapai 42,27% dari target. Mengingat proyek akan berakhir pada 31 Juli 2015 diperkirakan terdapat potensi sisa pinjaman sebesar USD 5 juta yang tidak dapat digunakan karena terbatasnya waktu yang tersisa hingga berakhirnya proyek. Sisa dana tersebut direncanakan akan dikembalikan kepada Bank Dunia dengan disertai penjelasan yang rinci mengenai asal sisa dana tersebut, serta capaian pada masing-masing komponennya. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan serta pengaruhnya terhadap pencapaian *PDO* dan *Intermediate Result* proyek.

  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

  Berdasarkan dokumen ISR terakhir, secara umum semua indikatorPDO maupun *Intermediate Result*proyek DOISP telah menunjukkan peningkatan capaian yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya, termasuk untuk indikator-indikator yang pada triwulan sebelumnya belum menunjukkan progres capaian seperti: 1) *DSU staff recruited and trained* dan 2) *Inacold sertification of dam professional*. Capaian masing-masing indikator secara rinci dapat dilihat pada lampiran. Capaian untuk beberapa indikator yang dianggap mewakili kinerja proyek atau biasa disebut dengan *Key Performance Indicators* (KPI)pada tingkat output dapat dilihat pada gambar berikut ini:

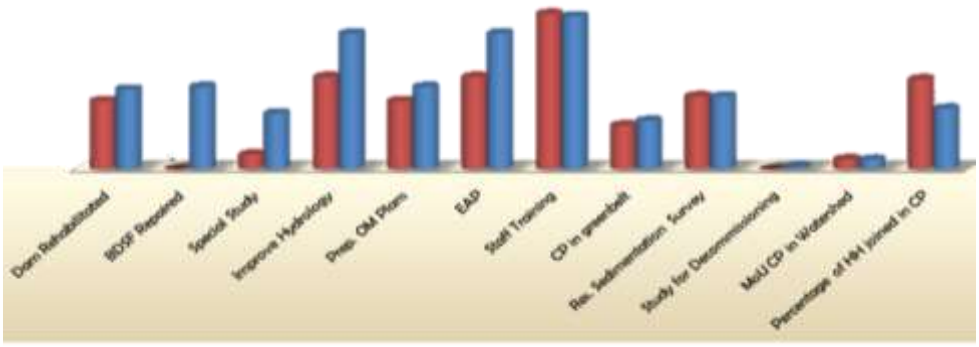

Keterangan Singkatan:

BDSF	: Basic Dam Service Facility	OM	: Operation and Maintanance
EAP	: Emergency Action Paln	CP	: Community Participation
Res.	: Reservoir	MoU	: Memorancum of Understanding
HH	: household		

Gambar 2.2 *Key Output Indicators* Proyek DOISP

Sebagian besar indikator *output* kunci telah menunjukkan progres capaian yang sangat baik bahkan beberapa diantaranya telah tercapai melampaui target, yaitu indikator terkait pelatihan staf mengenai operasi dan pemeliharaan (O&M) bendungan serta indikator mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS). Selain itu, terdapat 3 indikator yang capaiannya terlihat masih rendah yaitu1) BDSF r*epaired* (perbaikan fasilitas dasar dam); 2) *special study*; dan iii) s*tudy for decomissioning*.

Beberapa indikator diperkirakan akan mencapai target pada akhir masa laku proyek, sementara beberapa target indikator lainnya tidak dapat dipenuhi sehingga sudah dan akan dilakukan tindak lanjut terhadap ketidaktercapaian tersebut. Kontrak paket BDSF telah ditandatangani pada 15 Desember 2014 dan proses perbaikan terhadap pekerjaan *special study* terus dilakukan konsultan sebelum mendapatkan reviu dan persetujuan. Kegiatan perbaikan hidrologi dan penyusunan EAPmasih menyisakan 17 dari target 56 dam. Berdasarkan proyeksi dari progres kegiatan, target indikator dari empat kegiatan tersebut diperkirakan akan tercapai pada akhir masa laku proyek.

Sementara itu, rehabilitasi terhadap 4 dari target 33 dam tidak dapat dilaksanakan dalam periode pelaksanaan proyek. Rupiah murni akan menggantikan dana proyek untuk melaksanakan kegiatan, sebagaimana telah dialokasikan untuk paket Wadaslintang dan Sempor. Indikator output lainnya yang sudah menunjukkan progres namun diperkirakan tidak akan dapat mencapai target akhir adalah *community participation (CP) in greenbelt*, meskipun kegiatan sudah dilaksanakan di 20 bendungan, namun hanya 18 bendungan yang sanggup menjalankan dana kemasyarakatan, menyisakan 2 Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) di Jawa Timur yang tidak dapat menyelesaikan verifikasi anggaran. Selanjutnya indikator terkait *study of decomissioning* diperkirakan tidak akan tercapai karena fungsi dari bendungan tidak ada yang dapat dihapus melainkan harus dipertahankan. Indikator ini akan dibatalkan.

Selain manfaat sesuai dengan desain dan PDO, beberapa manfaat langsung yang dipeoleh dari proyek DOISP menurut pelaksana, antara lain:

1) Memperkuat keamanan dan kebijakan manajemen operasional, regulasi dan kapasitasKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu dengan upaya peningkatan dalam program DOISP yang telah meningkatkan pengetahuan para pemangku kepentingan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyatdalam pengelolaan bendungan.

2) Pengetahuan yang didapatkan dalam sistem administrasi, yaitu: proses tender yang terkait dengan prosedur/aturan baku Bank Dunia dengan kombinasi ketentuan Pemerintah Indonesia dengan segala permasalahan dalam pelaksanaannya, dan juga sistem audit keuangan oleh BPKP yang menambah pengetahuan mengenai tatacara administrasi pengelolaanproyek.

3) Program DOISP telah mendorong PIU/BBWS untuk membuat suatu program kegiatan dengan lebih detail dan berdasarkan nilai perkiraan biaya yang akurat, sehingga dijadikan acuan untuk standar biaya pada kegiatan serupa.

4) Dengan adanya Program DOISP telah menstimulasi perbaikan yang menyeluruh pada struktur organisasi, regulasi dan manajemen bendungan.

Program DOISP merupakan pencetus upaya perbaikan dan peningkatan pengelolaan bendungan sesuai amanah peraturan, namun upaya yang dilakukan dalam perbaikan bendungan dan waduknya masih terbatas pada rehabilitasi minor dan upaya peningkatan pemeliharaan. Dengan demikian diperlukan program lanjutan yang lebih luas dengan mempertimbangkan pembelajaran dan praktik-parktik terbaik dari pelaksanaan proyek DOISP. Pada triwulan ini pelaksana proyek telah mengidentifikasi beberapa pembelajaran dari proyek DOISP, antara lain:

1) Penguatan kebijakan pemerintah dalam manajemen bendungan sangat penting untuk keberhasilan program.
2) Perlu dilakukan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
3) Program DOISP telah memberikan gambaran tentang peningkatan potensi pada beberapa komponen penting pengelolaan bendungan, namun demikian upaya peningkatan komponen-komponen tersebut masih perlu dilanjutkan dengan indikator-indikator penting yang harus diperhatikan yaitu: 1) Pembentukan dan pemantapan organisasi pada institusi DMU/UPB (Unit Pengelola Bendungan); 2) CDMU (Pusat Monitoring Bendungan), sebagaiinstitusi pemantauan dan evaluasi kondisi bendungan; 3) Penempatan dan peningkatan sumber daya manusia, agar dapat menjalankan evaluasidan desain teknik dengan baik, dalam rangka meningkatkan Quality Assurance (QA).
4) Pengembangan dan peningkatan fungsi Kantor BBWS sangat penting untuk dilakukan, sebagai Pusat Pengendali Operasional Bendungan di wilayahnya, yang diperkuat dengan Bagian Desain dan Evaluasi Teknik sebagai bagian Pembinaan Teknik, yang dapat berfungsi sebagai pengawas terhadap hasil desain dan hasil inspeksi pada masing-masing bendungan yang berada dalam koordinasi wilayahnya.
5) Perencanaan yang baik untuk kebutuhan sumber daya manusia dan staf teknik yang lebih berkualitas sangat mendesak untuk dilakukan. Salah satunya dengan menempatkan tenaga ahli muda yang bersertifikat pada masing-masing Unit Pengelola Bendungan.

- ***Water Resources and Irrigation Sector Management*/WISMP-II (8027-ID)**

Realisasi Penyerapan Dana

Sampai dengan akhir tahun 2014 penyerapan kumulatif proyek WISMP baru mencapai USD 36,92 juta atau sebesar 24,61% dari komitmen pinjaman. Dari aspek penyerapan dana dibandingkan dengan waktu terpakai, proyek ini mengalami keterlambatan yang serius, hal ini ditunjukkan oleh nilai progres varian yang mencapai -36,38. Sementara itu, kinerja penyerapan dana tahun 2014 mengalami peningkatan yang signifikan pada triwulan ini, yaitu mencapai USD 23,99 juta atau sebesar 75,65% dari target. Pada triwulan sebelumnya penyerapan dana hanya mencapai USD 7,87 juta atau sebesar 24,83% dari target. Nilai realisasi dana untuk tahun 2014 masih dimungkinkan untuk

berubah, diperkirakan pada bulan Februari 2015 baru akan diperoleh nilai realisasi final.

Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam hal keuangan adalah proses revisi DIPA yang baru selesai pada akhir tahun 2014, sehingga penyerapan dana menjadi terlambat. Selain itu terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan investasi agribisnis yang disebabkan oleh diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri yang baru mengenai hibah. Hal ini menyebabkan dana yang sebelumnya ada di Dinas Pertanian harus dipindahkan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Pada tahun 2015 diharapkan kegiatan sudah dapat dimulai karena proses pemindahan dana tersebut telah selesai dilakukan.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Berdasarkan dokumen ISR terakhir, semua indikator *intermediate result*proyek WISMP II sudah menunjukkan peningkatan capaian dibandingkan dengan periode sebelumnya, begitu juga dengan sebagian besar indikator PDO, kecuali indikator "*Number of Irrigation Commissions fully functional*" capaiannya masih sama dengan periode sebelumnya yaitu 30 dari target akhir sebanyak 45.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan terdapat beberapa kendala di daerah diantaranya tidak terbitnya Surat Keputusan (SK) untuk SKPD pada tahun ini sehingga pelaksanaan kegiatan terhambat. Selain itu terkait dengan *on-granting* terdapat daerah yang sudah mundur dari kegiatan ini, yaitu Kabupaten Lampung Utara, tetapi Kabupaten Luwu dan Solok Selatan telah resmi ikut serta dalam program ini dan saat ini sedang dalam penyusunan *annual work plan.* Beberapa SKPD kembali mengalami defisit dana, sehingga akan dilakukan realokasi dana penerushibahan antar SKPD sebagaimana yang sebelumnya pernah dilakukan pada tahun 2013.

Untuk permasalahan TA modernisasi dan TA desain konstruksi yang pada triwulan sebelumnya telah diidentifikasi akan melampaui waktu berakhirnya proyek karena terlambat dikontrak, telah diambil keputusan bahwa desain konstruksi yang seharusnya dari dana pinjaman akan dijalankan saja tanpa menunggu TA modernisasi, karena pada desain awal proyek kedua paket tersebut menjadi satu kesatuan. Namun, beberapa pihak menyarankan agar paket pekerjaan tersebut dipisahkan dengan justifikasi perlu dilakukan persiapan terlebih dahulu baru kemudian dibuat desain konstruksi. Pemisahan ini membuat paket pekerjaan menjadi kurang menarik sehingga terdapat kendala dalam proses lelang. Jika pelaksanaan desain konstruksi tidak memungkinkan dari dana pinjaman, maka direncanakan akan dilaksanakan dengan pembiayaan dari dana rupiah murni (bukan pinjaman).

Progres pelaksanaan paket Citarum yang pada proyek lainnya banyak mengalami kendala, pada proyek WISMP II progres sudah cukup baik. Dari 12 paket pekerjaan, 11 paket diantaranya sudah terkontrak dan 1 paket lainnya dengan nilai yang cukup besar diperkirakan akan terkontrak pada tahun 2015.

Proyek WISMP II baru saja melakukan *mid term review* yang salah satu rekomendasinya adalah perbaikan/restrukturisasi kegiatan. Restrukturisasi kegiatan disepakati tidak akan mengubah PDO secara signifikan, melainkan difokuskan untuk meningkatkan

capaian untuk target proyek yang telah disepakati dalam dokumen persiapan. Salah satunya dengan melakukan realokasi dana ke daerah yang targetnya belum tercapai. Adapun persyaratan untuk melakukan restrukturisasi tersebut adalah 1) tidak menyimpang dari PDO; 2) tidak melanggar ESSF; dan 3) tidak melebihi masa berlaku pinjaman.

- ***Jakarta Urgent Flood Mitigation Project*/JUFMP (8121-ID)**

Realisasi Penyerapan Dana

Proyek JUFMP pada Triwulan IV Tahun 2014 terus menunjukkan perbaikan kinerja. Salah satunya dalam hal penyerapan dana yang ditunjukkan oleh nilai progres varian. Meskipun nilai progres varian masih tergolong tinggi namun telah mengalami perbaikan yang signifikan yaitu -20,71. Penyerapan dana pada tahun 2014 hanya mencapai 47,82% dari target yang ditetapkan. Rendahnya penyerapan dana pada tahun ini disebabkan masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pekerjaan.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Progres fisik kegiatan JUFMP pada Triwulan IV Tahun 2014 telah menunjukkan kinerja yang baik meskipun terdapat berbagai permasalahan yang harus segera diselesaikan. Persentase capaian fisik pada hampir semua sub kegiatan telah melampaui target yang ditetapkan untuk triwulan IV. Terdapat 3 sub kegiatan yang mengalami permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1) Paket 1 (Ciliwung Gunung Sahari-Waduk Melati)

   Terdapat jembatan kereta Api di salah satu lokasi kegiatan yang membutuhkan ijin dari PT. Kereta Api Indonesia (KAI). Pelaksana kegiatan dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta telah menyampaikan surat kepada PT. KAI pada bulan Oktober 2014 dan telah dilakukan diskusi yang menghasilkan kesepakatan PT. KAI akan menganggarkan dana untuk pengangkatan jembatan tersebut pada tahun 2015.Bappenas akan menilai kemungkinan untuk mengangkat isu ini ke tingkat *national steering committee*.

2) Paket 2 (*Dredging and Embankment Cengkareng Floodway*)

   - Proses pemancangan pada lokasi Kembangan terlambat karena belum adanya kesepakatan gantirugi dengan PT. PLN terkait relokasi tiang PLNyang berada di lokasi tersebut.
   - Terdapat *water intake* milik PT. PAM Jaya dan PT.Mandala Permai, yang berlokasi di Kembangan hingga saat ini belum dilakukan relokasi.

3) Paket 6A (*Dredging and Embankment of West Banjir Canal and Upper Sunter Drain*)

   - Permasalahan LARAP yang sebelumnya diperkirakan dapat diselesaikan karena telah disepakati untuk melaksanakan kebijakan Pemprov DKI untuk merelokasi penduduk ke Rumah Susun (Rusun), saat ini masih menjadi kendala karena dibutuhkan rekomendasi terkait hal tersebut dari Dinas Permukiman Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang sampai saat ini belum diperoleh.Selain itu, cakupan area yang memerlukan kegiatan permukiman kembali sangat luas.

Bappenas akan menilai kemungkinan untuk mengangkat isu ini ke tingkat *national steering committee*.

Dalam dokumen ISR terakhir untuk indikator PDO proyek JUFMP belum menunjukkan progres dalam pencapaian target. Sementara itu, dua indikator *intermediate result* telah menunjukkan progres capaian yang signifikan yaitu: 1) *Volume of dredge material removed from the floodways, canals and retention basins (including solid waste)* dari target 3,4 juta m^3telah tercapai 1,8 juta m^3; dan 2) *Length of embankment repaired or constructed*dari target 43,2 km telah tercapai 18,17 km. Ke depan diharapkan dengan membaiknya kinerja proyek, capaian indikator PDO maupun *intermediate result* proyek juga segera meningkat.

Ditjen Bina Marga

- ***Western Indonesia National Road Improvement*/WINRIP (8043-ID)**

Realisasi Penyerapan Dana

Proyek WINRIP merupakan salah satu proyek pinjaman Bank Dunia dengan nilai progres varian cukup rendah yaitu mencapai -36,76. Angka tersebut menunjukkan bahwa terjadi keterlambatan yang signifikan dalam hal penyerapan dana. Dari jumlah pinjaman sebesar USD 250 juta, sampai dengan Triwulan IV Tahun 2014 dana yang diserap baru mencapai USD 10,32 juta atau sebesar 4,13% dari komitmen pinjaman, sedangkan waktu terpakai adalah 40,88%. Sementara itu, kinerja penyerapan tahun ini juga belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Nilai penyerapan triwulan I sampai dengan triwulan IV hanya USD 9,65 juta atau sebesar 44,39%.

Rendahnya nilai penyerapan dana tersebut disebabkan oleh berbagai keterlambatan pada paket pekerjaan fisik, mulai dari keterlambatan desain, kesepakatan penggunaan mekanisme pengadaan barang/jasa, keterlambatan karena permasalahan internal kontraktor (*joint venture*) dan juga terdapat pergantian ruas jalan. Oleh karena itu penanggung jawab kegiatan tengah mengupayakan percepatan-percepatan pada semua tahapan kegiatan, dan diperkirakan pada Tahun 2015 penyerapan dana akan meningkat signifikan karena banyak paket pekerjaan sudah terkontrak dan akan dilakukan pembayaran.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Berdasarkan dokumen ISR terbaru belum ada progres capaian pada indikator PDO proyek WINRIP. Sedangkan pada indikator *intermediate result* terdapat 3 indikator yangtelah menunjukkan progres capaian yaitu:1)*Road rehabilitated, Rural*dari target 715 km telah tercapai 5,38 km; 2) *Number of km of improved national roads inthe project region as planned*, dari target 715 km telah tercapai 5,38 km, dan 3) *Satisfactory completion of road safety audits for all road projects of component 1,* dari target 100% telah tercapai 40%.Indikator *intermediate result* yang belum menunjukkan progresscapaian adalah 1) *Number of meters of improved bridges*; 2) *Satisfactory completion of technical audits for all road projects of component 1;* dan 3)*Percent of Environment unit staff trained and capacitated to mitigate disaster risk related to road network.* Informasi capaian indikator kinerja yang lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran.

Terdapat 21 subproyek WINRIP yang dikelompokkan dalam 3 group pekerjaan, yaitu AWP 1, AWP 2 dan AWP 3. Dari ketiga group tersebut AWP 1 merupakan group yang paling maju progres pelaksanaannya. Saat ini semua paket pekerjaan pada AWP 1 sedang dalam tahap konstruksi. Sementara itu, pada AWP 2 dan AWP 3 sebanyak 4 paket pekerjaan sedang melakukan reviu*Detail Engineering Design* (DED), sisanya sebanyak 11 paket lainnya masih dalam persiapan dan pengadaan. Pelaksana kegiatan merencanakan pada tahun 2015 sebanyak 16 paket pekerjaan akan terkontrak dan pada tahun 2016 seluruh paket pekerjaan dapat terkontrak, sehingga proyek dapat diselesaikan sesuai dengan masa laku pinjaman yang akan berakhir pada bulan Desember 2017.

Permasalahan yang dihadapi pada grup 1 (AWP 1) antara lain keterlambatan pelaksanaan paket 1 dan 4 dari jadwal yang ditetapkan, saat ini sedang dilakukan upaya percepatan. Selain itu, masih terdapat sedikit lahan yang belum dibebaskan pada sub proyek 2, saat ini sedang dibicarakan dengan Pemerintah Daerah setempat. Pada group 2 dan 4 (AWP 1 dan 4) terdapat 3 paket yang masih terkendala karena belum adanya kesepakatan mengenai penggunaan metode *full e-procurement*, sudah dilakukan diskusi dengan pihak Bank Dunia untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut. Selain itu pada 4 paket pekerjaan lainnya perlu dilakukan revisi *Detail Engineering Design* (DED) karena perkiraan awal melampaui biaya program, saat ini sedang dilakukan perbaikan oleh Balai II.

Ditjen Cipta Karya

- **Proyek PNPM Perkotaan (*Additional Financing for The National Program for Community Empowerment in Urban Area*(7664-IND)dan *National Community Empowerment Program in Urban Areas 2012-2015*/PNPM 2012-2015 (8213-ID))**

Realisasi Penyerapan Dana

Proyek 7664-IND *Additional Financing for The National Program for Community Empowerment in Urban Area*berakhir pada 31 Desember 2014. Penyerapan kumulatif hingga triwulan IV mencapai USD 112,87 juta atau sebesar 97,71% dari komitmen pinjaman. Realisasi pada tahun terakhir proyek juga cukup baik yaitu 91,50%.

Sementara itu, proyek 8213-ID PNPM Urban 2012-2015 sampai dengan triwulan ini telah menyerap dana sebesar 57,65% dari komitmen pinjaman, dengan penyerapan tahun 2014 sebesar 92,36%. Diperkirakan tidak semua sisa dana proyek akan teralokasi pada anggaran tahun 2015, potensi sisa dana yang tidak akan terserap sampai dengan akhir masa berlaku proyek diperkirakan mencapai sekitar USD 70 juta. Terkait dengan besarnya potensi sisa pinjaman tersebut perlu dipastikan target-target yang belum tercapai dan tindak lanjut yang akan dilakukan. Terdapat wacana untuk mengusulkan perpanjangan masa berlaku pinjaman hingga 31 Desember 2016 mengikuti waktu berakhirnya hibah pendamping, namun dana BLM sudah habis hanya tersisa dana untuk konsultan. Saat ini masih dilakukan pembahasan mengenai permasalahan tersebut dan juga menunggu keputusan pemerintah terkait kebijakan untuk kelanjutan pelaksanaan kegiatan PNPM.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Capaian indikator kinerja untuk proyek 7664-IND *Additional Financing for The National Program for Community Empowerment in Urban Area* pada dokumen ISR terbarumenunjukkan kecenderungan capaian yang sama dengan periode sebelumnya, dimana semua indikator PDO telah tercapai melampaui target, begitu juga dengan sebagian besar indikator *intermediate result* kecuali indikator yang terkait dengan dana bergulir (*Revolving Loan Fund*/RLF).

Selanjutnya, capaian indikator PDO untuk *loan* 8213-ID *PNPM Urban 2012-2015*belum menunjukkan kemajuan dibandingkan dengan periode ISR sebelumnya,kecuali indikator terkait penanganan pengaduan masyarakat yang telah tercapai melampaui target. Sementara itu, sebagian besar indikator *intermediate result*telah tercapai melampaui target kecuali indikator terkait *Revolving Loan Fund*(RLF) dan pengisian MIS proyek. Terkait dengan RLF sampai saat ini masih bergulir di masyarakat dengan total dana sebesar Rp 1,2 triliun. Pelaksana proyek sedang membuat klasifikasi kinerja komponen RLF tersebut untuk memudahkan dalam merumuskan tindak lanjut yang tepat.

- **Proyek*Third WSSLIC-PAMSIMAS*(42047-IND)dan *PAMSIMAS II*(8250-ID)**

Realisasi Pencairan Dana

Pada Triwulan IV Tahun 2014 realisasi dana proyek *Third WSSLIC-PAMSIMAS* mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada triwulan sebelumnya belum ada realisasi dana, namun pada triwulan ini realisasi dana mencapai 92,36%. Proyek ini berakhir pada 31 Desember tahun 2014, dengan penyerapan kumulatif yang dilaporkan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2014 mencapai 99,73%. Diperkirakan terdapat sisa dana yang tidak dapat dimanfaatkan sebesar USD 3,06 juta yang disebabkan oleh selisih kurs.Sisa dana tersebut akan dikembalikan.

Kinerja proyek PAMSIMAS II dalam hal realisasi dana sangat baik, ditunjukkan oleh progres varian yang bernilai positif yaitu 16,47. Demikian juga dengan kinerja penyerapan tahun 2014, realisasi dana mencapai 97,26% dari target yang ditetapkan. Namun demikian, pada tahun 2014 terdapat 8 desa di Kabupaten Bangka Tengah yang tidak mencairkan dana BLM sehingga akan diluncurkan ke tahun 2015.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Berdasarkan dokumen ISR terbaru, semua indikator kinerja proyek PAMSIMAS baik indikator PDO maupun *intermediate result*telah menunjukkan progres yang signifikan, beberapa diantaranya telah tercapai melampaui target, antara lain indikator yang terkait dengan replikasi PAMSIMAS di wilayah lain dan indikator terkait monitoring dan evaluasi proyek.

- ***Urban Water Supply and Sanitation Project*/UWSSP (7730-ID)**

Realisasi Penyerapan Dana

Proyek UWSSP berakhir pada 31 Desember 2014, realisasi akhir diperkirakan mencapai 95% dari komitmen pinjaman. Namun, karena realisasi dana yang dicatat oleh

pelaksana kegiatan adalah dalam satuan rupiah yang kemudian dikonversi menggunakan satu nilai kurs, maka realisasi dana hasil konversi tersebut telah melebihi nilai *loan* yaitu mencapai 109%,akibat adanya perbedaan kurs pada setiap pencairan dana. Saat ini, pelaksana kegiatan masih menunggu pengesahan 2 transaksi terakhir di Kementerian Keuangan, kemudian data realisasi akan dikonsolidasikan dengan Kementerian Keuangan dan Bank Dunia untuk memperoleh nilai riil realisasi akhir terhadap nilai pinjaman. Data tersebut akan dijelaskan dengan rinci dalam laporan akhir proyek.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Berdasarkan dokumen ISR terbaru, sebagian besar capaian indikator PDO maupun *intermediate result* proyek telah mendekati target, beberapa diantaranya telah melampaui target yang ditetapkan. Namun, indikator PDO yang capaiannya masih rendah pada ISR periode sebelumnya yaitu terkait *operating ratio* dengan target lebih rendah dari 1, pada periode ini belum menunjukkan kemajuan.

Pelaksana pekerjaan melaporkan bahwa semua paket pekerjaan fisik telah selesai dilaksanakan, tetapi terdapat permasalahan pada pekerjaan fisik paket BWSC1.8 *Uprating IPA Cikareteg*. Meskipun pekerjaan pada paket ini sudah selesai 100%, namun belum dapat difungsikan karena pipa transmisi air baku yang dibiayai melalui dana PDAM masih dalam tahap pengerjaan. Untuk itu PDAM diharapkan dapat mempercepat penyelesaian pipa tersebut sehingga IPA Cikareteg dapat segera difungsikan.

- **Kementerian Dalam Negeri**
  - ***National Programme for Community Empowerment in Rural Area/PNPM Rural 2012-2015*(8217-ID)**

Realisasi Penyerapan Dana

Penyerapan kumulatif proyek PNPM 2012-2015 hingga Triwulan IV Tahun 2014 mencapai 33,79% dari komitmen pinjaman (*tidak termasuk komponen refinancing*). Berdasarkan nilai progres varian, proyek ini mengalami keterlambatan yang signifikan dalam hal penyerapan dana, ditunjukkan dengan nilai progres varian yang mencapai -30,1. Sementara itu, kinerja realisasi tahun 2014 hanya mencapai 64,13% dari target.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Berdasarkan dokumen ISR terbaru ringkasan progres capaian untuk indikator PDO dan *intermediate result* sebagai berikut:

1) Indikator PDO
   Sebanyak satu indikator telah tercapai melampaui targetyaitu indikator terkait partisipasi komunitas dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kegiatan, dari target 3.000 telah tercapai sebanyak 3.600. Indikator PDO yang tidak dapat mencapai target pada tahun 2014 adalah *Direct project beneficiaries,* dari target 40 juta hanya tercapai 2,5 juta yang disebabkan oleh adanya pengurangan dana BLM. Sementara itu, beberapa indikator PDO belum menunjukkan progres capaian sampai saat ini yaitu:

- *Projects funded by PNPM provide economic benefits (direct and indirect) for community members*
- *Change in productivity and/or lower cost of Access*
- *Local-level multipliers*
- *Cost savings over regular procurement*

2) Indikator *intermediate result*:

Sebagian besar indikator telah menunjukkan peningkatan capaian dan beberapa diantaranya telah mencapai/melebihi target. Namun, masih terdapat beberapa indikator yang tidak dapat mencapai target pada tahun 2014, yaitu:

- *> 85% of work plans completed in one program cycle (18 months)* hanya tercapai 4,5%
- *90% of districts that conduct annual coordination meetings between PNPM-Rural (Satker) and other GOI teams to discuss PNPM-Rural activities,* hanya tercapai 34%
- *70% of villages which are assisted to review their mid-term village development plans,* hanya tercapai 3%.
- *50% of districts which establish Economic Empowerment Stakeholde* , hanya tercapai 23%
- *70% of UPKs that are evaluated as healthy administrative and financially for RLF,* hanya tercapai 53%
- *50% of corruption cases that are resolved*, hanya tercapai 28%

Sampai saat ini pelaksanaan proyek masih terkendala oleh belum adanya kejelasan mengenai nomenklatur kementerian dan instansi yang bertanggung jawab untuk melanjutkan pelaksanaan proyek. Hal ini perlu untuk mendapatkan perhatian. Keberlanjutan hasil-hasil yang dicapai oleh PNPM tidak akan optimal jika perubahan struktur/nomenklatur organisasi tidak mempertimbangkan untuk diteruskan dan melembaga.

- **PT. PLN**
  - ***Power Transmission Development Project*/PTD I (7940-ID) dan *Scattered Transmission and Substation in Indonesia Phase* II/IPTD II (8280-ID)**

Realisasi Penyerapan Dana

Pada Triwulan IV Tahun 2014 penyerapan kumulatif proyek IPTD 1 adalah USD 58,40 juta atau sebesar 25,96% dari total komitmen pinjaman. Berdasarkan nilai progres varian yang mencapai -52,27, proyek ini mengalami keterlambatan yang sangat signifikan dalam hal penyerapan dana. Sementara itu, penyerapan dana sepanjang tahun 2014 cukup baik yaitu 81,14% dari target. Terdapat potensi sisa dana sebesar USD 80,15 juta, PT. PLN telah mengajukan usulan pemanfaatan untuk sisa dana tersebut kepada Bappenas. Saat ini usulan tersebut sedang diproses di internal Bappenas untuk memastikan justifikasi yang diberikan sudah memadai, begitu juga dengan rencana pelaksanaan serta target awal proyek telah tercapai.

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2014, proyek IPTD II belum melakukan penarikan dana karena sampai saat ini proyek masih dalam proses pengadaan.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Proyek IPTD I terdiri dari 6 paket pekerjaan yaitu J1, J2, J3, S1, S2, dan S3. Pelaksanaan pekerjaan pada paket J1, J2 dan J3 mengalami keterlambatan karena kinerja kontraktor yang dinilai lambat. Hal ini diperkirakan disebabkan oleh pemenang pada semua paket adalah kontraktor yang sama dengan lokasi pekerjaan yang berbeda-beda, sehingga kontraktor menjadi *overload* pekerjaan. Hal tersebut mengakibatkan keterlambatan dalam mobilisasi peralatan, serta kurangnya tenaga kerja di lapangan. Selanjutnya, pelaksanaan pekerjaan pada paket S1, S2 dan S3 terlambat karena perubahan spesifikasi dan jumlah material. Belum ada informasi mengenai capaian indikator PDO maupun *intermediate result* proyek ini.

- ***Upper Cisokan Pumped Storage Hydro Electrical Power*(8057-ID)**

Realisasi Penyerapan Dana

Proyek *Upper Cisokan* sampai dengan Triwulan IV Tahun 2014 masih mengalami keterlambatan yang signifikan dalam hal penyerapan dana. Hal ini ditunjukkan oleh nilai progres varian yang mencapai -38,52. Realisasi kumulatif proyek ini adalah USD 5,46 juta atau sebesar 0,86% dari total komitmen pinjaman. Kinerja penyerapan pada tahun ini kurang memuaskan yaitu hanya 44,88% dari target. Terdapat permasalahan pada penagihan untuk *PRP & ESP Meeting* sebesarUSD 99.604,40 yang tidak dapat dilakukan karena DIPA tahun 2014 tidak mencukupi. Untuk itu akan dianggarkan pada DIPA Tahun 2015 dan akan dilakukan dengan metode *reimbursement* (PP).

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Dokumen ISR terbaru memperlihat bahwa beberapa indikator PDO maupun *intermediateresult* proyek telah mengalami peningkatan capaian. Dari 4 Indikator PDO, terdapat 2 indikator yang telah menunjukkan progres yaitu 1) *Evidence of satisfactory compliance with the EMP;* dan 2) *Improved capability of PLN in planning, development and operation of hydro power pump storage.* Indikator PDO lainnya belum menunjukkan progres.Dari 7 indikator *intermediate result* hanya 1 indikator yang telah mencapai target pada periode sebelumnya yaitu terkait pengadaan. Indikator yang telah menunjukkan progres triwulan ini yaitu terkait penyelesaian pembayaran kompensasi pemindahan penduduk (*resettlement*) telah tercapai 50% dari target (meningkat 25% dibanding periode sebelumnya). Indikator *intermediate result*lainnya belum menunjukkan kemajuan capaian.

Pelaksanaan kegiatan saat ini masih dalam tahap pengadaan paket-paket pekerjaan, dimana 3 paket diantaranya diperkirakan akan terkontrak pada bulan April-Juni 2015, sehingga dapat segera memulai pekerjaan. Sementara itu, untuk progres pembebasan lahan saat ini telah mencapai 317,22 Ha dari total kebutuhan sebesar 720 Ha.

Di Kabupaten Bandung Barat masih tersisa lahan yang belum dibebaskan sebesar 94,45 Ha, sebelumnya dikhawatirkan proses pembebebasan lahan akan diulang dari awal karena keputusan penetapan lokasi akan berakhir pada Desember 2014. Saat ini masa berlaku keputusan tersebut telah diperpanjang hingga 31 Desember 2015 sehingga proses pembebasan lahan dapat terus dilanjutkan dan dipercepat. Di Kabupaten Cianjur lahan yang belum dibebaskan adalah lahan untuk transmisi seluas 2 Ha,

diperkirakan pada bulan Februari 2015 dapat diselesaikan. Untuk pinjam pakai kawasan hutan, telah terbit Persetujuan Lahan Kompensasi dari Menteri Kehutanan seluas 186 Ha, setelah diukur ulang oleh BPN luasannya menjadi sebesar ±163,86 Ha. Masih terdapat kekurangan untuk lahan kompensasi seluas 147 Ha yang harus dipenuhi pada saat izin prinsip habis masa berlakunya. PT. PLN telah melakukan pembelian lahan kompensasi di Desa Ciguha dan Desa Sukajembar Kecamatan Sukanagara tanggal 27 Oktober 2014 seluas 135,2166 Ha dan di Desa Mekarjaya Kecamatan Campaka tanggal 27 November 2014 seluas 26,3457 Ha, saat ini dalam proses penyerahan tahap I kepada Kementerian Kehutanan. Untuk kekurangan lahan kompensasi seluas 147 Ha, sedang dalam proses meminta rekomendasi dari Bupati Cianjur.

- **Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**
  - ***Health Professional Education Quality Project*/HPEQ (7737-ID)**

    Realisasi Penyerapan Dana

    Proyek HPEQ berakhir pada 31 Desember 2014, realisasi kumulatif yang telah dilaporkan sampai dengan triwulan ini mencapai 86,70% dari komitmen pinjaman. Sejak triwulan sebelumnya telah diidentifikasi mengenai potensi sisa dana yang bersumber dari beberapa komponen sebagai berikut:

    1) Komponen I
       - Jumlah prodi yang diakreditasi oleh LAM-PTKes sudah mencapai target KPI proyek HPEQ, tetapi tidak mencapai target prodi yang sudah dianggarkan DIPA Dit.Belmawa 2014 (173 prodi dari 291 prodi), dikarenakan belum adanya regulasi untuk implementasi LAM-PTKes serta birokrasi keuangan yang membutuhkan waktu lama
       - Efisiensi dana untuk penyusunan standar-standar bidang gizi, farmasi dan kesehatan masyarakat karena sudah ada *template* naskah akademik dan standar dari 4 bidang sebelumnya, serta adanya dukungan dari asosiasi institusi pendidikan, asosiasi profesi dan Kementerian Kesehatan untuk memfasilitasi kegiatan
       - Efisiensi dana untuk penyusunan instrumen akreditasi karena telah mendapatkan acuan dari instrumen akreditasi profesi dokter (sehingga mengurangi jumlah aktivitas untuk penyusunan instrumen akreditasi bidang gizi, farmasi dan kesehatan masyarakat)
       - Efisiensi dana untuk uji coba instrumen akreditasi (pengurangan jumlah *sample* dari yang ditargetkan sebelumnya)
    2) Komponen II
       - Efisiensi dana untuk pelatihan-pelatihan persiapan uji kompetensi karena sudah menggunakan standar dari LPUK-Nakes dan ada pendanaan mandiri dari Asosiasi Institusi Pendidikan dan Organisasi Profesi
       - Efisiensi dana dalam pelaksanaan uji coba uji kompetensi bidang keperawatan dan kebidanan, karena sudah menggunakan perangkat uji coba yang disusun

oleh LPUK-Nakes dan pelaksanaan uji coba sudah difasilitasi oleh Asosiasi Institusi Pendidikan dan Organisasi Profesi

3) Komponen III

Terdapat sisa alokasi, pengembalian dana dari kontraktor dan hasil efisiensi pada 14 perguruan tinggi yang menjadi pelaksana proyek

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Meskipun terdapat potensi sisa dana yang berasal dari 3 komponen proyek, berdasarkan laporan penanggung jawab proyek semua indikator kinerja kunci pada setiap komponen proyek HPEQ telah tercapai dengan baik. Saat ini sedang dilakukan konsolidasi data capaian untuk masing-masing indikator tersebut untuk memperoleh nilai capaian akhir yang akan dijelaskan dalam laporan akhir proyek.

- **Kementerian PPN/Bappenas**
  - ***Scholarships Program for Strengthening Reforming Institutions*(8010-ID)**

Realisasi Penyerapan Dana

Penyerapan kumulatif proyek SPIRIT sampai Triwulan IV Tahun 2014 telah mencapai 41,41% dari komitmen pinjaman. Kinerja penyerapan tahun ini juga cukup baik yaitu mencapai 90,45%. Terdapat beberapa permasalahan terkait keuangan pada Triwulan IV Tahun 2014, diantaranya kesalahan pembebanan rekening khusus dalam sistem administrasi keuangan sehingga terdapat pencairan dana proyek lain yang ditagihkan ke reksus proyek SPIRIT sebesar USD 1,2 juta sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu juga terjadi kesalahan dalam penggunaan kurs pada sistem SPAN di Kementerian Keuangan terutama untuk mata uang Poundsterling, selisih nilai kurs tersebut mencapai USD 1,5 juta. Untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut telah dilakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan. Pada PIU Kementerian Keuangan alokasi anggaran untuk tahun 2015 dinilai terlalu besar, diharapkan dapat dipindahkan/diluncurkan ke tahun 2016.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Capaian indikator kinerja *intermediate result*telah menunjukkan peningkatan yang siginifikan, empat indikator telah mencapai target dan satu indikator lainnya hampir mencapai target. Indikator yang belum menunjukkan kemajuan adalah terkait evaluasi program (1 indikator) karena ditargetkan untuk dilaksanakan pada tahun 2015 dan tahun 2017. Progres pelaksanaan SPIRIT di Bappenas saat ini persediaan daftar kandidat untuk program S2 sudah habis sehingga diusulkan untuk direalokasi ke instansi yang masih memiliki banyak calon peserta seperti BPK, BPKP dan instansi lainnya. Namun, mengingat sisa masa berlaku proyek hanya 2 tahun, maka harus dipastikan kandidat yang diterima adalah yang sudah benar-benar siap berangkat dengan program pendidikan S2 yang jangka waktu studinya hanya 1 tahun. Pelaksanaan program gelar pada PIU Kementerian Keuangan juga sudah melampaui target, namun masih terdapat sisa dana. Berdasarkan hasil diskusi *steering committee*

(SC) sisa dana tersebut akan dimanfaatkan dengan merekrut kembali calon karyasiswa untuk program S2 dengan jangka waktu studi 1 tahun.

Beberapa permasalahan yang telah diidentifikasi pada triwulan sebelumnya seperti rendahnya *living allowance* untuk karyasiswa di Australia akan segera ditindaklanjuti dengan melakukan penyesuaian. Saat ini usulan penyesuaian tersebut masih menunggu persetujuan SC. Sementara itu, permasalahan terkait perlunya *clearance* dari *federal reserve* untuk pencairan dana karyasiswa di Amerika diperkirakan akan tetap menjadi isu namun tidak signifikan.

- **Kementerian Keuangan**
  - ***Government Financial Management & Rev. Adm. Project*/GFMRAP (4762-IND/4026-IND)**

    Realisasi Penyerapan Dana

    Realisasi penyerapan kumulatif proyek GFMRAP sampai dengan Triwulan IV Tahun 2014 yaitu USD 38,19 juta atau sebesar 63,39% dari komitmen pinjaman, sedangkan realisai penyerapan dana pada tahun ini menunjukkan kinerja yang baik yaitu mencapai 92,98% dari target tahun 2014. Pada periode bulan Januari sampai dengan Juni tahun 2015 diperkirakan akan digunakan dana sebesar USD 15 juta, selanjutnya pada akhir proyek diharapkan semua dana dapat terserap. Terkait *recurrent cost*direncanakan akan menggunakan dana pemerintah (rupiah murni).

    Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

    Berdasarkan dokumen ISR terbaru capaian indikator PDO proyek GFMRAP telah menunjukkan kemajuan yang signifikan seiring dengan telah dilaksanakannnya *roll out* SPAN di 62 lokasi, diperkirakan pada akhir proyek semua target PDO akan tercapai. Sementara itu dua indikator *Intermediate result* juga telah menunjukkan kemajuan capaian.Satu indikator lainnya masih menunjukkan capaian yang sama dari tahun 2012 yaitu *Number of Reviews (including from Minister) verify the completion of at least four high-quality policy analysis products* dari target akhir 4, baru tercapai 3 pada Januari 2012.Indikator *intermediate result*yang belum ada capaian hingga saat ini adalah *Verification of effective project governance, external oversight, change management and implementation.*

    Progres pelaksanaan kegiatan saat ini, yaitu peningkatan *server* untuk mendukung *rollout* telah selesai dilakukan. Kegiatan *rolloutphase* 1 juga sudah selesai dilaksanakan pada tanggal 2-17 Januari 2015 di 78 KPPN dan 16 Kanwil, dengan demikian total 140 KPPN dan 23 Kanwil telah mengimplementasikan sistem SPAN. Selanjutnya, akan dilakukan persiapan untuk *rollout phase* 2 yang mencakup 39 KPPN dan 10 Kanwil. Sementara itu, *rollout acceptance* saat ini masih dalam proses, diperkirakan akan diperoleh pada pertengahan bulan Februari tahun 2015, sedangkan *final acceptance* direncanakan pada bulan Juni 2015.

- **Badan Pusat Statistik (BPS)**
  - ***Statistical Capacity Building Change and Reform for the Development Statistic*/Statcap-Cerdas (8038-IND)**

    Realisasi Penyerapan Dana

    Seiring dengan telah membaiknya pelaksanaan proyek Statcap, realisasi dana juga mulai menunjukkan progres meskipun masih tergolong rendah. Nilai penyerapan kumulatif sampai dengan akhir tahun 2014 adalah USD 0,66 juta (Rp 6,22 miliar) atau sebesar 1,4% dari komitmen pinjaman dan 12% dari target tahun 2014. Terdapat usulan untuk revisi alokasi dana rupiah murni pendamping untuk tahun 2015 karena dinilai terlalu kecil, begitu juga dengan alokasi pinjaman.

    Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

    Pada tahun 2014 telah dilaksanakan *kick off meeting* proyek Statcap, selain itu *owner agent* telah berhasil dikontrak dan dilakukan pembayaran uang muka. Proses pengadaan untuk paket 1 (konsultan) juga sudah dimulai, dan telah dilakukan negosiasi kedua, diperkirakan paket 1 akan mulai bekerja pada bulan Maret 2015. Pada paket *owner agent* diperlukan amandemen kontrak karena adanya pergantian *key expert*. *Owner agent* bertugas untuk membantu BPS dalam mengawal proses implementasi proyek, sehingga *key expert* harus diupayakan sesuai dengan kebutuhan BPS.

- **PT. SMI dan PT. PII**
  - ***Indonesia Infrastructure Finance*/IIF(7731-ID) *dan Indonesia Infrastructure Guarantee Fund*/IIGF (8192-ID)**

    Realisasi Penyerapan Dana

    Pada Triwulan IV Tahun 2014 tidak terdapat tambahan realisasi dana untuk proyek IIFF, dengan demikian status realisasi dana kumulatif masih sama dengan triwulan sebelumnya yaitu sebesar 97,18% dari komitmen pinjaman atau sebesar USD 97,18 juta. Dari dana yang sudah direalisasikan tersebut nilai yang sudah disalurkan ke sub proyek adalah sebesar USD 81,5 juta.

    Pada proyek IIGF terdapat tambahan penyerapan dana pada triwulan ini sehingga sudah dapat dibebankan ke rekening khusus yaitu sebesar USD 0,76 juta. Dari nilai pinjaman sebesar USD 29,6 juta, sebanyak USD 25 juta diantaranya merupakan *standby loan* yang hanya akan dicairkan apabila ada subproyek yang meminta penjaminan kepada PT. PII. Sehingga ke depan disepakati untuk nilai *standby loan* tersebut dikeluarkan dari perhitungan jumlah pinjaman maupun kinerja realisasi dana. Namun demikian, akan terus dipantau pelaksanaannya secara keseluruhan.

    Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

    Pada Dokumen ISR terbaru belum ada kemajuan capaian untuk indikator PDO maupun *intermediate result* proyek IIFF. Sementara itu, terkait dengan usulan perubahan PDO telah disepakati perubahan PDO menjadi:

    "The objective of the project is to support the development of Indonesia's infrastructure projects in accordance with the national strategic plan, through the establishment a domestic non-bank

financial institution that will increase provision of private sector financed infrastructure by (i) offering long-term local-and/or foreign-currency denominated debt and equity financing; and (ii) providing advisory services to government as well as private sector financiers as needed throughout the project lifecycle".

Saat ini usulan perubahan tersebut telah disampaikan secara resmi oleh Pemerintah Indonesia kepada Bank Dunia. Untuk perubahan syarat ESSF, usulan penghapusan *Section I.C Anti Corruption* dan penghapusan redaksi terkait ketentuan *General Condition* merupakan bagian yang tidak dapat dihilangkan dari *loan agreement* sehingga tidak dapat dilakukan.

Saat ini PT. SMI menangani 11 proyek termasuk dari pendanaan bukan pinjaman, dua sub proyek diantaranya telah lunas. Terdapat 1 sub proyek dari pendanaan rupiah yang tidak dilanjutkan prosesnya dengan pertimbangan resiko yang terlalu besar.

Progres pelaksanaan untuk proyek IIGF masih belum signifikan, meskipun kebutuhan penjaminan sesungguhnya besar namun hanya 3 proyek yang telah mengajukan permintaan penjaminan, saat ini masih dalam tahap persiapan. PT. PII diharapkan dapat mengambil pembelajaran dari pelaksanaan proyek IIFF. Mengenai strategi pengelolaan dana pinjaman dalam bentuk *standby loan* masih menunggu rekomendasi dari hasil *review mission*.

- **Kementerian Pertanian**
  - ***Sustainable Agricultural Research and Technology*/SMART-D (8188-ID)**

Realisasi Penyerapan Dana

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2014, penyerapan kumulatif proyek SMART-D baru mencapai 22,44% dari komitmen pinjaman, sementara waktu terpakai adalah 44,25% sehingga nilai progres varian menjadi cukup rendah yaitu -21,62. Kinerja penyerapan pada tahun ini juga tergolong rendah hanya 44,19%. Rendahnya penyerapan dana disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya pada komponen *capacity building* karena banyak peserta yang sebelumnya ditargetkan untuk mendapatkan pendidikan dan *training* di luar negeri memilih untuk di dalam negeri, sehingga terdapat efisiensi biaya. Penyebab lainnya adalah adanya kendala dalam pengadaan barang/jasa.

Terdapat wacana pengalihan dana dari komponen A (pengembangan SDM)ke komponen B (pengembangan infrastuktur)*).* Namun perlu dilakukan penelaahan kembali terhadap kebutuhan tersebut beserta pengaruhnya terhadap pencapaian PDO proyek, karena desain awal proyek bukan untuk peningkatan infrastruktur.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pada triwulan ini pencapaian indikator *intermediate result* proyek telah meningkat cukup signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Indikator yang capaiannya meningkat antara lain: 1) *percentage of IAARD staff that are researchers;*2)*IAARD Researchers with M.Sc. and/or PhD; 3*) *Collaborative research/extension sub-projects under implementation/completed; 4*)*Collaborative research or extension subprojects completed (number); dan 5*) *Patents and Licenses*. Sementara itu, terdapat 2 indikator PDO

yang capaiannya telah meningkat, yaitu: 1) *Technologies demonstrated in the project areas (number);* dan 2) *Patents and Licenses*. Informasi lebih lengkap mengenai capaian masing-masing indikator dapat dilihat pada lampiran.

Pada komponen A (pengembangan SDM), pelaksanaan program pendidikan S2 telah melampaui target untuk jumlah peserta namun untuk program pendidikan S3 sampai saat ini jumlah peserta masih di bawah target. Sementara itu, untuk pelatihan jangka pendek tahap lanjut hanya *Scientific Exchange* (SE) dan*training* kemampuan profesional (TKP) yang jumlah pesertanya telah melampaui target awal proyek, sedangkan jenis pelatihanlainnya masih di bawah target. Kendala utama yang dihadapi pada pelaksanaan komponen ini adalah permasalahan perijinan dari pimpinan instansi yang cukup sulit didapat, selain itu kemampuan bahasa asing pegawai Badan Litbang Pertanian yang belum memadai. Untuk menindaklanjuti permasalahan ini akan dilakukan koordinasi dengan pimpinan masing-masing instansi serta diadakan pelatihan bahasa selama 3 bulan untuk calon peserta.

Pada komponen B telah dilakukan perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan infrastruktur, saat ini telah dilakukan perhitungan kembali dengan jadwal yang baru. Selain itu terdapat 3 paket pekerjaan yang harus melakukan pelelangan ulang untuk ke-3 kalinya disebabkan oleh tidak adanya perusahaan yang mampu memenuhi persyaratan yang diberikan, sehingga dilakukan penurunan persyaratan dan akan dilanjutkan pelaksanaannya pada tahun 2015. Selanjutnya pada komponen C, beberapa penelitian terhambat karena tidak ada bahan-bahan yang dibutuhkan akibat cuaca serta keterlambatan pengadaan.

- **Kementerian Riset dan Teknologi**
  - ***Research and Innovation in Science and Technology Project*/RISET-Pro (8245-ID)**

Realisasi Penyerapan Dana

Penyerapan kumulatif untuk proyek Riset-Pro sampai dengan triwulan ini masih rendah yaitu hanya mencapai USD 0,17 juta atau sebesar 0,18% dari komitmen pinjaman. Kinerja penyerapan dana pada tahun ini juga sangat rendah hanya mencapai 1,33 % dari target.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Belum ada kemajuan yang signifikan dalam capaian indikator kinerja pada ISR terakhir (Agustus 2014), hanya 2 indikator yan telah mencapai target yaitu:

- *Project implementation and monitoring reports (include financial reports) completed (Component 4)*
- *Computerized project monitoring database established, updated, and key information placed on RISTEK project site (Component 4)*

Beberapa permasalahan yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan menurut penanggung jawab proyek adalah sebagai beikut:

- AWP baru memperoleh NOL dari World Bank bulan Mei 2014

- Pencairan dana pinjaman baru dilaksanakan bulan juni 2014, kecuali untuk karyasiswa*on-going*
- Keterlambatan seleksi calon karya siswa 2014 dan keterlambatan dalam memperoleh LoA
- Perbedaan persepsi pengelola keuangan Kemenristek atas mekanisme pencairan dana pinjaman melalui UP/TUP.
- Kesulitan dalam mencari konsultan individu maupun konsultan lembaga yang memenuhi kualifikasibagi kegiatan Komponen 1,2 dan 4
- Pembiayaan keberangkatan karyasiswa yang seharusnya sesuai jadwal ternyata masih ada 30 karyasiswa dari 82 yang belum mendapatkan LoA dan berdampak pada pembiayaan di Komponen 3 (*tuition* dan *non tuition*)

Selain permasalahan tersebut kebijakan pemotongan anggaran perjalanan dinas juga berdampak pada tertundanya kegiatan monitoring dan evaluasi karyasiswa di luar negeri, yang seharusnya telah dilaksanakan sejak tahun 2013. Kegiatan monitoring tersebut merupakan salah satu kegiatan yang dibiayai dari dana pendamping. Terdapat permasalahan dalam pengalokasian dana pendamping dimana menurut Kementerian Keuangan ketersediaan dana pendamping untuk proyek ini tidak diwajibkan. Dengan demikian dikhawatirkan kegiatan-kegiatan pendukung yang tidak dapat dibiayai dari dana pinjaman tidak dapat dilaksanakan.

Sehubungan dengan perubahan nomenklatur kementerian, saat ini Peraturan Presiden mengenai penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi telah diterbitkan, namun hanya mengatur sampai pada tingkat Eselon 1, sementara tingkatan dibawahnya belum diatur. Oleh karena itu disepakati bahwa kegiatan yang dapat dimulai pelaksanaannya terlebih dahulu adalah untuk program gelar, sementara kegiatan lainnya menunggu penyelesaian perubahan nomenklatur.

- **Kementerian Kelautan dan Perikanan**
  - ***Coral Reef Rehabilitation and Management Program-Coral Triangle Initiative/Coremap-CTI* (8336-ID)**

Realisasi Penyerapan Dana

Realisasi dana proyek *Coremap* CTI yang didanai dari pinjaman Bank Dunia pada tahun 2014 hanya mencapai USD 1,31 juta. Rendahnya realisasi dana selain karena proyek masih tergolong baru, pada tahun 2014 pencantuman nomor register di DIPA baru diselesaikan pada bulan September, sehingga waktu yang tersisa untuk implementasi hanya 3 bulan.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2014 adalah penyusunan beberapa pedoman penting yang akan digunakan dalam pelaksanaan proyek antara lain pedoman implementasi, monitoring dan evaluasi serta pedoman pengadaan barang dan jasa.

- **PT. Pertamina**
  - ***Geothermal Clean Energy Investment Project*(8082-ID)**

    Realisasi Penyerapan Dana

    Pada triwulan ini telah terdapat kemajuan realisasi dana untuk proyek Geothermal yaitu USD 17,04 juta atau sebesar 71,63%. Namun jika dibandingkan dengan waktu terpakai, proyek ini mengalami keterlambatan penyerapan dana yang sangat signifikan, dengan nilai progres varian mencapai -85,32. Saat ini usulan perpanjangan masa berlaku proyek masih diproses di Bank Dunia. Selain itu, terdapat potensi sisa dana pinjaman sebesar USD 40 juta yang saat ini masih dibahas di internal PT. Pertamina untuk menindaklanjutinya.

    Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

    Capaian indikator *intermediate result* pada dokumen ISR terbaru telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, sebanyak tiga indikator telah tercapai pada periode sebelumnya, pada periode ini dua indikator lainnya juga telah tercapai yaitu: 1) *Minimum of 2 EPC contracts signed;*dan 2) *World Bank approval of yearly training program.* Indikator yang belum mencapai target yaitu *Minimum of 40 staff trained in key workshops each year,* namun capaiannya telah meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Sementara itu indikator PDO belum menunjukkan progres yang signifikan.

    Progres saat ini paket Ulubelu telah melakukan penarikan pertama dan diperkirakan ke depan akan terus berjalan dengan baik. Sementara itu, untuk Lahendong penarikan pertama terlambat 2-3 bulan dari penandatanganan kontrak.

.

Box 1: Kunjungan Lapangan

Loan Bank Dunia: Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities (PAMSIMAS)

***Executing Agency*:** Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum

Tujuan kunjungan lapangan:

Kunjungan lapangan PAMSIMAS dilaksanakan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PAMSIMAS di Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan.

Hasil kunjungan lapangan:

1. **Desa Pinang Habang, Kec. Wanaraya, Kab. Batola**

   Pelayanan penyediaan air melalui PAMSIMAS baru berjalan dari Bulan Juni 2014, dan mencakup RT 2 dan RT 8. Saat ini PAMSIMAS telah membantu kemudahan akses terhadap air bersih, namun di satu desa baru sekitar 25% warga yang menjadi penerima manfaat. Masyarakat masih membutuhkan tambahan dua titik sarana penampungan air agar dapat menjangkau seluruh desa dan tidak menimbulkan kesenjangan antar warga.Saat ini, PAMSIMAS di Desa Pinang Habang telah melayani 30 pelanggan. Biaya iuran yang disepakati oleh masyarakat penerima manfaat adalah sebesar 2.000 rupiah/kubik air, yang akan digunakan untuk membiayai pulsa listrik dan perbaikan infrastruktur.

2. **Desa Sido Makmur, Kota Marabahan, Kab. Batola**

   Pemanfaatan sarana penampungan dan pengolahan air bersih PAMSIMAS di Desa Sido Makmur dimulai pada tahun 2014 dan baru berjalan empat bulan. Berbeda dari desa sebelumnya, sumber air bersih Desa Sido Makmur berasal dari air sungai dan memerlukan sistem. Saat ini pelanggan mencapai 21 orang, dan iuran air dipatok 3.500 per kubik. Hal menarik yang disampaikan oleh masyarakat adalah kurangnya biaya untuk pipa distribusi yang dikarenakan menara air diletakkan jauh dari permukiman warga. Lokasi menara tersebut adalah permintaan dari masyarakat agar menara air terletak di luar lokasi permukiman untuk menghindari perselisihan antar warga.

Pelaksanaan PAMSIMAS di Batola, memiliki karakteristik yang berbeda dari lokasi lain, yaitu lokasi perumahan masyarakat yang tersebar dan mengakibatkan jangkauan pelayanan PAMSIMAS mencakup jumlah penduduk yang lebih sedikit. Khusus di Kota Marabahan dan beberapa lokasi lain di Kalimantan, kondisi lahan yang sebagian besar adalah lahan gambut mengakibatkan kesulitan sumber air bersih. Dengan kondisi yang berbeda-beda tersebut, PAMSIMAS sebagai program nasional memerlukan pendekatan sesuai karakter daerah dan bentuk pemantauan dan evaluasi yang dapat menangkap informasi mengenai keragaman dan dinamika kegiatan di lapangan.

Gambar 1. Sungai sebagai Sumber Air dan Menara Penampungan dan Pengolahan Air PAMSIMAS (dari kiri ke kanan)

Box 2: Kunjungan Lapangan

Loan Bank Dunia: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan (PNPM Perkotaan)

***Executing Agency*:** Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum

Tujuan kunjungan lapangan:
Kunjungan lapangan PNPM Perkotaan dilaksanakan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PNPM Perkotaan di Kota Manado, Sulawesi Utara.

Hasil kunjungan lapangan:

1. **Kelurahan Sario Tumpaan**
   Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Sario Tumpaan dikelola oleh BKM "Sartum Bersatu". Dana BLM yang dialokasikan dan telah didistribusikan di kelurahan ini sebesar IDR 75 juta pada tahun anggaran 2013, IDR 10 juta pada DDUB perubahan tahun 2013 dan IDR 45 juta pada tahun anggaran 2014. Hingga saat ini BLM tahun anggaran 2014 telah terserap sebesar 100% yang dimanfaatkan untuk pembangunan sosial seperti bantuan seragam untuk anak kurang mampu dan peningkatan gizi anak dan lansia. Beberapa kendala yang dialami oleh BKM "Sartum Bersatu" terkait penyelenggaraan program PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah mereka antara lain masih sering terjadi 'Tarkam' (Taruhan Antar Kampung) di wilayah tersebut, sehingga sulit untuk melakukan pelatihan setelah jam kerja dan khawatir beberapa infrastruktur rusak dikarenakan kondisi tersebut, masih banyak warga miskin yang belum dapat terbantu karena perbedan standar kemiskinan dengan BPS. Selama ini, BKM menentukan standar warga miskin ialah yang berpenghasilan dibawah IDR 1 juta per bulan, dan kelurahan ini belum menjadi daerah kegiatan PRB-BK. Kedepannya diharapkan PRB-BK dapat mengkaji potensi banjir bandang di Manado, menindaklanjuti adanya bencana banjir bandang pada Januari 2014 lalu.
2. **Kelurahan Malayang I Timur**
   Dana BLM dari Program PNPM di kelurahan ini disalurkan melalui BKM "Makin Laju" (Masyarakat Miskin Selangkah Maju) dan dikelola oleh KSM atau panitia pelaksana kegiatan.Pemanfaatan dana BLM sebesar IDR 120 juta tersebut telah 100% dimanfaatkan melalui kegiatan-kegiatan seperti pembuatan jalan rabat, pembuatan jalan paving, kursus menjahit, bantuan pendidikan anak sekolah dan pemeriksaan Pap Smear. Pada tahun-tahun sebelumnya sejak program PNPM dikelola oleh BKM Makin Laju sejumlah kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain pembuatan relling pengamanan, pembuatan dan perbaikan drainase, kursus mengemudi, kursus menjahit, pelatihan tata boga, pelatihan masyarakat dan media warga, kursus kecantikan, perbaikan gizi balita dan gizi lansia. Namun disamping itu masih terdapat kendala-kendala yang dialami BKM antara lain beberapa infrastruktur yang telah dibangun dari hasil kegiatan PNPM Mandiri rusak dikarenakan bencana banjir bandang pada Januari 2014, terdapat kendala pada saat pembebasan lahan, namun kendala ini dapat terselesaikan setelah melalui proses musyawarah dengan pihak kelurahan, pengembalian dana bergulir masih tersendat, dan masyarakat peserta pelatihan tata boga dan menjahit tidak bisa mengembangkan hasil pelatihan tersebut dikarenakan tidak memiliki modal yang cukup. Namun sejak tahun 2011, penggunaan BLM untuk dana pengadaan sudah tidak diizinkan sehingga BKM tidak dapat memberikan bantuan pengadaan untuk pengembangan pelatihan. Di samping itu, sejak setahun terakhir terdapat persyaratan untuk peminjaman modal usaha hanya diperuntukan bagi masyarakat yang telah memiliki usaha untuk menghindari keterlambatan pengembalian dana bergulir.

Gambar 1. Relling Pengaman Pinggir Sungai danKegiatan Pelatihan Masyarakat (dari kiri ke kanan)

ADB

Pada Triwulan IV Tahun 2014, terdapat 14 kegiatan dengan 17 *Loan Agreement*(proyek ICWRMIP terdiri dari 2 *Loan Agreement* (2500-INO dan 2501-INO), *Metropolitan Sanitation Management Investment Project* terdiri dari 2 *Loan Agreement*(3123-INO dan 8280-INO), dan *Java-Bali 500 Kilovolt Power Transmission Crossing* terdiri dari 2 *Loan Agreement*(3083-INO dan 8276-INO)) yang didanai oleh pinjaman dari *Asian Development Bank* (ADB) dengan total pinjaman sebesar USD 1.214,67 juta. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan oleh tujuh Kementerian/Lembaga seperti yang diilustrasikan melalui gambar berikut ini:

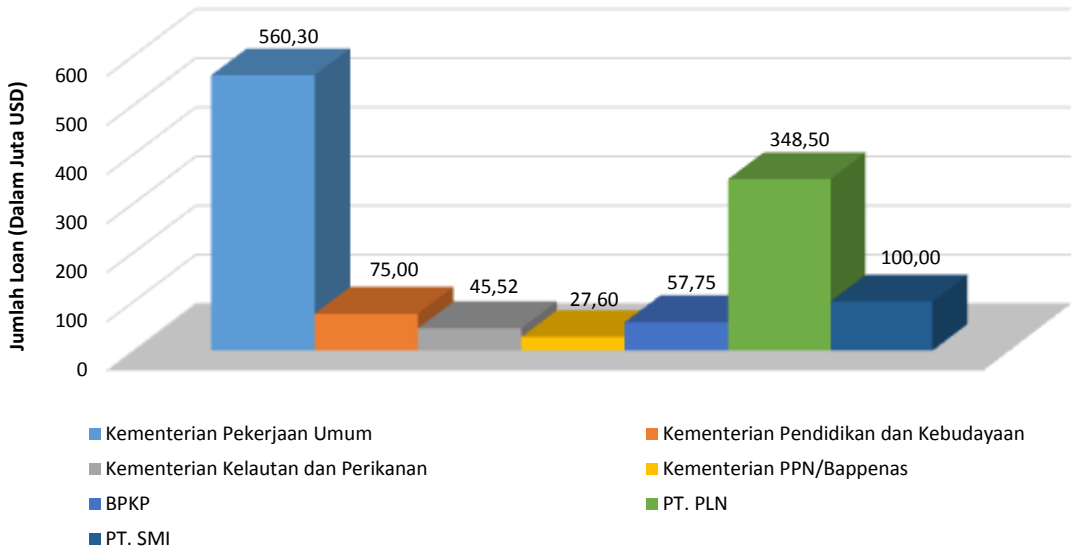

Gambar 2.3 Jumlah Pinjaman Kegiatan ADB pada Triwulan IV TA 2014 Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab
Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan IV Tahun 2014 (diolah)

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2014, jumlah kegiatan yang dibiayai pinjaman ADB paling banyak dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang mencapai USD 560,3 juta untuk 6 kegiatan, yang mencakup pengelolaan sumber daya air terpadu di wilayah sungai Citarum, pembangunan infrastruktur jalan untuk medukung konektivitas serta dukungan terhadap ketersediaan air serta infrastruktur dan pelayanan perkotaan lainnya. Sementara itu, kegiatan yang dibiayai dengan pinjaman ADB terbesar kedua merupakan penerusan pinjaman yang dilaksanakan oleh PT. PLN untuk pembangunan sektor energi dengan total pinjaman sebesar USD 348,5 juta yang dilaksanakan melalui 3 kegiatan.

Jika dilihat berdasarkan sektor, kegiatan yang banyak didanai melalui pinjaman ADB adalah di sektor energi dengan jumlah pinjaman sebesar USD 348,5 juta yang dilaksanakan oleh PT. PLN (Persero). Untuk pembagian kegiatan yang didanai oleh pinjaman ADB berdasarkan sektor kegiatan dapat diilustrasikan melalui gambar berikut:

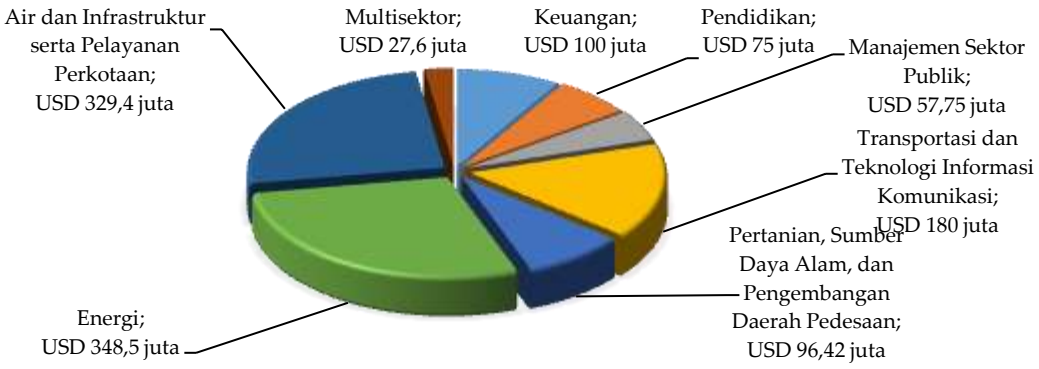

Gambar 2.4 Jumlah Pinjaman Kegiatan ADB pada Triwulan IV TA 2014 Berdasarkan Sektor Kegiatan

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan IV Tahun 2014 (diolah)

Proyek Baru dan Proyek Tutup

Pada Triwulan IV TA 2014, tidak ada kegiatan yang baru efektif. Namun, ada kegiatan yang tutup pada triwulan ini, yaitu kegiatan *Indonesia Infrastructure Finance Facility Company* (IIFF) dengan nomor *loan* 2516-INO. Kegiatan *Indonesia Infrastructure Finance Facility Company* (IIFF) ini dilaksanakan oleh PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI) dan mulai efektif pada tanggal 25 April 2011 serta telah tutup tepat waktu pada 31 Desember 2014. Kegiatan ini menggunakan dana pinjaman dari ADB sebesar USD 100 juta dan sampai akhir masa laku pinjaman, kegiatan ini dapat menyerap dana sebesar USD 99,48 juta. Pada akhir masa laku pinjaman, kegiatan *IIFF Company* telah melakukan pembatalan dana pinjaman (*final cancellation*) sebesar USD 0,52 juta untuk dana yang tidak terserap. Secara resmi, *final cancellation* ini ditandai dengan terbitnya surat dari Kementerian Keuangan Nomor S-20/PU/2015 pada tanggal 13 Januari 2015.

Realisasi Penyerapan Pinjaman dan Pencapaian Indikator Kinerja

Rekapitulasi pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh pinjaman ADB berdasarkan instansi penanggung jawab dapat dilihat di tabel di bawah ini:

Tabel 2.5 Realisasi Penyerapan Pinjaman ADB Menurut Instansi Penanggung Jawab Triwulan IV TA 2014

(Dalam Juta USD)

No.	Instansi Penanggung Jawab	Jumlah Proyek	Jumlah Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan IV TA 2014		Pinjaman Belum Ditarik	Penyerapan TA 2014		
				Nilai	%		Target	Realisasi	%
Dilaksanakan oleh K/L		**10**	**766,17**	**197,21**	**25,74**	**568,97**	**134,67**	**65,44**	**48,59**
1	Kemen PU-Pera	6	560,30	160,47	28,64	399,83	90,63	52,21	57,61
2	Kemendikbud	1	75,00	6,51	8,68	68,49	24,01	1,51	6,30
3	Kemen KP	1	45,52	1,46	3,21	44,06	1,97	1,46	74,11
4	BPKP	1	57,75	8,61	14,91	49,14	13,63	6,71	49,19
5	Bappenas	1	27,60	20,16	73,03	7,45	4,43	3,55	80,05
Diteruspinjamkan (SLA)		**4**	**448,50**	**142,97**	**31,88**	**305,53**	**30,52**	**30,12**	**98,69**
6	PT PLN	3	348,50	43,49	12,48	305,01	25,12	25,24	100,49
7	PT SMI	1	100,00	99,48	99.48	0,52	5,40	4,88	90,31
Total		**14**	**1.214,67**	**340,18**	**28,01**	**874,50**	**165,19**	**95,56**	**57,85**

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan IV Tahun 2014 (diolah)

Penyerapan kumulatif sampai dengan bulan Desember 2014 mencapai USD 340,18 juta atau 28,01% dari total nilai pinjaman kegiatan (USD 1.214,67 juta). Penyerapan sampai dengan Triwulan IV TA 2014 mencapai 57,85% dari target penyerapan dana pinjaman pada TA 2014 (USD 165,19 juta).

Pada umumnya, kegiatan-kegiatan yang didanai oleh pinjaman dari ADB berjalan dengan baik. Namun demikian, terdapat indikasi untuk dua kegiatan memerlukan perpanjangan masa efektif *loan* karena beberapa komponen kegiatan mengalami keterlambatan dan penyelesaiannya memerlukan waktu yang diperkirakan akan melebihi tanggal berakhirnya masa efektif *loan*. Dua kegiatan yang memerlukan perpanjangan tersebut adalah *Regional Road Development Project* (RRDP) dan *Metropolitan Sanitation Management and Health Project* (MSMHP).

Isu lain yang ditemui dari kegiatan-kegiatan yang didanai oleh pinjaman dari ADB adalah adanya usulan pemotongan alokasi dana perjalanan dinas dan pertemuan/rapat kegiatan di luar kantor, baik dari porsi *loan* ataupun rupiah murni. Sementara itu, beberapa kegiatan, dengan memperhatikan sifat dari pelaksanaan kegiatan tersebut terdapat komponen kegiatan *monitoring* dan/atau koordinasi antara satuan kerja Pusat dengan pelaksana kegiatan di Daerah. Terhadap jenis kegiatan ini masih memerlukan komponen perjalanan dinas dan pelaksanaan pembahasan kegiatan dengan kebutuhan ruangan untuk jumlah peserta yang tidak dimungkinkan dilaksanakan di ruangan kantor. Dengan adanya rencana pemotongan dana tersebut, dimungkinkan adanya sejumlah kegiatan yang tidak dapat dicapai sesuai target, demikian juga dengan alokasi dana untuk komponen kegiatan tersebut tidak dapat diserap sesuai dengan rencana yang telah ditargetkan di tahun 2014. Salah satu kegiatan yang terkena dampak kebijakan ini adalah kegiatan *Polytechnic Education Development Project*.

***Progress Variant* Proyek Pinjaman ADB ≤ -30**

Berdasarkan hasil pemantauan sampai dengan triwulan IV 2014 diketahui terdapat 4 proyek pinjaman ADB yang berada pada kategori *at risk* (PV ≤ -30). Proyek pinjaman ADB yang masuk kategori *at risk* tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6 Perbandingan Nilai PV Kegiatan Pinjaman ADB dengan Kinerja Penyerapan Rendah (PV ≤-30,00) padaTriwulan I, Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV TA 2014

No	Nomor Loan	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Tutup	TW I 2014	TW II 2014	TW III 2014	TW IV 2014
1	2500-INO	*Integrated Citarum Water Resources Management*	03/06/2009	31/05/2016	-63,50	-40,96	-58,97	-55,96
2	2817-INO	*Regional Road Develoment Project*	31/07/2012	30/08/2016	-22,62	-28,51	-45,20	-47,17
3	2654-INO	*Metropolitan Sanitation Management Health Project*	22/11/2010	30/06/2015	-12,46	-13,58	-32,91	-31,30
4	2619-INO	*Java-Bali Electricity Distribution Performance Improvement Project*	25/04/2011	31/10/2014	-61,56	-59,71	-50,06	-29,51

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan IV Tahun 2014 (diolah)

- **Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**
  - ***Integrated Citarum Water Resources Management and Investment Program* (2500-INO & 2501-INO)**

    Realisasi Penyerapan Dana

    Hingga Triwulan IV TA 2014, kegiatan *Integrated Citarum Water Resources Management and Investment Program* (ICWRMIP) dengan nomor *loan* 2500-INO telah melakukan penyerapan sebesar USD 4,76 juta (23,80% dari total pinjaman dengan nomor *loan*tersebut) dan telah melakukan penyerapan sebesar USD 16,23 juta (52,51% dari total nilai pinjaman) untuk nomor *loan* 2501-INO. Penyerapan untuk nomor *loan* 2500-INO yang dilakukan di TA 2014 sebesar USD 1,32 juta (59,37% dari target penyerapan TA 2014 sebesar USD 2,23 juta) sedangkan nomor *loan* 2501-INO telah melakukan penyerapan sebesar USD 1,94 juta (111,44% dari target penyerapan TA 2014 sebesar USD 1,74 juta). Nilai *progress variant* untuk nomor *loan* 2500-INO adalah -55,96, artinya kinerja nomor *loan* tersebut mengalami *serious delay*. Sedangkan nilai *progress variant* untuk nomor *loan*2501-INO adalah -27,25, artinya kinerja nomor *loan* tersebut mengalami sedikit kendala dan keterlambatan penyerapan.

    Rencana penarikan pada tahun 2015 yang telah tercantum di DIPA 2015 adalah sekitar Rp 120 milyar untuk nomor *loan* 2500-INO dan sekitar Rp119 milyar untuk nomor *loan* 2501-INO.

    Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

    Proses pembebasan lahan untuk kegiatan ini telah dapat dilaksanakan dengan baik. Dari 1.086 rumah terdampak kegiatan yang telah terdaftar di dokumen *resettlement plan*, masih tersisa 45 rumah yang belum mengambil dana kompensasi walaupun sudah ada sosialisasi terkait pengambilan dana kompensasi. Dana kompensasi untuk 45 rumah tersebut akan dititipkan di desa terkait. Masyarakat yang sudah menerima dana kompensasi tetapi masih menempati lahan yang akan menjadi tempat kegiatan proyek akan dibantu proses perpindahannya oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Capaian lainnya dari kegiatan ini adalah dari 31 kelompok yang ada, 15 kelompok sudah dilatih dan diberi pembekalan untuk *livelihoods restoration*. Pekerjaan fisik telah dikerjakan sampai 25% dari kedua nomor *loan* yang ada dan sejauh ini, kendala administratif tidak lagi terjadi karena perizinan dan *resettlement plan* sudah selesai. Pekerjaan fisik diperkirakan dapat diselesaikan pada bulan Januari atau Februari 2016.

    Terdapat tiga komponen kegiatan yang masih dilaksanakan di Kementerian/Lembaga terkait, yaitu di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum. Kegiatan ini diperkirakan akan memiliki sisa dana pinjaman yang dihasilkan oleh selisih kurs. BBWS Citarum mengusulkan pemanfaatan sisa pinjaman ini untuk pembiayaan desain Cikarang dan Tarum Barat sebagai sebuah studi atau kajian persiapan proyek lanjutan dari ICWRMIP ini. Terhadap usulan tersebut, pihak BBWS Citarum diminta fokus untuk penyelesaian kegiatan dan rencana usulan penggunaan sisa dana pinjaman tersebut dapat dipertimbangkan setelah ada *review/progress* dari penyelesaian kegiatan fisik tersebut.

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan, di antaranya terdapat 37 rumah yang melakukan klaim baru dari daftar nominatif yang telah divalidasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi. Untuk saat ini, masih menunggu keputusan resmi Pemerintah Daerah. Terkait dengan permasalahan ini, jika Pemerintah Daerah menyetujui klaim ke-37 rumah tersebut dan memasukkannya ke dalam daftar nominatif, PIU dan Pemerintah Daerah siap menyediakan alokasi untuk dana kompensasi atas klaim ke-37 rumah itu. Hal ini dilakukan dengan harapan tidak menggangu kegiatan pekerjaan fisik di daerah terkait karena pekerjaan fisik akan tetap dilakukan mengingat dokumen *civil working zone* (CWZ) sudah dikeluarkan oleh ADB.

Untuk kegiatan yang didanai melalui hibah 0216-INO dari ADB yang dilaksanakan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu "*Citarum Watershed Management and Biodiversity Project* (CWMBP)", saat ini dalam proses pengusulan perpanjangan masa tutup menjadi sama dengan masa tutup ICWRMIP, yaitu sampai dengan 31 Maret 2016, sesuai dengan pelaksanaan kegiatan utama (ICWRMIP) yang dibiayai melalui sumber pinjaman.

- ***Regional Road Development Project* (2817-INO)**

Realisasi Penyerapan Dana

Hingga Triwulan IV TA 2014, kegiatan *Regional Road Development Project* (RRDP) dengan nomor *loan* 2817-INO telah melakukan penyerapan sebesar USD 21,69 juta (12,05% dari total pinjaman dengan nomor *loan* tersebut). Penyerapan untuk nomor *loan* 2817-INO yang dilakukan di TA 2014 sebesar USD 15,69 juta (30,83% dari target penyerapan TA 2014 sebesar USD 50,9 juta). Nilai *progress variant* untuk nomor *Loan* 2817-INO adalah -47,17, artinya kinerja nomor *loan* tersebut mengalami *serious delay*.

Penyerapan kegiatan ini masih rendah. Saat ini telah dilakukan *re-tender* paket sebesar Rp 0,5 triliun, dan baru ditandatangani pada akhir tahun 2014 dengan harapan akan terjadi penarikan dana dalam jumlah besar di tahun 2015.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Sampai akhir Triwulan IV Tahun 2014, kegiatan *Regional Road Development Project* (RRDP) telah menyelesaikan proses kontrak pekerjaan sipil, termasuk kontrak yang mengalami *re-tender*.

Paket fisik yang dibiayai oleh dana pinjaman dari ADB di dalam kegiatan sudah terkontrak semuanya dan dalam proses *approval* dari ADB. Semua paket kegiatan, kecuali paket di Jawa Timur, sudah berjalan dengan baik. Paket di Jawa Timur masih mengalami keterlambatan karena ada indikasi perubahan nilai kontrak hampir 20% lebih tinggi dari kontrak sebelumnya. Dengan adanya hal ini, proses addendum kedua akan tertunda pelaksanaannya.

Pekerjaan fisik di daerah Kalimantan Utara menemui isu terkait dengan dokumen *Land Acquisition and Resettlement Action Plan* (LARAP). Di dalam dokumen LARAP, proses penggantian bangunan dan tanaman dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Namun, dalam perkembangan terjadi perubahan, seluruh masyarakat yang terkait dengan

pembebasan lahan untuk pembangunan jalan menolak ganti rugi dan bersedia memberikan lahan mereka untuk kegiatan RRDP.

Dalam rangka mendukung RPJMN 2015, kegiatan RRDP di daerah perbatasan di Kalimantan diusulkan untuk dibuat 4 *line*, untuk pengembangan daerah perbatasan, dengan masing-masing diperlukan lebar jalan sekitar 4,5 meter. Untuk mendukung rencana usulan tersebut, tim pelaksana kegiatan telah melakukan pengukuran kembali, termasuk di Entikong, Badau, Aru, dan Sinar Tanjung, dan diperoleh beberapa skenario pengusulan pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan ini, termasuk pembiayaan melalui APBN jika tidak bisa dilaksanakan melalui kegiatan RRDP.

Terkait dengan upah pekerja, perlu diperhatikan mengenai permasalahan yang disebabkan oleh kurangnya pengawasan *executing agency* sehingga sub-kontraktor memperkerjakan orang dengan upah di bawah UMR, yang berpotensi menjadi isu/permasalahan dikemudian hari.

Untuk menindaklanjuti beberapa isu/permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini, direncanakan akan diusulkan perpanjangan waktu pelaksanaan selama 22 bulan, untuk penyelesaian pekerjaan di Jawa Timur dan beberapa pekerjaan tambahan.

- ***Metropolitan Sanitation Management and Health Project* (2654-INO)**

Realisasi Penyerapan Dana

Hingga Triwulan IV Tahun 2014, kegiatan *Metropolitan Sanitation Management and Health Project* (MSMHP) dengan nomor *loan* 2654-INO telah melakukan penyerapan sebesar USD 20,28 juta (57,93% dari total pinjaman dengan nomor *loan* tersebut). Penyerapan untuk nomor *loan* 2654-INO yang dilakukan di TA 2014 sebesar USD 4,96 juta (115,10% dari target penyerapan TA 2014 sebesar USD 4,3 juta). Nilai *progress variant* untuk nomor *loan* 2654-INO adalah -31,30, artinya kinerja nomor *loan* tersebut mengalami *serious delay*.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan MSMHP ini dilaksanakan di Medan dan Yogyakarta. Pelaksanaan kegiatan di Yogyakarta telah selesai 100%, baik dari segi pekerjaan fisik maupun keuangan. Di Medan, paket 1 (*Sewerage System Medan – WWTP*) dan paket 3 (*Sewerage System Medan – Expansion Zone 9*) telah selesai 100%, paket 2 (*Sewerage System Medan – Optimization Including Decentralized Waste Water Treatment Plants for Twin Blocks in Medan*) telah dilaksanakan 91% dan diperkirakan dapat diselesaikan pada bulan Maret 2015, paket 4 (*Sewerage System Medan – Expansion Zone 12*) telah dilaksanakan 74,19%, dan paket 5 (*Sewerage System Medan – Expansion Zone 10 & 11*) telah dilaksanakan 53,24%.

Pengerjaan kegiatan di Medan, mengalami kendala, diantaranya untuk paket 2, yaitu belum tersedianya studi dampak lingkungan (AMDAL) untuk IPAL Cemara *existing*, yang diperkirakan akan selesai di Desember 2014, mengalami penundaan yang diperkirakan akan selesai pada bulan Februari 2015. Sumber pendanaan Pengerjaan AMDAL dilakukan melalui dana PDAM, yang telah disesuaikan dengan penyusunan AMDAL IPAL *existing* yang diperkirakan akan selesai pada bulan Februari 2015.

Sedangkan dokumen AMDAL untuk optimalisasi IPAL akan disusun secara paralel dalam waktu bersamaan.

Untuk pengerjaan Paket 4 dan 5, kendala yang dihadapi adalah terkait dengan kondisi tanah yang berpasir dan muka air yang tinggi sehingga menyebabkan longsor. Kondisi ini tidak sesuai dengan desain saat perencanaan, karena tidak tepat dalam mengambil *sample* dalam proses penyusunan desain perencanaannya. Selain itu, ada usulan relokasi rumah pompa yang berakibat pada berubahnya satuan biaya kegiatan. Terhadap kondisi ini, telah diusulkan perbaikan metode kerja melalui *steel sheet pile* untuk galian terbuka dan metode *jacking* dengan *slurry*.

Dengan masih terdapatnya beberapa paket kegiatan yang masih jauh dari penyelesaiannya, pihak *executing agency* menyampaikan adanya kemungkinan untuk rencana usulan perpanjangan *loan*. Terhadap usulan ini, perlu diperhatikan mengenai justifikasi yang disampaikan dalam *explanatory note* sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan rencana usulan perpanjangan tersebut.

Dari beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini, dapat dijadikan sebagai pembelajaran, dan sebaiknya menjadi catatan untuk dicantumkan di dalam *Project Completion Report* (PCR), terutama dalam hal perencanaan. Dokumen AMDAL dan *Detail Engineering Design* kegiatan ini dinilai tidak mempertimbangkan kondisi lapangan dengan baik.

- ***Urban Sanitation and Rural Infrastructure Support to PNPM* (2768-INO)**

Realisasi Penyerapan Dana

Hingga Triwulan IV Tahun 2014, kegiatan *Urban Sanitation and Rural Infrastructure Support to PNPM* (USRI) dengan nomor *loan* 2768-INO telah melakukan penyerapan sebesar USD 97,52 juta (97,52% dari total pinjaman dengan nomor *loan* tersebut). Penyerapan untuk nomor *loan* 2768-INO yang dilakukan di TA 2014 sebesar USD 28,30 juta (128,75% dari target penyerapan TA 2014 sebesar USD 21,98 juta). Nilai *progress variant* untuk nomor *loan* 2768-INO adalah 11,20, artinya kinerja nomor *loan* tersebut sangat baik dan bahkan lebih cepat dari perencanaan sebelumnya.

Pada tahun 2015, kegiatan ini mengalokasikan dana sekitar 9 milyar rupiah. Kegiatan ini juga memiliki *loan saving* sekitar USD 4,5 juta per 31 Desember 2014 dan diperkirakan jumlah tersebut hanya akan digunakan sekitar USD 900 ribu untuk perpanjangan kontrak *National Project Management Consultant* (NPMC) dan penambahan tenaga fasilitator lapangan di Manado sekitar Rp 3,0 milyar.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang berjalan dengan baik dan tidak menemui isu perpanjangan *loan*. Namun, kegiatan ini perlu menggarisbawahi beberapa hal, terutama masalah pelaporan karena pelaporan kegiatan ini dinilai kurang tepat waktu dan kualitas isi laporan pun masih perlu diperbaiki. Selain itu, dana pinjaman yang tersisa (yang tidak digunakan) perlu segera dilakukan *partial cancellation* untuk menghindari *commitment fee*.

Selain isu *partial cancellation* dan pelaporan, kegiatan ini menemui isu standar dari infrastruktur yang telah dibangun. Dari keseluruhan infrastruktur yang telah dibangun, baru 27% yang memenuhi standar. Namun, *executing agency* belum mengetahui penyebab tidak terpenuhinya standar ini dan akan menindaklanjutinya. Catatan dari BPK juga perlu diperhatikan mengingat status dari BPK untuk USRI mengalami penurunan, dari awalnya Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), lalu menjadi Wajar dengan Pengecualian pada tahun 2013, dan pada saat ini, statusnya masih belum jelas.

- ***Metropolitan Sanitation Management Investment Project* (3123-INO & 8280-INO)**

Realisasi Penyerapan Dana

Hingga Triwulan IV Tahun 2014, kegiatan *Metropolitan Sanitation Management Investment Project* (MSMIP) dengan nomor *loan* 3123-INO dan 8280-INO belum melakukan penyerapan mengingat kegiatan ini baru efektif pada tanggal 9 Juli 2014. Nilai *progress variant* untuk nomor *loan* 3123-INO dan 8280-INO adalah -7,39, artinya kinerja nomor *loan* tersebut baik dan masih tepat waktu.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan MSMIP masih belum didelegasikan dari *headquarter* ADB di Manila kepada *Indonesia Resident Mission* ADB. Isu lain yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan MSMIP ini adalah administrasi terkait dana pinjaman dari *ASEAN Infrastructure Fund* (AIF) yang juga diadministrasikan melalui ADB karena sampai saat ini, masih belum ada kejelasan administrasi dari dana pinjaman AIF ini. *Executing agency* akan menindaklanjuti hal ini dengan ADB mengingat administrasi dana pinjaman AIF ini dilakukan oleh ADB. Selain itu, *inception mission* dari kegiatan ini belum dapat memberikan informasi yang signifikan karena tidak melibatkan Bappenas dan Kementerian Keuangan.

- ***Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2* (3122-INO)**

Realisasi Penyerapan Dana

Hingga Triwulan IV Tahun 2014, kegiatan *Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2* (NUSP-2) dengan nomor *loan* 3122-INO belum melakukan penyerapan mengingat kegiatan ini baru efektif pada tanggal 17 Juli 2014. Nilai *progress variant* untuk nomor *loan* 3123-INO adalah -1,57, artinya kinerja nomor *loan* tersebut baik dan masih tepat waktu.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan NUSP-2 ini sudah melakukan *inception mission* pada tahun 2014. Dari *inception mission* tersebut, ada beberapa pelaksanaan kegiatan yang mengalami keterlambatan, termasuk mengenai administrasi ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Keterlambatan NUSP 2 juga terjadi di penggunaan *e-procurement* dan konsultan baru dapat terkontrak pada bulan November 2014. Saat ini, kegiatan NUSP-2 sedang dalam proses revisi *short listing*. Kegiatan ini dimungkinkan akan mengalami perubahan *coverage* dari 300 kelurahan menjadi hanya 80 kelurahan agar kegiatan bisa lebih fokus

dan hasil yang dihasilkan bisa menjadi lebih signifikan. Namun hal ini tidak mengubah *loan agreement* karena di dokumen PAM tidak tercantum jumlah kelurahan penerima manfaat proyek.

Target pencapaian kegiatan pada tahun 2015 diperkirakan tidak akan tercapai karena adanya keterlambatan. Pekerjaan fisik yang akan dilakukan pada tahun 2015 pun hanya sedikit dan diperkirakan baru akan terkejar pada tahun 2016. Oleh karena itu, *executing agency* perlu menyesuaikan kembali target pencapaian agar menjadi lebih realistis.

- **Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**
  - ***Polytechnic Education Development Project* (2928-INO)**

Realisasi Penyerapan Dana

Hingga Triwulan IV Tahun 2014, kegiatan *Polytechnic Education Development Project* (PEDP) dengan nomor *loan* 2928-INO telah melakukan penyerapan sebesar USD 6,51 juta (8,68% dari total pinjaman dengan nomor *loan* tersebut). Penyerapan untuk nomor *loan* 2928-INO yang dilakukan di TA 2014 sebesar USD 1,51 juta (6,30% dari target penyerapan TA 2014 sebesar USD 24,01 juta). Nilai *progress variant* untuk nomor *loan* 2928-INO adalah -26,46, artinya kinerja nomor *loan* tersebut masih baik walaupun mengalami keterlambatan dan kendala.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Proses pengadaan kegiatan PEDP sudah selesai proses kontrak tetapi belum dibayarkan sehingga diperkirakan akan ada penarikan besar pada awal tahun 2015. Namun demikian, diperkirakan akan menemui kendala terkait luncuran alokasi yang memerlukan revisi DIPA sehingga dimungkinkan akan ada keterlambatan pembayaran.

Selain itu, dengan adanya surat edaran Menteri PAN-RB menenai pemotongan biaya perjalanan dinas, secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja kegiatan, karena adanya pemotongan alokasi untuk beberapa komponen kegiatan yang membutuhkan perjalanan dinas, baik dari porsi pinjaman maupun rupiah murni. Keadaan ini sudah didiskusikan secara internal dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti), namun belum dapat menetapkan adanya usulan untuk pengecualian terkait dengan surat edaran Menteri PAN-RB. Untuk solusi terhadap penyelesaian permasalahan ini, perlu dibicarakan lebih lanjut dalam pertemuan tersendiri karena akan melibatkan banyak kementerian/lembaga.

Target di tahun 2014 untuk komponen *curriculum development* belum dapat dicapai, meskipun demikian untuk *progress* pelaksanaannya telah mencapai 80% dari keseluruhan kegiatan. Dan saat ini masih menunggu validasi dokumen *curriculum development*.

- **Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)**
  - ***Coral Reef Rehabilitation and Management Program – Coral Triangle Initiative* (3094-INO)**

Realisasi Penyerapan Dana

Hingga Triwulan IV Tahun 2014, kegiatan *Coral Reef Rehabilitation and Management Program – Coral Triangle Initiative* (COREMAP-CTI) dengan nomor *loan* 3094-INO telah melakukan penyerapan sebesar USD 1,46 juta (3,21% dari total pinjaman dengan nomor *loan* tersebut). Penyerapan untuk nomor *loan* 3094-INO yang dilakukan di TA 2014 sebesar USD 1,46 juta (74,11% dari target penyerapan TA 2014 sebesar USD 1,97 juta). Nilai *progress variant* untuk nomor *loan* 3094-INO adalah -12,67, artinya kinerja nomor *loan* tersebut baik dan masih tepat waktu.

Kegiatan ini melakukan penyerapan yang cukup baik, terutama di satuan kerja di pusat. Namun, penyerapan beberapa satuan kerja di daerah masih rendah karena adanya beberapa kegiatan yang telah dijadwalkan akan menggunakan fasilitas diluar kantor pada bulan Desember 2014 harus dibatalkan, setelah adanya Surat Edaran Menteri PAN-RB mengenai larangan mengadakan rapat di hotel.

Selain itu, adanya revisi pencantuman nomor register di DIPA yang baru dapat terselesaikan pada 30 September 2014 menyebabkan kegiatan ini mengalami sedikit keterlambatan.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Tahun pertama pelaksanaan kegiatan ini diisi dengan pelaksanaan kegiatan administratif. Karena adanya revisi pencantuman nomor register di DIPA, meskipun pihak *executing agency* telah menghimbau seluruh satuan kerja di tingkat daerah untuk tetap melaksanakan proses lelang terlebih dahulu agar segera setelah revisi DIPA terbit, kontrak bisa langsung ditandatangani, namun masih ada beberapa kabupaten yang tidak melaksanakan hal tersebut. Keadaan ini menyebabkan kontrak tidak dapat ditandatangani segera setelah revisi DIPA terbit.

Capaian pada tahun pertama ini adalah untuk persiapan kegiatan, termasuk penyusunan pedoman umum kegiatan COREMAP-CTI, diantaranya: materi kelembagaan, program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pengadaan, serta *monitoring* dan evaluasi. Selain itu, *Project Management Office* (PMO) juga sudah melakukan bimbingan teknis mengenai pengadaan kepada seluruh satuan kerja kegiatan.

Komponen yang dilaksanakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), sebagai salah satu *Project Implementing Unit* (PIU), juga telah menerbitkan pedoman mengenai tata cara *monitoring* terumbu karang dan sosial ekonomi.

Isu lain dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah terkait dengan proses administrasi DIPA 2015 untuk alokasi kegiatan COREMAP-CTI yang juga mencakup Kabupaten Buton yang mengalami pemekaran menjadi: Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Tengah, dan Kabupaten Buton Selatan pada pertengahan tahun 2014. Selain hal

tersebut, permasalahan dalam hal ini adalah terkait dengan alokasi yang dicantumkan dalam dokumen *loan agreement* hanya tercantum untuk lokasi Kabupaten Buton saja.

- **Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)**
  - ***Strengthening Accountability Revitalization Project* (2927-INO)**

Realisasi Penyerapan Dana

Hingga Triwulan IV Tahun 2014, kegiatan *Strengthening Accountability Revitalization Project* (STAR) dengan nomor *loan* 2927-INO telah melakukan penyerapan sebesar USD 8,61 juta (14,91% dari total pinjaman dengan nomor *loan* tersebut). Penyerapan untuk nomor *loan* 2264-INO yang dilakukan di TA 2014 sebesar USD 6,71 juta (49,19% dari target penyerapan TA 2014 sebesar USD 13,63 juta). Nilai *progress variant* untuk nomor *loan* 2927-INO adalah -19,83, artinya kinerja nomor *loan* tersebut baik walaupun mengalami sedikit kendala dan keterlambatan.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Sampai dengan Desember 2014, jumlah mahasiswa yang mengikuti program *degree* berjumlah 1.357 orang atau 90,5% dari target tahun 2014 (1.500 orang). Kegiatan sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) atau JFA *Certification* juga sudah dilaksanakan dan diikuti oleh 1.024 peserta atau 106,67% dari target tahun 2014 (960 peserta). Kegiatan sertifikasi non-JFA telah mengumumkan calon peserta sertifikasi pada akhir Triwulan III Tahun 2014 dan pada akhir Triwulan IV Tahun 2014, kegiatan sertifikasi non-JFA telah diikuti oleh 116 peserta atau 107,41% dari target tahun 2014 (108 peserta). Kegiatan *Substance Technical Training* sudah diikuti oleh 814 orang atau 100,25% dari target (806 orang).

Pencairan dana untuk perguruan tinggi dan mahasiswa program *degree* masih mengalami keterlambatan karena lamanya finalisasi dokumen kontrak di beberapa perguruan tinggi serta adanya kesalahan proses pemasukan data di Kementerian Keuangan.

Paket pengadaan infrastruktur *State Accountability Management Information System* atau Sistem Informasi Manajemen Akuntabilitas (SIMA) melakukan *re-bidding* karena dari 19 peserta yang mengambil dokumen untuk tender, hanya 3 yang mengembalikan dan dari ketiga peserta tersebut, hanya ada satu yang memenuhi persyaratan. Pada dasarnya, pihak ADB tidak mempermasalahkan hal ini tetapi *executing agency* tetap memutuskan untuk melaksanakan *re-bidding*. Proses *re-bidding* telah berjalan dan sudah mendapatkan *approval* dari ADB sehingga pada akhir Desember 2014 atau awal Januari 2015 kegiatan ini sudah bisa dilaksanakan. Alokasi dana untuk pengadaan infrastruktur ini sudah dianggarkan di DIPA 2014 tetapi karena adanya isu ini, alokasi dana untuk kegiatan ini pada tahun 2015 akan disesuaikan kembali sesuai *work plan* yang telah dikirimkan *executing agency* ke Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.

Komponen pengadaan untuk *Project Management Consultant* (PMC) masih terkendala karena kontrak PMC sampai saat ini belum dapat ditandatangani walaupun proyek sudah berjalan selama 22 bulan. Hal ini disebabkan tidak adanya pejabat yang

berwenang dalam memberikan persetujuan pemenang *tender*, dalam hal ini adalah Kepala BPKP, yang saat ini belum ada gantinya (terjadi kekosongan jabatan). Untuk menindaklanjuti hal ini, *executing agency* akan berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengenai permasalahan penandatanganan kontrak serta berkoordinasi dengan ADB terkait dengan ketentuan yang berlaku di ADB mengenai hal ini. *Executing agency* juga akan mengusahakan agar pejabat pelaksana tugas Kepala BPKP dapat bertindak sebagai penandatangan kontrak.

- **Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**
  - ***Infrastructure Reform Sector Development* (2264-INO)**

Realisasi Penyerapan Dana

Hingga Triwulan IV Tahun 2014, kegiatan *Infrastructure Reform Sector Development* (IRSDP) dengan nomor *loan* 2264-INO telah melakukan penyerapan sebesar USD 20,16 juta (70,03% dari total pinjaman dengan nomor *loan* tersebut). Penyerapan untuk nomor *loan* 2264-INO yang dilakukan di TA 2014 sebesar USD 3,55 juta (80,05% dari target penyerapan TA 2014 sebesar USD 4,43 juta). Nilai *progress variant* untuk nomor *loan* 2264-INO adalah -15,98, artinya kegiatan ini masih berjalan dengan baik walaupun mengalami sedikit keterlambatan.

Penyerapan kegiatan ini masih belum memenuhi target penyerapan karena SP3 yang keluar dari Kementerian Keuangan baru sebagian dari *withdrawal application* yang diajukan (masih ada 16 SP3 yang belum keluar). Kalau seluruh SP3 telah terbit, penyerapan pada tahun 2014 bisa mencapai sekitar 87%.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan ini telah diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2015 dan perpanjangan ini bertujuan untuk menyelesaikan 7 transaksi *public-private partnership* (PPP) dan 4 transaksi baru PPP. Dari 7 transaksi PPP yang ada, satu transaksi, yaitu untuk proyek "*Jakarta Monorail*" telah berhenti karena Gubernur DKI Jakarta membatalkan proyek ini. Proyek "*Bandung Solid Waste to Energy (Unsolicited)*" masih menunggu keputusan dari Walikota Bandung terkait penandatanganan kontrak perjanjian kerja sama proyek ini. Transaksi proyek "*Gedebage Integrated Terminal*" yang juga berlokasi di Bandung sudah disetujui oleh Walikota Bandung tetapi *executing agency* dan ADB memutuskan untuk menunda proses transaksi proyek ini sampai kontrak perjanjian kerja sama proyek "*Bandung Waste to Energy (Unsolicited)*" telah ditandatangani oleh Walikota Bandung. Jika sampai akhir Desember 2014 hal ini tidak bisa direalisasikan, maka kedua proyek tersebut akan dianggap batal.

Proyek "*Consolidated Redevelopment Banda Aceh*" telah melaksanakan mobilisasi konsultan tahap dua setelah Walikota Banda Aceh menyetujui proyek ini untuk dilanjutkan ke tahap transaksi. Dokumen *Request for Proposal* (RfP) proyek ini juga telah dikirimkan ke *single bidder* (PT. Jababeka) pada tanggal 1 Desember 2014. Dokumen RfP ini sedang di-*review* oleh *bidder* dan setelah itu, *executing agency* dan *bidder* melaksanakan *pre-bid meeting* pada pertengahan Januari 2015. Pada akhir Triwulan IV Tahun 2014, penyerapan untuk komponen konsultan telah mencapai 100% dari nilai

kontrak. Oleh karena itu, konsultan proyek ini perlu menyampaikan *draft* Kontrak Addendum No. 5 pada awal Januari 2015 untuk melanjutkan proyek agar dapat memfinalkan RfP, evaluasi dokumen *tender*, proses negosiasi dengan *single prospective bidder*, serta *contract signing*. Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh dinilai berkomitmen tinggi dalam proses proyek ini tetapi calon investor masih mempertanyakan sisi keamanan sehingga calon investor masih menunda penandatanganan untuk konsultasi.

Dokumen final RfP proyek "*Batam Solid Waste Management*" telah diterbitkan pada tanggal 2 September 2014 dan pada awalnya, pemasukan dokumen penawaran dijadwalkan tutup pada tranggal 18 Desember 2014. Namun, tiga investor (penawar) untuk proyek "*Batam Solid Waste Management*" ini meminta perpanjangan waktu untuk pemasukan dokumen penawaran sampai dengan 31 Maret 2015. Perpanjangan tenggat waktu ini telah disetujui oleh *executing agency* dengan catatan bahwa tidak akan ada perpanjangan tenggat waktu lagi.

Executing agency telah menyelesaikan klarifikasi tentang *pre-financing bond* proyek "*Coal Railway Central Kalimantan*" pada 18 Desember 2014. Proses finalisasi negosiasi pun telah dilaksanakan dan menetapkan TP. Mega Guna – China Railway Group sebagai pemenang *tender*. Penawaran untuk proyek ini telah diperpanjang sampai Januari 2015 dan saat ini, proyek ini sedang menunggu *contract signing*.

Kontrak proyek "*Lamongan Water Supply*" masih tertunda akibat masih dilakukannya kajian sumber air baku alternatif serta kajian teknis lainnya. Kajian ini diperlukan karena Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki rencana pelebaran *flood channel* yang berdampak terhadap lokasi proyek "*Lamongan Water Supply*" tetapi jadwal konstruksi masih belum jelas. Hal ini akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sekaligus mendiskusikan hasil kajian sumber air baku.

- **PT. PLN**
  - ***Java-Bali Electricity Distribution Performance Improvement* (2619-INO)**

    Realisasi Penyerapan Dana

    Hingga Triwulan IV Tahun 2014, kegiatan *Java-Bali Electricity Distribution Performance Improvement* dengan nomor *loan* 2619-INO telah melakukan penyerapan sebesar USD 25,30 juta (50,61% dari total pinjaman dengan nomor *loan* tersebut). Penyerapan untuk nomor *loan* 2619-INO yang dilakukan di TA 2014 sebesar USD 7,06 juta (35,55% dari target penyerapan TA 2014 sebesar USD 19,85 juta). Nilai *progress variant* untuk nomor *Loan* 2619-INO adalah -29,51, artinya kinerja nomor *loan* tersebut masih baik walaupun mengalami keterlambatan dan kendala.

    Alokasi DIPA tahun 2015 untuk kegiatan ini masih terlalu kecil karena disusun dua tahun lalu dengan perkiraan bahwa semua kegiatan akan berjalan lancar. Namun mengingat kendala yang terjadi, alokasi DIPA tahun 2015 perlu ditambah dan hal ini akan dilakukan melalui revisi DIPA pada semester ke-1 tahun 2015.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan ini masih mengerjakan paket 6 di DKI Jakarta, yaitu paket *Supply and Installation of Distributed Material and Equipment for DKI Jakarta Region.* Pengerjaan paket ini telah berjalan 4% dan direncanakan akan selesai 50% pada bulan April 2015 dengan menggunakan porsi AFD terlebih dahulu, setelah itu, pengerjaannya dilanjutkan dengan menggunakan porsi ADB. Pada Triwulan IV Tahun 2014, paket 6 ini dalam proses amandemen untuk *front loading* dan dimungkinkan akan terkendala di dalam perijinan galian yang saat ini masih dalam proses.

Pengerjaan paket 7 dan 8 di Jawa Barat, mengalami perubahan dari *open cut* menjadi *boring*. Pengerjaan paket 7 dan 8 ini perlu perhatian di sisi kontraktornya karena *progress*-nya cukup mengkhawatirkan karena nilai kontrak yang terlalu besar. Selain itu, penanggung jawab paket 7 dan 8 tersebut belum terbiasa dalam menangani kontrak internasional sehingga administrasi kontrak menjadi belum optimal.

Pengerjaan paket 10 di Jawa Timur, yaitu paket *Supply and Installation of Distributed Material and Equipment for East Java Region* (LOT 1) dan *Supply and Installation of Distributed Material and Equipment for East Java Region* (LOT 2), telah mencapai 10% dan direncanakan akan selesai tepat waktu sebelum penutupan masa laku pinjaman pada 30 November 2015. Seperti paket 6, pengerjaan paket 10 ini akan menggunakan dana porsi AFD sampai bulan April 2015 (saat pengerjaan telah mencapai 50%) dan kemudian dilanjutkan dengan menggunakan dana porsi ADB.

Selain pengerjaan paket tersebut di atas, paket lainnya yang terdiri dari 5 paket suplai material dan 2 paket konstruksi telah selesai dikerjakan. Paket 11 di Bali telah selesai dikerjakan dan pada Triwulan IV Tahun 2014, paket 11 sedang dalam proses *canal quantity*.

- ***West Kalimantan Power Grid Strengthening Project* (3015-INO)**

Realisasi Penyerapan Dana

Hingga Triwulan IV Tahun 2014, kegiatan *West Kalimantan Power Grid Strengthening Project* dengan nomor *loan* 3015-INO telah melakukan penyerapan sebesar USD 18,19 juta (36,74% dari total pinjaman dengan nomor *loan* tersebut). Penyerapan untuk nomor *loan* 3015-INO yang dilakukan di TA 2014 sebesar USD 18,19 juta (345,18% dari target penyerapan TA 2014 sebesar USD 5,27 juta). Nilai *progress variant* untuk nomor *loan* 3015-INO adalah -3,89, artinya kinerja nomor *loan* tersebut baik dan masih tepat waktu.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Progress pelaksanaan paket 1 kegiatan ini cukup bagus dan diperkirakan dapat diselesaikan pada bulan Juni 2015. Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan paket 1 ini adalah tingginya harga yang ditentukan oleh masyarakat untuk kompensasi tanam tumbuh (*row*) sehingga pembebasan lahan di tiga lokasi masih terhambat. Namun, perizinan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah terselesaikan. Pelaksanaan paket 2 diperkirakan dapat diselesaikan pada bulan Mei atau Juni tahun 2015. Pendanaan untuk 150 KP di paket ini akan dibebankan ke paket 4 karena pendanaan APBN untuk paket 2 ini tidak dapat diterbitkan.

Kinerja kontraktor pelaksana paket 3 pada dua bulan terakhir di Triwulan IV Tahun 2014 menunjukkan perbaikan walaupun masih di bawah ekspektasi. Diperkirakan, pelaksanaan paket 3 belum dapat diselesaikan pada tahun 2015 karena kontraktor masih sulit untuk bisa mengakselerasi pelaksanaan kegiatan. Di sisi lain, paket 4 kegiatan ini telah terlaksana 40% dan diperkirakan bulan Juni 2015 bisa diselesaikan. Paket 4 juga memgalami penambahan *scope* untuk *jumper* ke Singkawang dan akan dievaluasi pada akhir bulan Januari 2015.

Proses *re-financing* retro aktif sudah mencapai USD 9,071 juta dan diharapkan dapat membantu pengerjaan kegiatan dengan baik. *Re-financing* ini digunakan untuk pembayaran *advance payment* dan sudah *settle* (tidak ada permasalahan). Selain itu, *re-financing* ini digunakan untuk penguatan di Sanggau dan Engkadau.

- ***Java-Bali 500 Kilovolt Power Transmission Crossing Project* (3083-INO & 8276-INO)**

Realisasi Penyerapan Dana

Hingga Triwulan IV Tahun 2014, kegiatan *Java-Bali 500 Kilovolt Power Transmission Crossing Project* dengan nomor *loan* 3083-INO dan 8276-INO belum melakukan penyerapan mengingat kegiatan ini baru efektif pada 29 September 2014. Nilai *progress variant* untuk nomor *loan* 3083-INO dan 8276-INO adalah -5,09, artinya kinerja nomor *loan* tersebut masih baik dan tepat waktu.

Alokasi DIPA tahun 2015 untuk kegiatan ini diperkirakan trelalu besar dan tidak akan terserap melebihi 10% karena nilai *disbursement*-nya akan kecil. Oleh karena itu, perlu ada pembahasan lebih lanjut mengenai target *disbursement* pada tahun 2015.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan ini baru efektif pada tanggal 29 September 2014 dan saat ini, masih dalam tahap *procurement*. Pendanaan porsi ADB akan digunakan untuk mendanai proyek dari Paiton sampai dengan Watudodol (*substation* sebelum menyeberang selat Bali). Sebagian pendanaan untuk *crossing* atau penyeberangan Selat Bali menggunakan dana *direct lending* dan sebagian lainnya menggunakan anggaran PLN. Dokumen AMDAL tidak perlu ada perubahan karena sudah sesuai dengan lokasi yang direncanakan, tidak ada perubahan lokasi. Untuk pelaskanaan kegiatan ini akan dilakukan oleh Unit Pelaksana Konstruksi (UPK) di bawah Unit Induk Pembangunan 7.

- **PT. Sarana Multi Infrastruktur, Persero**
  - ***Indonesia Infrastructure Finance Facility Company* (2516-INO)**

Realisasi Penyerapan Dana

Hingga Triwulan IV Tahun 2014, kegiatan *Indonesia Infrastructure Finance Facility Company* (IIFF) dengan nomor *loan* 2516-INO melakukan penyerapan sebesar USD 99.481.861 (99,48% dari jumlah nilai pinjaman proyek tersebut). Penyerapan untuk nomor *loan* 2516-INO yang dilakukan di TA 2014 sebesar USD 4,88 juta (90,31% dari target penyerapan TA 2014 sebesar USD 5,40 juta). *Executing agency* telah melakukan *final cancellation* untuk sisa dana pinjaman pada masa akhir proyek. Nilai *progress*

variant untuk nomor *loan* 2516-INO adalah -0,52, artinya kinerja nomor *loan* tersebut baik dan tepat waktu.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Masa efektif kegiatan ini telah berakhir pada 31 Desember 2014 dan surat resmi mengenai *financial cancellation and closing* telah dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan dan ADB pada tanggal 13 Januari 2015. Isu terakhir yang dialami oleh kegiatan ini adalah DIPA revisi yang baru diperoleh pada tanggal 5 September 2015 serta penarikan SLA terakhir sebesar USD 4,877 juta baru diterima di rekening *executing agency* pada tanggal 25 November 2015. Sisa *loan* berjumlah USD 518.139 berasal dari selisih nilai kurs IDR dengan USD dan sisa *loan* tersebut telah dibatalkan sehingga total pinjaman pada akhir kegiatan berjumlah USD 99.481.861. Setelah berakhirnya kegiatan, *executing agency* diharapkan dapat segera membuat dokumen *Project Completion Report* (PCR).

IDB

Proyek pinjaman luar negeri dari *Islamic Development Bank (*IDB) dibiayai dengan menggunakan skema syariah/*Islamic Finance,* melalui beberapa model pembiayaan yang berbeda berdasar prinsip dan jenis kegiatan yang dibiayai. Model pembiayaan tersebut di antaranya adalah:

- *Istisna'a,* untuk kegiatan pembangunan infrastruktur/bangunan;
- *Installment Sale,* untuk kegiatan pengadaan/pembelian barang;
- *Leasing,* untuk sewa beli peralatan;
- *Loan,* yang digunakan untuk pembiayaan *capacity building* (*training/soft skill* program);
- *Mudarabah* dan *Equity Participation* berupa penyertaan modal, biasanya digunakan untuk sektor bisnis/swasta yang menghasilkan keuntungan.

Secara umum, pembiayaan dari IDB dilakukan atas prinsip jual beli dan atau sewa beli. Pihak IDB bertindak sebagai penyedia output proyek atau barang yang dibeli oleh pemerintah dengan harga yang telah disepakati bersama, dan dibayar melalui angsuran dalam jangka menengah/panjang.

Dengan mekanisme ini, pembiayaan dilakukan tidak berdasar *interest* tetapi berdasar *sale price* dari harga di masa depan, yang telah disepakati bersama antara pemerintah Indonesia dan IDB saat pembahasan *financing agreement*. Dalam proses penyediaan output proyek atau barang tersebut, pihak IDB menunjuk pihak *Executing Agency* sebagai agen yang akan melaksanakan proses *tender*/lelang atas output proyek atau barang yang akan dibangun/dibeli.

Pada Triwulan IV Tahun 2014, ada 17 proyek dengan 26 *financing agreement* yang didanai oleh pinjaman dari IDB dengan total pinjaman sebesar USD 1.041,89 juta. Proyek-proyek tersebut dilaksanakan oleh enam Kementerian/Lembaga seperti yang digambarkan sebagai berikut:

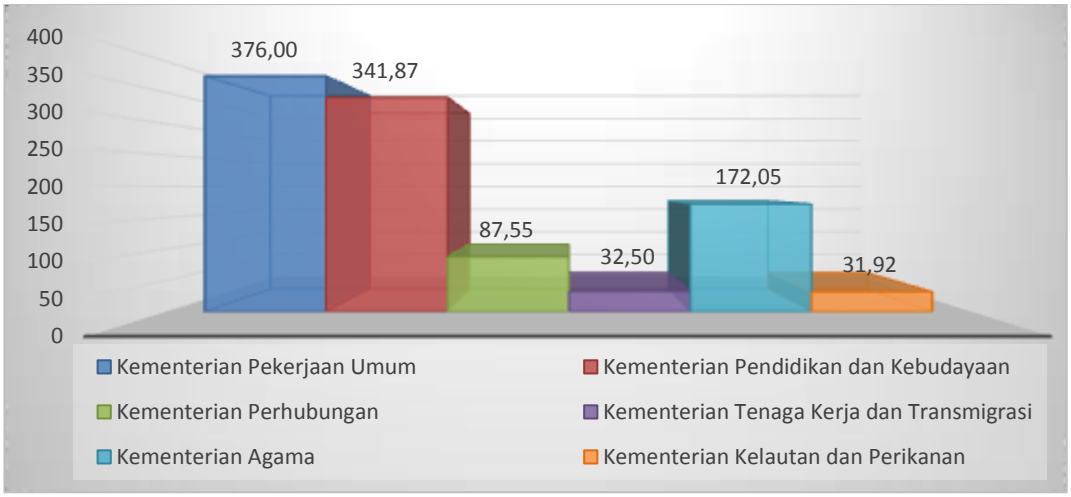

Gambar 2.5 Jumlah Pinjaman Proyek IDB pada Triwulan IV TA 2014 Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan IV Tahun 2014 (diolah)

Sampai dengan Triwulan IV TA 2014, proyek IDB paling banyak ada di sektor pendidikan tinggi dengan jumlah 6 proyek yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 4 proyek dan oleh Kementerian Agama sebanyak 4 proyek. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki proyek dengan jumlah pinjaman terbanyak, yaitu USD 376 juta, yang terdiri dari 4 proyek.

Jika dibagi menjadi sektor-sektor, pinjaman IDB dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.6 Jumlah Pinjaman Proyek IDB pada Triwulan IV TA 2014 Berdasarkan Sektor Kegiatan

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan IV Tahun 2014 (diolah)

Realisasi Penyerapan Pinjaman dan Pencapaian Indikator Kinerja

Rekapitulasi pelaksanaan pinjaman IDB berdasarkan instansi penanggung jawab dapat dilihat di tabel berikut ini:

Tabel 2.7 Penyerapan Pinjaman IDB Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab pada Triwulan IV TA 2014

(Dalam Juta USD)

No	Instansi Penanggung Jawab	Jumlah Proyek	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan IV TA 2014		Pinjaman Belum Ditarik	Penyerapan TA 2014		
				Nilai	%		Target	Realisasi	%
1	Kemen PU-Pera	4	376,00	86,07	22,89	289,93	89,45	45,25	50,59
2	Kemendikbud	6	341,87	9,96	2,91	331,91	81,76	6,35	7,77
3	Kemenhub	1	87,55	0,80	0,91	86,75	2,62	0,32	12,07
4	Kemenag	4	172,05	13,28	7,72	158,77	45,77	12,58	27,48
5	Kemen KP	1	31,92	5,77	18,08	26,15	6,53	0,33	5,05
6	Kemenakertrans	1	32,50	0,03	0,08	32,47	0,38	0,03	6,60
Total		**17**	**1.041,89**	**115,91**	**11,13**	**925,98**	**226,52**	**64,85**	**28,63**

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan IV Tahun 2014 (diolah)

Penyerapan kumulatif sampai dengan bulan Desember 2014 mencapai USD 115,91 juta atau 11,13% dari total nilai proyek yang didanai oleh pinjaman IDB. Sedangkan penyerapan untuk TA 2014, sampai dengan akhir Triwulan IV (Desember) 2014 hanya mencapai 28,63% dari target TA 2014 sebesar USD 226,52 juta.

- **Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**

  - **PNPM ICDD *Phase* II (IND-0147)**

    Proyek PNPM ICDD *Phase* II merupakan proyek pembangunan kapasitas komunitas dan masyarakat miskin di perkotaan di 14 provinsi, yaitu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat. Proyek ini terdiri dari 4 *financing agreement* dengan nomor IND-0147, IND-0148, IND-0149, dan IND-0150. Seluruh pelaksanaan proyek telah selesai pada Desember 2014.

    Realisasi Penyerapan Dana

    Hingga Triwulan IV TA 2014, proyek PNPM ICDD *Phase* II sudah melakukan penyerapan sebesar USD 5,54 juta (92,40% dari jumlah pinjaman) untuk IND-0147. Nilai *progress variant* untuk proyek ini adalah -7,60 untuk IND-0147, artinya kedua *financing agreement* proyek ini telah terlaksana dengan baik dan tepat waktu.

    Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

    Keseluruhan komponen yang ada di kedua *financing agreement*, baik IND-0147 yang tutup pada 31 Desember 2014, telah selesai 100%. Mengingat telah tutupnya proyek ini, *executing agency* perlu mengirimkan *Project Completion Report* (PCR) selambat-lambatnya bulan Maret 2015. Setelah masa efektif *financing agreement* selesai dan PCR disampaikan, IDB akan menyiapkan *finance repayment schedule*.

- ***Regional Road Development Project* (IND-0161)**

  Proyek *Regional Road Development* merupakan proyek *co-financing* antara ADB dan IDB. Proyek ini berupa pembangunan jalan sepanjang kurang lebih 410 km dan renovasi 169 jembatan di wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, serta Jawa Tengah. Pinjaman IDB mendanai kegiatan di wilayah Jawa Tengah dengan total panjang kurang lebih 86,3 km yang terdiri dari 3 ruas jalan, yaitu ruas jalan Tambak Mulyo – Wawar, Giri Woyo – Duwet, dan Wawar – Congot. Selain itu, proyek ini juga mencakup pengembangan kebijakan di bidang jalan, berupa *Road Safety Program*, studi pengembangan, dan *capacity development* bagi *stakeholder* terkait di bidang transportasi jalan raya.

  Realisasi Penyerapan Dana

  Hingga Triwulan IV TA 2014, proyek RRDP belum terdapat penyerapan sehingga target penyerapan tahun 2014 yaitu USD 8,03 juta belum tercapai. Nilai *progress variant* untuk proyek ini adalah -41,82, artinya proyek ini mengalami *serious delay* karena penyerapan belum dilakukan mengingat kontrak baru dijadwalkan ditandatangani pada Januari 2015.

  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

  Pada Triwulan IV TA 2014, *progress* paket pekerjaan fisik di Jawa Tengah yang dikerjakan dengan menggunakan dana pinjaman dari IDB adalah sebagai berikut :

  - Paket 24 RCP-01 (CW-01), 24 RCP-02 (CW-02), dan 24 RCP-03 (CW-03) telah mendapat persetujuan (*No Objection*) dari IDB pada tanggal 1 Desember 2014. Draf kontrak untuk paket pekerjaan ini juga telah disetujui oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tanggal 8 Desember 2014. Kontrak dijadwalkan ditandatangani pada 12 Januari 2015, namun demikian, proses ini terhenti untuk sementara waktu, dan masih menunggu final proses restrukturisasi, serta hasil persetujuan DPR atas dokumen anggaran.
  - Paket *Design and Supervision Consultant* (DSC) telah mendapat persetujuan (*No Objection Letter*-NOL) dari IDB dan saat ini tinggal dilakukan penandatanganan kontrak pada paket tersebut. Proses penandatanganan kontrak ini juga masih terhenti karena menunggu finalisasi dokumen anggaran dan restrukturisasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

- ***Community Based Sanitation Project in Indonesia* (IND-0167)**

  Proyek *Community Based Sanitation Project in Indonesia* atau SANIMAS (Sanitasi Berbasis Masyarakat/*Community Based Sanitation*) merupakan proyek yang bertujuan untuk menangani masalah kesehatan yang disebabkan oleh defekasi terbuka dan sanitasi yang buruk. Untuk mencapai tujuan tersebut, proyek ini akan menyediakan infrastruktur sanitasi dasar di 1.800 lokasi yang berada di 48 kota di 13 provinsi yang telah menjadi lokasi intervensi proyek PNPM ICDD yang didanai juga oleh pinjaman IDB, yaitu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Riau, Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

Proyek ini telah dinyatakan efektif pada tanggal 29 Oktober 2014 dan akan tutup pada tanggal 31 Desember 2018. Jumlah dana pinjaman proyek ini adalah USD 100 juta yang akan membiayai 6 komponen proyek : (1) *Block Financing for Community Sanitation Infrastructure*; (2) *Capacity Building*; (3) *Consultancy Services*; (4) *Project Management Unit*; (5) *Start-Up Workshop, Familiarization, and Review Visits*; serta (6) *Financial Audit*.

Realisasi Penyerapan Dana

Hingga Triwulan IV TA 2014, proyek SANIMAS belum melakukan penyerapan. Nilai *progress variant* untuk proyek ini adalah -4,13, artinya proyek ini masih baik dan tepat waktu walaupun ada sedikit keterlambatan.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Proyek ini baru efektif pada Triwulan IV Tahun 2014 dan telah melaksanakan *start-up workshop* pada tanggal 9 Desember 2014 di Jakarta. Namun, belum terdapat penyerapan dan saat ini sedang dalam tahap pengajuan surat untuk pengajuan penyerapan dana. Isu yang ditemui pada Triwulan IV Tahun 2014 ini terkait persetujuan penggunaan *e-procurement* untuk semua elemen dalam pelaksanaan proyek. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, memberlakukan penggunaan sistem *e-procurement* di seluruh kegiatan (termasuk yang bersumber dari pinjaman), dan telah menyampaikan hal tersebut kepada IDB untuk mendapatkan persetujuan. Pihak IDB menyatakan belum dapat menyetujui mekanisme tersebut dan meminta pihak kementerian untuk melaksanakan proses tender/lelang sesuai dengan kesepakatan yang ada di dalam *Financing Agreement*. Proses komunikasi dan koordinasi masih terus dilakukan untuk mengatasi hal ini, baik dengan pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan pihak IDB.

- **PNPM ICDD *Phase* III (IND-0169, IND-0170, IND-0171)**

Proyek ICDD PNPM III merupakan kelanjutan dari proyek PNPM ICDD *Phase* II di lokasi yang sama kecuali di Provinsi Aceh. Proyek ini efektif pada tanggal 15 Desember 2013. Saat ini, pelaksanaan proyek PNPM ICDD III sedang dilakukan percepatan pelaksanaan proyek sehingga diharapkan dapat diselesaikan pada tahun 2015.

Realisasi Penyerapan Dana

Hingga Triwulan IV TA 2014, penyerapan kumulatif total 3 *financing agreement* mencapai USD 80,53 juta atau 39,28% dari total nilai pinjaman 3 *financing agreement* tersebut, yaitu USD 205 juta. Realisasi penyerapan kumulatif *financing agreement* IND-0169 sebesar USD 80,23 juta (42,90%), IND-0171 sebesar USD 0,30 juta (3,03%), sedangkan untuk IND-0170 belum terdapat penyerapan. Nilai *progress variant* dari *financing agreement* IND-0169 adalah 5,55, artinya kinerja penyerapan baik dan tepat waktu.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Komponen *Evaluation and Thematic Studies* di *financing agreement* IND-0170 telah selesai dilaksanakan. Komponen *Livelihood Enhancement Program* di *financing agreement* IND-0171, yang pada Triwulan III Tahun 2014 sedang dalam proses revisi DIPA 2014, telah selesai dilaksanakan dan dana juga telah dicairkan. Pekerjaan lainnya di luar proyek BLM akan diselesaikan hingga bulan Desember 2015. Alokasi untuk pekerjaan yang akan dilakukan pada tahun 2015 juga sudah dimasukkan ke dalam DIPA 2015.

- **Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

  - ***Development and Upgrading of State University of Jakarta* (IND-0130)**

    Proyek pembangunan fisik di UNJ telah selesai pada 31 Desember 2013 dan menghasilkan output berupa 3 gedung baru (2 gedung menggunakan biaya pinjaman dari IDB dan 1 gedung menggunakan dana GoI) seluas 29.500 m^2 beserta infrastruktur pendukungnya, renovasi 15 gedung dengan total luas 22.570 m^2 melalui dana pendamping GoI, pengadaan konsultan *expert* (*Construction Manager* dan *Procurement Specialist*); peralatan laboratorium pembelajaran serta furnitur, pengembangan akademik (pengembangan kurikulum dan peningkatan kapasitas SDM), serta jasa-jasa konsultansi untuk mendukung pelaksanaan proyek. Kedua nomor *loan* proyek ini efektif pada 12 April 2009. Nomor *loan* IND-0129 berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan nomor *loan* IND-0130 berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

    Realisasi Penyerapan Dana

    Hingga Triwulan IV TA 2014, jumlah penyerapan dana untuk *financing agreement* IND-0130, sebesar USD 1,65 juta (52,07%) dari jumlah pinjaman USD 3,171 juta.

    Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

    Proyek ini telah berakhir (closed) pada tanggal 31 Desember 2014. Pada masa akhir pelaksanaan proyek, *executing agency* hanya menyelesaikan komponen *staff development* berupa beasiswa program doktoral. Komponen beasiswa program doktoral ini, telah memberangkatkan 25 peserta. Namun demikian dari jumlah tersebut, hanya 19 orang yang telah lulus, 6 sisanya akan diusahakan dari beasiswa lainnya mengingat keterbatasan masa efektif *loan*.

    Pekerjaan fisik telah terselesaikan semuanya dan telah dapat digunakan yaitu beberapa ruangan telah menjadi ruang kelas. Bangunan laboratorium bahasa dan ruangan sumber belajar beserta peralatan yang ada telah dapat dioperasikan. Bangunan laboratorium ICT juga telah dipergunakan tetapi masih menggunakan peralatan lama, bukan hasil pengadaan proyek ini karena dana peralatan ICT memang tidak teranggarkan di dalam proyek ini.

    Mengingat proyek ini telah selesai, *executing agency* diharapkan dapat segera menyelesaikan *Project Completion Report* (PCR) sebagai dokumen pertanggungjawaban dan pencapaian proyek.

- ***The Development of Medical Research Center and Two Univeristy Hospitals* (IND-0137 & IND-0138)**

Proyek *Development of Medical Education and Research Center at Two University Hospitals* dibiayai secara *co-finance* dengan *Saudi Fund for Development* (SFD). Proyek ini telah efektif pada 26 Februari 2011 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Total nilai proyek sebesar USD 128,17 juta, terdiri atas pinjaman IDB sebesar USD 63,97 juta, pinjaman SFD sebesar USD 36 juta, dan dana pendamping GoI sebesar USD 28,2 juta. Proyek ini berupa pembangunan gedung pusat riset kedokteran di Universitas Indonesia, dan pembangunan rumah sakit pendidikan di Universitas Sebelas Maret dan Universitas Andalas. Untuk kegiatan fisik di Universitas Andalas dan Universitas Negeri Sebelas Maret yang didanai oleh porsi pinjaman SFD, telah dimulai sejak Triwulan I Tahun 2014 yang lalu.

Realisasi Penyerapan Dana

Hingga Triwulan III TA 2014, penyerapan kumulatif untuk IND-0137 sebesar USD 0,96 juta (3,08% dari total nilai pinjaman) dan penyerapan kumulatif IND-0138 sebesar USD 0,04 juta (0,12% dari total nilai pinjaman). Nilai *progress variant* untuk IND-0137 adalah -76,28 dan untuk IND-0138 adalah -79,24, artinya kedua *financing agreement* tersebut mengalami *serious delay* karena pengadaan peralatan (*installment sale*) dilakukan setelah pekerjaan fisik (*istisna'a*) dan saat ini, pekerjaan fisik belum selesai.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Komponen yang dibiayai porsi SFD

Komponen proyek yang dibiayai oleh SFD (*Saudi Fund for Development*), berupa pembangunan fisik RS Perguruan Tinggi UNS dan RS Universitas Andalas/UNAND, saat ini sudah dalam proses konstruksi pekerjaan fisik yang dimulai sejak bulan Maret 2014 yang lalu. Hingga akhir tahun 2014, progress kemajuan pekerjaan di UNS telah mencapai 30%, dan 36% pada UNAND.

Komponen yang dibiayai IDB

Porsi pinjaman IDB digunakan untuk membiayai pekerjaan fisik di FK-UI (Medical Research Center; konsultan perencana (DEDC) untuk tiga (3) perguruan tinggi); serta pengadaan peralatan pada tiga (3) lokasi termasuk pengadaan konsultannya (EQC).

Pekerjaan fisik di Universitas Indonesia baru ditandatangani pada tanggal 18 Desember 2014. Keterlambatan ini antara lain disebabkan lamanya proses pengurusan perijinan lokasi pembangunan, mengingat lokasi tersebut sebagian bangunannya merupakan Cagar Budaya (*Heritage*). *Ground Breaking Ceremony* dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2015, namun pada dasarnya kontraktor telah memulai pekerjaan persiapan dilapangan setelah ditandatanganinya kontrak kerja. Untuk pengadaan peralatan/*equipment* (tiga paket) bersumber dari porsi pendanaan IDB (pengadaan alat untuk tiga PT), sedang dalam proses finalisasi *bidding document* oleh konsultan.

Isu lain yang dihadapi PIU di Universitas Indonesia adalah perubahan tata kelola Universitas Indonesia menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTBH). Dengan perubahan status ini, mulai tahun 2015, Universitas Indonesia tidak lagi memiliki

(tidak menggunakan) dokumen anggaran berupa DIPA (terutama untuk kegiatan pembangunan/belanja modal) sehingga akan terdapat perubahan dalam proses administrasi anggaran (DIPA) atas proyek pinjaman ini. Pihak Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi telah melakukan koordinasi persiapan atas perubahan ini, namun demikian hingga saat ini juga masih terkendala dengan proses restrukturisasi dengan perubahan Ditjen Dikti bergabung dengan Kementerian Ristek . Diharapkan proses perubahan ini akan dapat diselesaikan pada kuartal pertama tahun 2015 ini.

- ***The Quality Improvement of Padjadjaran University* (IND-0140 & IND-0141)**

Proyek *The Quality Improvement of Padjadjaran University* ini berupa pembangunan 18 gedung baru seluas 40.000 m² beserta infrastruktur pendukungnya, pengadaan peralatan, peningkatan kapasitas tenaga pengajar, serta pengembangan kurikulum. Proyek ini efektif pada 24 Juli 2011 dengan total pinjaman dari IDB sebesar USD 43,97 juta dan pendanaan dari GoI sebesar USD 8,75 juta.

Realisasi Penyerapan Dana

Hingga Triwulan IV TA 2014, penyerapan untuk IND-0140 adalah sebesar USD 5,05 juta (18,69% dari total nilai pinjaman) sedangkan untuk IND-0141 belum terdapat penyerapan. Nilai *progress variant* untuk IND-0137 adalah -62,19 dan untuk IND-0138 adalah -80,88, artinya kedua *financing agreement* tersebut mengalami *serious delay* karena pengadaan peralatan (*installment sale*) dilakukan setelah pekerjaan fisik (*istisna'a*) dan saat ini, pekerjaan fisik belum selesai.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Executing agency telah menyelesaikan komponen *curriculum development*. Komponen *staff development* yang berupa beasiswa pascasarjana di dalam negeri telah selesai tetapi komponen *staff development* yang berupa beasiswa pascasarjana di luar negeri masih berjalan.

Komponen *civil work* telah mencapai 11,4%, dimulai sejak tanggal 17 Oktober 2014. Kontrak pekerjaan fisik tersebut berlangsung selama 14 bulan sejak tanggal dimulai. *Bidding document* komponen FAC di dalam proyek ini telah dikembalikan oleh IDB pada tanggal 19 Januari 2015 dan revisi dari dokumen tersebut telah dikirimkan kembali kepada IDB pada tanggal 20 Januari 2015.

- ***Development and Quality Improvement of State University of Semarang* (IND-0152, IND-0153, IND-0154)**

Proyek *The Development and Quality Improvement of the Semarang State University* (UNNES) berupa pembangunan 13 gedung baru seluas 34.600 m² beserta peralatannya, pengembangan infrastruktur pendukung, renovasi 4 gedung lama, pengembangan kurikulum, dan pendidikan doktoral ke luar negeri. Proyek UNNES bernilai USD 45,29 juta, terdiri atas pinjaman IDB sebesar USD 36,02 juta dan dana pendamping GoI sebesar USD 9,27 juta. Proyek ini telah efektif pada 28 November 2011.

Realisasi Penyerapan Dana

Hingga Triwulan IV TA 2014, penyerapan kumulatif nomor pinjaman IND-0152 sebesar USD 1,40 juta (41,74% dari total nilai pinjaman), nomor pinjaman IND-0153 sebesar USD 0,38 juta (1,48% dari total nilai pinjaman), dan nomor pinjaman IND-0154 sebesar USD 0,04 juta (0,54% dari total nilai pinjaman). Nilai *progress variant* untuk *financing agreement* IND-0152 sebesar -33,83, untuk *financing agreement* IND-0153 sebesar -98,52, dan untuk *financing agreement* IND-0154 sebesar -99,46, artinya ketiga *financing agreement* tersebut mengalami *serious delay* karena pengadaan peralatan (*installment sale*) dilakukan setelah pekerjaan fisik (*istisna'a*) dan saat ini, pekerjaan fisik belum selesai.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Komponen *civil work* sudah melaksanakan penandatanganan kontrak pada tanggal 26 November 2014 tetapi pembayaran uang muka belum dapat dicairkan walaupun *withdrawal application* telah dikirimkan ke KPPN pada 26 November 2014. Keterlambatan pencairan ini terjadi karena masih ada beberapa persyaratan tambahan yang perlu disusulkan oleh *executing agency* untuk mencairkan penarikan uang muka ini.

Komponen *staff development* berupa beasiswa untuk dosen masih dapat terlaksana secara optimal walaupun kelulusan beberapa orang diperkirakan akan terlambat. Komponen *curriculum development* sudah menyelesaikan tahap kedua dari 4 tahap yang ada. 50% penagihan dari komponen ini belum dimasukkan karena masih dalam tahap pengecekan atau evaluasi. Komponen pengadaan peralatan (*equipment*) telah mengajukan dokumen *bidding* (dokumen *Post-qualification Request for Proposal*). Pengajuan dokumen ini belum mendapatkan respon dari IDB. *Executing agency* akan melakukan *follow-up* terkait hal tersebut.

Dokumen lain yang belum mendapatkan respon dari IDB adalah dokumen hasil pemenang *Financial Audit Consultant* (FAC) yang telah dikirimkan pada tanggal 25 November 2014.

Pembangunan fisik yang dibiayai oleh porsi GOI telah diselesaikan semua dan *progress* pengadaan furnitur telah mencapai 50%. Porsi DIPA 2015 terkait pengadaan furnitur ini baru teralokasi sebesar 4 miliar rupiah dari 15 miliar yang akan ditarik pada tahun 2015. *Executing agency* menindaklanjuti hal ini dengan meminta Dikti untuk merevisi DIPA supaya dapat meng-*cover* dana tersebut.

- ***Development and Upgrading of State University of Padang* (IND-0155 & IND-0156)**

Proyek *The Reconstruction and Upgrading of the State University of Padang Project* (UNP) berupa rekonstruksi dan pembangunan 7 gedung beserta infrastruktur pendukungnya, pengadaan peralatan laboratorium, serta pekerjaan konsultansi. Proyek ini mendapatkan pinjaman dari IDB sebesar USD 29,5 juta dan pendanaan dari GoI sebesar USD 6,9 juta, telah efektif pada 28 November 2011.

Realisasi Penyerapan Dana

Hingga Triwulan IV TA 2014, penyerapan kumulatif *financing agreement* IND-0155 (*istisna'a*) sebesar USD 0,37 juta (1,52% dari total pinjaman IND-0155) dan penyerapan

kumulatif *financing agreement* IND-0156 (*installment sale*) sebesar USD 0,03 juta (0,66% dari total nilai pinjaman IND-0156). Nilai *progress variant* IND-0155 adalah -60,27 dan nilai *progress variant* IND-0156 sebesar -61,13, artinya kedua *financing agreement* tersebut mengalami *serious delay* karena pengadaan peralatan (*installment sale*) dilakukan setelah pekerjaan fisik (*istisna'a*) dan saat ini, pekerjaan fisik baru dimulai.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pada Triwulan IV Tahun 2014, *progress* kegiatan yang dilaksanakan *executing agency* adalah sebagai berikut :

1. *Detailed Engineering Design Consultant* (DEDC), telah dikontrak pada tanggal 3 Mei 2013 dan konsultan desain telah menyelesaikan pekerjaan 100%.
2. *Project Management Supervision Consultant* (PMSC), telah dikontrak sejak tanggal 27 September 2013.
3. *Equipment Design Consultant* (EQC), telah dikontrak pada tanggal 11 Februari 2014 dan sedang menyiapkan *Bidding Document* untuk pengadaan *equipment*.
4. *Financial Audit Consultant* (FAC), proses tender
   Pembukaan dokumen penawaran telah dilakukan pada tanggal 23 Desember 2014 dan panitia sedang menyusun laporan hasil evaluasi.
5. PMU *Equipment*
   Proses pengadaan telah selesai dan peralatan telah terpasang di kantor PMU.

- ***The Support to the Development of Higher Education Project* (IND-0168)**

Proyek *The Support to the Development of Higher Education Project* atau dikenal sebagai Proyek *7 in 1*, didanai dengan pinjaman IDB sebesar USD 174,01 dan *co-finance* dengan *Saudi Fund for Development* (SFD) dengan pinjaman sebesar USD 35 juta. Proyek ini berupa pembangunan 60 gedung baru dengan jumlah area bangunan seluas 168.075 m^2, renovasi dari 16 gedung yang sudah ada, dan pengadaan peralatan, pengembangan kurikulum, pelatihan, *e-learning*, buku/jurnal, dan bantuan penelitian. IDB mendanai proyek yang dilakukan di enam universitas, yaitu Universitas Tanjungpura (Kalimantan), Universitas Lambung Mangkurat (Kalimantan), Universitas Sam Ratulangi (Sulawesi), Universitas Negeri Gorontalo (Sulawesi), Universitas Negeri Yogyakarta (Jawa), dan Universitas Negeri Surabaya (Jawa). Satu universitas lagi, yaitu Universitas Syiah Kuala (Sumatera), didanai oleh SFD.

Realisasi Penyerapan Dana

Hingga Triwulan IV TA 2014, realisasi proyek telah mencapai USD 0,03 juta atau sebesar 0,42% dari target TA 2014 (USD 7,87 juta) atau 0,02% dari total nilai pinjaman. Nilai *progress variant* untuk *financing agreement* IND-0168 ini mencapai -17,85, artinya kegiatan ini masih berjalan dengan baik walaupun mengalami sedikit keterlambatan. Pada tahun 2015, rencana penarikan untuk pendanaan yang bersumber dari IDB akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan *familiarization,* pengadaan konsultan DEDC, pengadaan konsultan *equipment,* pengadaan konsultan individu, dan pengadaan konsultan PMS. Sedangkan, rencana penarikan dengan pendanaan yang bersumber dari SFD akan digunakan untuk elemen yang sama seperti IDB kecuali untuk elemen pengadaan konsultan individu tidak dialokasikan.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Proyek ini baru efektif pada 14 April 2014. Mekanisme pengelolaan serta pemaketan proyek telah disusun ulang dan disepakati dalam *start-up workshop*. Hasil pemaketan tersebut terdiri dari beberapa kegiatan (paket) sebagai berikut:

1. *Detailed Engineering Design Consultant* (DEDC) terdiri dari 4 paket (tender dilaksanakan oleh PMU di Pusat), yaitu:
   a. Satu paket porsi IDB di Universitas Sam Ratulangi dan Universitas Negeri Gorontalo.
   b. Satu paket porsi IDB di Universitas Tanjungpura dan Universitas Lambung Mangkurat.
   c. Satu paket porsi IDB di Universitas Negeri Surabaya dan Universitas Negeri Yogyakarta.
   d. Satu paket porsi SFD di Universitas Syiah Kuala.
2. *Project Management and Supervision Consultant* (PMSC)
3. *Equipment Consultant* (EQC) terdiri dari 4 paket (tender dilaksanakan oleh PMU di Pusat), yaitu:
   a. Satu paket porsi IDB di Universitas Sam Ratulangi dan Universitas Negeri Gorontalo.
   b. Satu paket porsi IDB di Universitas Tanjungpura dan Universitas Lambung Mangkurat.
   c. Satu paket porsi IDB di Universitas Negeri Surabaya dan Universitas Negeri Yogyakarta.
   d. Satu paket porsi SFD di Universitas Syiah Kuala.
4. Pengadaan PMU *Expert* terdiri dari 4 paket (dilaksanakan oleh PMU di Pusat), yaitu:
   a. PMU Expert – Procurement Specialist
   b. PMU Expert – Financial Management Specialist
   c. PMU Expert – Information and Communication Technology Specialist (ICT)
   d. PMU Expert – Civil Engineering Specialist
5. Paket Pekerjaan fisik/konstruksi, proses tender dilaksanakan oleh masing-masing PIU di Perguruan Tinggi.
6. Paket Pengadaan Peralatan, proses tender dilaksanakan oleh masing-masing PIU di Perguruan Tinggi.
7. *Familiarization* terdiri dari 1 paket, serta beberapa paket/kegiatan *soft component* (*curriculum development, staff development*)

Proyek ini memang terlambat efektif tetapi sebelum itu, *executing agency* telah melakukan berbagai macam persiapan proyek.

Sampai Triwulan IV Tahun 2014, perkembangan masing-masing paket tersebut adalah sebagai berikut:

- *Detailed Engineering Design Consultant (DEDC)*
  Dokumen *short-listing* untuk 4 paket DEDC (3 paket dari porsi IDB dan 1 paket dari porsi SFD) telah mendapatkan NOL, sedang dalam proses finalisasi dokumen tender.

- *Equipment Consultant (EQC)*
  Dalam tahap finalisasi dokumen tender dan persiapan *shortlist.*
- Paket *Financial Audit Consultant* (FAC) dan ICT telah mendapatkan NOL pada awal bulan Januari 2015.
- *Start-Up Workshop*
  Paket *start-up workshop* telah dilaksanakan pada bulan Agustus 2014 dan menyerap dana sebesar Rp 433.256.050,00 atau USD 0,04 juta.
- *Familiarization*
  Familiarisasi telah mendapatkan NOL dan akan dilakukan setelah bulan Maret 2015.

- **Kementerian Perhubungan**

  - ***Development of Belawan Port Phase 1* (IND-0133)**

    Proyek ini berupa pekerjaan pengerukan, *land reclamation, soil improvement, utilities,* dan *pavement* di Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara dengan jumlah dana pinjaman sebesar USD 87,55 juta. Proyek ini efektif pada tanggal 1 Mei 2010 dan tutup pada tanggal 21 Maret 2016.

    Realisasi Penyerapan Dana

    Hingga Triwulan IV TA 2014, penyerapan kumulatif pada pinjaman dengan *financing agreement* IND-0133 ialah sebesar USD 0,8 juta (0,91% dari total nilai pinjaman). Nilai *progress variant* untuk *financing agreement* IND-0133 adalah -78,35, artinya *financing agreement* tersebut mengalami *serious delay*.

    Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

    Sampai dengan status akhir tahun 2014, realisasi pelaksanaan kegiatan baru untuk kegiatan konsultan (PMSC), yang telah kontrak sejak tanggal 22 Maret 2013. Konsultan telah melakukan review atas dokumen detail design dan telah menyelesaikan dokumen tender untuk pekerjaan fisik.

    Proses lelang pekerjaan fisik mengalami keterlambatan karena diperlukan adanya *re-scoping* atas pekerjaan yang akan dilakukan. Saat ini, proses tender telah sampai pada tahapan penentuan hasil pemenang, namun masih terkendala permasalahan teknis, karena pihak IDB belum dapat menyetujui usulan calon pemenang dari Panitia Tender (Panitia tender/PMU mengusulkan calon pemenang dengan urutan penawaran terendah kedua). IDB beranggapan bahwa alasan teknis yang yang disampaikan oleh panitia (sehingga penawar terendah gugur) tidak signifikan, dan diminta untuk dilakukan klarifikasi dan review ulang. Proses ini telah berjalan sekitar empat (4) bulan), namun hingga saat ini masih belum ada keputusan lebih lanjut. Dalam perkembangannya, pihak PMU juga menyampaikan kepada IDB bahwa terdapat indikasi pemalsuan dokumen (surat dukungan sub kontraktor) dalam penawaran oleh penawar terendah, namun pihak IDB masih tetap meminta hal tersebut untuk dilakukan klarifikasi terlebih dahulu.

    Pihak IDB masih manunggu hasil akhir klarifikasi dari PMU atas permasalahan tersebut.

- **Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

  - ***Revitalization of Vocational Training Center* (IND-0159 & IND-0160)**

    Proyek *Revitalization of Vocational Training Centers* (VTC) berupa program ekspansi, pembelian peralatan, pengembangan keterampilan, dan pelatihan dari 11 Balai Latihan Kerja (BLK) di Indonesia. Proyek ini didanai dengan total pinjaman IDB sebesar USD 32,5 juta dari dua nomor *financing agreement* dan efektif sejak 23 Desember 2013. *Financing agreement* nomor IND-0159 difokuskan untuk pembiayaan konsultan dan *financing agreement* nomor IND-0160 difokuskan untuk pembiayaan peralatan.

    Realisasi Penyerapan Dana

    Hingga Triwulan IV TA 2014, *financing agreement* IND-0159 belum terdapat penyerapan. Penyerapan kumulatif *financing agreement* IND-0160 sebesar USD 0,03 juta (0,08% dari total nilai pinjaman *financing agreement* tersebut). Nilai *progress variant* untuk *financing agreement* IND-0159 ini mencapai -25,53 dan nilai *progress variant* untuk *financing agreement* IND-0160 mencapai -25,45, artinya proyek ini dinilai mengalami keterlambatan.

    Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

    Kemajuan pelaksanaan yang dicapai hingga saat ini adalah kegiatan *start-up workshop* yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 – 12 September 2014. Hasil dari kegiatan *start-up workshop* juga menyepakati ulang pemaketan kegiatan antara lain pengadaan konsultan manajemen dan peralatan (PMEQC-*Project Management and Equipment Consultant*); pengadaan PMU *Expert*; *Vocational/VTC Expert*; serta pengadaan peralatan (*equipment*).

    Saat ini pihak PMU sedang menyiapkan proses *short list* untuk PMEQC, serta finalisasi dokumen tender (PMEQC), untuk disampaikan kepada IDB untuk mendapatkan persetujuan (NOL). Diharapkan tender/lelang PMEQC dapat mulai dilaksanakan pada Triwulan ke II tahun 2015.

- **Kementerian Agama**

  - ***The Reconstruction of IAIN Ar Raniry* (IND-0113)**

    Realisasi Penyerapan Dana

    Hingga Triwulan IV TA 2014, pinjaman dengan *financing agreement* IND-0113 telah melakukan penyerapan sebesar USD 3,84 juta (45,19% dari total nilai pinjaman *financing agreement* tersebut). Nilai *progress variant* untuk *financing agreement* tersebut adalah -54,81, artinya *financing agreement* tersebut mengalami *serious delay*.

    Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

    Proyek ini direncanakan tutup 30 September 2014 tetapi telah diperpanjang sampai 31 Desember 2014 untuk menuntaskan keseluruhan proyek. Pada tanggal 31 November 2014, pekerjaan fisik telah diselesaikan 100% dan hanya sedang menunggu terbitnya SP3. Dari 8 pencairan untuk pembangunan fisik, baru tiga *Notes of Disbursement* (NOD) yang diterima oleh *executing agency*. NOD ini diperkirakan sudah ada di Kementerian

Keuangan tetapi karena di SPAN ada pengkodeaan baru untuk SP3 yang terbit sebelum tahun 2013, NOD belum dapat dikeluarkan. Untuk menindaklanjuti hal ini, KPPN akan membuat *withdrawal application* dengan penomoran baru dan setelah itu akan menerbitkan SP3.

Mengingat masa efektif proyek ini telah tutup, *executing agency* diharapkan dapat segera mengirimkan *Project Completion Repoert* (PCR) pada bulan Maret 2015.

- ***Upgrading and Development of UIN Sunan Gunung Djati* (IND-0127)**

Realisasi Penyerapan Dana

Hingga Triwulan IV TA 2014, pinjaman dengan *financing agreement* IND-0127 telah melakukan penyerapan sebesar USD 4,13 juta (79,62% dari total nilai pinjaman *financing agreement* tersebut). Nilai *progress variant* untuk *financing agreement* tersebut mencapai -20,38, artinya *financing agreement* tersebut masih berjalan dengan baik walaupun cukup terlambat.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Proyek ini telah dinyatakan selesai pada tanggal 31 Desember 2014. Pada akhir pelaksanaan proyek, *executing agency* menghadapi isu selisih kurs tetapi hal ini tidak terlalu signifikan terhadap pelaksanaan proyek. Untuk menyelesaikan administrasi keuangan, IDB dan Bank Indonesia perlu melakukan koordinasi lebih lanjut terutama untuk penyampaian *withdrawal application*, *Letter of Credits* (LC), dan *Notes of Disbursement* (NOD). Penyelesaian administrasi keuangan ini memerlukan perpanjangan selama kurang lebih sebulan di internal IDB dan Bank Indonesia. Oleh karena itu, IDB akan mengirimkan surat formal untuk perpanjangan kepada BI. Namun demikian, hal ini tidak mengubah *closing date* proyek ini.

Mengingat telah selesainya proyek ini, *executing agency* diharapkan dapat segera mengirimkan *Project Completion Report* pada bulan Maret 2015.

- ***Development of IAIN Sunan Ampel* (IND-0157 & IND-0158)**

Proyek *The Development and Quality Improvement of State Institute of Islamic Studies* (IAIN) *Sunan Ampel Surabaya* berupa pembangunan 7 gedung baru seluas 33.680 m^2, renovasi 6 bangunan lama, penyediaan infrastruktur pendukung, peralatan, pengembangan kurikulum, dan keterampilan staf. Proyek ini telah efektif sejak tanggal 28 November 2011. Pendanaan proyek ini berasal dari pinjaman IDB sebesar USD 35 juta serta dari dana pendamping GoI sebesar USD 7 juta.

Realisasi Penyerapan Dana

Hingga Triwulan IV TA 2014, pinjaman dengan *financing agreement* IND-0157 terdapat penyerapan sebesar USD 5,44 juta (17,90% dari total nilai pinjaman *financing agreement* tersebut) dan untuk IND-0158 terdapat penyerapan sebesar USD 0,07 juta (1,47% dari total nilai pinjaman *financing agreement* tersebut). Nilai *progress variant* untuk IND-0157 mencapai -59,37 dan untuk IND-0158 mencapai -86,73, artinya kedua *financing agreement* tersebut mengalami *serious delay* karena pengadaan peralatan (*installment sale*) dilakukan setelah pekerjaan fisik (*istisna'a*) dan saat ini, pekerjaan fisik belum selesai.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pekerjaan konsultan DEDC, telah terlaksana dan selesai. Paket PMSC telah terkontrak sejak tanggal 11 Januari 2013 dan sedang dalam pelaksanaan. Paket EQC telah terkontrak sejak tanggal 5 Februari 2014 dan saat ini sedang menyelesaikan dokumen tender untuk peralatan (*equipment*). Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan peralatan yang dilakukan, terdapat kebutuhan tambahan peralatan *amphiteather* pada C*onnecting Hall* yang akan difungsikan sebagai ruang eksibisi. Pihak PMU telah mengajukan permintaan tambahan peralatan tersebut melalui Kementerian Agama. Bappenas masih menunggu permintaan resmi dari Kementerian Agama, sebelum proses lebih lanjut.

Kontrak *civil work* proyek ini telah ditandatangani pada tanggal 10 Oktober 2014 Sampai dengan minggu kedua bulan Januari 2015, *progress* pekerjaan fisik telah mencapai 21%. Kontrak *civil work* ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2015 dan diharapkan pekerjaan *civil work* dapat berjalan dengan optimal sehingga tidak memerlukan perpanjangan kembali. Paket pembangunan fisik ini mengalami *re-scoping* dan telah disetujui.

Paket *Financial Audit Consultant* (FAC) *approval* IDB (NOL) telah terbit pada minggu ketiga bulan Januari 2015, dan sedang dalam persiapan penandatanganan kontrak.

Untuk proses selanjutnya, IDB memberikan saran agar *executing agency* dapat mengirimkan dokumen *softcopy* ke IDB HQ di Jeddah dan ke *Country Gateway Office* (CGO) di Jakarta terlebih dahulu sebelum mengirimkan dokumen *hardcopy*. Dokumen *hardcopy* dapat dikirimkan ke IDB CGO Jakarta untuk validasi dokumen.

- ***Support to Development of Islamic Higher Education* (IND-0164)**

Proyek *The Support to Quality Improvement of Islamic Higher Education Project* (IND-0164) atau dikenal juga sebagai Proyek *4 in 1,* merupakan proyek pembangunan dan pengembangan 4 IAIN, yaitu IAIN Sumatera Utara di Medan, IAIN Raden Fatah di Palembang, IAIN Walisongo di Semarang, dan IAIN Mataram di NTB.

Proyek ini berupa pembangunan 33 gedung baru dan fasilitas pendukung beserta furnitur dan peralatan laboratorium, pengembangan kurikulum dan *training program*, serta pekerjaan konsultansi dan PMU. Proyek ini telah efektif pada 18 Mei 2013 dengan nilai USD 163,28 juta yang terdiri dari pinjaman IDB sebesar USD 123,75 juta dan dana pendamping GoI sebesar USD 39,53 juta. Proyek ini dikelola dan dilaksanakan oleh PMU di Pusat di bawah Kementerian Agama.

Realisasi Penyerapan Dana

Hingga Triwulan IV TA 2014, penyerapan kumulatif pinjaman dengan *financing agreement* IND-0164 sebesar USD 0,08 juta untuk *start-up workshop*. *Progress variant* untuk *financing agreement* tersebut adalah -40,52, artinya *financing agreement* tersebut mengalami *serious delay*.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pada Triwulan IV Tahun 2014, proyek *The Support to Quality Improvement of Islamic Higher Education Project* atau disebut juga dengan *4 in 1* ini telah menyelesaikan isu tertundanya pembayaran *start-up workshop* yang telah dilaksanakan pada Triwulan IV TA 2014.

Proyek ini mengalami keterlambatan dalam pelaksanaannya, antara lain karena lemahnya kapasitas tim pengelola proyek (PMU), serta kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan proyek. Hal ini telah mengakibatkan lambatnya progress pelaksanaan kegiatan, dan juga lambatnya identifikasi permasalahan serta rencana dan/atau penyelesaian masalahnya.

PMU perlu melibatkan pihak PIU terkait (empat perguruan tinggi) dalam proses persiapan maupun pelaksanaan kegiatan, terutama agar segera menyusun dokumen (TOR dan FRPs) untuk kegiatan konsultan (terutama konsultan perencana/DEDC), PMSC dan EQC.

- **Kementerian Kelautan dan Perikanan**

  - ***Development of Belawan and Sibolga Fishing Port* (IND-0121)**

    Proyek *The Development of Belawan and Sibolga Fishing Port* (IND-0121) berupa pembangunan dua fasilitas pelabuhan ikan di Belawan dan Sibolga, beserta infrastruktur pendukungnya. Proyek ini efektif pada tanggal 15 Juli 2008 dengan nilai pinjaman dari IDB sebesar USD 31,92 juta.

    Realisasi Penyerapan Dana

    Hingga Triwulan IV TA 2014, pinjaman dengan *financing agreement* IND-0121 terdapat penyerapan sebesar USD 5,77 juta (18,08% dari total nilai pinjaman *financing agreement* tersebut). Nilai *progress variant* untuk *financing agreement* tersebut mencapai -81,92, artinya *financing agreement* tersebut mengalami *serious delay*.

    Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

    Proyek ini telah dinyatakan batal, dan sedang dalam proses pembatalan *financing agreement* oleh Kementerian Keuangan. Proyek ini sempat mengalami keterlambatan akibat lamanya *Executing Agency* dalam melakukan penetapan pemenang kontraktor di Pelabuhan Belawan, akhirnya telah diputuskan proses tersebut tidak dapat diteruskan. Kegiatan pembangunan di Pelabuhan Belawan akhirnya akan dibiayai oleh dana rupiah.

Multilateral Lain

Pada Triwulan IV Tahun 2014 total jumlah pinjaman dari lembaga multilateral lain adalah (ekuivalen) USD 198,21 juta, terdiri dari 4 proyek pinjaman dari IFAD dengan nilai pinjaman USD 162,21 juta dan 1 proyek pinjaman dari *Saudi Fund* senilai USD 36 juta yang merupakan proyek *co-financing* dengan *Islamic Development Bank* (IDB). Oleh karena itu untuk dapat melihat kinerja pelaksanaan proyek tersebut secara utuh, pembahasan lebih rinci mengenai kinerja pelaksanaan proyek *Saudi Fund* digabungkan dalam pembahasan proyek-proyek pinjaman dari IDB.

Realisasi Penyerapan Pinjaman dan Pencapaian Indikator Kinerja

Realisasi kumulatif proyek pinjaman dari Lembaga Multilateral lain sampai dengan Triwulan IV Tahun 2014 telah mencapai USD 106,08 juta atau sebesar 53,52% dari komitmen pinjaman. Kinerja penyerapan dana pada tahun 2014 untuk proyek IFAD cukup baik yaitu sebesar 84,88% dari target, sedangkan untuk proyek Saudi Fund sebesar 29,74% dari target penyerapan yang tercermin dalam nilai DIPA, untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8 Penyerapan Pinjaman dari Lembaga Multilateral Lain
Menurut Instansi Penanggung JawabTriwulan IV TA 2014

(Ekuivalen Juta USD)

No	Instansi Penanggung Jawab	Jumlah Proyek	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan IV TA 2014		Pinjaman Belum Ditarik	Penyerapan TA 2014		
				Nilai	%		Target	Realisasi	%
IFAD		**4**	**162,21**	**101,50**	**62,01**	**60,71**	**26,97**	**22,88**	**84,88**
1	Kementan	2	67,07	35,53	52,97	31,54	12,00	11,21	93,40
2	Kemendagri	1	63,20	52,83	83,60	10,37	1,82	0,90	49,54
3	Kemen KP	1	31,94	13,14	41,14	18,80	13,14	10,77	81,96
SAUDI FUND		**1**	**36,00**	**4,89**	**12,89**	**31,11**	**16,54**	**4,89**	**29,74**
4	Kemendikbud	1	36,00	4,89	12,89	31,11	16,54	4,89	29,74
Total		**5**	**198,21**	**106,08**	**53,52**	**92,13**	**43,51**	**27,77**	**63,84**

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan IV Tahun 2014 (diolah)
Keterangan:
[1]) Terdapat perubahan target (DIPA).
[2]) Termasuk realisasi triwulan sebelumnya yang belum dilaporkan.
[3]) Pembahasan untuk proyek Saudi Fund digabungkan dengan pembahasan pada bagian IDB karena merupakan proyek co-financing dengan IDB.

- **Kementerian Pertanian**

  - ***Rural Empowerment and Agricultural Development*/READ (645-ID)**

    Realisasi Penyerapan Dana

    Pelaksanaan proyek READ berakhir pada 31 Desember 2014, dengan penyerapan kumulatif yang dilaporkan hingga Triwulan IV TA 2014 sebesar 93,90% dari komitmen pinjaman. Setelah proyek berakhir, masih terdapat waktu untuk penyelesaian administrasi keuangan proyek sampai dengan 30 Juni 2015 (*closing account*). Nilai akhir realisasi kumulatif diharapkan dapat dijelaskan pada laporan akhir pelaksanaan

proyek (*Project Completion Report/PCR)*, termasuk penjelasan mengenai potensi sisa dana yang telah diperkirakan sebelumnya. Dari sisi substansi pelaksanaan proyek, dalam laporan akhir diharapkan juga dapat memuat pencapaian akhir proyek, pembelajaran, keberlanjutan serta replikasi kegiatan yang telah/akan dilakukan.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Sampai dengan akhir masa pelaksanaan proyek, strategi penyapihan (*exit strategy*) terus diperkuat baik pada level nasional maupun daerah. Salah satu strategi untuk menjaga keberlanjutan hasil-hasil proyek dan juga memperluas cakupan manfaatnya bagi masyarakat adalah melalui replikasi kegiatan. Penguatan-penguatan telah dilakukan untuk strategi tersebut terutama dari aspek kelembagaan, pembiayaan, teknis pelaksanaan dan sebagainya. Dari hasil diskusi terakhir, lima kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yaitu Banggai, Buol, Poso, Toli-toli, dan Parimo telah siap untuk melaksanakan strategi keberlanjutan dan replikasi proyek READ. Dari aspek pembiayaan, masing-masing kabupaten tersebut telah menganggarkan dana dari APBD di berbagai dinas terkait dengan READ, dan dukungan dari APBN melalui Kementerian Pertanian dan DAK. Selanjutnya dari aspek kelembagaan, program dan pembiayaan telah disinkronkan dengan tugas dan fungsi masing-masing instansi di daerah. Sementara itu, dari aspek teknis berbagai strategi pelaksanaan telah disusun untuk menjamin agar pelaksanaan strategi keberlanjutan dan replikasi tersebut dapat berjalan dengan baik.

Capaian akhir untuk indikator *output, outcome* maupun *goal* proyek masih dalam tahap pengumpulan data. Dari data yang sudah terkumpul salah satu tujuan utama proyek telah tercapai melampaui target yaitu peningkatan ketahanan pangan bagi rumah tangga yang menjadi sasaran proyek, dari target 10.000 rumah tangga dapat tercapai sebanyak 17.211 rumah tangga atau sebesar 172% dari target. Capaian untuk outcomes dan output berdasarkan data yang sudah terkumpul sebagian besar juga telah melampaui target.

- ***Smallholder Livelihood Development Project in Eastern Indonesia*/SOLID (835-ID)**

Realisasi Penyerapan Dana

Penyerapan kumulatif proyek SOLID sampai dengan Triwulan IV Tahun 2014 adalah 32,97% dari komitmen pinjaman, sementara itu kinerja penyerapan dana tahun 2014 cukup baik karena mampu mencapai 95,36% dari target. Permasalahan yang dihadapi terkait aspek keuangan adalah terdapat *backlog* yang nilainya cukup besar dan menyebabkan reksus di blokir, hal ini terjadi karena pelaksana kegiatan di daerah belum menggunakan sistem *online* sehingga terlambat dalam pengajuan pencairan dana dan menumpuk di akhir tahun. Akibatnya dana *initial deposit* yang tersedia di reksus sebesar USD 1 juta tidak mencukupi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut *initial deposit* telah ditambah menjadi USD 3 juta. Pada tahun 2015 IFAD merencanakan akan mengaplikasikan sistem baru alokasi dana yang disesuaikan dengan AWPB untuk mencegah permasalahan tersebut berulang. Permasalahan lain yang masih terjadi adalah pergantian personil pelaksana proyek, sebagaimana terjadi di Maluku Utara akibat adanya pergantian gubernur pada akhir 2014.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Progres pelaksanaan kegiatan SOLID pada Triwulan IV TA 2014 antara lain untuk konsultan *firm* saat ini masih dalam proses pengadaan (evaluasi proposal teknis). Permintaan NOL telah disampaikan kepada IFAD, diharapkan dapat segera diproses sehingga tahap selanjutnya dapat selesai sesuai target. Selanjutnya untuk kegiatan *comparative study* yang semula akan dilakukan di luar negeri dialihkan ke dalam negeri sesuai dengan kebijakan Pemerintah Indonesia, namun tidak dapat dilaksanakan karena dana di reksus tidak mencukupi. Permasalahan lain yang dihadapi adalah pengadaan alat pertanian di Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Buru Selatan harus dilanjutkan pada tahun 2015 karena belum diperoleh pemenang. Sementara itu kegiatan yang dilaksanakan oleh LSM telah mulai berjalan, diharapkan tidak ada kendala yang berarti dalam pelaksanaan. Pada tahun 2014, dana hibah telah dimanfaatkan untuk melakukan identifikasi *international value chain*. Penyerapan dana hibah diharapkan dapat meningkat pada tahun 2015 setelah kontrak *International Value Chain* ditandatangani pada 19 Januari 2015.

Setelah dilaksanakannya *Mid Term Review* terdapat beberapa penguatan yang dilakukan dan berdampak pada perubahan struktur dan sasaran proyek SOLID. Perubahan struktur pelaksanaan dan sasaran tersebut telah di internalisasikan dan akan disosialisasikan pada pertengahan Februari 2015.

- **Kementerian Dalam Negeri**
  - ***National Programme for Community Empowerment in Rural Area*/PNPM *Rural* (755-ID)**

    Realisasi Penyerapan Dana

    Penyerapan kumulatif proyek PNPM Rural hingga Triwulan IV TA 2014 telah mencapai 83,60% dari komitmen pinjaman, sementara itu kinerja penyerapan dana pada tahun 2014 hanya mencapai 49,54% dari target.

    Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

    Sampai denga Triwulan IV TA 2014 masih belum diperoleh keputusan resmi mengenai perubahan nomenklatur kementerian sebagai penanggung jawab proyek PNPM *Rural*, begitu juga dengan kebijakan untuk kelanjutan program PNPM *Rural* secara keseluruhan.

- **Kementerian Kelautan dan Perikanan**
  - ***Coastal Community Development Project* (880-ID)**

    Realisasi Penyerapan Dana

    Penyerapan kumulatif proyek CCDP sampai dengan Triwulan IV tahun 2014 adalah sebesar 41,14% dari komitmen pinjaman, sedangkan penyerapan sepanjang tahun 2014 mencapai 81,96% dari target. Tidak terdapat permasalahan keuangan yang menganggu pelaksanaan proyek pada triwulan ini.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Secara umum pelaksanaan kegiatan pada tahun 2014 telah berjalan cukup baik, dengan capaian 83% dari target. Terdapat 3 lokasi yang mengalami gagal lelang pada tahun ini sehingga harus dilanjutkan prosesnya pada tahun 2015, sebagai berikut:

- Pembangunan rumah produksi rumput laut di Lombok: peserta lelang tidak menyampaikan penawaran.
- Pembangunan rumah produksi di gorontalo utara: penawar tidak memenuhi kualifikasi yang ditetapkan.
- Pembangunan rumah pengolahan hasil perikanan di Kupang: penawar tidak memenuhi kualifikasi.

Dengan gagalnya pengadaan pada 3 lokasi tersebut maka dikhawatirkan implementasi akan sedikit mundur dari target semula. Untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut, akan dibuat spesifikasi bahwa peralatan yang diminta dalam pengadaan harus dalam keadaan *ready stock*. Penanggung jawab proyek telah melakukan survei pasar dan diperoleh informasi bahwa semua barang yang dibutuhkan tersedia di pasaran lokal yang berasal dari Surabaya. Dengan demikian diharapkan dapat mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk implementasi karena tidak perlu menunggu mobilisasi peralatan dari daerah lain.

KREDITOR BILATERAL

Pada Triwulan IV TA 2014, terdapat 66 jumlah pinjaman proyek yang berasal dari kelompok Kreditor Bilateral yang terdiri dari 41 pinjaman proyek Jepang dan 25 Bilateral lain. Total nilai pinjaman proyek dari Kreditor Bilateral tersebut sebesar ekuivalen USD 6.166.19 juta dengan realisasi penyerapan sampai dengan Triwulan IV TA 2014 sebesar USD 2.317,29 juta atau 37,58% dari total nilai pinjaman. Sementara realisasi pada Tahun Anggaran 2014 periode Januari–Desember sebesar USD 665,25juta atau 64,5% dari target Tahun 2014. Berikut rincian pinjaman proyek berasal dari kelompok Kreditor Bilateral:

Tabel 2.9 Rekapitulasi Pinjaman Luar Negeri Bilateral

(Ekuivalen Juta USD)

No	Sumber Pinjaman	Jumlah Proyek	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan IV TA 2014		Pinjaman Belum Ditarik	Penyerapan TA 2014		
				Nilai	%		Target	Realisasi	%
1	Jepang	41	4.539,42	1.642,85	36,19	2.896,57	677,56	403,62	59,57
2	Australia	1	246,42	217,58	88,30	28,84	30,21	23,51	77,81
3	Jerman	3	76,37	41,67	54,55	34,71	29,43	12,55	42,64
4	Korea	7	345,94	66,22	19,14	279,71	36,38	13,91	38,23
5	Perancis	4	248,53	26,53	10,68	222,00	20,24	8,60	42,48
6	AFD	3	129,50	74,31	57,38	55,19	33,11	35,30	106,62
7	RR Tiongkok	5	531,89	206,91	38,90	324,98	176,21	145,41	82,52
8	Spanyol	2	48,12	41,22	85,64	6,91	28,20	22,35	79,22
Total		**66**	**6.166,19**	**2.317,29**	**37,58**	**3.848,90**	**1.031,34**	**665,25**	**64,50**

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan IV Tahun 2014 (diolah)

Berdasarkan instansi penanggung jawab, pada Triwulan IV TA 2014 terdapat 15 Kementerian/ Lembaga, BUMN, dan Pemda yang menjadi instansi penanggung jawab (*Executing Agency*) atas 66 pinjaman luar negeri, dimana sebagian besar berada di 3 Kementerian/Lembaga dan 1 BUMN, yaitu di Kementerian Pertahanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan berada di PT. PLN, sisa proyek lainnya tersebar di 11 Kementerian/Lembaga lainnya.

Rekapitulasi pelaksanaan pinjaman luar negeri sampai dengan Triwulan IV TA 2014 menurut instansi penanggung jawab (*Executing Agency*) dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.10 Rekapitulasi Pinjaman Luar Negeri Bilateral Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab

(Ekuivalen Juta USD)

No.	Instansi Penanggung Jawab	Jumlah Proyek	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan IV TA 2014		Pinjaman Belum Ditarik	Penyerapan TA 2014		
				Nilai	%		Target	Realisasi	%
Dilaksanakan oleh K/L		**51**	**4.185,51**	**1.877,21**	**44,85**	**2.308,30**	**723,59**	**521,56**	**72,08**
1	Kemenhub	7	1.073,58	192,36	17,92	881,22	203,52	72,49	35,62
2	Kemendikbud	4	258,60	106,82	41,31	151,78	60,54	24,97	41,25
3	Kemenkes	3	73,82	72,79	98,61	1,03	1,04	8,84	853,11
4	Kemen KP	1	30,00	19,96	66,53	10,04	11,68	11,39	97,52
5	Kemen PU-Pera	25	2.295,49	1.319,01	57,46	976,48	386,05	374,14	96,91
6	Bappenas	2	140,72	63,00	44,77	77,72	6,82	8,34	122,22
7	Kemenkominfo	3	82,79	15,56	18,80	67,22	11,90	2,84	23,86
8	Kepolisian RI	2	73,42	0,92	1,26	72,50	12,99	0,92	7,10
9	Badan Otorita Batam	1	48,95	0,00	0,00	48,95	1,47	0,00	0,00
10	BMKG	1	36,86	26,53	71,98	10,33	11,47	8,60	74,97
11	LIPI	1	17,88	11,24	62,86	6,64	5,81	0,07	1,26
12	BIG	1	53,41	49,01	91,77	4,40	10,30	8,96	87,03
Diteruspinjamankan (SLA)		**13**	**1.561,52**	**318,43**	**20,39**	**1.243,08**	**153,13**	**114,09**	**74,51**
13	PT. PLN	12	1.335,54	303,25	22,71	1.032,28	140,75	101,61	72,19
14	PT. Pertamina	1	225,98	15,18	6,72	210,80	12,38	12,48	100,80
Diterushibahkan		**2**	**419,17**	**121,64**	**29,02**	**297,53**	**154,62**	**29,59**	**19,14**
15	Pemda DKI	2	419,17	121,64	29,02	297,53	154,62	29,59	19,14
Total		**66**	**6.166,19**	**2.317,29**	**37,58**	**3.848,90**	**1.031,34**	**665,25**	**64,50**

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan IV Tahun 2014 (diolah)

Jepang

Selama Triwulan IV TA 2014, jumlah pinjaman proyek Jepang yang efektif dan dipantau pelaksanaannya berjumlah 41 dengan nilai total pinjaman JPY 541.688,18 juta. Penarikan pinjaman secara kumulatif sampai dengan akhir Triwulan IV TA 2014 sebesar JPY 196.041,16 juta atau 36,19% dari total pinjaman, sehingga dana pinjaman yang belum ditarik senilai JPY 345.647,02 juta atau 63,81% dari total pinjaman.

Dari 41 pinjaman proyek yang bersumber dari Jepang, sebanyak 29 pinjaman proyek dilaksanakan langsung oleh Kementerian/Lembaga, 2 pinjaman proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui penerushibahan *(on-granting)* dan 10 pinjaman proyek dilaksanakan oleh BUMN melalui peneruspinjaman atau *Subsidiary Loan Agreement* (SLA).

Proyek Baru dan Proyek Tutup

Terdapat 3 proyek pinjaman Jepang yang akan berakhir masa berlakunya pada tahun 2014. Informasi tentang masa berakhir dan penyerapan dana pinjaman proyek Jepang yang berakhir pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.11 Daftar Pinjaman Proyek Jepang yang Berakhir Masa Lakunya Pada TA 2014 dan Status Dana Pinjaman yang Belum Ditarik

(Dalam Juta JPY)

No	Nomor *Loan*	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Tutup	Pinjaman Belum Ditarik		Keterangan
					Nilai	PV	
1	IP-524	*Urgent Disaster Reduction Project for Mt. Merapi*	28/07/2005	28/07/2014	6,25	0,04	Selesai
2	IP-543	*Regional Infrastructure for Social & Economic Dev*	29/07/2007	29/07/2014	2.992,14	12,72	Selesai
3	IP-536	*E/S Jaskarta Mass Rapid Transit System*	22/03/2007	31/12/2014	-209.22	11,19	selesai

Realisasi Penyerapan Pinjaman dan Pencapaian Indikator Kinerja

Jumlah penarikan pinjaman sampai dengan Triwulan IV TA 2014 sebesar JPY 48.163,55 juta atau 59,57% dari target penyerapan TA 2014. Penarikan Triwulan IV TA 2014 meningkat sebesar 60,62% dibandingkan Triwulan III TA 2014. Meskipun demikian, secara umum penyerapan pinjaman proyek yang dibiayai oleh Jepang masih tergolong rendah. Rendahnya penyerapan pinjaman Jepang disebabkan oleh beberapa hal yaitu sebagai berikut :

- Proyek-proyek yang baru efektif tahun 2014 masih belum dapat menyelesaikan proses pengadaan barang dan jasa yaitu:
  - 4 proyek dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu IP-559 *Upper Citarum Basin Flood Management*, IP-566 *Urgent Disaster Reduction Project for Mt. Merapi and Lower Solo Progo River Area II*, IP-567 *Countermeasure for Sediment in Wonogiri Multipurpose Dam Reservoir (III)*, dan IP-565 *Metropolitas Sanitation Metropolitan Sanitation Management Investment Program: Engineering Services for Sewerage System Development in DKI Jakarta.* Lamanya proses pengadaan pada proyek-proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat karena pihak Jepang dan

Kementerian terkait mempunyai perbedaan pandangan mengenai penerapan *e-procurement* yang diusulkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

- 1 proyek dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan yaitu IP-563 *Jabodetabek Railway Capacity Enhancement Phase I;*
- 1 Proyek dilaksanakan oleh Kementerian PPN/ Bappenas yaitu IP-568 *Professional Human Resources Development Project (PHRDP) – IV*;
- 1 proyek dilaksanakan oleh PT. PLN yaitu IP-556 *Java-Sumatera Interconnection Transmission Line*.

- Proyek masih dalam tahap penyelesaian pengadaan barang/jasa, proses perijinan, manajemen proyek, dan masalah teknis yaitu pada proyek IP-548 *Railway Double Tracking on Java South Line Project (III)*, IP-562 *Railway Double Tracking on Java South Line Project (IV)*, IP-561 *Indramayu Coal Fired Power Plant Project (E/S)* dan IP-556 *Java – Sumatera Interconnection Transmission Line Project*.
- Terdapat masalah pengadaan lahan. Hal ini terjadi pada proyek-proyek yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan PT PLN. Masalah pengadaan lahan yang menghambat secara signifikan pelaksanaan proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terjadi pada proyek IP-551 *Urban Flood Control System Improvement in Selected Cities,* dan IP-558 *Regional Solid Waste Management for Mamminasata*. Pengadaan lahan di PT. PLN yang belum mengalami kemajuan sejak TA 2014 dan membutuhkan perhatian serta kerja sama dengan pemerintah daerah antara lain IP-538 *Peusangan Hydroelectric Power Plant Construction,* IP-532 *Construction of Asahan 3 HEPP*, dan IP-561 *Indramayu Coal Fire Power Plant*. Masalah yang terjadi pada proses pengadaan lahan terkait dengan masalah perijinan dan negosiasi kepada warga maupun pemerintah daerah.

Secara detail rekapitulasi pelaksanaan pinjaman proyek Jepang pada Triwulan IV TA 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.12 Pinjaman Proyek yang Dibiayai Jepang sampai dengan Triwulan IV TA 2014

(*Dalam Juta JPY*)

No	Instansi PenanggungJawab	Jumlah Proyek	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan IV TA 2014		Pinjaman Belum Ditarik	Penyerapan TA 2014		
				Jumlah	%		Target	Realisasi	%
DilaksanakanolehKementerian/Lembaga									
1	Kemen PU-Pera	17	173.703,00	104.346,35	60,07	69.356,65	23.426,27	23.257,68	99,28
2	Kemendikbud	3	28.100,18	12.364,74	44,00	15.735,44	6.644,76	2.644,54	39,80
3	Kemenhub	5	105.102,00	20.000,77	19,03	85.101,23	21.413,45	7.487,89	34,97
4	Kemkominfo	1	2.911,00	1.857,36	63,81	1.053,64	374,81	338,78	90,39
5	LPNK	3	23.165,00	13.366,10	57,70	9.798,90	2.042,63	2064,14	101,05
Diterushibahkan (*On-Granting*)									
6	Pemda DKI Jakarta	2	50.019,00	14.515,01	29,02	35.503,99	18.450,28	3.531,21	19,14
Diteruspinjamkan (SLA)									
7	BUMN	10	158.688,00	29.590,82	18,65	129.097,18	8.501,54	8.839,32	103,97
Total		**41**	**541.688,18**	**196.041,16**	**36,19**	**345.647,02**	**80.853,74**	**48.163,55**	**59,57**

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan IV Tahun 2014 (diolah)

Jumlah penarikan pinjaman Jepang pada TA 2014 sampai dengan Triwulan IV adalah JPY 48.163,55 juta atau 59,57% dari target TA 2014. Jumlah ini sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah penarikan pinjaman Jepang pada TA 2013 sampai dengan Triwulan IV.

Dilihat dari persentase penarikan pinjaman tahun berjalan sampai dengan Triwulan IV, persentase penarikan pada TA 2014 lebih rendah dibandingkan dengan persentase penarikan pada TA 2013. Sedangkan target penyerapan pinjaman pada TA 2014 lebih tinggi dibandingkan dengan target penyerapan pada TA 2013.

Tabel 2.13 Perbandingan Penyerapan Pinjaman sampai dengan Triwulan IV TA 2013 dan 2014

(DalamJuta JPY)

Tahun Anggaran	Jumlah Proyek	Penyerapan TA Berjalan		
		Jumlah s/d Triwulan IV	Target	% terhadap Target Tahun Anggaran
2013	38	48.319,51	78.529,16	61,53
2014	41	48.163,55	80.853,74	59,57

Progress Variant Proyek Pinjaman Jepang ≤ -30

Berdasarkan hasil pemantauan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2014 diketahui terdapat 13 proyek pinjaman Jepang yang berada pada kategori *at risk* (PV ≤ -30). Proyek pinjaman Jepang yang masuk kategori *at risk* tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.14 *Progress Variant* Proyek Pinjaman Jepang

No	Nomor *Loan*	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Tutup	TA 2013	TA 2014			
					TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	IP-548	*Double Track Cirebon-Kroya Phase I & III*	25/07/2008	25/07/2016	-67,58	-70,69	-73,84	-73,84	-76,99
2	IP-508	*Railway Electrification and D.D. Tracking Project I*	13/12/2001	11/19/2016	-70,02	-71,71	-73,39	-73,39	-67,76
3	IP-532	*Asahan Hydroelectric Power Plant Construction III*	15/05/2007	15/05/2017	-61,77	-64,47	-67,24	-67,63	-69,99
4	IP-537	*PLN Operation Improvement System for Support*	15/05/2008	26/01/2018	-52,50	-54,47	-57,27	-57,27	-59,55
5	IP-542	*ICT Utilization Project forn Educational Quality Enchancement*	29/03/2007	29/05/2015	-45,21	-48,26	-51,34	-39,75	-31,20
6	IP-539	*North-West Sumatera Inter-Connector Transmission*	26/01/2009	26/01/2019	-48,84	-51,20	-50,62	-50,62	-39,86
7	IP-531	*Tanjung Priok Acces Road Construction Proj.II*	01/04/2006	30/06/2013	-47,13	-47,87	-47,65	-47,65	-39,97
8	IP-558	*Regional Solid Waste Management for Maminasata*	01/09/2010	01/09/2018	-39,14	-42,03	-45,00	-45,00	-47,84
9	IP-529	*Tanjung Priok Acces Road Construction Proj. I*	28/07/2005	28/01/2015	-36,95	-39,41	-40,51	-40,51	-42,66
10	IP-553	*Development of Bandung Institute of Technology*	28/07/2009	30/09/2018	-38,56	-41,01	-40,03	-40,03	-34,75

No	Nomor *Loan*	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Tutup	TA 2013	TA 2014			
					TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
11	IP-552	*Countermeasure for Sediment in Wonogiri Multipurpose*	28/07/2009	28/07/2015	-41,39	-36,98	-36,92	-36,92	-34,77
12	IP-557	*Lumut Balai Geothermal Power Plant Project*	25/10/2011	25/10/2019	-29,20	-32,17	-35,16	-35,16	-33,08
13	IP-545	*Aceh Reconstruction Project*	29/03/2007	26/07/2017	-29,49	-31,90	-32,16	-32,16	-30,48

Catatan: Proyek IP-552 tercatat termasuk at risk dengan PV: -34,77. Hal ini disebabkan pelaksana proyek tidak akan memanfaatkan seluruh dana pinjaman sebagai konsekuensi perubahan desain dan penggunaan material.

- **Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan 17 pinjaman proyek yang bersumber dari Jepang. Pinjaman meliputi 10 pinjaman proyek dikelola oleh Ditjen Sumber Daya Air; 3 pinjaman proyek dikelola oleh Ditjen Bina Marga; dan 4 pinjaman proyek dikelola Ditjen Cipta Karya. Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2014 total kumulatif penyerapan pinjaman Kementerian PU dan Perumahan Rakyat jumlahnya JPY 104.346,35 juta atau 60,07% dari total pinjaman (JPY 173.703 juta).

Pada tahun anggaran 2014 sampai dengan Triwulan IV, penyerapan pinjaman di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar JPY 23.257,68 juta atau 99,28% dari target penyerapan TA 2014. Persentase penyerapan pinjaman pada kementerian ini pada TA 2014 sampai dengan Triwulan IV lebih besar dibandingkan persentase penyerapan pinjaman pada TA 2013 sampai dengan Triwulan IV. Perbandingan jumlah penyerapan pinjaman sampai dengan Triwulan IV TA 2013 dan TA 2014 di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

Tabel 2.15 Perbandingan Penyerapan Pinjaman sampai dengan Triwulan IV TA 2013 dan 2014

(DalamJuta JPY)

Tahun Anggaran	Penarikan Kumulatif	Penyerapan TA Berjalan	
		Jumlah s.d Triwuln IV	% terhadap Target Tahun Anggaran
2013	117.881,14	21.401,16	89,93
2014	104.346,35	23.257,68	99,28

Ditjen Sumber Daya Air

Sebanyak 10 proyek yang dibiayai oleh pinjaman Jepang dikelola oleh Ditjen Sumber Daya Air (SDA), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Total pinjaman proyek yang dikelola oleh Ditjen SDA sebesar JPY 87.640,00 juta. Hingga Triwulan IV Tahun 2014, jumlah pinjaman yang telah berhasil diserap Ditjen SDA adalah JPY 56.987,06 juta atau 65,02% dari total nilai pinjaman. Pada TA 2014 sampai dengan Triwulan IV, Ditjen SDA telah menyerap pinjaman sebesar JPY 9.730,56 juta atau 92,85% dari target penyerapan TA 2014 (JPY 10.479,53 juta).

- ***Lower Solo River Improvement II* (IP-522)**
  Realisasi Penyerapan Dana

  Proyek IP-522 pada TA 2014 sampai dengan Triwulan IV, telah melakukan penyerapan pinjaman sebesar JPY 549,86 juta atau 61,76% dari target penyerapan pinjaman TA 2014. Pada Triwulan IV Tahun 2014, proyek mengerjakan 3 paket kontrak yaitu Jasa konsultansi, Paket J-2(1) Tanggul Keliling Rawa Jabung dan FFWS. Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2014 kumulatif penyerapan pinjaman IP-522 sebesar JPY 7.654,93 juta atau 81,91% dari total pinjaman (JPY 9.345,00 juta).

  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

  Proyek masih mengalami masalah pada Paket J-2(1) terkait pembebasan lahan. Pelaksana proyek telah melakukan rapat koordinasi dengan panitia kabupaten dan pihak-pihak terkait pada tanggal 5 Nov 2014 di Kecamatan Widang. Dari hasil rapat koordinasi disimpulkan bahwa perwakilan warga meminta pekerjaan Jabung Ring Dike agar tetap berjalan seiring proses ganti rugi tanam tumbuh. Proses penentuan ganti rugi disepakati dalam pengadilan.

- ***Komering Irrigation Project Stage Phase II* (IP-523)**
  Realisasi Penyerapan Dana

  Proyek IP-523 pada TA 2014 hingga Triwulan IV, telah melakukan penyerapan pinjaman sebesar JPY 1.476,80 juta, jumlah ini melebihi target penyerapan pinjaman TA 2014 (JPY 671,77 juta). Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2014, nilai kumulatif penyerapan pinjaman proyek IP-523 sebesar JPY 11.729,03 juta atau 85,05% dari total pinjaman.

  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

  Proyek telah menyelesaikan 10 paket kontrak dan 7 paket kontrak sedang dikerjakan.

- ***Integrated Water Resources and Flood Management*(IP-534)**
  Realisasi Penyerapan Dana

  Pada TA 2014 sampai dengan Triwulan IV, proyek IP-534 telah melakukan penyerapan pinjaman sebesar JPY 2.159,03 juta, jumlah ini melebihi dari Target TA 2014 (JPY 1.292,32 juta). Proyek telah menyelesaikan 5 paket kontrak. Pada TA 2014, proyek sedang menyelesaikan 2 paket kontrak yaitu Paket B1: *Dam Body & Related Structure* dan Paket *Consulting Services*. Nilai kumulatif penyerapan pinjaman proyek IP-534 hingga Triwulan IV Tahun 2014 sebesar JPY 14.017,53 juta atau 85,99% dari nilai pinjaman.

- ***Participatory Irrigation System Improvement Project* (IP-546)**
  Realisasi Penyerapan Dana

  IP-546 pada TA 2014 sampai dengan Triwulan IV, telah melakukan penyerapan pinjaman sebesar JPY 1.371,10 juta atau 88,90% dari target penyerapan pinjaman TA 2014 (JPY 1.542,38 juta). Penyerapan kumulatif pinjaman proyek IP-546 sampai dengan Triwulan IV Tahun 2014 sebesar JPY 9.662,21 juta atau 78,49% dari total jumlah pinjaman.

- ***Decentralized Irrigation System Improvement Project*(IP-547)**
  Realisasi Penyerapan Dana

  Proyek IP-547 pada TA 2014 sampai dengan Triwulan IV, telah melakukan penyerapan pinjaman sebesar JPY 1.022,92 juta, jumlah ini melebihi dari target penyerapan TA 2014 (JPY 974,17 juta). Hingga Triwulan IV Tahun 2014 nilai kumulatif penyerapan pinjaman dari proyek ini sebesar JPY 7.129,10 juta atau 79,50% dari total nilai pinjaman. Masalah pengadaan lahan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan proyek pada triwulan sebelumnya telah dapat diselesaikan.

- ***Urban Flood Control System Improvement in Selected Cities* (IP-551)**
  Realisasi Penyerapan Dana

  Proyek IP-551 pada TA 2014 sampai dengan Triwulan IV, telah melakukan penyerapan pinjaman sebesar JPY 1.891,12 juta, jumlah ini melebihi dari target penyerapan pinjaman TA 2014 (JPY 1.865,46 juta). Kumulatif penyerapan IP-551 hingga Triwulan IV 2014 sebesar JPY 3.419,42 juta atau 45,65% dari total pinjaman.

  Dalam pelaksanaannya, proyek terkendala masalah pengadaan lahan. Masalah tersebut terkait dengan ketersedian dana untuk melakukan pembebasan lahan. Pembebasan lahan untuk lahan yang belum dikerjakan ditargetkan akan dimulai pada TA 2015.

- ***Countermeasure for Sediment in Wonogiri Multipurpose* (IP-552)**
  Realisasi Penyerapan Dana

  Proyek IP-522 pada TA 2014 sampai dengan Triwulan IV melakukan penyerapan pinjaman sebesar JPY 1.259,74 juta atau 90,72% dari target penyerapan TA 2014 (JPY 1.388,58 juta). Nilai kumulatif penyerapan IP-552 hingga Triwulan IV Tahun 2014 sebesar JPY 3.374,84 juta atau 55,69% dari total pinjaman.

  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

  Pelaksana proyek telah menyelesaikan pekerjaan fisik Paket 2 dan Paket 4, saat ini sedang dalam proses pembayaran dan pemeliharaan. Pekerjaan Paket 6-1 dan Paket 6-2 mengalami keterlambatan karena masih terdapat tanaman dan menunggu panen di sebagian lokasi proyek. Paket 6-4 dan 6-5 telah tanda tangan kontrak tanggal 8 Desember 2014.

- ***Upper Citarum Basin Flood Management* IP-559)**

  Realisasi Penyerapan Dana

  Hingga Triwulan IV Tahun 2014, proyek belum melakukan penyerapan pinjaman.

  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

  Proses pengadaan untuk *Consulting Services* proyek sudah sampai pada tahap pemasukan dokumen tender dan ditutup 30 Januari 2015.

- ***Urgent Disaster Reduction Project for Mount Merapi and Lower Progo River Area - Phase II*** **(IP-566)**

  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

  Proyek IP-566 akan menggunakan sistem *full e-procurement* telah mendapat persetujuan dari Jepang. Proses lelang untuk proyek ini rencananya akan dimulai pada minggu ke 3 bulan Januari 2015.

- ***Countermeasure for Sediment in Wonogiri Multipurpose Dam Reservoir II*** **(IP-567)**

  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

  Proyek dalam tahap persiapan dan cara pengadaan telah disepakati menggunakan *full e-procurement* yang akan diterapkan. Paket 2.2 *(Construction of Check Dam Including Riverbank Protection in Tirtomoyo River*) pekerjaannya dibatalkan.

Ditjen Bina Marga

Terdapat 3 proyek yang dibiayai oleh pinjaman Jepang dan dikelola oleh Ditjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan total pinjaman sebesar JPY 64.519,00 juta. Total pinjaman yang telah diserap hingga Triwulan IV Tahun 2014 sebesar JPY 34.410,45 juta atau 53,33% dari total pinjaman. Pada TA 2014 sampai dengan Triwulan IV, penyerapan pinjaman yang telah dilakukan Ditjen Bina Marga sebesar JPY 6.354,95 juta, jumlah ini melebihi dari target penyerapan TA 2014 yang telah direncanakan (JPY 4.155,30 juta).

- ***Tanjung Priok Acces Road Construction Project I*** **(IP-529)**

  Realisasi Penyerapan Dana

  Proyek IP-529 pada TA 2014 sampai dengan Triwulan IV telah melakukan penyerapan pinjaman sebesar JPY 1.122,20 juta atau 90,07% dari target penyerapan TA 2014 (JPY 1.245,85 juta). Nilai kumulatif penyerapan pinjaman dari IP-529 hingga Triwulan IV Tahun 2014 sebesar JPY 14.872,89 juta atau 56,54% dari total nilai pinjaman.

  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

  Terkait pelaksanaan area Kali Baru dilakukan perpanjangan waktu dan telah di informasikan ke pihak Jepang.

- ***Tanjung Priok Acces Road Construction Proj. II*** **(IP-531)**

  Realisasi Penyerapan Dana

  Proyek IP-531 pada TA 2014 sampai dengan Triwulan IV telah melakukan penyerapan pinjaman sebesar JPY 4.334,43 juta, jumlah ini melebihi dari target penyerapan pinjaman TA 2014 (JPY 2.237,41 juta). Hingga Triwulan IV Tahun 2014, kumulatif penyerapan pinjaman IP-531 jumlahnya JPY 14.360,84 juta atau 53,95% dari total pinjaman.

  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

  Pelaksanaan proyek sedang dalam proses amandemen kontrak pada Paket 3 dan Paket 5.

- ***Aceh Reconstruction Project* (IP-545)**

  Realisasi Penyerapan Dana

  Proyek IP-545 pada TA 2014 sampai dengan Triwulan IV melakukan penyerapan pinjaman sebesar JPY 898,32 juta, jumlah ini melebihi dari target penyerapan pinjaman TA 2014 (JPY 672,04 juta). Hingga Triwulan IV 2014, nilai kumulatif penyerapan pinjaman IP-545 sebesar JPY 5.176,72 juta atau 44,65% dari total pinjaman.

  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

  Proyek terdiri dari 8 paket kontrak dimana 5 paket kontrak telah selesai dilaksanakan dan 3 paket kontrak lainnya masih dalam proses penyelesaian.

Ditjen Cipta Karya

Ditjen Cipta Karya merupakan *executing agency* dari 5 proyek yang dibiayai oleh pinjaman Jepang di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Total pinjaman proyek yang dikelola Ditjen Cipta Karya yaitu sebesar JPY 21.544,00 juta dan total pinjaman yang telah diserap sampai dengan Triwulan IV Tahun 2014 adalah JPY 33.475,70 juta atau 74,29% dari total pinjaman.

Pada TA 2014 sampai denganTriwulan IV, penyerapan pinjaman yang telah dilakukan sebesar JPY 7.172,17 juta atau 81,58% dari target penyerapan TA 2014. Pada TA 2014 target penyerapan Ditjen Cipta Karya adalah JPY8.791,44 juta.

- ***Denpasar Sewerage Development Project II* (IP-550)**

  Realisasi Penyerapan Dana

  Proyek IP-550 pada TA 2014 sampai dengan Triwulan IV telah melakukan penyerapan pinjaman sebesar JPY 77,31 juta atau 86,38% dari target penyerapan TA 2014.

  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

  Proyek telah menyelesaikan 1 paket kontrak yaitu paket konstruksi ICB-2. Pada TA 2014, proyek sedang menyelesaikan 1 paket kontrak yaitu Supervisi DSDP II. Hingga Triwulan IV Tahun 2014, nilai kumulatif penyerapan pinjaman IP-550 sebesar JPY 5.656,00 juta atau 94,20% dari nilai total pinjaman.

- ***Regional Solid Waste Management for Mamminasata* (IP-558)**

  Realisasi Penyerapan Dana

  Proyek IP-558 pada TA 2014 sampai dengan Triwulan IV telah melakukan penyerapan sebesar JPY 25,36 juta atau 1,85% dari target TA 2014 (JPY 1.370,52 juta). Hingga Triwulan IV 2014, nilai kumulatif penyerapan pinjaman IP-558 adalah JPY 223,34 juta atau 6,30% dari nilai total pinjaman.

  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

  Pekerjaan proyek belum dapat dilaksanakan karena belum disepakatinya usulan Pemkab Gowa mengenai *transfer station* di Kota Makassar dan rencana Bupati Gowa memindahkan lokasi TPA Regional.

- ***Rural Settlement Infrastructure and Kabupaten Strategic Area Development* (IP-564)**

  Realisasi Penyerapan Dana

  Proyek ini mulai efektif pada tanggal 23 Juni 2014 dengan jumlah pinjaman JPY 10.029 juta. Pada TA 2014 sampai dengan Triwukan IV, proyek IP-564 telah melakukan penyerapan pinjaman sebesar JPY 7.069,50 juta atau 96,43% dari target penyerapan TA 2014 (JPY 7.331,42 juta). Hingga Triwulan IV Tahun 2014, total penyerapan pinjaman IP-564 adalah JPY 7.069,50 juta atau 70,49% dari total pinjaman.

- **Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi**

  Terdapat 3 pinjaman proyek yang bersumber dari Jepang dilaksanakan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan total nilai pinjaman sebesar JPY 28.100,18 juta. Pinjaman tersebut dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, yaitu IP-541 *Hasanuddin University Engineering Faculty Development*, IP-549 *Development of World Class University At University of Indonesia*, dan IP-553 *Development of Bandung Institute of Technology*. Total pinjaman yang telah diserap hingga Triwulan IV Tahun 2014 adalah sebesar JPY 12.364,74 juta atau 44,00% dari total nilai pinjaman.

  Pada TA 2014 sampai dengan Triwulan IV, jumlah penyerapan pinjaman Jepang di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebesar JPY 2.644,54 juta atau 39,80% dari target penyerapan TA 2014 (JPY 6.644,76 juta). Jumlah tersebut sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan jumlah penyerapan pinjaman pada TA 2013 sampai dengan Triwulan IV. Perbandingan jumlah penyerapan pinjaman pada TA 2013 sampai dengan Triwulan IV dan jumlah penyerapan pinjaman pada TA 2014 sampai dengan Triwulan IV di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi adalah sebagai berikut.

Tabel 2.16 Perbandingan Penyerapan Pinjaman sampai denganTriwulan IV TA 2013 dan 2014

(Dalam Juta JPY)

Tahun Anggaran	Penarikan Kumulatif	Penyerapan TA Berjalan	
		Jumlah s/d Triwuln IV	% terhadap Target Tahun Anggaran
2013	9.720,20	2.398,26	24,83
2014	12.364,74	2.644,54	39,80

- ***Hasanuddin University Engineering Faculty Development* (IP-541)**

  Realisasi Penyerapan Dana

  Proyek IP-541 pada TA 2014 sampai dengan Triwulan IV, telah melakukan penyerapan pinjaman sebesar JPY 824,51 juta atau 77,45% dari target penyerapan TA 2014 (JPY 1.064,51 juta). Hingga Triwulan IV 2014, nilai kumulatif penyerapan dari proyek IP-541 adalah JPY 5.514,51 juta atau 70,69% dari total nilai pinjaman.

- *Development of World Class University at University of Indonesia* **(IP-549)**

  Realisasi Penyerapan Dana

  Proyek IP- 549 pada TA 2014 sampai dengan Triwulan IV telah melakukan penyerapan sebesar JPY 790,53 juta atau 23,31% dari target penyerapan TA 2014 (JPY 3.392,00 juta). Rendahnya penyerapan disebabkan belum tercatatnya penyerapan pinjaman yang dilakukan pelaksana proyek akibat belum dikeluarkannya dokumen SP3D oleh Kementerian Keuangan sebagai bukti pencairan pinjaman. Selain itu, pelaksana proyek menghadapi masalah dengan kontraktor yang tidak mengirimkan barang sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati.

- *Development of Bandung Institute of Technology* **(IP-553)**

  Realisasi Penyerapan Dana

  Proyek IP-553 pada TA 2014 sampai dengan Triwulan IV, melakukan penyerapan pinjaman sebesar JPY 1.029,50 juta atau 47,05% dari target penyerapan TA 2014 (JPY 2.188,25 juta). Hingga Triwulan IV Tahun 2014, nilai kumulatif penyerapan pinjaman IP-553 sebesar JPY 1.380,4 juta atau 24,40% dari total nilai pinjaman.

  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

  Pelaksanaan fisik mengalami keterlambatan karena pekerjaan konsultan yang lambat. Pelaksana proyek mengalami masalah dalam pengadaan barang karena keterlambatan DIPA.

- **KementerianPerhubungan**

  Terdapat 5 pinjaman proyek dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan terdiri atas 1 proyek yang dikelola oleh Ditjen Perhubungan Laut dan 4 proyek yang dikelola oleh Ditjen Perkeretaapian. Total nilai pinjaman Kementerian Perhubungan adalah JPY 105.102,00 juta. Hingga Triwulan IV Tahun 2014 penyerapan kumulatif yang telah dilakukan sebesar JPY 20.000,77 juta atau 19,03% dari total pinjaman.

  Pada TA 2014 sampai dengan Triwulan IV Kementerian Perhubungan telah melakukan penyerapan pinjaman JPY 5.784,09 juta atau 81,77% dari target penyerapan TA 2014. Perbandingan jumlah penyerapan pinjaman pada TA 2013 sampai dengan Triwulan IV dengan jumlah penyerapan pinjaman pada TA 2014 sampai dengan Triwulan IV di Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.17 Perbandingan Penyerapan Pinjaman sampai dengan Triwulan IV TA 2013 dan 2014

(DalamJuta JPY)

Tahun Anggaran	Penarikan Kumulatif	Penyerapan TA Berjalan	
		Jumlah s/d Triwulan IV	% terhadap Target Tahun Anggaran
2013	13.345,77	5.784,09	81,77
2014	20.000,77	7.487,89	34,97

- ***The Urgent Rehabilitation Project of Tanjung Priok Port*** **(IP-521)**

  Realisasi Penyerapan Dana

  Proyek IP-521 pada TA 2014 sampai dengan Triwulan IV, telah melakukan penarikan pinjaman sebesar JPY 4.464,10 juta, jumlah ini melebihi target penyerapan TA 2014 (JPY 3.303,72 juta). Hingga Triwulan IV 2014, nilai kumulatif penarikan pinjaman proyek IP-521 adalah JPY 10.847,42 juta atau 90,01% dari total nilai pinjaman.

  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

  Pekerjaan fisik proyek telah selesai.

- ***Railway Electrification And Double-Double Tracking Project I*** **(IP-508)**

  Realisasi Penyerapan Dana

  Proyek IP-508 pada TA 2014 sampai dengan Triwulan IV telah melakukan penyerapan pinjaman sebesar JPY 3.023,79 juta atau 27,84% dari target penyerapan TA 2014.

  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

  Pelaksana proyek sedang mengerjakan konstruksi Paket B1 dan paket pekerjaan supervisi untuk konstruksi B1. Pekerjaan konstruksi Paket B2(1) akan dibiayai oleh anggaran Pemerintah Indonesia berdasarkan surat Direktur Jenderal Pengelolaan Utang kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan No. S-658/PU/2014 tanggal 12 September 2014. Hingga Triwulan IV 2014 , nilai kumulatif penyerapan pinjaman IP-508 adalah JPY 8.507,06 juta atau 20,73% dari nilai total pinjaman.

- ***Double Tracking on Java South Line Project*** **(IP-548)**

  Realisasi Penyerapan Dana

  Proyek IP-548 *Double Tracking on Java South Line Project* belum melakukan penyerapan pinjaman hingga Triwulan IV 2014.

  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

  Revisi DIPA dari proyek ini akan segera diproses. Negosiasi kontrak IP-548 telah selesai dan menunggu keputusan pimpinan Kementerian Perhubungan.

- ***Railway Doubletrack Java South Line IV (Kroya-Kutoarjo)*****(IP-562)**

  Realisasi Penyerapan Dana

  Proyek IP-562 belum melakukan penarikan pinjaman sampai dengan Triwulan IV 2014. Proyek merupakan lanjutan dari *loan* IP-508.

  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

  Keputusan kontrak untuk dilanjutkan belum final menunggu keputusan pimpinan Kementerian Perhubungan.

- ***Jabodetabek Railways Capacity Enhancement - Phase I*** **(IP-563)**

  Realisasi Penyerapan Dana

  Proyek IP-563 sampai dengan Triwulan IV 2014 belum melakukan penarikan pinjaman.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pelaksana proyek sedang melakukan perbaikan atas TOR dan RAB. Proses lelang akan dilaksanakan setelah perbaikan tersebut selesai.

- **Kementerian Komunikasi dan Informatika**

Terdapat 1 (satu) pinjaman proyek yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu IP-542*ICT Utilization for Educational Quality Enhancement in Yogyakarta Province.*

- ***ICT Utilization for Educational Quality Enhancement in Yogyakarta Province* (IP-542)**
  Realisasi Penyerapan Dana

  Proyek IP-542 pada TA 2014 sampai dengan Triwulan IV telah melakukan penyerapan JPY 338,78 juta atau 90,39% dari target penyerapan TA 2014 (JPY 90,39 juta). Pekerjaan fisik proyek IP-542 telah selesai. Nilai kumulatif penyerapan pinjaman IP-542 hingga Triwulan IV 2014 adalah JPY 1.857,36 juta atau 63,51% dari total nilai pinjaman.

- **Badan Informasi Geospasial (BIG)**

Badan Informasi Geospasial (BIG) melaksanakan 1 (satu) pinjaman proyek yaitu IP-544 *National Geo-Spatial Data Infrastructure Development Project*.

- ***National Geo-Spatial Data Infrastructure Development Project* (IP-544)**
  Realisasi Penyerapan Dana

  Total pinjaman IP-544 adalah JPY 6.373,00 juta. Kumulatif penyerapan pinjaman IP-544 hingga Triwulan IV 2014 adalah JPY 5.848,54 juta atau 91,77% dari total pinjaman.

  Proyek IP-544 pada TA 2014 sampai dengan Triwulan IV telah melakukan penyerapan sebesar JPY 1.069,20 juta atau 87,03% dari target penyerapan TA 2014 (JPY 1.228,60 juta). Jumlah penyerapan pinjaman proyek IP-544 pada TA 2014 sampai dengan Triwulan IV lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah penyerapan pinjaman pada TA 2013 sampai dengan Triwulan IV.

Tabel 2.18 Perbandingan Penyerapan Pinjaman sampai dengan Triwulan IV TA 2013 dan 2014

(DalamJuta JPY)

Tahun Anggaran	Penarikan Kumulatif	Penyerapan TA Berajalan	
		Jumlah s/d Triwulan 2014	% terhadap Target Tahun Anggaran
2013	4.779,34	718,67	37,06
2014	5.848,54	1.069,20	87,03

- **KementerianPerencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas**

Bappenas melaksanakan 2 (dua) pinjaman proyek yaitu IP-535 *Professional Human Resources Development Project (PHRDP)* – III dan IP-568 *Professional Human Resources Development Project (PHRDP) – IV*. Proyek IP-568 merupakan lanjutan dari proyek IP-535. Perbandingan jumlah penyerapan pinjaman pada TA 2013 sampai dengan

Triwulan IV dengan jumlah penyerapan pinjaman pada TA 2014 sampai dengan Triwulan IV di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas adalah sebagai berikut:

Tabel 2.19 Perbandingan Penyerapan Pinjaman sampai dengan Triwulan IVTA 2013 dan 2014

(DalamJuta JPY)

Tahun Anggaran	Penarikan Kumulatif	Penyerapan TA Berjalan	
		Jumlah s/d Triwulan IV	% terhadap Target Tahun Anggaran
2013	6.522,62	575,80	61,49
2014	7.517.56	994,94	122,22

- ***Professional Human Resources Development Project (PHRDP) III*** **(IP-535)**

  Realisasi Penyerapan Dana

  Penyerapan pinjaman proyek IP-535 pada TA 2014 sampai dengan Triwulan IV adalah JPY 750,08 juta, jumlah ini melebihi dari target TA 2014. Hingga Triwulan IV Tahun 2014 nilai kumulatif peyerapan pinjaman IP-535 adalah JPY 7.272,71 juta atau 74,85% dari nilai total pinjaman.

  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

  Pelaksana proyek sedang menyelesaikan 3 paket *domestic training* yaitu JFP Tingkat Pertama, JFP Muda, dan JFP Madya. Permasalahan yang dihadapi oleh proyek IP-535 yaitu mengenai pengumpulan *statement of expenditure*.

- ***Professional Human Resources Development Project (PHRDP) – IV*** **(IP-568)**

  Realisasi Penyerapan Dana

  IP-568 mulai efektif pada tanggal 25 April 2014. Nilai pinjaman dari proyek ini adalah JPY 7.272,71 juta. Proyek IP-568 (*Professional Human Resources Development Project (PHRDP) – IV)* pada TA 2014 sampai dengan Triwulan IV telah melakukan penyerapan pinjaman JPY 244,86 juta. Proyek ini belum menyelesaikan proses seleksi konsultan. Bappenas masih menggunakan konsultan PHRDP III sampai konsultan PHRDP IV terpilih. Total penyerapan pinjaman proyek IP-568 sebesar JPY 244,86 juta atau 3,46% dari total pinjaman.

- **Pemerintah Provinsi DKI Jakarta**

  Sebanyak 2 (dua) pinjaman proyek yang bersumber dari pinjaman Jepang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu IP-536 *E/S Jakarta Mass Rapid Transit System* dan IP-554 *Construction of Jakarta Mass Rapid Transit Project*. Hingga Triwulan IV TA 2014, Pemerintah DKI Jakarta hanya dapat melakukan penyerapan pinjaman sebesar 19,14% dari target TA 2014.

Tabel 2.20 Perbandingan Penyerapan Pinjaman sampai dengan Triwulan IV TA 2013 dan 2014

(DalamJuta JPY)

Tahun Anggaran	Penarikan Kumulatif	Penyerapan TA Berjalan	
		Jumlah s/d Triwuln IV	% terhadap Target Tahun Anggaran
2013	10.983,80	9.876,29	63,01
2014	14.515,01	3.531,21	19,14

- ***E/S Jakarta Mass Rapid Transit System* (IP-536)**

  Realisasi Penyerapan Dana

  Proyek IP-536 pada TA 2014 sampai dengan Triwulan IV telah melakukan penyerapan pinjaman sebesar JPY 395,76 juta atau 75,76% dari target penyerapan TA 2014 (JPY 75,76 juta). Proyek IP-536 telah selesai. Nilai kumulatif penyerapan IP-536 hingga Triwulan IV 2014 adalah JPY 1.659,78 juta atau 88,81% dari nilai total pinjaman (JPY 1.869,00 juta).

- ***Construction of Jakarta Mass Rapid Transit Project*(IP-554)**

  Realisasi Penyerapan Dana

  Proyek IP-554 pada TA 2014 sampai dengan Triwulan IV telah melakukan penyerapan pinjaman sebesar JPY 3.135,45 juta atau 17,49% dari target penyerapan TA 2014 (JPY 17.927,91 juta). Hingga Triwulan IV Tahun 2014, nilai kumulatif penyerapan pinjaman proyek IP-554 adalah JPY 12.855,23 juta atau 26,70% dari total nilai pinjaman.

  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

  Proyek IP-554 *Construction of Jakarta Mass Rapid Transit Project* mengerjakan 11 paket kontrak yang terdiri dari paket kontrak Sipil Konstruksi Atas (CP 101, CP 102, dan CP 103), Sipil Konstruksi Bawah (CP 104, CP 105, CP 106, CP 107, dan CP 108), *construction management consulting services, operation management consulting services*, dan *tender assistant*. Proyek mengalami kemajuan dalam persiapan pekerjaan konstruksi khususnya pembebasan lahan Stadion Lebak Bulus yang telah dalam proses verivikasi. Selain itu, proyek masih melakukan pembebasan lahan dan relokasi utilitas di beberapa lokasi.

- **PT. PLN**

  Terdapat 9 (sembilan) pinjaman proyek yang dilaksanakan oleh PT. PLN dengan total pinjaman sebesar JPY 131.722 juta. Hingga Triwulan IV 2014, total pinjaman yang telah berhasil diserap sebesar JPY 27.779,24 juta atau 21,09% dari total pinjaman. Pada TA 2014 sampai dengan Triwulan IV, PT. PLN telah melakukan penyerapan pinjaman sebesar 7.349,88 juta, jumlah ini melebihi target penyerapan TA 2014.

Tabel 2.21 Perbandingan Penyerapan Pinjaman PT. PLN sampai dengan Triwulan IV TA 2013 dan 2014

(DalamJuta JPY)

Tahun Anggaran	Penarikan Kumulatif	Penyerapan TA Berjalan	
		Jumlah s/d Triwulan IV	% terhadap Target Tahun Anggaran
2013	20.429,35	6.989,30	45,96
2014	27.779,24	7.349,88	104,64

- ***Keramasan Power Plant Extension Project* (IP-527)**

  Realisasi Penyerapan Dana

  Proyek IP-527 pada TA 2014 sampai dengan Triwulan IV telah melakukan penarikan pinjaman sebesar JPY 1.152,90 juta, jumlah ini melebihi target penyerapan TA 2014. Hingga Triwulan IV 2014, IP-527 telah melakukan penyerapan pinjaman sebesar JPY 9.686,45 juta atau 99,49% dari nilai total pinjaman proyek.

  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

  Pekerjaan fisik proyek sudah selesai dilaksanakan dan sedang dalam masa pemeliharaan. Kendala pada pelaksanaan proyek yaitu kerusakan yang terjadi pada Unit 2. Perbaikan Unit 2 telah dilakukan dan ditanggung oleh kontraktor karena masih dalam masa *guarantee period*. Kontraktor tidak setuju untuk mengulang waktu 1 tahun untuk FAC terhitung dari selesainya *replacement* rotor gas turbine yang rusak.

- ***Asahan Hydroelectric Power Plant Construction III* (IP-532)**

  Realisasi Penyerapan Dana

  Proyek IP-532 pada TA 2014 sampai dengan Triwulan IV telah melakukan penyerapan sebesar JPY 41,08 juta atau 28,67% dari target penyerapan TA 2014. Hingga Triwulan IV 2014, total penyerapan pinjaman proyek ini adalah JPY 1.012,35 juta atau 3,68% dari total pinjaman proyek.

  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

  Proyek terkendala masalah ijin pinjam kawasan hutan yang belum terbit. Dokumen persyaratan terbitnya ijin pinjam pakai kawasan hutan sedang dalam proses penandatanganan, direncanakan ijin pinjman pakai kawasan hutan ini akan terbit Januari 2015. PT PLN (Persero) diminta untuk memenuhi kewajiban dalam melaksanakan tata batas kawasan hutan dan inventarisasi sebagai persyaratan terbitnya Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Gugatan Kasus Perdata dan Kasus TUN dari PT SSL perihal Ijin Prinsip Pembangunan dan Sumber Air yang dinilai mengganggu proyek pembangunan PLTA Meranti Utara, PLN menang ditingkat banding. Sampai saat ini PLN manunggu putusan MA terhadap gugatan kasasi dari PT SSL.

- ***PLN Operation Improvement System* (IP-537)**

Realisasi Penyerapan Dana

Proyek IP-537 pada TA 2014 sampai dengan Triwulan IV telah melakukan penyerapan pinjaman sebesar JPY 59,43 juta, jumlah ini lebih dari target penyerapan TA 2014 (JPY 23,61 juta). Hingga triwulan IV Tahun 2014 IP-537 baru menyerap pinjaman sebesar JPY 284,20 juta atau 6,32% dari total pinjaman proyek (JPY 4.498 juta).

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pelaksana proyek IP-537 mempertimbangkan untuk tidak melanjutkan proyek menggunakan dana pinjaman tetapi dengan menggunakan anggaran PLN. Pelaksana proyek akan menyampaikan hal ini ke Kementerian Keuangan.

- ***Peusangan Hydroelectric Power Plant Construction*(IP-538)**

Realisasi Penyerapan Dana

Proyek IP-538 pada TA 2014 sampai dengan Triwulan IV telah melakukan penyerapan pinjaman sebesar JPY 2.094,35 juta atau 62,14% dari target penyerapan TA 2014. Hingga Triwulan IV Tahun 2014, kumulatif penyerapan pinjman priyek IP-538 adalah JPY 9.827,22 juta atau 37,77% dari total pinjaman proyek.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pada Triwulan IV Tahun 2014, permasalahan lahan telah dapat diatasi.

- ***North-West Sumatera Inter-Connector Transmission*(IP-539)**

Realisasi Penyerapan Dana

Proyek IP-539 pada TA 2014 hingga Triwulan IV melakukan penyerapan sebesar JPY 3.629,18 juta atau 69,23% dari target penyerapan TA 2014. Kumulatif penyerapan proyek ini sampai dengan Triwulan IV Tahun 2014 adalah JPY 5.517,94 juta atau 34,23% dari total pinjaman proyek.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pada Triwulan IV Tahun 2014, pelaksana proyek telah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur Sumatera Barat untuk hutan suaka alam dan sedang menunggu proses final MoU dengan BKSDA SUMBAR oleh Kementerian Kehutanan. Untuk wilayah Sumatera Utara, pelaksana proyek sedang mempersiapkan peninjauan lapangan PERTEK DINHUT tingkat Provinsi dan Kabupaten untuk mendapatkan rekomendasi Gubernur Sumatera Utara.

- ***Engineering Services for Java-Sumatera Interconnection* (IP-555)**

Realisasi Penyerapan Dana

Proyek IP-555 pada TA 2014 sampai dengan Triwulan IV telah melakukan penyerapan pinjaman sebesar JPY 270,49 juta atau 66,20 dari target penyerapan TA 2014. Kumulatif penyerapan pinjaman proyek sampai dengan Triwulan IV 2014 adalah JPY 1.348,64 juta atau 34,71% dari total pinjaman.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pelaksana proyek telah melakukan penandatangan MoU dengan PT PN VII pada tanggal 26 September 2014 terkait penggunaan lahan untuk pembangunan CS Muara Enim. Penggunaan lahan IPP PLTU Banten sedang dalam proses pembuatan perjanjian dengan pihak IPP LBE untuk pembangunan *landing point* di Salira.

- ***Java-Sumatera Interconnection Transmission Line*** **(IP-556)**

Realisasi Penyerapan Dana

Proyek IP-556 terkontrak pada akhir Oktober 2014. Sampai dengan Triwulan IV 2014 proyek ini belum ada penyerapan pinjaman karena masih dalam proses pengadaan. Diperkirakan poyek ini baru ada penyerapan pada tahun 2015.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Hingga Triwulan IV Tahun 2014 ijin penggunaan lahan milik PT PN VII belum terbit, PLN telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

- ***Tulehu Geothermal Power Plant Project (E/S)*****(IP-560)**

Realisasi Penyerapan Dana

Proyek IP-560 pada TA 2014 sampai dengan Triwulan IV telah melakukan penyerapan pinjaman sebesar JPY 102,44 juta atau 30,20% dari target penyerapan TA 2014. Nilai kumulatif penyerapan proyek IP-560 hingga Triwulan IV 2014 sebesar JPY 102,44 juta atau 2,01% dari total pinjaman proyek.

- ***Indramayu Coal Fired Power Plant Project (E/S)*****(IP-561)**

Realisasi Penyerapan Dana

Proyek IP-561 belum melakukan penyerapan pinjaman hingga Triwulan IV Tahun 2014.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

PLN sedang menunggu dokumen AMDAL dari Bupati sebagai prasyarat persetujuan kontrak. Selain dari permasalahan lahan proyek ini juga terkendala masalah tender. PT PLN meminta persetujuan Jepang untuk melakukan proses re-tender namun sampai dengan Triwulan IV pihak Jepang belum menyetujui.

- **PT. Pertamina**

PT. Pertaminamelaksanakan 1 pinjaman proyek yaitu IP-557*Lumut Balai Geothermal Power Plant.*

- ***Lumut Balai Geothermal Power Plant*** **(IP-557)**

Realisasi Penyerapan Dana

Total pinjaman proyek IP-557 adalah JPY 26.966 juta dan jumlah pinjaman yang berhasil diserap sampai dengan Triwulan IV Tahun 2014 sebesar JPY 1.811,58 juta atau 6,72% dari total pinjaman.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pada Triwulan IV, proyek sedang dalam tahap proses negosiasi kontrak dengan vendor. Proses tersebut membutuhkan waktu yang lama karena perbedaan lingkup dan spesifikasi desain. Hingga Triwulan IV TA 2014, PT. Pertamina melakukan penarikan pinjaman sebesar JPY 1.489,43 juta melebihi dari target penyerapan TA 2014.

Tabel 2.22 Perbandingan Penyerapan Pinjaman sampai dengan Triwulan IV TA 2013 dan 2014

(DalamJuta JPY)

Tahun Anggaran	Penarikan Kumulatif	Penyerapan TA Berjalan	
		Jumlah s/d Triwulan IV	% terhadap Target Tahun Anggaran
2013	322,15	122,13	4,53
2014	1.811,58	1.489,43	100,80

Australia

Pinjaman dari Pemerintah Australia yang efektif dan dipantau pelaksanaannya sampai dengan Triwulan IV TA 2014 yaitu proyek EINRIP (*Eastern Indonesia National Road Improvement Project*) dengan nilai pinjaman sebesar AUD 300,00 juta (ekuivalen USD 345 juta). Proyek EINRIP bertujuan untuk meningkatkan dan merehabilitasi jalan dan jembatan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan 20 paket kegiatan tersebar di 9 provinsi. Instansi pelaksana adalah Ditjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat.

Realisasi Penyerapan Pinjaman dan Pencapaian Indikator Kinerja

- **Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**
  - ***Eastern Indonesia National Road Improvement Project*/EINRIP (AIPRD-L-002)**

    Realisasi Penyerapan Pinjaman

    Proyek EINRIP dalam TA 2014 target penyerapan sebesar AUD 36,78 juta (ekuivalen USD 30,20 juta) dan realisasi penyerapan pada Triwulan IV TA 2014 sebesar AUD 28,86 juta (ekuivalen USD 23,69 juta). Penyerapan kumulatif pinjaman Australia hingga bulan Desember tahun 2014 mencapai AUD 265,13 juta (88,38 %), sehingga sisa dana pinjaman yang belum ditarik sebesar AUD 34,87 juta.

    Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

    Pelaksanaan pekerjaan EINRIP hingga saat ini telah menyelesaikan 2 dari 3 target indikator kinerja output, antara lain penyiapan proyek EINRIP (identifikasi, FS, *Screening, Design, Document*) dan pengadaan rangka baja AWP 1. Progres pelaksanaan indikator kinerja output lainnya, yaitu "pelaksanaan konstruksi EINRIP" masih dalam tahap penyelesaian pekerjaan dengan tanggal akhir kontrak untuk ketiga paket adalah sebagai berikut: ENT-01 bulan Juli 2015, ESS-05 bulan Juni 2016 dan ESS-06 bulan Februari 2016.

    Secara umum, terdapat isu yang masih belum terselesaikan sejak kegiatan pemantauan proyek EINRIP triwulan sebelumnya, diantaranya:

a. Permasalahan lahan untuk tiga paket yang belum selesai yaitu ENT-01, ESS-05 dan ESS-06 saat ini sedang dikoordinasikan dengan Pemkab terkait yaitu Ende, Bulukumba dan Sinjai.

b. Kinerja kontraktor untuk paket yang belum selesai mengalami beberapa kendala, yaitu pada paket ENT-01 kontraktor mengalami kesulitan *cashflow* yang mempengaruhi lambatnya progress pekerjaan, sebagai tindaklanjut permasalahan ini sebagian *price adjustment* telah dibayarkan. Sedangkan pada paket ESS-05, kontraktor mengalami keterlambatan sebesar -15,26%, hal ini ditindaklanjuti dengan melakukan SCM I pada tanggal 14 November 2014.

c. Perpanjangan masa laku ***loan closing date*** untuk yang ketiga kalinya sampai dengan 30 September 2015, sehubungan dengan masih terdapat 3 (tiga) paket yang belum selesai. Nilai total terkontrak hingga Triwulan IV Tahun 2014 sebesar AUD 278,30 juta (92,77%), sehingga terdapat sisa dana sebesar AUD 21,7 juta yang tidak terserap dan akan dikembalikan ke DFAT.

Jerman

Pada Triwulan IV Tahun 2014 terdapat 3 pinjaman proyek dari Pemerintah Jerman yang sedang berjalan dan dipantau pelaksanaannya yaitu: i) *Sustainable Economic Development through Tech and Vocational Education and Training* (SED-TVET), ii) *Track Maintenance Improvement Programme,* dan iii) *The Improvement of the Moh. Hoesin Hospital.* Total nilai pinjaman ketiga proyek tersebut adalah sebesar EUR 62,78 juta dengan penyerapan kumulatif hingga Desember 2014 sebesar EUR 34,25 juta (54,55%) sehingga masih terdapat sisa pinjaman yang belum ditarik sebesar EUR 28,54 juta.

Realisasi Penyerapan Pinjaman dan Pencapaian Indikator Kinerja

Target penarikan pinjaman Jerman pada TA 2014 sebesar EUR 24,19 juta, dan realisasi penarikan pada periode Januari-Desember tahun 2014 adalah sebesar EUR 10,32 juta atau 42,64% dari target penarikan pinjaman TA 2014.

Tabel 2.23 Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman Jerman Triwulan IV TA 2014
Menurut Instansi Penanggung Jawab

(*Dalam Juta*)

Instansi Pelaksana	Jumlah Proyek	Nilai Pinjaman		Penarikan s/d Triwulan IV TA 2014		Pinjaman Belum Ditarik		Penarikan TA 2014 (Januari–Desember)		
		EUR	Ekiv. USD*	EUR	Ekiv. USD*	EUR	Ekiv. USD*	EUR	Ekiv. USD*	%
Kemendikbud Kemenperindustrian Kemenakertrans	1	19,00	23,11	2,63	3,20	16,37	19,91	2,31	2,81	57,77
Kemenhub	1	32,50	39,53	20,35	24,75	12,15	14,78	8,01	9,74	40,47
Kemenkes	1	11,28	13,72	11,27	13,71	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
Total	**3**	**62,78**	**76,37**	**34,25**	**41,66**	**28,54**	**34,72**	**10,32**	**12,55**	**42,64**

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan IVTahun 2014 (diolah)

Catatan: menggunakan kurs tengah BI tanggal 31 Desember 2014 (1 EUR = 1,2164 USD)

***Progress Variant* Proyek Pinjaman Jerman ≤ -30**

Berdasarkan hasil pemantauan sampai dengan Triwulan IV TA 2014 terdapat satu proyek yang didanai dari pinjaman Pemerintah Jerman dengan kategori *at risk*, yakni proyek SED-TVETdengan *progress variant* menunjukan angka -62,27.

Tabel 2.24 Pinjaman Jerman dengan PV <-30 (Status Pada Triwulan III dan Triwulan IV TA 2014)

Nomor *Loan*	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Tutup	TA 2014	
				TW III	TW IV
2007 66 071	*Sutainable Economic Dev't through Tech & Voc*	15/12/2011	15/12/2015	-65,77	-62,27

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan IV Tahun 2014 (diolah)

- **Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

  - ***Sustainable Economic Development through Technical & Vocational Education and Training*(2007 66 071)**

    Penanggung jawab (*Executing Agency*) SED-TVET adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan *Implementing Agency* adalah: i) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; ii) Kementerian Perindustrian; dan iii) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Proyek tersebut memiliki durasi pelaksanaan selama 4 (empat) tahun yang dimulai sejak tanggal 15 Desember 2011 hingga 15 Desember 2015.

    Proyek ini bertujuan untuk peningkatan kapasitas institusi, peningkatan penyediaan dan kemampuan tenaga kerja, serta peningkatan kualitas lulusan SMKN. Alokasi anggaran untuk masing-masing Instansi Pelaksana adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar EUR 7 juta (33%), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar EUR 5 juta (24%), Kementerian Perindustrian sebesar EUR 5 juta (24%), untuk pekerjaan konsultan sebesar EUR 2 juta (9,5%), kemudian sisanya adalah EUR 2 juta (9,5%) yang berasal dari hibah untuk pelatihan lanjutan guru.

    Realisasi Penyerapan Dana

    Nilai pinjaman proyek SED-TVET adalah sebesar EUR 19 juta dan hibah sebesar EUR 2 juta dengan realisasi penyerapan pinjaman Januari – Desember 2014 sebesar EUR 2,31 juta atau 57,77% dari target penarikan pinjaman TA 2014 sebesar EUR 3,99 juta.

    Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

    Hingga saat ini, realisasi fisik untuk pekerjaan pengadaan jasa konsultasi peralatan mencapai 100% dari target pekerjaan fisik TA 2014, proyek ini disajikan pada buku lampiran laporan kinerja pelaksanaan PHLN Triwulan IV TA 2014.

    Pada proyek SED-TVET terdapat keterlambatan serius karena pada awal pelaksanaan proyek terdapat permasalahan pembahasan harmonisasi kebijakan pengadaan barang dan jasa yang akan digunakan sehingga alokasi waktu yang tersedia sebagian telah terpakai untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pada Triwulan IV Tahun 2014, paket kontrak pengadaan peralatan dari total 23 paket pekerjaan yang dilelangkan yang telah terkontrak sebanyak 12 paket. Sedangkan sebanyak 11 paket yang belum terkontrak, akan dilaksanakan lelang ulang pada Januari 2015 dengan perkiraan

penandatanganan kontrak pada bulan Mei 2015 dan pengiriman barang akan selesai dilakukan pada Oktober 2015.

Sedangkan untuk paket kontrak yang termasuk dalam porsi pendanaan hibah yaitu pengadaan *advance training* tahap pra-kualifikasi dinyatakan gagal karena tenaga ahli yang diusulkan tidak memenuhi persyaratan. Direncanakan akan dilaksanakan lelang ulang pada Triwulan I 2015 dengan kontrak pada bulan Mei 2015.

- **Kementerian Perhubungan**

  - ***Track Maintenance Improvement Programme* (2005 66 612)**

    Tujuan proyek adalah meningkatkan pemeliharaan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa. Rencana pencapaian output TA 2014 untuk proyek *Track Maintenance Improvement Programme* disajikan pada buku lampiran laporan kinerja pelaksanaan PHLN Triwulan IV TA 2014.

    Realisasi Penyerapan Dana

    Nilai pinjaman proyek *Track Maintanance Improvement Programme* adalah sebesar EUR 32,5 juta dengan penyerapan kumulatif hingga bulan Desember 2014 adalah sebesar EUR 20,35 juta (62,62%). Untuk Tahun Anggaran 2014 (periode Januari-Desember) penyerapan proyek ini mencapai EUR 8,01 juta (40,47%) dari target penarikan pinjaman TA 2014 sebesar EUR 19,78 juta.

    Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

    Instansi pelaksana proyek *Track Maintanance Improvement Programme* adalah Ditjen Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan. Proyek ini direncanakan akan berakhir pada 30 Juni 2016.

    Dari 79 miliar Rupiah alokasi dalam DIPA revisi 2014, baru 60 miliar Rupiah yang sudah terbit SP3 nya dan tercatat dalam laporan realisasi, sedangkan sisanya 19 miliar Rupiah masih dalam proses penerbitan SP3 oleh KPPN.

- **Kementerian Kesehatan**

  - ***The Improvement of the Moh. Hoesin Hospital* (2002 66 353)**

    Proyek ini merupakan pengadaan peralatan kesehatan, *rezoning*, dan pelatihan bagi pegawai dan perawat rumah sakit Moh. Hoesin Palembang. Instansi pelaksana proyek *The Improvement of the M. Hoesin Hospital* adalah Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan. Proyek ini telah mengalami 4 kali perpanjangan pelaksanaan dan masa laku pinjaman akan berakhir pada 31 Desember 2015.

    Realisasi Penyerapan Dana

    Nilai pinjaman proyek *The Improvement of the Moehamad Hoesin Hospital* adalah sebesar EUR 11,28 juta dan hibah sebesar EUR 1,5 juta dengan penyerapan kumulatif pinjaman mencapai EUR 11,27 juta atau 99,86% dan sisanya sebesar EUR 0,02 juta yang akan ditarik seluruhnya sampai proyek berakhir.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Rencana pencapaian output TA 2014 untuk proyek *The Improvement of the Moh. Hoesin Hospital* disajikan pada buku lampiran laporan kinerja pelaksanaan PHLN Triwulan IV 2014.

Permasalahan pada proyek *The Improvement of Moh. Hoesin Hospital Palembang* adalah tagihan pembayaran untuk pekerjaan perawatan untuk Lot 1, Lot 3 dan Lot 4 telah diajukan *Withdrawal Application* dari Kementerian Kesehatan kepada KPPN tetapi sampai saat ini masih menunggu persetujuan dari Kementerian Keuangan.

Korea

Pada Triwulan IV Tahun 2014, terdapat 7 pinjaman proyek bersumber dari EDCF Korea sedang berjalan dan dipantau pelaksanaannya, dengan total pinjaman sebesar KRW 377.495,65 juta. Pinjaman tersebut dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2 proyek), Kementerian Kesehatan (2 proyek), Badan Otorita Batam (1 proyek), Kepolisian Republik Indonesia (2 proyek). Penyerapan kumulatif pinjaman sampai akhir Triwulan IV Tahun 2014 adalah sebesar KRW 72.264,93 juta atau 19,14% dari total pinjaman.

Proyek Baru dan Proyek Tutup

Terdapat 1 proyek pinjaman EDCF (Korea) yang akan berakhir masa berlakunya pada tahun 2014 yaitu proyek INA-14 *Improvement of H. Adam Malik Hospital in Medan* berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

Tabel 2.25 Daftar Pinjaman Proyek Korea Yang Berakhir Masa Lakunya Pada TA 2014

(*Dalam Juta KRW*)

No	Nomor Loan	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Tutup	Pinjaman Belum Ditarik		Keterangan
					Nilai	PV	
1	INA-14	*Improvement of H. Adam Malik Hospital in Medan*	27/05/2009	31/12/2014	0,00	0,00	Selesai

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan IV Tahun 2014 (diolah)

Realisasi Penyerapan Pinjaman dan Pencapaian Indikator Kinerja

Secara keseluruhan, penyerapan pinjaman proyek pemerintah Korea pada TA 2014 masih rendah yaitu sebesar KRW 15.178,83 juta atau 38,23% dari target penyerapan TA 2014. Penyerapan tertinggi pada TA 2014 dilaksanakan oleh proyek Improvement of *H. Adam Malik Hospital in Medan* (INA-14) yaitu sebesar 9.651,45 juta atau 4.764,80% dari target TA 2014. Besarnya penyerapan tersebut karena adanya tambahan alokasi pagu untuk proyek tersebut. Di sisi lain terdapat dua proyek yang sampai dengan Triwulan IV 2014 masih belum melakukan penyerapan yaitu proyek *Development of Sewerage System in Batam Island* (INA-20) dan *Fast Patrol Boats of Indonesian National Police* (INA-21). Belum adanya penarikan tersebut karena pelaksanaan proyek masih dalam proses pengadaan jasa konsultan. Rekapitulasi nilai pinjaman dan penarikan kumulatif pinjaman proyek EDCF Korea pada Triwulan IV 2014 berdasarkan instansi penanggung jawab dapat dilihat pada Tabel 2.26.

Tabel 2.26 Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman Korea menurut Instansi Penanggung Jawab

(Dalam Juta KRW)

No	Kementerian/Lembaga	Jumlah Proyek	Nilai pinjaman	Penarikan s/d Triwulan IV TA 2014		Pinjaman Belum Ditarik	Penyerapan TA 2014		
				Jumlah	%		Target	Realisasi	%
1	Kemen PU-Pera	2	178.378,95	6.786,04	3,80	171.592,91	23.346,82	4.521,04	19,36
2	Kemenkes	2	65.580,40	64.472,56	98,31	1.107,84	573,79	9.651,45	1.682,05
3	POLRI	2	80.121,78	1.006,34	1,26	79.115,44	14.175,18	1.006,34	7,10
4	Badan Otorita Batam	1	53.414,52	0,00	0,00	53.414,52	1.603,19	0,00	0,00
Total		**7**	**377.495,65**	**72.264,94**	**19,14**	**305.230,71**	**39.698,98**	**15.178,83**	**38,23**

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan IV Tahun 2014 (diolah)

Jumlah penarikan pada TA 2014 sampai dengan Triwulan IV Tahun 2014 adalah KRW 16.297,11 juta atau 36,34% dari target TA 2014. Jumlah ini sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Dilihat dari persentase penarikan tahun berjalan pada TA 2014 dibandingkan target sampai dengan Triwulan IV, persentase penarikan pada TA 2014 lebih tinggi dari 2013 yaitu sebesar 38,23 pada TA 2014 dibandingkan 36,34% pada TA 2013.

Tabel 2.27 Perbandingan Penyerapan Pinjaman sampai dengan Triwulan IV TA 2013 dan 2014

(Dalam Juta KRW)

Tahun Anggaran	Jumlah Proyek	Penyerapan TA Berjalan	
		Jumlah s/d. TW IV	% terhadap Target Tahun Anggaran
2013	6	16.297,11	36,34
2014	7	15178,82	38,23

Progress Variant Proyek Pinjaman Korea ≤ -30

Berdasarkan hasil pemantauan sampai dengan Triwulan IV TA 2014 diketahui terdapat 2 (dua) proyek pinjaman EDCF (Korea) yang berada pada kategori *at risk* (PV ≤ -30) atau bahkan memiliki PV ≤ -50. Kedua proyek tersebut yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.28 *Progress Variant* Proyek Pinjaman Korea

No	Nomor *Loan*	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Tutup	TA2014			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
1	INA-19	*Construction of Karian Multipurpose Dam Project*	14/02/2012	14/02/2018	-34,07	-37,91	-42,11	-46,31
2	INA-17	*Padang By-Pass Capacity Expansion Project*	14/04/2011	14/10/2015	-64,65	-70,18	-69,55	-75,15

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan IV Tahun 2014 (diolah)

- **Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**
  Sebanyak 2 pinjaman proyek yang bersumber dari pemerintah Korea dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Masing-masing proyek dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Direktorat Jenderal Bina Marga.

- ***Construction of Karian Multipurpose Dam Project*(INA-19)**

  Realisasi Penyerapan Dana

  Pada TA 2014 proyek INA-19 telah melaksanakan penarikan pinjaman sebesar KRW 341,48 juta atau hanya 1,83% dari total target penarikan pada TA 2014. Penyerapan kumulatif pada pinjaman yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan IV yaitu KRW 1.823,48 juta atau 1,64% dari total pinjaman.

  Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

  Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2014, proyek ini mulai melaksanakan satu dari keseluruhan tiga paket kontrak. Rendahnya penyerapan pinjaman pada proyek ini karena proses pengadaan jasa pekerjaan konstruksi harus dilelang ulang.

  Lelang ulang tersebut menyebabkan traget penyerapan pada TA 2014 tidak tercapai. Proyek hanya melakukan penyerapan untuk jasa konsultan sebesar KRW 341,48 juta atau 1,83% dari total target penarikan pada TA 2014.

- ***Padang By-Pass Capacity Expansion Project* (EDCF INA-17)**

  Realisasi Penyerapan Dana

  Pada TA 2014 proyek INA-17 melakukan penarikan sebesar KRW 4.179,56 juta atau 89,06% dari total yang ditargetkan pada tahun 2014. Penyerapan kumulatif pinjaman yang telah dilakukan yaitu KRW 4.962,56 juta atau 7,40% dari total pinjaman.

- **Kementerian Kesehatan**

  Terdapat dua pinjaman proyek yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan. Secara keseluruhan penyerapan pinjaman yang telah dilakukan pada TA 2014 sangat baik. Penarikan terbesar dilakukan proyek *Improvement of H. Adam Malik Hospital in Medan* (INA-14).

  - ***Strengthening of Teaching Hospital*(INA-10)**

    Realisasi Penyerapan Dana

    Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2014, proyek INA-10 telah melakukan penyerapan senilai KRW 22.660,56 atau 95,34% dari total pinjaman.

    Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

    Proyek ini habis masa lakunya namun diperpanjang untuk penyelesaikan pembayaran paket pekerjaan yang telah selesai.

  - ***Improvement of H. Adam Malik Hospital in Medan* (INA-14)**

    Realisasi Penyerapan Dana

    Penyerapan kumulatif pinjaman yang telah dilaksanakan proyek INA-14 adalah sebesar KRW 41.812 juta atau sebesar 100% dari total pinjaman proyek ini.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2014 proyek ini telah menyelesaikan semua paket pekerjaan. Proyek ini habis masa lakunya pada 31 Desember 2014 dan sedang menunggu *final report* dari konsultan pengawas untuk tahun 2014.

- **POLRI/Kepolisian Negara RI**

Terdapat dua proyek yang dilaksanakan oleh Kepolisian Republik Indonesia yaitu proyek *Integrated Trunking Radio Communication for Indonesia National Police* (INA-18) dan *Fast Patrol Boats for Indonesian National Police* (INA-21).

- ***Intergrated Trunking Radio Communication for Indonesian Police* (INA-18)**

Realisasi Penyerapan Dana

Pada TA 2014 proyek INA-18 sudah mulai melakukan penarikan sebesar KRW 1.003,34 juta atau sebesar 12,47% dari target penarikan TA 2014.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Proyek ini dalam proses survei oleh konsultan dan proses pengadaan barang.

- ***Fast Patrol Boats for Indonesian Police Project* (INA-21)**

Realisasi Penyerapan Dana

Sampai dengan Triwulan IV TA 2014, proyek INA-21 masih belum melakukan penyerapan karena proyek tersebut masih dalam proses pengadaan jasa konsultan.

- **Badan Otorita Batam**

Terdapat satu proyek pinjaman yang dilaksanakan oleh Badan Otorita Batam yaitu proyek Development of *Sewerage System in Batam Island* (INA-20).

- ***Sewerage System in Batam Island* (INA-20)**

Realisasi Penyerapan Dana

Sampai dengan Triwulan IV TA 2014, proyek ini belum melakukan penyerapan pinjaman karena proyek tersebut masih dalam proses pengadaan jasa konsultan.

Perancis dan AFD

Pada Triwulan IV TA 2014, terdapat 7 pinjaman proyek bersumber dari Pemerintah Perancis dan AFD yang sedang berjalan dan dipantau pelaksanaannya. Jumlah total masing-masing sumber pendanaan pinjaman proyek tersebut adalah sebesar EUR 204,3 juta dari Pemerintah Perancis, dan sebesar USD 129,5 juta dari AFD.

Realisasi Penyerapan Pinjaman dan Pencapaian Indikator Kinerja

Target penarikan pinjaman Perancis pada Tahun Anggaran 2014 sebesar EUR 16,65 juta, dengan realisasi pinjaman Perancis pada periode Januari-Desember tahun 2014 sebesar EUR 7,07 juta atau 42,48%. Penyerapan kumulatif 4 (empat) proyek pinjaman Perancis (termasuk 1 proyek *co-*

financing dengan AFD) adalah sebesar EUR 21,81 juta (10,68%) dengan sisa pinjaman yang belum ditarik sebesar EUR 182,49 juta (89,32%).

Tabel 2.29 Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman Perancis Triwulan IV TA 2014
Menurut Instansi Penanggung Jawab

(*Dalam Juta*)

Instansi Penanggung Jawab	Jumlah Proyek	Nilai Pinjaman		Penarikan s/d Triwulan IV TA 2014		Pinjaman Belum Ditarik		Penarikan TA 2014 (Januari–Desember)		
		EUR	Ekiv. USD*	EUR	Ekiv. USD*	EUR	Ekiv. USD*	EUR	Ekiv. USD*	%
BMKG	1	30,3	36,86	21,81	26,53	8,49	10,33	7,07	8,60	74,96
Kem. Perhubungan	2	126	153,27	0	0	126	153,27	0	0	0
Kem. Kominfo	1	48	58,39	0	0	48	58,39	0	0	0
Total	**4**	**204,3**	**248,51**	**21,81**	**26,53**	**182,49**	**221,98**	**7,07**	**8,60**	**42,48**

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan IVTahun 2014 (diolah)

Target penarikan pinjaman AFD Tahun Anggaran 2014 sebesar USD 33,12 juta, dan realisasi pinjaman AFD pada periode Januari-Desember tahun 2014 sebesar USD35,31 juta atau 106,62%. Penyerapan kumulatif 3 proyek pinjaman AFD sebesar USD 74,31 juta (57,38%) dengan sisa pinjaman yang belum ditarik sebesar USD 55,19 juta (42,62%).

Tabel 2.30 Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman AFD Triwulan IV TA 2014
Menurut Instansi Penanggung Jawab

(*Dalam Juta*)

Instansi Penanggung Jawab	Jumlah Proyek	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan IV TA 2014	Pinjaman Belum Ditarik	Penarikan TA 2014 (Januari–Desember)	
		USD	USD	USD	USD	%
Kem. Kelautan & Perikanan	1	30,00	19,96	10,04	11,39	97,52
PT. PLN	2	99,50	54,35	45,15	23,91	111,58
Total	**3**	**129,50**	**74,31**	**55,19**	**35,31**	**106,62**

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan IV Tahun 2014 (diolah)

Masalah yang cukup menonjol dalam pelaksanaan pinjaman proyek Perancis dan AFD selama Triwulan IV Tahun 2014 adalah terkait masalah teknis pelaksanaan proyek dan pencantuman DIPA.

- **Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika**

  - ***Strengthening of BMKG Climate and Weather Services***

    Proyek ini bertujuan untuk penguatan infrastruktur dan sistem informasi Meteorologi BMKG dalam rangka mengembangkan peringatan iklim dan cuaca secara ekstensif dan layanan kepada masyarakat untuk sektor ekonomi, sektor transportasi dan sektor pertanian serta sektor lainnya yang terkait.

Realisasi Penyerapan Dana

Jumlah pinjaman luar negeri sebesar EUR 30,3 juta. Rencana pencapaian *output* TA 2014 proyek *Strengthening of BMKG Climate and Weather Services* disajikan pada buku lampiran laporan kinerja pelaksanaan PHLN Triwulan IV TA 2014. Realisasi target pencapaian fisik tahun 2014 untuk pembelian peralatan, pembangunan sistem, dan pelatihan personil mencapai 82,14% dari target perkembangan fisik TA 2014. Sedangkan penyerapan anggaran mencapai 71,99% dari total pinjaman.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Permasalahan pada proyek *Strengthening BMKG Climate and Weather Services Capacity* adalah tertundanya pembayaran terhadap 2 (dua) *Withdrawal Application* (WA) yaitu pada WA 8 dan WA 10, total anggaran WA 8 sebesar EUR 979 ribu yang terserap hanya sebesar EUR 450 ribu dan dari total anggaran WA 10 sebesar EUR 1,5 juta yang terserap hanya sebesar EUR 770 ribu. Permasalahan penyerapan tersebut terjadi karena menunggu proses registrasi adendum kontrak oleh Kementerian Keuangan Perancis.

Disamping itu, terdapat permasalahan terkait pencantuman data penyerapan anggaran yang belum dapat tercatatkan, hal ini disebabkan belum terbitnya Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3) yang diterbitkan oleh KPPN sebagai dasar pelaporan. Menindaklanjuti hal tersebut BMKG telah berkoordinasi secara optimal dengan Dit EAS, DJPU, Kemenkeu.

- **Kementerian Perhubungan**

  - ***Bandung Urban Railway Transport Development***

    Proyek ini bertujuan untuk Peningkatan jalur kereta api dan penyusunan kembali tata letak stasiun kereta api, menambah stasiun menengah untuk peningkatan kualitas sinyal dan sistem telekomunikasi, Elektrifikasi jalur rel kereta Padalarang-Cicalengka, Peningkatan sistem persinyalan dan pembangunan depot dan workshop untuk pemeliharaan fasilitas.

    Proyek ini dibiayai oleh 2 (dua) sumber pendanaan, yaitu Pemerintah Perancis (Natixis) dan AFD dengan nilai pinjaman masing-masing adalah EUR 80 juta berasal dari Natixis dan EUR 46 juta yang berasal dari AFD. Pelaksanaan pekerjaan untuk porsi pendanaan AFD di fokuskan pada kegiatan Jasa Konsultansi dan Konstruksi *Elevated Structure*, dan porsi pendanaan Natixis di fokuskan pada kegiatan Konstruksi dan Elektrifikasi.

    Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

    Pada Triwulan IV TA 2014 belum ada realisasi pencapaian output baik konsultansi maupun konstruksi. Pihak Satker sedang melakukan proses pembahasan *request for proposal* dan seleksi untuk jasa konsultansi dengan ruang lingkup yaitu penyusunan *detailed design*, *tender assistance* dan supervisi untuk konstruksi *viaduct* 4,1 km, di mana saat ini sedang dalam tahap persetujuan *short list* di Ditjen Perkeretaapian.

    Sedangkan untuk pekerjaan yang didanai oleh Natixis, saat ini pihak Satker sedang melakukan persiapan untuk proses seleksi konsultan dengan ruang lingkup yaitu

manajemen *interface*, *technical studies*, *tender assistance* dan supervisi untuk pekerjaan jalur ganda, sintel, dan elektrifikasi Padalarang – Gedebage. Sedang dalam tahap finalisasi TOR. Pelaksanaan pekerjaan sementara akan menggunakan dana dari AFD terlebih dahulu.

- **Kementerian Komunikasi dan Informatika**

  - ***The Improvement on Television Transmitting Station***

    Proyek ini bertujuan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan stasiun transmisi TV secara *turnkey*, mencakup: *survey*, pengadaan, *dismantle* barang lama, instalasi, testing, *commissioning*, pelatihan, bantuan teknis, dan pemeliharaan dari perangkat transmisi, fasilitas pendukung, dan infrastruktur di 60 lokasi.

    Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

    Penandatanganan kontrak proyek telah dilakukan pada tanggal 3 Desember 2014. Saat ini sedang dilaksanakan *review design* yang dilakukan bersama-sama dengan Pihak Perancis. Hingga Triwulan IV TA 2014 belum ada realisasi pencapaian output baik konsultansi maupun konstruksi.

- **Kementerian Kelautan dan Perikanan**

  - ***Infrastructure Development Space Oceanography* (INDESO)**

    Proyek ini bertujuan untuk mendukung program-program kelautan dan perikanan di dalam mengembangkan stasiun penerima data yang dipergunakan untuk meningkatkan kerjasama dan kemitraan internasional di masa depan. Nilai pinjaman untuk proyek ini adalah sebesar USD 30 juta.

    Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

    Pengelolaan sumber daya kelautan oseanografi perlu didukung oleh 3 komponen penting, yaitu pengamatan berbasis ruang, pengamatan in-situ, dan biokimia laut dan permodelan fisik. Ketiga unsur tersebut diperlukan untuk memahami dinamika laut dan menggunakannya untuk meramalkan fenomena alam. Rencana pencapaian output proyek ini disajikan pada buku lampiran laporan kinerja pelaksanaan PHLN Triwulan IV TA 2014. Total realisasi pencapaian fisik keseluruhan proyek dari awal proyek sampai dengan Triwulan IV Tahun 2014 untuk pembangunan infrastruktur, sistem, dan manajemen proyek mencapai 59,26%. Sedangkan penyerapan kumulatif anggaran mencapai 66,53% dari total pinjaman. Sedangkan total penyerapan anggaran TA 2014 sampai dengan Triwulan IV 2014 sebesar EUR 11,39 juta.

    Pada proyek *Infrastructure Development Space Oceanography* (INDESO) dilakukan amandemen pertama yang diperlukan dalam rangka: (i) penyelarasan *financing plan* dalam CFA dengan dokumen kontrak; (ii) pengaturan atas penarikan di bawah USD 5.000.000,00 untuk tahun 2015; (iii) penyesuaian tanggal *Technical Completion Date* dari tanggal 31 Agustus 2016 menjadi tanggal 31 Maret 2017; dan (iv) penyesuaian metode pelaporan.

Disamping itu terdapat permasalahan dalam pencatatan SP3 disebabkan adanya kekurangan alokasi anggaran sebesar 1,4 Milliar Rupiah. Terkait hal tersebut Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan koordinasi dengan KPPN Kementerian Keuangan terkait penyelesaian masalah tersebut.

- **PT. PLN**

  - ***Java Bali Electricity Distribution Performance Improvement***

    Kegiatan *Java Bali Electricity Distribution Performance Improvement* sangat dibutuhkan untuk memenuhi pertumbuhan kebutuhan listrik yang cukup tinggi dan terbatasnya investasi perluasan jaringan distribusi dan suplai PT. PLN. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sistem distribusi PT. PLN melalui peningkatan efisiensi dan kualitas. Proyek ini merupakan proyek *co-financing* antara AFD dan ADB. Jumlah pinjaman luar negeri dari pendanaan yang berasal dari AFD sebesar USD 50 juta.

    Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

    Pada Triwulan IV Tahun 2014 belum ada realisasi target pencapaian fisik untuk pengadaan peralatan, instalasi mencapai 100%, sedangkan untuk pelaksanaan konsultansi belum ada realisasi pencapaian fisik dari total target pencapaian 2014. Sedangkan penyerapan anggaran mencapai 47,28% dari total pinjaman.

    Pada proyek *Java Bali Electricity Distribution Performance Improvement* terdapat permasalahan pada pelaksanaan pekerjaan paket 6 dan paket 10. Untuk pelaksanaan paket 6 terdapat permasalahan perijinan pekerjaan penggalian. Sedangkan untuk pelaksanaan paket 10 terdapat amandemen *front loading*.

    Disamping itu, terkait rencana pembatalan sebagian pinjaman AFD, diputuskan bahwa PLN masih akan mempertahankan porsi pinjaman AFD, hal ini didasarkan pada hasil *Loan Review Mission* yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2014 yang dituangkan dalam MoU disebutkan bahwa pihak Pemerintah dan *Lender* ingin memepertahankan *Parri Passu Modality*.

    Berdasarkan hasil pemantauan sampai dengan Triwulan IV TA 2014 proyek *Java-Bali Electricity Distribution Performance Improvement* memiliki *progress variant* sebesar-53,4.

  - ***Strengthening West Kalimantan Power Grid***

    Proyek ini bertujuan untuk efisiensi biaya operasi bisnis dan distribusi PLN di Kalimantan Barat. Pelaksanaan proyek ini mencakup 3 (tiga) aspek pekerjaan: i) pembangunan 275 KV jaringan transmisi; ii) meningkatkan jaringan transmisi 150KV di Kalimantan Barat; dan iii) membangun model jaringan baru untuk meningkatkan akses listrik untuk rumah tangga. Proyek ini merupakan proyek *co-financing* antara AFD dan ADB. Jumlah pinjaman luar negeri AFD dan ADB masing-masing sebesar USD 49,5 juta.

    Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

    Pada Triwulan IV TA 2014 terdapat realisasi pencapaian output untuk pelaksanaan konstruksi dan konsultansi sebesar 89,91% dari target pelaksanaan pekerjaan tahun 2014.

Pada proyek *Strengthening West Kalimantan Power Grid* terdapat permasalahan pembebasan lahan terkait tingginya harga permintaan ganti rugi yang diajukan oleh pemilik lahan.

Keterlambatan terbitnya DIPA mengakibatkan keterlambatan penerbitan *master list*, sementara material barang sudah hampir sampai di Indonesia. Disamping itu, terkait belum terbitnya izin *multiyears* untuk pekerjaan yang dibiayai APBN di Bengkayang yang mengakibatkan terhambatnya pekerjaan untuk evaluasi daya yang tidak dapat dilakukan. Menindaklanjuti hal tersebut Kementerian ESDM telah mengusulkan ke Kementerian Keuangan perihal perpanjangan ijin *multiyears.*

RR Tiongkok

Pada Triwulan IV Tahun 2014, terdapat 5 (lima) pinjaman proyek bersumber dari Pemerintah RR Tiongkok yang sedang berjalan dan dipantau pelaksanaannya, dengan jumlah total nilai pinjaman sebesar USD 531,89 juta. Pinjaman proyek tersebut dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (4 proyek) dan PT. PLN sebanyak (1 proyek). Penyerapan kumulatif pinjaman sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2014 sebesar USD 206,91 juta atau 38,90% dari jumlah yang pinjaman.

Realisasi Penyerapan Pinjaman dan Pencapaian Indikator Kinerja

Secara keseluruhan, penyerapan pinjaman proyek pemerintah RR Tiongkok pada TA 2014 cukup baik yaitu sebesar USD 145,41 juta atau 82,52% dari target TA 2014. Penyerapan tertinggi pada TA 2014 dilaksanakan oleh proyek *Additional Loan for Jatigede Dam* (21595701) sebesar USD 70,34 juta atau 119% dari target penyerapan TA 2014. Persentase penarikan pinjaman paling rendah TA 2014 dilakukan oleh proyek *Parit Baru Coal Fired Power Plant* (21661901) sebesar USD 16,11 juta atau sebesar 26,64% dari target penyerapan TA 2014.

Tabel 2.31 Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman RR Tiongkok Menurut Instansi Penanggungjawab

(*Dalam Juta USD*)

No	Kementerian/Lembaga	Jumlah Proyek	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan IV TA 2014		Pinjaman Belum Ditarik	Penyerapan TA 2014		
				Jumlah	%		Target	Realisasi	%
1	Kemen PU-Pera	4	399,71	190,8	47,73	208,91	115,75	129,31	111,72
2	PT. PLN	1	132,19	16,11	12,18	116,08	60,46	16,11	26,64
Total		**5**	**531,89**	**206,91**	**38,90**	**324,98**	**176,21**	**145,41**	**82,52**

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan IV Tahun 2014 (diolah)

Jumlah penarikan pada TA 2014 sampai dengan Triwulan IV Tahun 2014 adalah USD 145,41 juta atau 82,52% dari target TA 2014. Jumlah ini sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Dilihat dari persentase penarikan tahun berjalan pada TA 2014 dibandingkan target sampai dengan Triwulan IV, persentase penarikan pada TA 2014 lebih tinggi dari TA 2013 yaitu 82,52% dibandingkan 70,46% pada TA 2013.

Tabel 2.32 Perbandingan Penyerapan Pinjaman TA berjalan sampai dengan Triwulan IV TA 2013 dan 2014.

(Dalam Juta USD)

Tahun Anggaran	Jumlah Proyek	Penyerapan TA Berjalan	
		Jumlah s/d Triwulan IV	%
2013	5	135,94	70,46
2014	5	145,41	82,52

Terdapat permasalahan dalam pelaksanaan pekerjaan fisik proyek-proyek yang dibiayai pinjaman dari Pemerintah RR Tiongkok. Masalah yang dialami antara lain sebagai berikut:

- Masalah adminisitrasi/pengesahan DIPA terjadi pada proyek *Additional Loan for Jatigede Dam* (21595701).
- Lambatnya proses pengadaan lahan pada proyek *Toll Road Development Medan-Kualanamu* (21663301).
- Keadaan eksisting dan kondisi alam (tanah) juga menjadi kendala yang mempengaruhi pekerjaan fisik pada proyek *Tayan Bridge Construction (21660201)* dan *Parit Baru Coal Fired Power Plant* (21661901).

***Progress Variant* Proyek Pinjaman RR Tiongkok ≤ -30**

Berdasarkan hasil pemantauan sampai dengan Triwulan IV TA 2014 diketahui terdapat 2 proyek pinjaman RR Tiongkok yang berada pada kategori *at risk* (PV ≤ -30) yaitu pinjaman yang dilaksanakan oleh PT. PLN proyek *Parit Baru Coal Fired Power Plant* (21661901). Permasalahan yang dihadapi pada proyek ini adalah pengadaan lahan dan kondisi alam yang menghambat pelaksanaan fisik proyek.

Tabel 2.33 *Progress Variant* Proyek Pinjaman RR Tiongkok

No	Nomor *Loan*	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Tutup	TA 2014			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
1	21661901	*Parit Baru Coal Fired Steam Power Plant*	26/03/2013	28/04/2018	-24,59	-28,45	-32,64	-30,99

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan IV Tahun 2014 (diolah)

- **KementerianPekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat**

  Sebanyak 4 pinjaman proyek yang bersumber dari RR Tiongkok dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu satu proyek dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan tiga proyek dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga.

  - ***Additional Loan for Jatigede Dam*(21595701)**

    Realisasi Penyerapan Dana

    Pada TA 2014 proyek ini telah melakukan penyerapan sebesar USD 70,34 juta atau 119,80% dari target penarikan TA 2014. Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2014, penarikan kumulatif yang telah dilakukan proyek ini adalah sebesar USD 70,34 juta atau 60,12% dari total pinjaman.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Proyek pembangunan waduk Jatigede terdiri dari 5 pekerjaan yaitu *maindam*, *spillway*, *power waterway*, *plunge pool*, dan *grouting*. Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2014, proyek ini telah menyelesaikan semua paket pekerjaan. Proyek ini sedang dalam proses penyelesaian pembayaran kontrak-kontrak yang telah dikerjakan.

- ***Tayan Bridge Construction* (21660201)**

Realisasi Penyerapan Dana

Proyek ini telah melakukan penyerapan sebesar USD 15,89 juta atau 130,71% dari target penarikan TA 2014.Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2014, penyerapan kumulatif yang telah dilakukan proyek ini sebesar USD 40,37 juta atau 60,00% dari total pinjaman proyek.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2014, proyek ini telah menyelesaikan 88,65% dari total target pekerjaan jasa konstruksi. Pada Triwulan IV Tahun 2014 kontraktor mengalami kesulitan dalam penyelesaian paket pekerjaan karena kondisi geologis.

- ***Development of Cileunyi-Sumedang-Dawuan Toll* (21662601)**

Realisasi Penyerapan Dana

Pada TA 2014 proyek ini telah melakukan penyerapan sebesar USD 23,90 juta atau 84,19% dari target penarikan TA 2014. Sampai dengan Triwulan IV, penyerapan kumulatif yang telah dilakukan proyek ini adalah sebesar USD 47,25 juta atau 50,80% dari total pinjaman. Total Penarikan yang telah dilakukan proyek ini pada tahun 2014 adalah sebesar USD 23,34 juta atau 84,19% dari target penarikan Tahun Anggaran 2014.

- ***Toll Road Development of Medan-Kualanamu* (21663301)**

Realisasi Penyerapan Dana

Pada TA 2014 proyek ini telah melakukan penyerapan sebesar USD 16,48 juta atau 19,17% dari target penarikan TA 2014. Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2014, penarikan kumulatif yang telah dilakukan proyek ini adalah USD 32,85 juta atau 26,83% dari total pinjaman. Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2014, pelaksanaan proyek telah melaksanakan pekerjaan fisik pembangunan jalan tol mencapai 97,98% dari total *output* kontrak.

- **PT. PLN**
  - ***Parit Baru Coal Fired Steam Power Plant Project* (21661901)**

Realisasi Penyerapan Dana

Pada TA 2014 proyek ini telah melakukan penyerapan sebesar USD 16,11 juta atau 26,64% dari target penarikan TA 2014. Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2014, penarikan kumulatif yang telah dilakukan proyek ini adalah sebesar USD 16,11 juta atau 12,18% dari total pinjaman.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Sampai dengan Triwulan IV, proyek ini telah menyelesaikan 79,25% dari paket pekerjaan konstruksi. Terjadi keterlambatan pelaksanaan pada proyek ini disebabkan oleh kendala pengadaan lahan dan kondisi lahan lokasi pelaksanaan proyek yang kurang mendukung.

Spanyol

Pada Triwulan IV TA 2014, hanya terdapat 2 (dua) pinjaman proyek bersumber dari Spanyol yang sedang berjalan dan dipantau pelaksanaannya, yaitu proyek *Animal Husbandry Technology and Practices Improvement to accelerate Meat and Milk Production* dengan nilai pinjaman sebesar EUR 14,7 juta dan *Bridge Material Supply for Bridge Replacement* dengan nilai pinjaman sebesar EUR 24,86 juta..

Realisasi Penyerapan Pinjaman dan Pencapaian Indikator Kinerja

Sampai dengan Triwulan IV TA 2014, penyerapan kumulatif kedua proyek ini sebesar EUR 33,88 juta (85,64%), sedangkan pinjaman yang belum ditarik adalah sebesar EUR 5,68 juta. Penyerapan untuk Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Triwulan IV mencapai EUR18,37 juta (79,22% dari target yang telah ditetapkan).

Tabel 2.34 Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman Spanyol Pada Triwulan IV TA 2014
Menurut Instansi Penanggung Jawab

(*Dalam Juta*)

Instansi Penanggung Jawab	Jumlah Proyek	Nilai Pinjaman		Penarikan s/d Triwulan IV TA 2014		Pinjaman Belum Ditarik		Penarikan TA 2014 (Januari–Desember)		
		EUR	Ekiv. USD*	EUR	Ekiv. USD*	EUR	Ekiv. USD*	EUR	Ekiv. USD*	%
Kementerian PU	1	24,86	30,24	24,64	29,97	0,22	0,27	18,31	22,27	99,48
LIPI	1	14,7	17,88	9,24	11,24	5,46	6,64	0,06	0,07	1,26
Total	**1**	**39,56**	**48,12**	**33,88**	**41,22**	**5,68**	**6,91**	**18,37**	**22,35**	**79,22**

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan IV Tahun 2014 (diolah)

- **LIPI**
  - ***Animal Husbandry Technology and Practices Improvement to accelerate Meat and Milk Production***

    Proyek *Animal Husbandry Technology and Practices Improvement to accelerate Meat and Milk Production* menyediakan peralatan laboratorium, *processing* pakan dan susu, serta penyiapan sarana fisik berupa gedung laboratorium peternakan seluas 1.500m^2, *Processing unit* untuk pakan ternak seluas 512m^2, *unit processing* susu seluas 450m^2, kandang ternak (108m^2), kandang otomatis (180m^2), prasarana lingkungan (1 paket) yang akan dibangun di Cibinong di Bogor. Disamping itu, untuk peningkatan sumber daya manusia terkait pelaksanaan kegiatan ini, akan dilakukan *training* yang dibagi menjadi 3 komponen, yaitu: i) *operasional training program*, ditujukan untuk

memberikan pemahaman terhadap fungsi dan operasional peralatan-peralatan, menangani peralatan-peralatan, memahami protocol, dan mampu melakukan pemeliharaan terhadap alat-alat tersebut; ii) *Overseas Training Program*, akan dilaksanakan di Spanyol selama 2 minggu, total jumlah peserta 24 orang dibagi menjadi 5 kelompok (*Embryo Transfer dan Embryo Manipulasi*, *Feed Management, Dairy Product, Beef product,* dan *Project Management*); dan iii) *Domestik Training Program*, yang akan dilaksanakan di Indonesia selama 8 minggu dengan jumlah peserta sebanyak 105 orang.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Rencana pencapaian *output* TA 2014 untuk proyek *Animal Husbandry Technology and Practices Improvement* disajikan pada buku lampiran laporan kinerja pelaksanaan PHLN Triwulan IV TA 2014. Realisasi pencapaian fisik pengadaan peralatan laboratorium dan instalasi adalah 64,23% dari keseluruhan pekerjaan proyek dan pengembangan SDM (pelatihan) belum dapat dilaksanakan. Realisasi penyerapan anggaran mencapai 62,84% dari total anggaran.

Terdapat permasalahan dalam pelaksanaan proyek *Animal Husbandry Technology and Practices Improvement* pada Triwulan IV Tahun 2014 terkait masalah administrasi pembayaran di Spanyol yang menyebabkan terlambatnya pembayaran kepada *supplier*/kontraktor yang seharusnya pada bulan Oktober 2014. Hal ini mengakibatkan kontraktor tidak bisa menyelesaikan pekerjaan karena batas kontrak berakhir pada tanggal 20 Desember 2014. Pemerintah Spanyol melalui Kedubesnya di Jakarta telah berupaya membantu menyelesaikan permasalahan pembayaran oleh BBVA Spanyol kepada pihak *supplier* serta mempercepat prosedur pembayaran kepada *supplier* untuk pembayaran selanjutnya.

Terkait telah berakhirnya masa laku *loan*, LIPI telah mengajukan perpanjangan *Loan Agreement* sampai dengan Desember 2016, sampai dengan saat ini perpanjangan masih menunggu persetujuan dari BBVA Spanyol.

- **Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**

  - ***Bridge Material Supply for Bridge Replacement***

    Proyek *Bridge Material Supply for Bridge Replacement* bertujuan agar pembangunan jalan dan jembatan nasional memenuhi persyaratan mutu dan sesuai standar. Disamping itu, proyek ini diharapkan dapat menyediakan fasilitas transportasi dasar untuk mendukung pembangunan daerah. Pembangunan jalan dan jembatan akan dilaksanakan di beberapa propinsi di Indonesia, diantaranya adalah Sumatera Utara, Riau, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Papua, Maluku, Sulawesi Barat, dan Papua Barat.

    Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

    Rencana pencapaian *output* TA 2014 untuk proyek ini disajikan pada buku lampiran laporan kinerja pelaksanaan PHLN Triwulan IV Tahun 2014. Realisasi pencapaian fisik untuk pengadaan barang mencapai 98,04% dari keseluruhan proyek, sedangkan untuk pekerjaan jasa *services* 99,2%.

Sedangkan permasalahan pada proyek *Bridge Material Supply for Bridge Replacement* pada Triwulan IV Tahun 2014 adalah terkait pencatatan Surat Perintah Pembukuan Pengesahan (SP3) yang diterbitkan oleh KPPN untuk TA 2014 yang hanya mencapai 50% dari realisasi penyerapan anggaran berdasarkan *Notice of Disbursement* yang dikeluarkan oleh pihak lender.

PROYEK LEMBAGA PENJAMIN KREDIT EKSPOR/KREDIT SWASTA ASING(LPKE/KSA)

Jumlah proyek Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE)/Kredit Swasta Asing (KSA) yang efektif dan sedang berjalan pada Triwulan IV TA 2014 adalah sebanyak 54 proyek yang dikelola oleh 3 (tiga) instansi yaitu: Kementerian Pertahanan (Kemenhan) sebanyak 44 proyek, di mana 5 proyek di antaranya merupakan lintas alokasi, Kepolisian RI (Polri) 6 proyek, dan PT. PLN 4 proyek. Total nilai pinjaman LPKE/KSA bernilai USD 4,75 miliar. Adapun rekapitulasi pelaksanaan pinjaman KSA/LPKE menurut instansi penanggung jawab dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.35 Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman LPKE/KSA Pada Triwulan IV TA 2014 Menurut InstansiPenanggung Jawab

(*Dalam Juta USD*)

Instansi Penanggung Jawab	Jumlah Proyek	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan IV TA 2014	Target Penyerapan TA 2014
Dilaksanakan oleh K/L				
Kemenhan	44	4.617,94	3.054,58	1.744,89
Kepolisian RI	6	42,54	11,54	22,48
Di SLA kan				
PT. PLN	4	86,29	27,81	15,82
Total	**54**	**4.746,77**	**3.093,93**	**1.783,19**

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan IV Tahun 2014 (diolah)
Catatan : USD 1 = IDR 12.440,00

Realisasi Penyerapan Pinjaman dan Pencapaian Indikator Kinerja

- **Kementerian Pertahanan**

  Realisasi Penyerapan Dana

  Total nilai alokasi proyek LPKE/KSA Kemenhan yang sedang berjalan saat ini mencapai USD 5,625 miliar, dengan persentase terbesar terdapat pada alokasi Penetapan Sumber Pembiayaan (PSP) tahun 2011-2014 sebesar 82,22%. Pada triwulan ini terdapat 8 kegiatan yang selesai dilaksanakan. Ke-8 kegiatan tersebut terdiri dari 3 kegiatan yang dilaksanakan TNI AD, 3 kegiatan TNI AU, 2 kegiatan TNI AL. Di samping itu, terdapat 6 kegiatan yang efektif pada triwulan ini, yang terdiri dari 3 kegiatan TNI AD dan 3 TNI AL. Total penyerapan pinjaman kumulatif sampai dengan Triwulan IV Tahun 2014 mencapai USD 3,054 miliar atau 66,15% dari total komitmen pinjaman. Alokasi total PHLN Kemenhan pada tahun 2014 mencapai Rp 13,01 triliun atau ekuivalen USD 1,04 miliar.

Tabel 2.36 Total Alokasi, Komitmen Pinjaman, dan Penyerapan Kumulatif Pinjaman Proyek LPKE/KSA

(*Dalam Juta USD*)

No.	Tahun Alokasi	Jumlah Alokasi	Total Komitmen Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan IV TA 2014
1	AKE 2002	32,78	9,50	0,00
2	AKE 2004	16,00	13,60	10,30
3	AKE 2005	201,00	167,01	124,20
4	APP 2006	330,00	278,54	202,73
5	APP 2008	39,00	32,33	26,12
6	APP 2009	357,25	293,94	226,38
7	PSP 2011-2014	4.625,29	3.823,01	2.464,85
Total		**5.625,29**	**4.617,94**	**3.054,58**

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan IV Tahun 2014 (diolah)

Catatan : USD 1 = IDR 12.440,00

Berdasarkan Laporan Kinerja Pelaksanaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LPKPHLN) Triwulan IV Tahun 2014 yang dibuat sesuai data Bank Indonesia, sampai dengan 31 Desember 2014 Kemenhan berhasil melakukan penarikan kumulatif sebesar Rp 20,34 triliun dari target 2014 sebesar Rp 21,71 triliun,dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.37 Target dan Realisasi Penyerapan TA 2014

(*dalam juta USD*)

No.	Tahun Alokasi	Target TA 2014	Realisasi Penyerapan	
			Kumulatif	TW IV
1	AKE 2002	1.744,89	0	0
2	AKE 2004		4,52	2,34
3	AKE 2005		62,27	55,53
4	APP 2006		117,55	89,04
5	APP 2008		13,54	1,11
6	APP 2009		45,37	21,08
7	PSP 2011-2014		1.392,07	390,18
Total		**1.744,89**	**1.635,31**	**559,28**

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan IV Tahun 2014 (diolah)

Catatan : USD 1 = IDR 12.440,00

- **Kepolisian RI**

Realisasi Penyerapan Dana

Total pagu Pinjaman Luar Negeri Polri, yang mencakup pinjaman lunak dan komersial, yang tercantum dalam DIPA TA 2014 mencapai Rp 1,70 triliun atau ekuivalen USD 136,60 juta. Selaindialokasikan untuk proyek-proyek yang sedang berjalan, anggaran PLN sebesar ini juga dialokasikan untuk proyek-proyek yang direncanakan efektif pada pada tahun 2014 ini.

Pada Triwulan IV ini terdapat 6 (enam) proyek LPKE/KSA yang sedang berjalan dengan total alokasi KE sebesar USD 50,04 juta. Target penyerapan untuk keenam proyek ini mencapai USD 22,48 juta. Sampai dengan akhir Triwulan IV, penyerapan pinjaman mencapai Rp 7,49 juta atau 33,32%. Sesuai rencana, pada Triwulan IV ini Polri telah melakukan pembayaran uang muka dengan nilai total USD 6,07 juta untuk 4 (empat) proyek sebagai berikut:

1. Aljihandak EOD/Mole Programmer (K.E. 2008) sebesar USD 1,05 juta
2. Harsucad Pesawat (K.E. 2008) sebesar USD 0,60 juta
3. *Radio Trunking* Polda Jabar (K.E. 2009) sebesar USD 2,70 juta
4. *Radio Trunking* Polda Sumbar (K.E. 2009) sebesar USD 1,72 juta

Tabel 2.38 Rekapitulasi Proyek KSA/LPKE Kepolisian Republik Indonesia

(*Dalam Juta USD*)

No.	Alokasi Tahun	Jumlah Alokasi	Total Komitmen Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan IV TA 2014	Penyerapan TA 2014	
					Target	Realisasi
1	POLRI TA 2004	3,60	3,06	0,12	2,95	0,00
2	POLRI TA 2005	5,95	5,06	3,94	1,05	0,00
3	POLRI TA 2008	10,99	9,35	0,00	10,99	0,00
4	POLRI TA 2009	29,5	25,07	7.89	7,49	7,49
Total		50,04	42,54	11.54	22,48	7,49

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan IV Tahun 2014 (diolah)

- **PT. PLN**

Realisasi Penyerapan Dana

Terdapat 2 (dua) proyek pinjaman komersial PLN yang sedang berjalan atau efektif, yaitu *Java Bali Submarine Cables 150 kV Circuit 3 & 4*, dan *Scattered Transmissions and Substantions Package 8*. Proyek-proyek tersebut dibiayai dengan pinjaman JBIC melalui skema SLA (*Subsidiary Loan Agreement*). Di samping itu, saat ini PLN sedang melaksanakan proses pengefektifan 2 (dua) proyek yakni *Scattered Transmissions and Substantions Project Package 3* dan *Scattered Transmissions and Substantions Project Package 7*. *Package* 3 ditandatangani pada tanggal 5 Desember 2014 dengan *Lender* KfW Jerman sedangkan *Package* 7 ditandangani pada tanggal 25 Juli 2014 dengan *Lender* AFD Prancis.

Proyek *Scattered Transmissions and Substantions Package 8, Package 3* dan *Package 7* merupakan 3 dari 8 paket proyek yang sebelumnya direncanakan akan dibiayai dengan pinjaman luar negeri bersumber kredit ekspor dengan total alokasi sebesar USD 308,8 juta. Namun, dari ke-8 paket tersebut, hanya 3 paket yang akhirnya direalisasikan dengan menggunakan pinjaman luar negeri, sedangkan pendanaan untuk 5 paket lainnya dialihkan dengan menggunakan anggaran PLN sendiri. Sementara itu, alokasi untuk proyek *Java Bali Submarine Cables 150 kV Circuit 3 & 4* mencapai USD 65,67 juta. Dengan demikian, total alokasi untuk keempat proyek ini adalah USD 374,47 juta. Sedangkan total pinjaman luar negeri untuk keempat proyek ini mencapai USD 86,29 juta.

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2014 penyerapan kumulatif untuk kedua proyek ini mencapai USD 27,81 juta atau 46,46% dari total pinjaman proyek. Pada tahun 2014 PT. PLN menargetkan total penyerapan untuk kedua proyek ini sebesar USD 15,82 juta.

Tabel 2.39 Rekapitulasi Proyek KSA/LPKE PT PLN

(*Dalam Juta USD*)

No.	Nama Proyek	Jumlah Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan IV TA 2014	Penyerapan TA 2014	
				Target	Realisasi
1	*Java Bali Submarine Cables 150 kV Circuit 3 & 4*	29,16	27,81	13,47	11,11
2	*Scattered Transmissions and Substantions Package 8*	17,30	0,00	2,35	0,00
3	*Scattered Transmissions and Substantions Package 7*	19,83	0,00	0,00	0,00
4	*Scattered Transmissions and Substantions Package 3*	20,00	0,00	0,00	0,00
Total		**86,29**	**27,81**	**15,82**	**11,11**

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan IV Tahun 2014 (diolah)

Catatan: Kedua proyek ini menggunakan mata uang Japanese Yen. Nilai kurs yang digunakan dalam laporan ini adalah USD 1 = JPY 104,248; USD 1=IDR 12.440,00

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pada triwulan ini, proyek *Java Bali Submarine Cables 150 kV Circuit 3 & 4* telah menyelesaikan pekerjaan fisik maupun penyerapan pinjaman. Dari total komitmen pinjaman sebesar JPY 3,48 miliar, jumlah pinjaman yang dimanfaatkan untuk pelaksanaan proyek ini mencapai JPY 3,31 miliar atau 95,11%. Dengan berakhirnya proyek ini, pihak PLN diharapkan dapat menyelesaikan laporan pasca kegiatan untuk disampaikan kepada Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian paling lambat 6 bulan setelah proyek berakhir.

Terkait proyek *Scattered Transmissions and Substantions Package* 8, PLN mengusulkan perpanjangan masa laku *Loan Agreement* (L/A) proyek ini dari semula tanggal 15 Mei 2015 menjadi 30 Juni 2017. Rapat interkem yang dikoordinasikan Bappenas menyetujui usulan perpanjangan tersebut.

Sampai dengan Triwulan IV, kontrak proyek ini belum dapat efektif karena PLN belum bisa menyelesaikan pembayaran *advancepayment*, kepada salah satu perusahaan anggota konsorsium kontraktor proyek.

Di samping itu, PLN belum menyelesaikan proses pengadaan tanah untuk pembangunan Gardu Induk Semanggi Barat. Menurut rencana, proyek ini akan dibangun di atas tanah milik Pemprov DKI Jakarta dengan menggunakan mekanisme tukar guling lahan. Namun, sampai sekarang proses tukar guling lahan tersebut masih berjalan. Selain itu PLN juga belum mendapatkan ijin untuk kontruksi di lokasi pembangunan Transmisi 150 KV bawah tanah GIS Semanggi Barat ke GI Karet.

Untuk menindak lanjuti permasalahan yang ada, PLN diharapkan dapat segera menyelesaikan *advance payment* kepada PT Meta Epsi sehingga kontrak dapat efektif pada bulan Februari 2014 dan PLN diharapkan dapat menyelesaikan proses pengadaan lahan dan perijinan untuk kontruksi paling lambat pada bulan Mei 2015..

BAB III
KINERJA PELAKSANAAN HIBAH LUAR NEGERI

Pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2014 ini terdapat 229 laporan pelaksanaan hibah luar negeri yang disampaikan oleh23 Kementerian/Lembaga dengan total nilai hibah sebesar USD 1.479,50juta. Berdasarkan 229 laporan hibah yang masuk, jika diklasifikasikan menjadi 2 jenis hibah, yaitu hibah terencana dan hibah langsung, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang/jasa/surat berharga, maka terdapat 13 laporan hibah terencana, 147 laporan hibah langsung dalam bentuk uang, dan 69 laporan hibah langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga. Berikut adalah tabel yang menunjukkan jumlah laporan hibah yang masuk berdasarkan instansi penanggung jawab dan diklasifikasikan berdasarkan bentuk dan jenis hibahnya.

Tabel 3.1 Hibah Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab

(Ekuivalen Juta USD)

Instansi Penanggung Jawab	Hibah Terencana			Hibah Langsung dalam Bentuk Uang			Hibah Langsung dalam Bentuk Barang/Jasa/ Surat Berharga		
	Jml	Nilai	Realisasi Penyerapan	Jml	Nilai	Realisasi Penyerapan	Jml	Nilai	Realisasi Penyerapan
Kemen Pertanian	4	6,14	0,46	48	7,65	1,79	19	110,87	20,06
Kemen Perindustrian	-	-	-	-	-	-	2	1,52	0,00
Kemen ESDM	-	-	-	1	0,30	0,01	7	26,92	0,10
Kemen PAN dan RB	-	-	-	-	-	-	2	4,58	0,00
Kemen Keuangan	-	-	-	-	-	-	6	18,13	0,00
Kemen Kesehatan	-	-	-	32	360,92	37,40	6	78,71	28,96
Kemen Kominfo	-	-	-	1	1,87	0,10	-	-	-
Kemen LH	-	-	-	7	20,53	0,72	14	35,58	9,49
Kemen KP	-	-	-	21	228,18	1,53	-	-	-
Kemen Dikbud	-	-	-	1	25,55	2,80	-	-	-
Kemen PU dan Pera	8	210,71	23,58	-	-	-	-	-	-
BKKBN	1	0,43	0,40	-	-	-	-	-	-
BNN	-	-	-	1	0,02	0,02	-	-	-
BPOM	-	-	-	3	1,66	0,32	1	0,24	0,04
Bappenas	-	-	-	16	74,01	40,83	-	-	-
Kepolisian RI	-	-	-	8	48,30	10,22	-	-	-
BPS	-	-	-	2	1,13	0,53			
PPATK	-	-	-	-	-	-	1	1,09	0,31
Lemhanas	-	-	-	-	-	-	1	1,82	0,00
Komisi Yudisial	-	-	-	-	-	-	1	0,05	0,00
KPPU	-	-	-	-	-	-	1	0,03	0,03
KPK	-	-	-	-	-	-	4	23,84	0,00
Komnas HAM	-	-	-	6	28,10	0,47	-	-	-
Sekretariat Negara	-	-	-	-	-	-	4	160,62	7,27
Total	**13**	**217,28**	**24,44**	**147**	**798,22**	**96,74**	**69**	**464,00**	**66,26**

HIBAH BANK DUNIA

Pemantauan dan evaluasi hibah dari Bank Dunia pada Triwulan IV Tahun 2014 difokuskan pada 3 kegiatan hibah yang merupakan kegiatan pembangunan model atau insiatif baru, terdiri dari 2 kegiatan pada sektor pembangunan sosial dan 1 kegiatan pada sektor energi. Adapun jumlah kegiatan dan proporsi nilai hibah dari Bank Dunia yang sedang berjalan menurut sektor dapat dilihat pada gambar berikut:

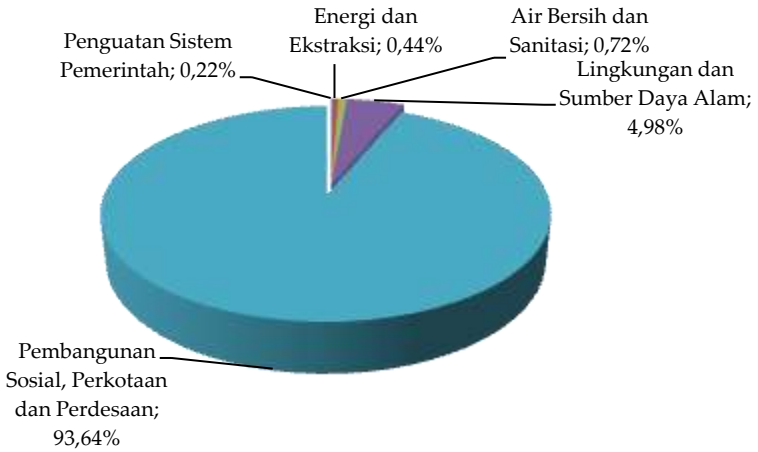

Gambar 3.1 Hibah Bank Dunia Menurut Sektor, Triwulan IV TA 2014

Nilai total hibah Bank Dunia yang sedang berjalan adalah sebesar USD 319 juta, dengan proporsi terbesar yaitu pada sektor pembangunan sosial, perkotaan dan perdesaan yang mencapai 93,64% dari total nilai hibah tersebut. Pada urutan selanjutnya yaitu sektor lingkungan dan sumber daya alam sebesar 4,98%, sektor air bersih dan sanitasi sebesar 0,72%, sektor energi dan ekstraksi sebesar 0,44%, serta sektor penguatan kapasitas pemerintah sebesar 0,22% dari total nilai hibah Bank Dunia.

Adapun hibah yang dipantau pada triwulan ini yaitu: i) *National Violence Monitoring System (NVMS)* yang dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; ii) *Indonesia Slum Allevation Policy and Action Plan, yang* dilaksanakan oleh Kementerian PPN/Bappenas; dan iii) *Indonesia Clean Stove Initiative – Piloting Biomass Cookstove Markets – MEMR Gomponent,* yang dilaksanakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK)

- ***National Violence Monitoring System (NVMS)/ Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK)***

  Hibah SNPK telah dimulai sejak tahun 2012 dan akan berakhir pada bulan Mei tahun 2015 dengan nilai hibah sebesar USD 1,5 juta. Hibah ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas institusi Indonesia dalam mendeteksi dan merespon konflik sosial melalui data dan analisis. Selain bekerjasama dengan Kemenko PMK, Bank Dunia juga bekerjasama dengan The Habibie Center untuk mendukung kegiatan ini, dengan nilai hibah sebesar USD 653,5 ribu. The Habibie Center bertugas untuk melakukan analisis dan penelitian mendalam mengenai isu-isu kekerasan yang penting bagi kebijakan.

Kegiatan hibah ini terdiri dari 3 komponen yaitu: i) pemantauan insiden kekerasan; ii) analisis dan kajian untuk penyusunan kebijakan; dan iii) peningkatan kapasitas dan penguatan koordinasi antar lembaga dalam penanganan konflik.

Realisasi Dana dan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

Sampai dengan Triwulan IV TA 2014 penyerapan kumulatif untuk hibah SNPK telah mencapai USD 1,19 juta atau sebesar 79,33% dari total dana hibah yang diberikan Bank Dunia. Diperkirakan seluruh sisa dana dapat terserap pada akhir waktu pelaksanaan. Progres pelaksanaan kegiatan pada masing-masing komponen sebagai berikut:

1) Pemantauan Insiden Kekerasan

Dalam penyediaan data kuantitatif yang berkualitas dan akurat, Kemenko PMK bekerjasama dengan JRI-*Research* yang telah berpengalaman melakukan kegiatan serupa. Terdapat 2 kegiatan utama pada komponen ini yaitu pengumpulan data kekerasan dan pembuatan portal *databaseonline*. Pada komponen ini diharapkan dapat dibangun database insiden kekerasan dengan sumber data utama surat kabar lokal. Cakupan wilayah untuk kegiatan ini pada awalnya hanya 17 provinsi kemudian berkembang menjadi 34 provinsi sesuai dengan perjanjian perpanjangan waktu dan tambahan dana hibah.

Pada tahun 2014, data insiden kekerasan untuk 34 provinsi tersebut telah tersedia yang diambil dari 125 surat kabar lokal, dan 2 surat kabar nasional. Data insiden kekerasan yang dikumpulkan tidak hanya data pada tahun berjalan tetapi juga pada tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 1998-2011, hal ini dimaksudkan untuk melihat tren konflik dan kekerasan di masing-masing wilayah. Data pada tahun 1998-2011 tersebut diambil dari database proyek serupa sebelumnya dengan cakupan yang lebih sempit, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Selain itu diperkuat juga dengan kegiatan pengumpulan data *baseline*.

Kegiatan pengumpulan data insiden kekerasan pada tahun berjalan akan selesai pada bulan Januari 2015 dan dihentikan untuk sementara waktu sampai ada kejelasan mengenai keberlanjutan kegiatan termasuk pendanaannya. Sementara itu, pengumpulan data baseline ditargetkan dapat selesai pada bulan Februari 2014. Portal *databaseonline* insiden kekerasan telah di-*launching* pada bulan Desember 2012 dan terus diperkuat dan diperbarui data-datanya setiap bulan hingga saat ini. Portal tersebut dapat diakses dengan alamat www.snpk-indonesia.com.

Gambar 3.2 Portal *Online* Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan

Pada saat peresmian portal SNPK banyak negara yang tertarik untuk mempelajari sistem ini terutama dalam hal metode *coding* yang telah terstandar, antara lain: Nepal, Norway, Philipine, Thailand, Timor Leste, Myanmar dan lain-lain.

2) Analisis dan kajian untuk penyusunan kebijakan

   Komponen ini merupakan komponen yang dilaksanakan oleh The Habibie Center. Di targetkan selama masa pelaksanaan proyek dapat diperoleh 9 *policybrief* hasil analisis dan kajian terhadap isu-isu kekerasan yang terjadi. Pada triwulan ini, The Habibie Center telah berhasil menyusun 8 *policy b*rief, dan 1 sisanya ditargetkan dapat diselesaikan pada bulan Februari 2015. Selain itu, The Habibie center juga ditargetkan untuk membuat 3 studi tematik. Pada tahun 2014 studi lapangan dan analisis data untuk studi yang ke-3 telah berhasil diselesaikan, direncanakan pada bulan Maret 2015 hasil studi tersebut akan didiseminasikan. Target selanjutnya untuk komponen ini adalah penyusunan Indeks Intensitas Kekerasan (IKK), The Habibie Center telah menyusun *concept note* untuk metode pengukuran IKK pada tahun 2014.

3) Peningkatan kapasitas dan penguatan koordinasi

   Pada komponen ini telah dilakukan berbagai kegiatan peningkatan kapasitas baik untuk Kemenko PMK maupun The Habibie Center dan stakeholder lainnya. Selain itu juga telah dilakukan kegiatan koordinasi dengan instansi terkait serta penyusunan laporan terkait insiden kekerasan baik *ad hoc* maupun rutin (bulanan).

Permasalahan dan Tindak Lanjut

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan hibah ini antara lain:

1) Tidak adanya tempat penyimpanan data karena pada perjanjian hibah tidak terdapat komponen untuk pembelian *server*, sehingga *server* yang digunakan saat ini disewa. Beberapa pihak telah menawarkan untuk membantu penyediaan *server* misalnya Universitas Paramadina, namun masih didiskusikan di internal penanggung jawab kegiatan.

2) Hibah ini merupakan kategori hibah langsung sehingga perlu dilakukan BAST terlebih dahulu dari Bank Dunia ke Kemenko PMK. Setelah dilakukan BAST maka akan menjadi milik negara, sehingga perlu dipertimbangkan opsi-opsi untuk pengelolaan termasuk *server* oleh instansi pemerintah, karena tidak dapat dengan mudah dipindahkan (pengelolaannya) ke pihak swasta.

Keberlanjutan, Replikasi dan Rencana Pengembangan ke Depan

Replikasi kegiatan SNPK telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, dan pada tahun 2015 direncanakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga akan melakukan replikasi. Terkait dengan keberlanjutan kegiatan, saat ini sedang dipertimbangkan beberapa opsi, diantaranya kerjasama dengan KSI. Namun, Kemenko PMK disarankan untuk dapat meneruskan SNPK oleh pemerintah melalui pembiayaan APBN. Untuk itu perlu dikoordinasikan dengan direktorat sektor terkait di Bappenas agar keberlanjutan pengelolaan SNPK dapat dilakukan oleh pemerintah.

Penanggung jawab proyek berpendapat bahwa SNPK saat ini belum dapat dijadikan sebagai *early warning system*, hanya dapat menyajikan informasi mengenai tren insiden kekerasan di seluruh

wilayah di Indonesia. Ke depan, akan dilakukan penguatan-penguatan agar sistem ini juga dapat menjadi *early warning system* dengan memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar lembaga seperti Kepolisian, Badan Intelegen Negara, dan sebagainya. *Roadmap* menuju *early warning system* juga sudah disusun dan saat ini sedang diperkuat. Selain itu perbaikan yang akan dilakukan ke depan adalah penyesuaian nomenklatur dengan Undang-Undang Anti Kekerasan karena pada saat pembuatan database undang-undang tersebut belum diresmikan.

Kementerian PPN/Bappenas

- ***Indonesia Slum Allevation Policy and Action Plan (SAPOLA)***

Hibah SAPOLA telah dimulai sejak 6 Oktober 2010 dan akan berakhir pada 31 Maret 2015 dengan nilai hibah sebesar USD 455.000 (ekuivalen Rp. 4.963.119.500). Tujuan pelaksanaan hibah ini antara lain: 1) mengembangkan kebijakan dan strategi nasional peningkatan kualitas perumahan kumuh dan pencegahan perumahan kumuh; 2) mendorong peningkatan kualitas dari perumahan kumuh eksisting; 3) mengembangkan kebijakan dan program untuk memberikan tempat tinggal yang cukup bagi populasi baru di perkotaan.

Realisasi Dana dan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2014, hampir seluruh dana proyek ini telah terserap yaitu mencapai Rp. 4.902.971.658 atau 98,79% dari nilai hibah. Meskipun kegiatan akan berakhir pada bulan Maret 2015, namun kegiatan SAPOLA telah berhasil diselesaikan pada akhir Desember 2014, sehingga waktu yang tersisa akan digunakan untuk penyelesaian administrasi kegiatan. SAPOLA telah berhasil membangun *framework* penanganan permukiman kumuh berbasis masyarakat beserta pedoman pelaksanaan dan rekomendasi untuk kebijakan. Untuk implementasinya, saat ini masih didiskusikan dengan instansi terkait yang bertanggung jawab terhadap penanganan permukiman kumuh.

Permasalahan dan Tindak Lanjut

Beberapa permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan SAPOLA antara lain:

- Proses penarikan beberapa kali terlambat dari rencana karena terdapat beberapa *output* yang belum sempurna sehingga Bappenas mensyaratkan agar konsultan menyelesaikan output tersebut terlebih dahulu sebelum *invoice* diproses ke KPPN;
- Kendala koordinasi antara pihak Bappenas dan Bank Dunia membuat terjadinya keterlambatan pencairan pembayaran kepada pihak konsultan, dimana seharusnya dicairkan pada bulan Desember 2014 sesuai dengan akhir masa anggaran. Bank Dunia baru akan mencairkan pada Bulan Januari 2015, sedangkan kegiatan SAPOLA sudah tidak dialokasikan ke dalam DIPA 2015. KPPN selaku pihak yang mencatat segala bentuk belanja negara membutuhkan adanya alokasi kegiatan SAPOLA pada DIPA 2015 sebagai dasar legitimasi penerbitan Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3).
- Seluruh SP3 untuk pengajuan di tahun 2014 belum diterbitkan.

Keberlanjutan, Replikasi dan Rencana Pengembangan ke Depan

Keberlanjutan kegiatan SAPOLA telah diwujudkan salah satunya melalui peresmian "**Program Penanganan Permukiman Kumuh Nasional: Menjadikan Penanganan Kumuh sebagai salah**

satu *Platform* kolaborasi Nasional" pada tanggal 22 Desember 2014. Program ini merupakan bentuk nyata upaya pencapaian target 0% permukiman kumuh sesuai dengan arah kebijakan pemerintah yang baru. Program ini dilaksanakan di 9 kabupaten/kota sebagai pilot yaitu Semarang, Yogyakarta, Makassar, Palembang, Surabaya, Banjarmasin, Pekalongan, Malang, dan Kabupaten Tangerang. Pelaksanaan program akan mengedepankan kolaborasi antar sektor dan penanganan kumuh berbasis masyarakat. Melibatkan 11.000 fasilitator yang tersebar di 11.000 kelurahan/desa seluruh Indonesia.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

- ***Indonesia Clean Stove Initiative (CSI) – Piloting Biomass Cookstove Markets – MEMR Gomponent***

  Hibah CSI baru dimulai pelaksanaannya pada 22 Mei 2014 dan akan berakhir pada 31 Desember 2015, dengan nilai hibah sebesar USD 300.000. Tujuan dari kegiatan ini adalah mendukung pelaksanaan program inisiatif tungku sehat hemat energi Indonesia yang bertujuan untuk memperluas akses terhadap tungku bersih dan efisien di Indonesia.

  Realisasi Dana dan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

  Realisasi dana hibah CSI sampai dengan 31 Desember 2014 baru mencapai Rp. 74 juta, karena kegiatan baru mulai berjalan pada bulan November 2014. Kegiatan yang sudah dilakukan adalah uji efisiensi tungku yang bekerja sama dengan lembaga Dian Desa Yogyakarta. Dari 16 tungku yang ditawarkan oleh produsen 4 tungku diantara adalah dari produsen luar negeri dan 12 lainnya adalah produksi dalam negeri. Pada tahun 2014, uji efisiensi tungku baru dapat dilaksanakan untuk 5 tungku disebabkan oleh permasalahan teknis yang terjadi di lembaga Dian Desa, sehingga harus dilanjutkan pada tahun 2015. Beberapa workshop juga sudah dilakukan di Yogyakarta untuk memperkenalkan teknologi tungku yang efisien kepada masyarakat.

  Hibah CSI ini merupakan fase ke-2 dari pelaksanaan program secara keseluruhan yang terdiri dari 3 fase. Fase ke 2 ini adalah untuk melaksanakan *pilot project* yang berlokasi di Provinsi Jawa tengah dan DIY dengan target 10.000-20.000 rumah tangga. Dalam pelaksanaannya juga bekerja sama dengan PT. Bank Rakyat Indonesia untuk subsidi kepada pihak swasta (produsen tungku). Pada fase 3 direncanakan akan dilaksanakan program nasional CSI melalui dana pemerintah (rupiah murni) dengan target 24,5 juta rumah tangga.

HIBAH LEMBAGA PBB

United Nations Development Programme (UNDP)

Pemantauan terhadap kegiatan hibah UNDP pada Triwulan IV TA 2014 dilakukan melalui *review portfolio* yang bertujuan untuk melihat proses dan pencapaian kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan UNDP secara keseluruhan, baik dari sisi *output* maupun *outcome*. Selain itu, hasil dari *review portfolio* ini juga dijadikan sebagai salah satu masukan terhadap kerjasama Pemerintah Indonesia dengan UNDP ke depan.

Pada *portfolio* kegiatan hibah UNDP tahun 2014, terdapat 4 kegiatan baru yang disetujui dalam pertemuan *Project Appraisal Committee (PAC)*dengan nilai sebesar USD 20,9 juta. Sementara itu, jumlah kegiatan yang berakhir pada tahun ini sebanyak 6 kegiatan dengan nilai hibah sebesar USD

29,49 juta. Kegiatan yang telah berakhir tersebut diharapkan dapat menyampaikan strategi keberlanjutan hasil-hasil kegiatan dan replikasi/*scallingup* yang sudah/akan dilakukan dalam *Project Completion Report* kepada pemerintah dan juga mitra pembangunan.

Adapun daftar kegiatan Hibah UNDP yang disetujui dan juga kegiatan yang berakhir pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Daftar Kegiatan Hibah UNDP yang Disetujui dan Kegiatan yang Berakhir pada Tahun 2014

(Dalam Juta USD)

Kegiatan yang Disetujui Tahun 2014		Kegiatan yang Berakhir Tahun 2014	
Nama Kegiatan	Jumlah Hibah	Nama Kegiatan	Jumlah Hibah
Sustainable Development Financing (SDF)	0,37	Low Emission Capacity Building (LECB)	1,25
Enhancing the Protected Area System in Sulawesi (E-PASS)	6,52	Preparatory Arangements for the Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)	11,41
Support for Reform of the Justice Sector in Indonesia	13,42	Arafura and Timor Seas Ecosystem Action Programme (ATSEA)	3,20
Sustainable Palm Oil Initiatives	0,60	Support to Indonesia's Democratic Elections (E-MDP)	9,48
		Barriers Removal to the Cost-Effective Development of Energy Efficiency Standards and Labelling (BRESL)	1,66
		Micro-Turbine Generation Technology Application Project (MCTAP)	2,50
Total hibah baru	**20,90**	**Total hibah tutup**	**29,49**

Selain itu, terdapat beberapa kegiatan yang semula akan berakhir pada tahun 2014 namun diperpanjang masa pelaksanaannya yaitu sebanyak 4 proyek dengan nilai hibah sebesar USD 43,92 juta. Daftar kegiatan hibah yang diperpanjang tersebut antara lain:

Tabel 3.3 Daftar Kegiatan Hibah UNDP yang Diperpanjang

No	Nama Kegiatan	Jumlah Hibah
1	Indonesian Democracy Index	11,02
2	Disaster Risk Reduction Based Rehabilitation and Reconstruction (DR4)	6,52
3	Tsunami Recovery Waste Management Project (TRWMP) Phase III	15,87
4	People Centred Development Programme (PCDP) II	10,51
Total hibah baru		**43,92**

Sesuai dengan fokus pemantauan pada tahun 2014, kegiatan hibah terencana (yang masuk dalam daftar rencana kegiatan hibah) juga di-*review* pelaksanaannya selama tahun 2014. Kegiatan hibah terencana yang di-*review* tersebut antara lain: 1) *Support to the acceleration of the MDG Achievement in Indonesia* 2012-2015; 2) *Strengthening Acces to Justice in Indonesia* (SAJI); 3) *Strengthening Women Participation and Representation in Governance in Indonesia* (SWARGA); dan 4) *Peace through Development in Disadvantaged Area* (PTDDA). Hasil *review* terhadap kegiatan-kegiatan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- **Kementerian PPN/Bappenas**
  - ***Support to the Acceleration of the MDG Achievement in Indonesia 2012-2015***

    Dalam rangka mempercepat pencapaian target MDGs sebagaimana yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010, Pemerintah Indonesia dan UNDP sepakat untuk melakukan kerjasama dalam mendukung upaya tersebut melalui kegiatan hibah *Support to the*

Acceleration of the MDG Achievement in Indonesia 2012-2015. Naskah perjanjian kegiatan hibah tersebut ditandatangani pada bulan Januari tahun 2013 dan direncanakan akan dilaksanakan sampai dengan 31 Desember tahun 2015, dengan total nilai hibah sebesar USD 900 ribu. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan mekanisme teknis dan institusional dapat mendukung pencapaian target MDGs tahun 2015 dan mekanisme tersebut dapat diadopsi untuk agenda pasca-MDGs. Selain itu kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas nasional dan daerah untuk melakukan monitoring, evaluasi, analisis dan pelaporan pencapaian MDGs.

Realisasi Dana dan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

Pada tahun 2014 dana hibah yang telah direalisasikan mencapai USD 647.166.Terdapat 2 output yang harus dicapai kegiatan ini yaitu 1) terbangunnya strategi dan mekanisme (teknis, institusional dan finansial) untuk mengimplementasikan peta jalan MDGs pada level nasional maupun regional; dan 2) peningkatan kapasitas nasional dan regional untuk memantau, mengevaluasi, menganalisis dan menyusun laporan pembangunan manusia dan MDGs.

Pada tahun 2014 terdapat tambahan 5 provinsi serta 24 kabupaten yang telah berhasil menyusun kerangka kerja percepatan pencapaian MDGs (MDG *Acceleration Framework/MAF*). Capaian lainnya antara lain telah dibangunnya sistem monitoring dan evaluasi *online* untuk mendukung provinsi-provinsi yang capaian MDGs-nya masih rendah. Sistem ini memantau progress pelaksanaan rencana aksi MDGs melalui laporan mengenai realisasi dana maupun capaian pelaksanaan kegiatan. Selain itu, pada tahun 2014 penyediaan data mengenai 39 indikator MDGs (75% dari keseluruhan indikator) telah sampai pada level kabupaten/kota bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik, sebelumnya data hanya tersedia sampai tingkat provinsi.

Gambar 3.3 Dokumen MDGs *Acceleration Framework* (MAF) di Beberapa Provinsi

Pembelajaran

1. Keberadaan sekretariat MDGs dengan staf yang berkualitas dan berdedikasi tinggi merupakan salah satu prasyarat keberhasilan kegiatan akselerasi capaian MDGs.
2. Klinik dan pendampingan teknis MDGs merupakan salah satu kunci keberhasilan kegiatan. Pada Triwulan IV TA 2014 sebanyak 7 provinsi dan 8 kabupaten/kota mendatangi sekretariat MDGs untuk melakukan asistensi.
3. Pelaksanaan dialog lintas sektor dan melibatkan pusat dan daerah dalam pencapaian tujuan MDGS diharapkan dapat membantu mengatasi kebutuhan untuk pendampingan

penyusunan MAF di 3 provinsi yang belum dapat dipenuhi sebelumnya yaitu MAF pengurangan kemiskinan di Provinsi DIY, MAF pengurangan angka kematian ibu di Provinsi Sumatera Utara dan MAF penanggulangan HIV & AIDs di Provinsi Bali.

4. Pengarusutamaan MDGs dalam penyusunan program pada tingkat provinsi dan kabupaten telah berhasil meningkatkan alokasi dana untuk Rencana Aksi Daerah sebanyak 2x lipat di 63% provinsi.

- ***Strengthening Access to Justice in Indonesia (SAJI)***

Kegiatan SAJI telah efektif sejak bulan Maret tahun 2012 dan akan berakhir pada bulan Desember tahun 2015, dengan nilai hibah sebesar USD 3,35 juta. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Indonesia dan organisasi non-pemerintah lainnya dalam memberikan keadilan kepada masyarakat melalui hukum formal maupun non-formal baik di pusat maupun di daerah sasaran proyek (Aceh, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah).

Realisasi Dana dan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

Jumlah realisasi dana kegiatan SAJI pada tahun 2014 adalah USD 404.601. Terdapat 5 output yang harus dicapai proyek ini yaitu a) output 1: mekanisme institusional, kerangka kerja legal dan penguatan kapasitas institusi pemerintah untuk mengimplementasikan rekomendasi dan rencana aksi strategi nasional akses terhadap keadilan; b) output 2: peningkatan mekanisme penanganan pengaduan masyarakat pada institusi pemerintah baik nasional maupun daerah; c) output 3: peningkatan akses terhadap bantuan layanan hukum dari pemerintah terutama untuk masyarakat miskin dan marginal; d) output 4: akses terhadap hukum informal meningkat terutama untuk perempuan dan kelompok rentan lainnya; e) output 5: *knowledege management* untuk menginformasikan peraturan dan inisiasi dalam meningkatkan akses terhadap keadilan dan berkontribusi pada laporan pelaksanaan instrumen hak asasi manusia di Indonesia.

Output 1. Capaian konkrit untuk output ini antara lain telah dibangunnya *website* akses terhadap keadilan yang dikelola oleh sekretariat nasional akses terhadap keadilan. Selain itu, pada tahun 2014, Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan telah berhasil direvisi/disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Gambar 3.4 Website Akses terhadap Keadilan (*Access to Justice)*

Output 2. Beberapa capaian pada output 2 antara lain SAJI telah berhasil memberikan dukungan kepada lembaga Ombudsman untuk menyusun Peraturan Presiden Nomor 76/2013 mengenai mekanisme pengaduan masyarakat, serta melakukan pilot pelaksanaan 9 unit standar mekanisme pengaduan masyarakat di 3 wilayah yaitu Bener Meriah (Provinsi Nangroe Aceh Darussalam), Palangkaraya (Kalimantan Tengah), dan Palu (Sulawesi Tengah). Selain itu, pelaksanaan pemrosesan pengaduan masyarakat di Ombudsman juga semakin diperkuat sesuai dengan Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan. Capaian lainnya pada output ini adalah kerangka kerja nasional terkait mekanisme pengaduan masyarakat telah memasuki tahap *roll out*. Pada tingkat daerah, kesadaran masyarakat terhadap keberadaan pelayanan pengaduan masyarakat juga telah meningkat di daerah sasaran proyek SAJI.

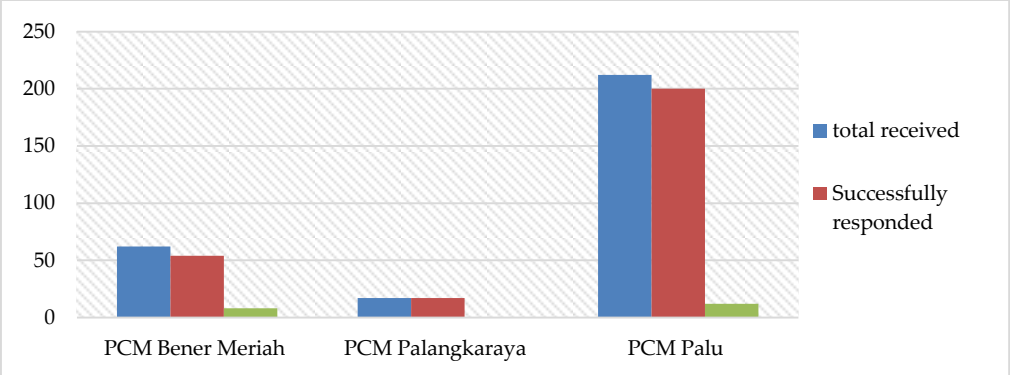

Gambar 3.5 Jumlah Pengaduan Masyarakat pada Unit Pelayanan Pengaduan Masyarakat (UP3) Periode Januari-September 2014

Sumber: Portfolio Review, 2015

Output 3. Pada output 3 proyek SAJI membantu dalam implementasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 mengenai bantuan hukum dan juga memberikan input dalam penyusunan peraturan turunannya. Proyek SAJI juga membantu dalam pemilihan penyedia layanan bantuan hukum serta memfasilitasi dan membangun kepedulian antar sesama pencari bantuan hukum.

Output 4. Banyak capaian yang sudah diperoleh dalam meningkatkan peran peradilan adat di daerah sasaran proyek SAJI, misalnya di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam telah dilaksanakan berbagai *workshop* dan forum berbagi pengalaman dan pengetahuan mengenai peradilan adat. Selain itu, proyek SAJI juga telah melakukan sosialisasi kepada 450.000 orang penduduk asli di Aceh melalui brosur, radio dan televisi. Dengan demikian diharapkan akses terhadap hukum informal (adat) dapat meningkat. Saat ini replikasi di provinsi Sulawesi Tengah sedang dipersiapkan, pedoman peradilan adat telah selesai disusun begitu juga dengan modul-modul untuk pelatihan. Pada tahun 2014 telah resmi berdiri lembaga adat di provinsi ini melalui Peraturan Gubernur Nomor 180/590/RO.HUK-6.ST/2014. Sementara itu, di Provinsi Kalimantan Tengah saat ini masih dalam proses penyusunan Peraturan Gubernur serupa mengenai pembentukan lembaga adat.

Gambar 3.6 Contoh Brosur Sosialisasi Peradilan Adat di Aceh (Kiri) dan Pedoman Peradilan Adat Sulawesi Tengah (Kanan)

Output 5. Pada output terakhir berbagai produk mengenai inisiatif proyek SAJI telah dihasilkan antara lain berupa video, leaflet dan laporan penilaian terhadap pelaksanaan proyek SAJI.

Pembelajaran

Berbagai pembelajaran dalam pelaksanaan kegiatan SAJI sebagai berikut:

1. Masukan strategis dalam penyusunan peraturan pelaksana untuk program bantuan hukum sangat krusial untuk memastikan implementasinya dapat berjalan lancar.
2. Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM akan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program bantuan hukum di tingkat daerah.
3. Idealnya kegiatan SAJI juga dilaksanakan pada tingkat provinsi untuk memberikan dukungan langsung serta komunikasi yang baik kepada lembaga hukum formal maupun dewan adat.

- **Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
  - ***Strengthening Women Participation and Representation in Governance in Indonesia* (SWARGA)**

    Kegiatan SWARGA dirancang untuk memperkuat keterwakilan perempuan dalam parlemen dan meningkatkan kapasitas perempuan anggota parlemen agar dapat bekerja dengan lebih baik. Kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan selama 3 tahun mulai dari tahun 2012 hingga tahun 2015, dengan total dana hibah sebesar USD 2 juta. Terdapat 4 tujuan yang harus dicapai pada proyek SWARGA yaitu: 1) mendukung pembangunan masyarakat yang terinformasi dan berpartisipasi aktif, sehingga persepsi publik mengenai peran perempuan dalam pemerintahan lebih seimbang; 2) memperkuat kapasitas institusi dan membangun jaringan dengan pihak berwenang untuk mengadvokasi hak-hak dan keterwakilan perempuan; 3) kontribusi terhadap upaya reformasi birokrasi dalam mendukung lingkungan karir yang ramah terhadap perempuan dan mekanisme *gender focal point* melalui kebijakan dan dukungan teknis; dan 4) menyediakan data dan kontribusi untuk pembangunan wawasan dalam isu-isu yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam politik dan pemerintahan serta memanfaatkan *lesson learned* dan *best practices* untuk kebijakan dan program yang lebih berkualitas.

Realisasi Dana dan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

Realisasi dana hibah SWARGA tahun 2014 mencapai USD 1.009.603. Progres pelaksanaan kegiatan sampai dengan tahun 2014 antara lain telah terjadi peningkatan jumlah perempuan yang terpilih menjadi anggota DPR-D (Dewan Perwakilan Rakyat-Daerah) di 9 lokasi proyek. Kegiatan SWARGA juga telah memberikan berbagai pelatihan yang telah berhasil meningkatkan pengetahuan perempuan anggota parlemen rata-rata sebesar 45,2%. Direncanakan selanjutnya akan diberikan pelatihan lanjutan agar kemampuan anggota parlemen perempuan tersebut terus meningkat. Selain itu, organisasi perempuan di DPD (Dewan Perwakilan Daerah) dan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) telah disatukan sehingga lebih sinergis dan membuat koordinasi menjadi lebih mudah.

Pembelajaran

Beberapa *lesson learned* yang diperoleh dari pelaksanaan proyek SWARGA antara lain:

1. Diperlukan koordinasi dan kerjasama yang baik antar lembaga dan mitra pembangunan dalam peningkatan kapasitas perempuan anggota parlemen. Kegiatan SWARGA bekerjasama dengan organisasi Kemitraan dan *The Asia Foundation* (TAF) sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan. Selain itu, kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah terkait juga dilakukan sehingga ketika terjadi permasalahan di lapangan dapat ditindaklanjuti bersama.
2. Peran tokoh kunci sangat besar dalam keberhasilan pelaksanaan kegiatan. SWARGA telah berhasil menyatukan organisasi perempuan di DPR dan DPD dengan dukungan dari tokoh kunci tersebut.

- **Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemdes PDTT)**
  - ***Peace through Development in Disadvantaged Area (PTDDA)***

    Kegiatan PTDDA telah efektif sejak bulan Juni tahun 2012 dan direncanakan akan selesai pada bulan Desember tahun 2016, dengan nilai hibah sebesar USD 1,88 juta. Proyek ini bertujuan untuk mendorong ketahanan masyarakat terhadap konflik. Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh adalah pemerintah dan masyarakat Indonesia dapat mengidentifikasi dan mengelola konflik serta dampaknya dengan lebih efektif.

Realisasi Dana dan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

Pada tahun 2014 telah dianggarkan dana sebesar USD 668,68 ribu dan telah direalisasikan sebesar USD 528,14 ribu. Terdapat 3 output yang harus dicapai pada proyek ini yaitu: a) **output 1:** kerangka kebijakan untuk pencegahan konflik dibangun pada tingkat nasional dan daerah; b) **output 2**: sistem kelembagaan untuk pencegahan konflik dibangun pada tingkat nasional dan daerah; dan 3) **output 3:** masyarakat dapat melaksanakan pencegahan konflik dan inisiasi kohesi sosial (*social cohesion*) menggunakan mekanisme dan alat yang stabil dan aman.

Output 1. Pada output ini kegiatan PTDDA telah berhasil memfasilitasi dan mendukung diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang penanganan konflik sosial. PTDDA juga bekerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) untuk menyusunan *policy paper* mengenai pencegahan konflik yang menjadi masukan dalam drafteknokratik RPJMN 2015-2019. Selain itu, PTDDA juga telah berhasil menyusun strategi nasional dan rencana aksi yang tergabung dalam buku I dan II RPJMN 2015-2019.

Output 2. Untuk mencapai output ini PTDDA berkolaborasi dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk mendukung terbentuknya Tim Koordinasi Pembangunan Perdamaian yang bertugas untuk melakukan sinkronisasi insiatif dalam pencegahan konflik dan penciptaan perdamaian. Berbagai inisiatif juga telah dilakukan diantaranya Kerjasama Selatan-Selatan (*South-South & Triangular Cooperation*) antara Pemerintah Indonesia dengan Myanmar yang bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan pemerintah dan organisasi sosial masyarakat mengenai peranan kepemimpinan perempuan dan kohesi sosial.

Output 3. Beberapa hasil yang telah dicapai terkait output 3 antara lain pedoman untuk perencanaan dan penganggaran yang sensitif konflik (*conflict-sensitive planning/conflict-sensitive budgeting*) telah selesai disusun dan dilakukan uji coba, begitu pula dengan kerangka kerja penanggulangan konflik. Hasil lainnya adalah pedoman *Conflict Early Warning System* (CEWERS) telah selesai disusun dan siap untuk diimplementasikan. Selain itu, PTDDA juga membangun Indeks Rawan Konflik di Daerah Tertinggal Indonesia (IRKDTI) bekerjasama dengan Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian UGM. Beberapa pelatihan juga telah dilakukan diantaranya Pelatihan Bina Damai kepada 80 orang fasilitator.

Gambar 3.7 Pedoman Perencanaan dan Penganggaran yang Peka Perdamaian (Sensitif Konflik)

Gambar 3.8 Pelatihan dan Workshop mengenai Perdamaian dan Penanggulangan Konflik

Pembelajaran

1. Pesan yang jelas dalam advokasi harus dibangun untuk mempromosikan pengelolaan konflik. Pesan yang jelas dapat membantu dalam menarik perhatian dari publik dan pembuat kebijakan.

2. Perubahan jenis konflik yang cukup dinamis di Indonesia dari konflik yang massif menjadi konflik yang berskala lebih kecil namun tersebar hampir di seluruh provinsi di Indonesia membutuhkan penanganan yang khusus dan tepat sasaran.
3. Telah terjadi perubahan paradigma pembangunan di Indonesia, dalam visi pemerintahan saat ini pencegahan konflik dan penciptaan perdamaian merupakan salah satu visi yang akan diwujudkan dalam kerangka persatuan nasional.

Box 3: Kunjungan Lapangan

Hibah UNDP: Climate Change Trust Fund (ICCTF)

***Executing Agency*:** Kementerian Kehutanan

Tujuan kunjungan lapangan:

Kunjungan lapangan dilaksanakan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ICCTF di Desa Kembangan, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, Madurat epatnya di *Forest Management Unit* (FMU) Gerbang Lestari.

Hasil kunjungan lapangan:

1. **Pengembangan *Biomass Energi State* (BEE)/Kebun Energi Biomassa**

   Kebun energi biomassa dikembangkan dengan memanfaatkan lahan-lahan kosong dan lahan kritis yang ada di Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan. Tanaman yang dikembangkan adalah Kaliandra Merah (*Calliandra Calothyrsus)*. Hal positif yang dapat ditangkap dari diskusi dengan pimpinan FMU adalah pemahaman yang sangat baik oleh FMU terhadap konsep kegiatan bahkan hingga ke level yang sangat teknis karena kemauan untuk belajar yang sangat tinggi. Berbagai ujicoba telah dilakukan oleh PMU diantaranya pembuatan pellet kayu dari berbagai jenis tanaman, hingga diperoleh kesimpulan bahwa kaliandra merupakan jenis tanaman yang paling tepat meskipun terdapat tanaman lain yang kandungan kalorinya tinggi, namun sulit dalam hal penanaman, pemeliharaan maupun pengolahannya.
2. ***Wood Pellet Industry* (WPI)/ Industri Pellet kayu**

   Terdapat 7 komponen utama mesin pengolahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan pellet dari kayu. Target produksi yang direncanakan di Bangkalan adalah 1ton/jam, namun saat ini terdapat banyak ketidaksesuaian dalam spesifikasi mesin dan berbagai permasalahan teknis lainnya sehingga hanya mampu berproduksi ±170 kg/jam. Sebelumnya, proses pengadaan mesin tersebut juga mengalami kendala, yaitu gagalnya proses lelang sehingga harus dilakukan lelang ulang. Dalam proses pelelangan ulang tersebut hanya 1 perusahaan yang memberikan penawaran sehingga dilakukan penunjukan langsung.

Pembelajaran:

1. Model kegiatan yang mengintegrasikan antara penyediaan bahan baku yang berkelanjutan dengan industri pengolahan yang ramah lingkungan memberikan dampak positif terhadap keberhasilan program.
2. Peran tokoh masyarakat sangat penting dalam menjamin keberhasilan kegiatan serta menjaga keberlanjutannya, sehingga dengan disepakatinya tokoh masyarakat yang disegani sebagai ketua pelaksana kegiatan sangat membantu dalam implementasi.
3. Model kegiatan yang mengintegrasikan antara penyediaan bahan baku yang berkelanjutan dengan industri pengolahan yang ramah lingkungan memberikan dampak positif terhadap keberhasilan program.

HIBAH PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT

Program Millennium Challenge Corporation (MCC) *Compact*

Millennium Challenge Corporation (MCC) adalah institusi independen Pemerintah Amerika Serikat yang menyalurkan bantuan dengan misi penurunan angka kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. MCC menyalurkan hibah kepada negara mitra dalam bentuk program *Treshold* dan *Compact*. Program *Treshold* merupakan hibah kecil yang diberikan kepada negara-negara dengan kriteria tertentu dan berkomitmen untuk meningkatkan kinerja kebijakan mereka. Program Compact adalah hibah bersaing dalam jumlah besar yang diberikan kepada negara-negara yang telah berhasil melewati skor median korupsi dan berhasil melaksanakan program *Threshold*.

Millennium Challenge Compact untuk Indonesia telah ditandatangani tanggal 19 November 2011dan mulai efektif sejak tanggal 2 April 2013 dan akan berlaku sampai dengan 1 April 2018 (tidak dapat diperpanjang lagi).

Tabel 3.4 Gambaran umum Hibah Program Compact

Instansi Penanggung jawab	Kemen PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
Sumber Dana	Millennium Challenge Corporation (MCC)
Waktu Efektif	2 April 2013 – 1 April 2018 (5 Tahun)
Nilai Hibah	USD 600.000.000

Hibah Program Compact sebesar USD 600 juta untuk membiayai komponen-komponen sebagai berikut:

Tabel 3.5 Komponen Pembiayaan Program Compact

No	Komponen	Nilai (USD)	Persentase (%)
1	*Green Prosperity*	332.500.000	55,4
2	*Community-based Nutrition*	131.500.000	22
3	*Procurement Modernization*	50.000.000	8
4	*Administration and Control*	75.800.000	12,6
5	*Monitoring and Evaluation*	10.200.000	2
Total		**600.000.000**	**100,0**

Penyerapan Anggaran Compact

Dana Hibah senilai USD 600 juta dipergunakan untuk membiayai kegiatan dengan tingkat penyerapan sebagai berikut:

Tabel 3.6 Penyerapan Anggaran Compact Berdasarkan Laporan CPS (*Common Payment System*)

No	Kegiatan	Jumlah (juta USD)	Penyerapan (s/d Desember 2014)	
			USD	%
1	*Green Prosperity Project*	332,50	1,182,494.36	0,36
2	*Community-based Health and Nutrition to Reduce Stunting Project*	131,50	34,759,317.00	26,43
3	*Procurement Modernization Project*	50,00	3,979,957.20	7,96
4	*Monitoring & Evaluation*	10,20	720,663.70	7,07
5	*Administration and Control*	75,80	13,595,115.63	17,94

Kemajuan dan Perkembangan Program Compact (s/d Desember 2014)

- **Proyek Kemakmuran Hijau (*Green Prosperity Project*)**

  Perkembangan dari Proyek Kemakmuran Hijau pada Triwulan IV Tahun 2014 difokuskan untuk pematangan konsep dan persiapan pelaksanaan penuh. Target besar yang direncanakan oleh Tim Proyek Kemakmuran Hijau adalah pada tahun 2015 sudah mulai penandatanganan kontrak dengan para penerima hibah, pelaksanaan proyek seperti pembangunan konstruksi dan sebagainya.

  Pada Triwulan IV, beberapa mekanisme pembiayaan hibah atau sering dikenal dengan Jendela Hibah yang telah disetujui MWA MCA-Indonesia mulai satu per satu diluncurkan sebagai langkah mencari calon mitra yang berminat untuk mendapatkan hibah Compact. Ada 3 Jendela hibah yaitu Jendela Hibah Kemitraan (*Partnership Grant)*, Jendela Hibah Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Komunitas (*Community Based Natural Resources Management*), dan Jendela Hibah Energi Terbarukan (*Renewable Energy Grant*).

  Langkah awal yang dilakukan MCA-Indonesia adalah dengan mengiklankan informasi tersebut melalui media massa dan website untuk mengundang para calon mitra yang berminat dengan mengirimkan pernyataan minat (*Expression of Interest*) pada Jendela Hibah yang diiklankan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Selain itu, juga melakukan sosialisasi langsung ke lokasi-lokasi yang ditentukan untuk menyaring informasi sekaligus mengundang para calon mitra untuk terlibat dalam kegiatan hibah.

Tabel 3.7 Lokasi Proyek Kemakmuran Hijau

Provinsi	Kabupaten
Jambi	Merangin, Muaro Jambi, Kerinci, Tanjung Jabung Timur
Sulawesi Barat	Mamuju, Mamasa
Nusa Tenggara Barat	Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara
Nusa Tenggara Timur	Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya
Sumatra Barat*)	Solok Selatan, Pesisir Selatan
Sulawesi Selatan*)	Luwu Utara, Luwu Timur
Sulawesi Tenggara*)	Kolaka Utara, Kolaka

Provinsi	Kabupaten
Kalimantan Barat*)	Kapuas Hulu, Sintang
Kalimantan Utara*)	Malinau
Kalimantan Timur*)	Mahakam Ulu, Berau

*Keterangan: *)MoU masih dalam proses, target pada 2015*

Realisasi Dana dan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

Perkembangan Triwulan IV untuk proyek Kemakmuran Hijau adalah sebagai berikut:

- **Perencanaan dan Penggunaan Lahan Secara Partisipatif atau *Participatory Land Use Planning* (PLUP)**

  Kegiatan PLUP senilai USD 25 juta ini pada Triwulan IV masih difokuskan pada pengembangan penyediaan data peta hingga ke tingkat desa, terutama setelah banyaknya pemekaran-pemekaran daerah baru. Media atau alat bantu untuk menentukan batas spasial pada hibah yang sudah mulai diluncurkan secara bertahap adalah GIS (*Geographic Information System*).

  GIS ini akan terus dikembangkan memasukkan data koordinat dari setiap lokasi yang potensial untuk pembangunan mikro hidro. Melalui GIS ini, maka akan terlihat daerah-daerah yang nantinya bisa *On Grid* atau disambungkan dengan jaringan PLN dan daerah *Off Grid* yang diluar jangkauan jaringan PLN karena bisa menampilkan area jaringan transmisi listrik PLN.

  Capaian yang dilakukan pada kegiatan ini adalah:

  1) Telah dibuatkan *dashboard GIS* untuk 4 (empat) kabupaten starter di 2 (dua) provinsi) yaitu Provinsi Jambi (Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Merangin) dan Provinsi Sulawesi Barat (Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamasa). Untuk dapat mengakses GIS Dashboard tersebut ada di website dengan alamat http://gp.mca-indonesia.go.id/peta-gis.
  2) Proses pengadaan PMaP (*Participatory Mapping Planning*) sudah pada tahap evaluasi *Expression Of Interest* (EOI).

- **Bantuan Teknis dan Pengawasan atau *Technical Assistance & Oversight***

  Bentuk kegiatan ini adalah dengan memberikan bantuan teknis pada penerima hibah untuk membuat perencanaan, mengembangkan prosedur, menyiapkan kerangka acuan, mekanisme seleksi hingga implementasi proyek. Selain itu juga melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penggunaan hibah. Kegiatan ini senilai USD 50 juta.

  Capaian yang dilakukan pada kegiatan ini adalah telah dipilihnya PMC (*Program Management Consultant*) berupa konsorsium dari Konsultan CDM Smith, Engility, dan Hatfield. Dari kontrak yang ditandatangani pada 23 September 2014 dan efektif pada 23 Oktober 2014. Saat ini PMC sedang melakukan mobilisasi untuk mengembangkan *Program Management Plan* (PMP). Draft dari PMP telah disampaikan ke MCA-Indonesia pada 19 Desember 2014. Target dari pengembangan PMP selesai pada 20 Februari 2015.

- **GP Facility**

1. **Hibah Kemitraan (*Partnership Grant*)**

   a. Hibah Kemitraan Kakao Lestari

   Hibah senilai USD 16 juta ini telah diluncurkan pada 3 Juli 2014 di media massa dan website. Tujuan utama Kemitraan Kakao Lestari adalah untuk mendukung pengembangan industri kakao yang berkelanjutan di Indonesia dan memperbaiki pemasukan para pekebun rakyat sehingga rakyat maupun industri pengolah kakao mendapatkan manfaat yang setara. Telah diterima 5 pengusul yang menyampaikan pernyataan minat. Pada tanggal 4 Oktober 2014, setelah dilakukan penilaian maka diumumkan 2 pernyataan minat yang memenuhi. Pada 14 November 2014, kedua pengusul tersebut diminta untuk menyusun proposal hingga 12 Januari 2015. Tahap selanjutnya adalah penilaian proposal, yang kemudian jadwal penandatanganan kontrak pada 1 April 2015.

   b. Hibah Kemitraan Kemakmuran Hijau

   Hibah senilai USD 54 juta dibuka pada 11 Oktober 2014 melalui media massa dan surat kabar. Pengumuman mengundang para calon mitra untuk menyampaikan penyataan minat sampai dengan 19 Desember 2014.

2. **Hibah Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat (*Community Based Natural Resources Management Grant*)**

   Merupakan program hibah dari proyek Kemakmuran Hijau di bidang pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat. Total nilai Program Hibah Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat (PSDA-BM) ini adalah USD 45 juta. Program PSDA-BM ini akan memberikan dana hibah senilai USD 250.000 hingga USD 1 juta, guna mendukung inisiatif dan investasi yang mampu memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dalam level masyarakat dan bentang alam tertentu. Rencananya akan dicari 2 Manager Program Hibah yang akan bertanggungjawab menangani wilayah-wilayah proyek, antara lain:

Tabel 3.8 Wilayah-wilayah Proyek Manager Program Hibah

Jabatan	Wilayah	Provinsi dan Kabupaten
Manajer Program Hibah 1	Sumatera dan Kalimantan	Jambi: Merangin, Muaro Jambi, Kerinci, Tanjung Jabung Timur Sumatera Barat:: Solok Selatan dan Pesisir Selatan Kalimantan Barat: Kapuas Hulu, Sintang Kalimantan Timur: Berau, Mahakam Ulu Kalimantan Utara: Malinau
Manajer Program Hibah 2	Sulawesi dan Nusa Tenggara	Sulawesi Barat: Mamuju dan Mamasa Sulawesi Selatan: Luwu Utara dan Luwu Timur Sulawesi Tenggara: Kolaka, Kolaka Utara NTB: Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Utara NTT: Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah

Manager akan bertanggung jawab mengelola seluruh siklus administrasi Hibah Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat (PSDA-BM) mulai dari proses Undangan Pengiriman Proposal (*Call for Proposal*/CfP), mekanisme kontrol dan pengawasan hingga penutupan proyek.

3. **Hibah Energi Terbarukan**

Hibah ini mendukung proyek energi terbarukan skala komersial dan berbasis komunitas termasuk untuk peningkatan kapasitas dan pembangunan serta konstruksi fasilitas baru. Hibah akan diberikan kepada rekanan atau mitra (termasuk organisasi nirlaba, perusahaan swasta, koperasi, lembaga donor dan pihak-pihak lainnya) yang memenuhi kelayakan hibah. Proyek Kemakmuran Hijau akan menggunakan dua skema pendanaan untuk Hibah Energi Terbarukan dengan tujuan untuk mendukung realisasi sasaran-sasaran Kebijakan Energi Nasional Pemerintah Indonesia yaitu:

- Hibah Pengembangan Energi Terbarukan Berbasis Komunitas Masyarakat didesain untuk kajian awal, studi kelayakan, persiapan proyek, konstruksi, kegiatan awal dalam operasi dan pemeliharaan, dan pelatihan untuk proyek-proyek energi terbarukan yang kecil dan tepat guna yang akan menguntungkan masyarakat setempat. Hibah ini akan membantu masyarakat untuk menerima pasokan listrik yang memadai dan dapat diandalkan serta manfaat dari arus pendapatan yang berasal dari produksi energi.
- Hibah Pengembangan Energi Terbarukan Skala Komersial yang akan ditujukan khusus untuk proyek-proyek energi terbarukan yang mengikuti standar internasional dan mengupayakan "subsidi" terendah.

a. Hibah Energi Terbarukan Skala Komunitas

Hibah senilai total USD 30 juta untuk jenis proyek baru/perbaikan/ekspansi kapasitas energi terbarukan (baik berupa produksi listrik ataupun panas) yang dikelola dan dimiliki oleh masyarakat. Jenis atau tipe teknologi yang diterapkan berupa biomassa, solar PV, tenaga hidro (mini & mikro), tenaga angin, hybrid dengan kapasitas antara 300 kW hingga 3 MW. Sistem hibah ini disediakan pendanaan sebesar 96% dari total biaya proyek oleh MCA Indonesia dapat berupa fasilitas tunggal atau *aggregate*. Sedangkan sisanya 4% dari kontribusi masyarakat dengan proporsi 3% *in kind* dan 1% tunai atau *cash*.

Perkembangan dari hibah ini telah diluncurkan pada 29 November 2014 melalui media massa dan website. Selain itu telah dilakukan sosialisasi di beberapa lokasi yang telah ditentukan.

b. Hibah Energi Terbarukan Skala Komersial

Hibah senilai total USD 100 juta untuk jenis proyek baru/perbaikan/ekpansi kapasitas energi terbarukan (khusus untuk produksi listrik) yang dikelola dan dimiliki oleh swasta yang sudah atau dalam proses PPA-PLN. Masyarakat akan mendapatkan bagi hasil atau pun porsi saham. Tipe teknologi yang diterapkan berupa biomassa, solar PV, tenaga hidro (mini & mikro), dan tenaga angin dengan kapasitas antara 1 MW hingga ≤ 10 MW. Sistem hibah ini disediakan 40% oleh MCA-Indonesia dari nilai total pembiayaan proyek. Investor harus memiliki pendanaan sendiri dalam bentuk

equity (minimum 30%) dan/atau pendanaan pinjaman (*debt*) dari perbankan (atau sumber lainnya).

- **Pengetahuan Hijau**

  Aktivitas Pengetahuan Hijau, sebagai salah satu komponen dari Proyek Kemakmuran Hijau, akan berinvestasi dalam berbagai proyek yang mampu meningkatkan keterampilan dan kapasitas tenaga kerja, memberikan bantuan teknis, mengumpulkan dan menyebarkan pengetahuan di satu atau lebih bidang Proyek Kemakmuran Hijau yaitu energi terbarukan, pengelolaan sumber daya alam, dan komoditas/pertanian yang berkelanjutan. Hibah yang disediakan untuk kegiatan ini dengan jumlah hibah minimum sebesar USD 200.000 dan jumlah hibah maksimal sebesar USD 4.000.000 per proyek. Total nilai hibah ini sebesar USD 15 juta.

  Hibah ini memiliki tujuan (1) untuk memastikan peningkatan keterampilan tenaga kerja dan keahlian terkait lainnya, peningkatan kapasitas, bantuan teknis, pelatihan kerja dan profesi, yang sejalan dengan strategi pembangunan nasional rendah karbon dan (2) untuk mendukung proyek Pengetahuan Hijau dan Kemakmuran Hijau dengan memfasilitasi pengumpulan, pengaplikasian dan penyebaran pengetahuan yang terkait dengan strategi pembangunan rendah karbon.

  Telah diluncurkan pada 20 Desember 2014 dan akan ditutup 15 Februari 2015. Peluncuran tersebut dilakukan melalui media massa dan website untuk mengundang pada calon mitra yang berminat agar segera menyampaikan pernyataan minat sebelum berakhir.

- **Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat Untuk Mengurangi *Stunting***

  Desain program Proyek Kesehatan dan Gizi berbasis Masyarakat dilakukan dengan tujuan khusus untuk mengurangi dan mencegah anak lahir dengan berat badan kurang (*low birth weight*), anak pendek (*stunting*), kekurangan gizi (*malnourishment*) pada anak-anak di lokasi proyek. Dalam jangka panjang, upaya ini diharapkan dapat meningkatan kesejahteraan rumah tangga melalui pengurangan pengeluaran (*cost savings*), peningkatan produktivitas (productivity growth), dan pendapatan seumur hidup yang lebih tinggi (*higher lifetime earning).*

  Komponen proyek, kegiatan, target capaian kegiatan dan target capaian pada tahun 2014 Proyek Kesehatan dan Gizi berbasis Masyarakat dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Komponen	Kegiatan	Target Capaian Kegiatan	Target 2014
Kegiatan Proyek Masyarakat	1. Technical Assistance 2. Participatory Planning 3. Community Block Grant	1. Memobilisasi 130 fasilitator baru tingkat kecamatan di 22 kabupaten di 3 provinsi. 2. Pelaksanaan *"community participatory planning & block grant implmentation"* di 5400 desa, 499 kecamatan, 64 kabupaten di 11 provinsi. 3. Penyelesaian pencairan tahap I dan memasuki pencairan dana tahap II.	- Fasilitator kec di 130 kecamatan, 22 kab dan 3 provinsi baru telah dimobilisasi. - Proses fasilitasi dilaksanakan.
Kegiatan Sisi Suplai	1. Pelatihan kepada Kader. 2. Pemberian Multiple Micro Nutrient untuk Ibu Hamil dan anak usia 6 – 23 bulan. 3. Triggering Hygiene & Sanitation. 4. Private sector engagement. 5. Pemberian insentif kepada Kader.	1. 9.566 kader posyandu, 1.114 staf Puskesmas, 112 staf Dinas Kesehatan Kabupaten, dan 20 staf Dinas Kesehatan Provinsi dilatih MIYCF. 2. 10.400 Kader desa dan 619 tenaga sanitarian Puskesmas mendapat pelatihan sanitasi. 3. 1.238 staf Puskesmas dilatih monitoring pertumbuhan anak. 4. Procurement process untuk multiple micro nutrient terselesaikan. 5. Dibangun konsep *Private Sector Engagement Design.*	- Pelatihan Fasilitator Nasional (32); Bidan Desa (81); Kader (600 / 300 desa) di jabar. - Modul pelatihan pemantauan pertumbuhan selesai. - Spesifikasi teknis dan ToR QC spesialis selesai. Mulai pengadaan Oktober 2014 - Rancangan kegiatan PSE disepakati.
Kegiatan Komunikasi, Manajemen Proyek dan Evaluasi	1. Kampanye Nasional 2. Manajemen 3. Monitoring & Evaluasi	1. Design *Formative Research* terselesaikan. 2. *National Secreatory Team* terbangun. 3. *Based line survey* terselesaikan.	- Design *Formative Research* sudah disetujui. - 3 anggota NST (Koordinator, Training, dan Sanitasi spesialis) sudah bekerja. Posisi M & E dan Nutritionis sedang dievaluasi - Firm untuk baseline sudah direkrut.

Gambar 3.9 Lingkup dan Target Capaian Kegiatan Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat

Pengembangan desain kegiatan Proyek Kesehatan dan Gizi berbasis Masyarakat telah dapat diselesaikan pada tahun 2013. Oleh karena itu, pada tahun 2014 kegiatan Proyek Kesehatan dan Gizi berbasis Masyarakat sudah siap untuk diimplementasikan. Meskipun demikian sejumlah persiapan masih harus dimantapkan agar kegiatan dapat diimplementasikan secara penuh.

Secara umum kinerja pelaksanaan Proyek Kesehatan dan Gizi berbasis Masyarakat sudah dapat memenuhi target kegiatan yang direncanan pada tahun 2014. Pencapaian tersebut antara lain:

1) Mobilisasi Fasilitator Kecamatan di 3 Provinsi Baru
2) Penandatanganan *Implementing Entity Agreement* dengan Kementerian Kesehatan
3) Manajemen Proyek: *National Secretary Team* (NST) sudah terbentuk
4) Modul Pelatihan Pemantauan Pertumbuhan sudah tersedia
5) Modul Pelatihan Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA) sudah tersedia
6) Modul Pelatihan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat sudah tersedia
7) Pelaksanaan Pelatihan Master of Training sebagian sudah dilaksanakan
8) Finalisasi desain *formative research* untuk basis pengembangan kampanye nasional sudah dilaksanakan
9) Spesifikasi *Multiple Micro Nutrient* untuk ibu hamil dan anak usia 6-23 bulan

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Finalisasi Laporan Hasil Kegiatan Riset Formatif

   Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat untuk Mengurangi *Stunting* (PKGBM) bertujuan untuk mengurangi dan mencegah bayi lahir dengan berat badan rendah, *stunting*, dan kekurangan gizi pada anak-anak di lokasi proyek; dan untuk meningkatkan pendapatan

rumah tangga melalui penghematan biaya kesehatan, peningkatan produktivitas dan meningkatkan kualitas hidup. Komponen kunci dari program ini adalah Kampanye dan Komunikasi Gizi Nasional (*National Nutritions Communication Campaign*/NNCC). Program ini akan dilakukan dalam lima tahap, yaitu: pelaksanaan riset formatif, pengembangan desain kampanye, implementasi kampanye, pengembangan *framework* monitoring dan evaluasi (M&E), dan diseminasi pelajaran yang dapat dipetik.

Riset formatif merupakan dasar dari strategi komunikasi. Riset dilakukan untuk mendapatkan informasi dari faktor kunci yang mempengaruhi praktik gizi serta ketersediaan media dan preferensi antara target audiens dari orang tua (ayah dan ibu), anggota keluarga (terutama ibu, suami dan ibu mertua), pengasuh untuk anak-anak usia 2 tahun ke bawah, serta personil Kemenkes dan pegawai pemerintah lainnya. Hasil penelitian akan digunakan untuk bahan penyusunan desain, kampanye komunikasi *multi-faceted* untuk meningkatkan kesadaran akan masalah *stunting*, dan perubahan perilaku positif dalam pengurangan *stunting* pada anak-anak di bawah usia 2 tahun. Riset formatif ini dilaksanakan secara kuantitatif dan kualitatif meliputi studi yang mencakup pengetahuan, sikap dan perilaku, dan *Participatory Rural Appraisals* (PRA).

Seluruh tahapan yang direncanakan dalam riset formatif mulai dari pengembangan disain pengumpulan data, analisis data, dan penulisan hasil riset telah dilaksanakan.

2. Penyusunan Pedoman Mekanisme Pembiayaan PKGBM

Pada tanggal 28 Oktober 2013, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan *Millennium Challenge Account* Indonesia (MCA–Indonesia) telah menandatangani perjanjian kerjasama untuk melaksanakan PKGBM. Kerjasama dilakukan untuk melaksanakan kegiatan penguatan suplai dan kampanye bidang kesehatan dalam PKGBM yang meliputi berbagai pelatihan bagi tenaga pelayanan kesehatan dan kader Posyandu; sanitasi dan hygiene; pelibatan swasta dalam perbaikan status gizi masyarakat; penyediaan gizi mikro untuk ibu hamil dan anak; penyediaan alat ukur badan; dan pelaksanaan kampanye nasional untuk mengatasi *stunting*. Sebagai tindak lanjut dari kerjasama tersebut, MCA Indonesia akan menyalurkan sejumlah dana melalui Kemenkes untuk membiayai beberapa sub-kegiatan dalam PKGBM. Penyaluran dana tersebut dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu sebagai berikut:

a) Dana yang akan diteruskan kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi dan Kabupaten. Dana yang akan diteruskan kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten adalah dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang akan dilakukan di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Puskesmas.

b) Dana yang digunakan untuk kegiatan di tingkat Pusat, yaitu dana yang akan digunakan langsung oleh Kemenkes untuk kegiatan yang dilakukan di tingkat Pusat.

Untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan tersebut, maka perlu disusun Pedoman Mekanisme Pembiayaan PKGBM. Sampai dengan akhir Triwulan IV, telah dilakukan koordinasi antara MCA-Indonesia dengan Kemenkes dengan hasil draf Pedoman Mekanisme Pembiayaan PKGBM. Draf ini akan difinaslisasi pada awal tahun 2015 dengan melibatkan Kementerian Keuangan. Tanpa pedoman mekanisme pembiayaan ini, kegiatan yang akan dilakukan di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Puskesmas tidak dapat diselenggarakan.

- **Proyek Modernisasi Pengadaan**

  Tujuan utama dari kegiatan Modernisasi Pengadaan adalah untuk mendapatkan penghematan dan efisiensi dalam proses pengadaan barang dan jjasa tanpa mengesampingkan kualitas proses pengadaan serta memberikan pelayanan publik yang sebaik-baiknya. Penghematan ini harus mengarah pada proses pekerjaan Pengadaan barang dan jasa yang lebih baik sehingga dalam jangka panjang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang positif.

  Terdapat 2 komponen utama dalam proyek Modernisasi Pengadaan, yaitu:

  a) *Profesionalisasi Pengadaan (Procurement Professionalization)*

     Dengan dibentuknya Unit Layanan Pengadaan pada tingkat lokal maupun nasional, maka diperlukan tenaga kerja yang profesional agar pekerjaan dengan praktek yang baik *(good practices)* dapat dilaksanakan. Dengan demikian maka proyek Modernisasi Pengadaan akan melaksanakan kegiatan penguatan ULP dengan kegiatan diantaranya:

     1) Menentukan kebutuhan standar sumber daya manusia dan memperkuat kemampuan operasional ULP;
     2) Melibatkan ULP dalam pelaksanaan Proyek Modernisasi Pengadaan, untuk menetapkan kelayakan dan praktek lokal yang baik;
     3) Mendukung strategi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk pengembangan sumber daya manusia;
     4) Mendukung pengembangan modul pelatihan, berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, untuk mengembangkan kompetensi auditor negara dalam melaksanakan audit kepatuhan dan kinerja pada sistem pengadaan.

  b) *Policy and Procedure Development*

     Kegiatan ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan antara kerangka kerja prosedural dan pelaksanaan sistem pengadaan di Indonesia. Dengan sistem pengadaan yang kompetitif, maka panduan dan standar dokumen lelang harus disiapkan dengan sebaik-baiknya agar proses pengadaan mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan harapan pengguna. Selain itu pengembangan prosedur dan kebijakan harus sesuai dengan kebutuhan sistem *e-procurement* dan sistem manajemen proyek kemitraan pemerintah dan pihak swasta.

     Pengembangan desain kegiatan Proyek Modernisasi Pengadaan dimatangkan pada tahun 2013, sehingga pada tahun 2014 kegiatan Proyek Modernisasi Pengadaan siap untuk diimplementasikan. Fase 1 diimplementasikan pada 29 ULP pilot yang tersebar diseluruh Indonesia tengah dilaksanakan. Pada fase ini ULP percontohan terdiri dari ULP Kementerian, Institusi Pemerintah, Universitas, Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten. Selanjutnya akan dilakukan *assessment* pada 70 ULP percontohan yang merupakan kegiatan Fase 2 proyek Modernisasi Pengadaan.

Realisasi Dana dan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

Pada Triwulan IV, tepatnya 9 Oktober 2014 Kementerian Keuangan telah mengesahkan DIPA revisi pengurangan alokasi Hibah MCC yang merupakan tindaklanjut dari Triwulan III, dimana alokasi awal sebesar Rp 250.000.000.000,00 dikurangi sebesar Rp 130.000.000.000,00 menjadi

Rp 120.000.000.000,00. Sehingga total anggaran Satker Pengelola Hibah MCC Tahun 2014 sebesar Rp 130.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Pagu Rupiah Murni sebesar Rp 10.000.000.000,00
- Pagu Hibah MCC Rp 120.000.000.000,00

Pencapaian kinerja output pelaksanaan sampai dengan TW IV tahun 2014 untuk Rupiah Murni (RM) Satker Pengelola Hibah MCC telah menyerap anggaran sebesar Rp9.580.583.191 (95,81%) dari total anggaran sebesar Rp10.000.000.000, sedangkan untuk Hibah MCC telah mengesahkan hibah sebesar Rp 118.759.953.916 (98,97%) dari total anggaran Rp120.000.000.000,00 dalam bentuk SPHL dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.9 Pengesahan Hibah Langsung Program Implementation Agreement-Grant Agreement MCC sampai dengan Triwulan IV Tahun 2014

(Dalam Rupiah)

No.	Tanggal	Nomor SPHL	Nilai SPHL
1.	2 Juli 2013	248602Y/140/701	189.831.600.000
2.	18 November 2013	253238Y/140/701	41.276.672.781
3.	05 Desember 2013	254246Y/140/701	7.928.816.232
Total Pengesahan Tahun 2013			**239.037.089.013**
4.	11 Maret 2014	141400501660001	12.897.882.449
5	12 Mei 2014	141400501660003	16.898.742.705
6	12 Mei 2014	141400501660002	6.338.067.932
7	10 Juni 2014	141400501660004	10.430.189.784
8	21 Oktober 2014	141400501660005	52.366.460.502
9	24 Oktober 2014	141400501660006	11.774.646.907
10	16 Desember 2014	141400501660007	8.053.963.637
Total Pengesahan Tahun 2014			**118.759.953.916**
Total Pengesahan (SPHL)			**357.797.042.929**

Penyerapan yang dicapai pada Triwulan IV untuk Rupiah Murni (RM) Satker Pengelola Hibah MCC senilai Rp1.915.054.753,00 (19,15%) dari total anggaran sebesar Rp10.000.000.000,00 pada tahun 2014.

Untuk penyerapan Komponen Hibah pada Triwulan IV senilai Rp 72.195.071.046 (60,16%) dari total anggaran sebesar Rp 120.000.000.000,00 pada tahun 2014. Dengan demikian penyerapan total Rupiah Murni dan Komponen Hibah pada Triwulan IV mencapai Rp 74.110.125.499,00 (57,01%) dari total Rp130.000.000.000,00 di tahun 2014.

Tabel 3.10 Penyerapan Anggaran Satker Pengelola Hibah MCC Triwulan IV Tahun 2014

(Dalam Rupiah)

No.	Komponen	Total Anggaran	Penyerapan (s/d Desember 2014)			
			Target	(%)	Realisasi	(%)
1	Rupiah Murni (RM)	10.000.000.000	10.000.000.000	100	9.580.583.191	95,81
2	Hibah	120.000.000.000	120.000.000.000	100	118.759.953.916	98,97
Total		**130.000.000.000**	**130.000.000.000**	**100**	**128.340.537.107**	**98,72**

Penyerapan Anggaran Satker Pengelola Hibah MCC pada Triwulan IV Tahun 2014 sudah mendekati target yang direncanakan, baik itu untuk anggaran Rupiah Murni maupun anggaran Hibah MCC.

Permasalahan dan Tindak Lanjut

Melihat kemampuan penyerapan dari MCA-Indonesia pada tahun 2014 yang rata-rata sekitar Rp 10 Milyar hingga Rp 11 Milyar/bulan, maka pagu hibah yang dialokasikan didalam DIPA Satker Pengelola Hibah MCC tahun 2015 diajukan sebesar Rp 110 Milyar. Sedangkan untuk Rupiah Murni, Satker Pengelola Hibah MCC diberikan anggaran sebesar Rp 13 Milyar termasuk anggaran untuk penggantian pajak dari kegiatan yang dibiayai dari dana hibah MCC. Sehingga total pagu DIPA Satker Pengelola Hibah MCC Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 123 Milyar.

Dikarenakan pada Triwulan IV, alokasi Hibah MCC yang disahkan dalam bentuk SPHL adalah realisasi penyerapan hingga bulan Oktober 2014, sedangkan untuk bulan November dan Desember 2014 akan dilakukan percepatan penyerapan pada bulan Januari 2015 (Triwulan I) dalam bentuk SPHL.

Adapun rencana penyerapan anggaran Satker Pengelola Hibah MCC pada Triwulan I Tahun 2015 sebagai berikut:

Tabel 3.11 Rencana Penyerapan Anggaran Satker Pengelola Hibah MCC Triwulan I Tahun 2015

(Dalam Rupiah)

No	Komponen	Total Anggaran	Triwulan I (2015)					
			Januari		Februari		Maret	
			Target	%	Target	%	Target	%
1	Rupiah Murni (RM)	13.000.000.000	4.520.833.333	35	770.833.333	9	770.833.333	9
2	Hibah MCC	110.000.000.000	22.000.000.000	20	10.000.000.000	9,09	10.000.000.000	9,09
Total		**123.000.000.000**	**26.520.833.333**	**22**	**10.770.833.333**	**9**	**10.770.833.333**	**9**

HIBAH PEMERINTAH JERMAN

Forest Programme

Forest Programme adalah sebuah program yang dalam konstribusinya untuk mendukung Kebijakan pengguranggan emisi gas buang yang disebabkan dari kerusakan hutan dan degradasi hutan (REDD+). Instansi penanggung jawab Kementerian Kehutanan.

Tabel 3.12 Gambaran Umum Hibah *Forest Programme*

Instansi Penanggung Jawab	Kementerian Kehutanan
Sumber Dana	*Grant* TF 2007 66 087 (GIZ dan USAID)
Waktu Efektif	2011 s/d 2018
Nilai Hibah	1. Porsi Pemerintah Indonesia: Rp 3.705.499.2000,00 (eq. EUR 2.315.937) 2. Porsi Pemerintah Jerman: EUR 20.000.000(hibah)

Realisasi Dana dan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

Perkembangan capaian kinerja pelaksanaan proyek secara umum adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13 Capaian Kinerja Hibah *Forest Programme*

Distrik	Kegiatan	Capaian
Berau	Pelatihan	1. Training RIL aspek perencanaan di PT. SLI IV 2. Pelatihan fasilitasi perencanaan pengelolaan hutan untuk DA#6 (persiapan FS) 3. Training fasilitasi vibrant dalam rangka kajian kelayakan ekosistem hutan 4. Training need assessment di PT Sumalindo Lestari Jaya IV 5. Training Pengelolaan keuangan desa 6. Training penggunaan alat ukur GPS, Kompas dll
	Kegiatan Lapangan	1. Kajian kelayakan/FS pengelolaan ekosistem hutan DA#7 2. Pelaksanaan survei sosial ekonomi 3. Monitoring quick start investment 4. Pelaksanaan investasi jangka panjang DA#7 (10 kampung) 5. Pendampingan pembangunan persemaian, pelaksanaan patroli hutan dan PLUP 6. Kajian kelayakan investasi komplementer 7. Pembangunan instalasi air bersih di desa punan segah 8. Pengambilan titik koordinat batas kampung
	Koordinasi	1. Rapat/koordinasi/sosialisasi dan musyawarah tingkat desa, kecamatan dan kabupaten (PIM, CP, FS, Investasi) 2. Workshop pengembangan kelembagaan management konflik 3. Rakor pemetaan partisipatif batas desa, rakor forclime FC
Kapuas Hulu	Pelatihan	1. Pelatihan dasar-dasar dan pengelolaan kawasan berbasis REDD 2. pelatihan budidaya tanaman kehutanan dan perkebunan (kopi, karet, organik) 3. Pelatihan kajian kelayakan pengelolaan ekosistem hutan 4. Training pengelolaan keuangan desa
	Kegiatan Lapangan	1. Kajian kelayakan/FS pengelolaan ekosistem hutan DA#7 2. Pelaksanaan survei sosial ekonomi 3. Pelaksanaan survei potensi dan tata guna lahan desa 4. Sosialisasi, musyawarah, dan pemetaan partisipatif batas administrasi desa 5. Monitoring quick start investment
	Koordinasi	1. Rapat/koordinasi/sosialisasi dan musyawarah tingkat desa, kecamatan dan kabupaten (PIM, CP, FS, Investasi) 2. Workshop perhitungan periodik Stock Karbon dan Tingkat Emisi Kabupaten
Malinau	Pelatihan	1. Pelatihan peningkatan kapasitas PL dan FD (persiapan FS#2)
	Kegiatan Lapangan	1. Kajian kelayakan/FS pengelolaan ekosistem hutan 2. Pelaksanaan survei sosial ekonomi 3. Monitoring quick start investment
	Koordinasi	1. Rapat/koordinasi/sosialisasi dan musyawarah tingkat desa, kecamatan dan kabupaten (PIM, CP, FS Investasi)

Isu Pelaksanaan Proyek

- **Penyerapan/Realisasi Anggaran**

  Program *Forclime* merupakan kegiatan yang didanai dari hibah. Untuk Modul FC merupakan hibah terencana dimana pelaksanaan dan administrasi anggaran dilakukan dengan mekanisme APBN (*on budget*) melalui KPPN. Sedangkan untuk modul TC merupakan hibah langsung berupa barang dan jasa yang administrasi dan anggarannya dilaksanakan langsung oleh GIZ (*off budget*). Realisasi penyerapan anggaran untuk program *Forclime-Module* TC relatif lambat di awal-awal tahun kegiatan, namun mengalami peningkatan di tahun berikutnya. Hal ini disebabkan oleh karena Kementerian Kehutanan baru pertama kali melaksanakan kegiatan dengan hibah terencana. Disamping itu, beberapa kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat kerap kali mengalami keterlambatan karena kapasitas masyarakat dalam merencanakan suatu kegiatan masih terbatas. Sebagai contoh dalam penyampaian proposal usulan kegiatan di masyarakat yang terlambat disampaikan, yang berakibat keterlambatan pelaksanaan proses kegiatan selanjutnya.
- **Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Kegiatan**
  Petunjuk Teknis (Juknis) kegiatan lapangan sebagai panduan tim lapangan bekerja sangat diperlukan agar tidak terjadi keraguan dalam menyampaikan kegiatan program kepada masyarakat. Saat ini, juknis tersebut masih dalam tahap finalisasi di Kementerian Kehutanan dan perlu segera diselesaikan untuk dapat disosialisasikan dan pelatihan bagi tim lapangan.
- **Dukungan untuk kegiatan lapangan**
  Daerah cakupan kegiatan program *Forclime* sangat luas sehingga perlu dukungan yang lebih baik termasuk dukungan dengan meningkatkan frekuesi kunjungan lapangan dalam memobilisasi tenaga lapangan untuk melakukan monitoring, patroli atau koordinasi dengan *stakeholder* lainnya.
- **Pemanfaatan Lahan oleh Masyarakat di Hutan Milik Negara**
  Salah satu program *Forclime* adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar hutan agar memiliki taraf hidup yang lebih baik dengan cara memberikan bibit-bibit pohon tertentu yang memiliki nilai ekonomi tinggi (contoh Karet, gaharu dan buah-buahan). Hasilnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang menanamnya. Beberapa masyarakat menggunakan lahan penanaman pohon tersebut dengan memanfaatkan hutan milik negara sebagai lahan untuk bekerja.

Permasalahan dan Tindak Lanjut

- Mempercepat penyusunan Juknis Lapangan agar dapat disosialisasikan dan pelatihan bagi tim lapangan;
- Memberikan dukungan yang lebih bagi tenaga lapangan untuk mempercepat mobilisasi dan frekuensi kunjungan lapangan;
- Melakukan studi/kajian pemanfaatan lahan oleh masyarakat di hutan milik negara.

BAB IV
LAPORAN PELAKSANAAN PROYEK YANG TELAH SELESAI

Pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2014 ini pembelajaran diperoleh dari *Project Completion ReportRural Empowerment and Agricultural Development* (READ)yang disampaikan oleh Kementerian Pertanian.

Rural Empowerment and Agricultural Development (READ)

Proyek *Rural Empowerment and Agricultural Development* (READ)mulai efektif pada 18 November 2008 dan berakhir pada 31 Desember 2014. Maksud dari pelaksanaan program READ adalah untuk memperbaiki mata pencaharian masyarakat miskin perdesaan secara berkelanjutan di 150 desa sasaran yang berada di Kabupaten Banggai, Buol, Parigi Moutong, Poso dan Toli-Toli di Provinsi Sulawesi Tengah. Tujuan Umum dari kegiatan ini adalah untuk mendukung pertumbuhan kegiatan ekonomi perdesaan yang berkelanjutan dan perbaikan pengelolaan sumberdaya alam di desa-desa lokasi Program READ. Kegiatan READ terdiri dari 4 komponen yaitu i) Pemberdayaan Masyarakat; ii) Infrastruktur Pedesaan; iii) Manajemen Program; dan iv) Analisis Kebijakan.

Tabel 4.1 Profil Proyek*Rural Empowerment and Agricultural Development*(READ)

Kode Loan	645-ID
Nama Proyek	*Rural Empowerment and Agricultural Development*
Instansi Penanggung Jawab	Kementerian Pertanian
Nilai Pinjaman	USD 21,67 juta
Masa Laku Pinjaman	18 November 2008 s/d 31 Desember 2014

Pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain:

- Mendukung inisiatif untuk meningkatkan kemampuan masyarakat lokal dalam mengelola pembangunan sosial-ekonominya sehingga menjadi lembagamasyarakat yang lebih transparan, akuntabel, adil dan kompeten.
- Mendukung sistem desentralisasi pemerintahan yang ditujukan untuk mendekatkan sumberdaya pada masyarakat, meningkatkan daya tanggap pada kebutuhan lokal dan akuntabilitas pemerintah.
- Membantu mengatasi kendala yang dialami oleh para petani miskin untuk mencapai tingkat pendapatan yang lebih baik dan perbaikan ketahanan pangan dari usaha pertanian dan non-pertanian.
- Memperbaiki kondisi prasarana perdesaan yang kurang memadai yang dapat menghambat kegiatan produksi dan pemasaran yang dilakukan para petani miskin dan pengusaha lainnya, melalui kesepakatan antara masyarakat dan pemerintah daerah. Investasi akan disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat yang dituangkan dalam rencana pembangunan desa.

- Mendukung Kementerian Pertanian untuk melaksanakan perannya sebagai lembaga fasilitasi dan koordinasi dalam program pengentasan kemiskinan, dan bukan hanya sebagai lembaga pelaksana/*implementing agency*. Pendekatan ini akan mendukung kebijakan desentralisasi pemerintahan.

Pencapaian Indikator Kinerja

Secara umum capaian dari kegiatan READ sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- Pembangunan dan Rehabilitasi Infrastruktur
  Pembangunan dan/atau rehabilitasi infrastruktur yang dilakukan antara lain meliputi pembangunan/rehabilitasi saluran irigasi (24,28 Km), pembangunan/rehabilitasi jalan (705,55 Km), pembangunan sarana air bersih (53 unit), pembangunan/rehabilitasi jembatan (188 unit), pembangunan/rehabilitasi fasilitas pengeringan kopra (43 unit) dan sebagainya.

- Pembentukan Kelompok Komoditas
  Jumlah kelompok komoditas yang telah berhasil dibentuk cukup menggembirakan yaitu mencapai 1.075 kelompok yang terbagi dalam 7 jenis komoditas yaitu padi/jagung, kakao, kopra, sayuran, pekarangan/ternak kecil, kelompok perempuan (non pertanian), dan kelompok dana bergulir (BLM). Jumlah dana bergulir yang telah disalurkan proyek READ adalah sebesar USD 1,78 juta (Rp 17,9 miliar).

- Pelatihan, Lokakarya dan Sekolah Lapang
  Sejak awal pelaksanaan proyek READ hingga tahun 2014 telah dilaksanakan lebih dari 25 jenis pelatihan/lokakarya/sekolah lapang dan kegiatan sejenis lainnya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat maupun pengelola kegiatan.

- Bantuan Peralatan dan Benih

  Jenis bantuan yang diberikan oleh proyek READ antara lain bantuan benih padi (2.232 orang petani), pengadaan traktor (200 unit), pengadaan alat ukur/timbangan tanam padi/jagung (160 unit), pembangunan pusat pengembangan kakao (di 5 kabupaten), bantuan ternak (50 desa) dan lain-lain.

Pembelajaran

Banyak pembelajaran yang dapat diperoleh sejak perencanaan hingga pelaksanaan proyek READ, setidaknya terdapat 5 pembelajaran penting yang membuat program READ dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat diadopsi oleh program serupa lainnya, sebagai berikut:

- Desain Kegiatan,

  Desain kegiatan READ dibuat dengan mengadopsi konsep *livelihood* (penghidupan) yang memperhatikan kesinambungan semua aspek yaitu *human capital, social capital, natural capital, physical capital, financial capital.* Dengan desain yang sangat holistik tersebut proyek READ mampu membantu mengatasi berbagai permasalahan mendasar di masyarakat. Selain itu proyek READ juga dirancang lintas sektor dan sesuai dengan kapasitas masyarakat.

- Metode dan Pendekatan

  Metode dan pendekatan yang digunakan oleh proyek READ adalah metode partisipasi yang dimulai sejak perencanaan proyek, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi proyek. Hal ini

menumbuhkan rasa kepemilikan yang tinggi di masyarakat, sehingga target-target kegiatan dapat dicapai dengan baik.

- Penguatan jejaring serta akses terhadap inovasi dan teknologi

  Proyek READ melibatkan banyak mitra kerja yang kompeten di bidangnya sehingga dapat membuka jejaring yang luas serta memungkinkan untuk terjadinya *transfer of knowledge.* Proyek READ juga membuka kerjasama dengan BPPT dan Kementerian Riset dan Teknologi sehingga memungkinkan untuk diadopsinya teknologi baru.

- Sistem Manajemen dan Penguatan Kapasitas

  READ menerapkan *Result Based Management* sehingga implementasi program berfokus pada hasil. Selain itu, kapasitas pelaksana proyek juga ditingkatkan melalui berbagai pelatihan sehingga dapat menjalankan proyek dengan efektif.

Keberlanjutan dan Rencana Replikasi

Tujuan utama *exit strategy* proyek READ adalah 1) menjaga keberlanjutan pelaksanaan komponen Program READ di 5 kabupaten di Sulawesi Tengah, untuk memastikan bahwa lembaga desa dan kelompok kegiatan berfungsi secara efektif, menggunakan sistem peningkatan produksi dan pemasaran, serta membangun usaha non budidaya pertanian baru dan/atau melakukan pengembangan lebih lanjut terhadap usaha non budidaya pertanian yang sudah ada, serta infrastruktur pertanian dapat dimanfaatkan dan dipelihara dengan optimal; dan ii) mereplikasi kegiatan dan komponen Program READ di kawasan perbatasan di NTT dan Kalimantan Barat.

a) Penguatan Pelaksanaan Kegiatan Eksisting untuk menjaga keberlanjutan

   Rancangan *exit strategy* untuk tahap pertama adalah penguatan pelaksanaan kegiatan eksisting di Provinsi Sulawesi Tengah, tanpa penambahan lokasi baru. Keberlanjutan program READ akan sangat bergantung pada komitmen dan inisiasi yang dilakukan Pemerintah Daerah, dengan bantuan fasilitasi dari BPPSDMP di tahun 2015 untuk kegiatan sebagai berikut:

   - **Penguatan kelembagaan**, melalui fasilitasi lembaga tani agar dapat menjadi berbadan hukum. Langkah ini dipandang perlu, agar kelompok tani yang telah mendapatkan dukungan READ dapat berkelanjutan secara kelembagaannya.
   - **Penguatan O&M infrastruktur** yang telah didapatkan dari program READ. Kementerian Pertanian akan melakukan lokakarya untuk masyarakat penerima infrastruktur dan alat tani, untuk mengajarkan pemeliharaan dan memastikan masyarakat dapat mengelola dan menyisihkan dana untuk operasional dan perbaikan infrastruktur dan alat tani tersebut.
   - **Penguatan fasilitasi penangkaran benih**. Untuk kelompok masyarakat yang mengembangkan komoditas padi, jagung dan kakao, terdapat fasilitasi READ di bawah komponen *livelihood* agar masyarakat dapat mengakses benih yang berkualitas. Melalui kerjasama dengan BPTP, dilakukan pengadaan benih dan penyediaan demplot untuk pelatihan masyarakat. Dari hasil kerjasama tersebut, masing-masing desa saat ini telah mampu menghasilkan benih berkualitas, bahkan beberapa kelompok telah mengembangkannya sebagai usaha. Untuk komoditas kakao, READ bekerjasama dengan PT. Mars, telah melakukan kegiatan magang dan pelatihan petani sehingga petani mendapatkan akses untuk benih kakao yang berkualitas.

- Pelaksana program memandang ketiga fokus di atas perlu untuk diperkuat agar pelaksanaan READ dapat berkelanjutan.

Setelah berakhirnya masa berlaku *loan* untuk proyek READ, keberlanjutan pelaksanaannya akan diserahkan ke Pemerintah Daerah. Masing-masing Pemerintah Daerah telah menyusun *exit strategy* yang cukup bervariasi termasuk untuk transfer kelembagaannya. Sebagian ada yang tetap di Dinas Pertanian dan ada yang ditransfer ke Bappeda. Variansi tersebut tampak, dari cara masing-masing daerah menyikapi keberlanjutan READ. Ada daerah yang mengupayakan integrasi hasil READ dengan program regular Pemerintah Daerah lainnya, sementara di daerah lain seperti Poso akan melanjutkan program READ secara utuh dan akan melakukan replikasi di daerahnya.

Peran Bappeda mengkoordinasikan program READ dengan program atau kegiatan yang ada di Kabupaten masing-masing yang meliputi dinas pertanian, perkebunan, peternakan, penyuluhan, pekerjaan umum dan lain-lain. Pengalokasian anggaran pada masing-masing instansi akan didorong agar dicantumkan secara eksplisit untuk penggunaan program ini.

b) Replikasi READ di Kalimantan dan NTT

Untuk replikasi ke dua lokasi baru, diharapkan tahun 2015 telah dapat terlaksana, namun jika tidak memungkinkan maka akan dilakukan persiapan di 2015 untuk kemudian dilaksanakan di 2016. Saat ini Kementerian Pertanian sedang memulai diskusi dengan Pemerintah Daerah yang akan menjadi lokasi baru tersebut, termasuk rencana penunjukan satker di daerah. Di tingkat nasional, BPPSDMP Kementerian Pertanian bertindak sebagai NSU. Manajemen Pelaksanaan Program di tingkat Provinsi akan difasilitasi oleh BPPP Kupang, di tingkat Kabupaten akan dikelola oleh Bapeluh, dan kegiatan akan difokuskan di BPP/BP3K. Semua komponen program akan diarahkan oleh BPPSDMP dan dibiayai melalui dana APBN dan APBD.

Untuk lokasi baru, Kementerian Pertanian berkomitmen untuk mereplikasi keseluruhan program READ, yang dinilai memiliki keunggulan dalam hal program yang komprehensif. Tidak hanya pemberdayaan masyarakat dan pelatihan, tetapi juga penyediaan infrastruktur usaha tani. Replikasi READ mendapatkan dukungan karena model pemberdayaan yang dikembangkan fokus pada peningkatan pertanian, tidak hanya terkait penanggulangan kemiskinan seperti program-program pemberdayaan lainnya.

Namun demikian, Kementerian Pertanian menyadari kendala-kendala teknis dan administrasi yang akan dihadapi dalam replikasi program READ yang semula didanai oleh pinjaman. Kendala-kendala yang diidentifikasi sejak awal diantaranya adalah terkait mekanisme pengadaan (pengadaan infrastruktur dengan jumlah tertentu di peraturan pemerintah harus menggunakan pihak ketiga), mekanisme kelembagaan (dengan dasar *loan agreement*, di bawah SDM terdapat satker yang terdiri dari berbagai lintas kelembagaan), dan mekanisme keuangan.

BAB V
PENUTUP

KESIMPULAN

Beberapa hal berikut ini merupakan kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil pemantauan pelaksanaan pinjaman/hibah luar negeri pada Triwulan IV Tahun 2014, yaitu:

- Jumlah proyek yang dipantau dalam Triwulan IV TA 2014 meliputi 125 proyek yang dibiayai melalui pinjaman multilateral dan bilateral, dan 54 proyek dari pembiayaan KSA/LPKE dengan total nilai pinjaman mencapai ekuivalen USD 17.172,59 juta. Penarikan pinjaman dari seluruh pinjaman luar negeri sampai dengan Triwulan IV TA 2014 (posisi 31 Desember 2014) adalah sebesar ekuivalen USD 7.098,03 juta atau 41,33% dari total nilai pinjaman, sehingga total pinjaman yang belum ditarik sebesar ekuivalen USD 10.074,54 juta. Realisasi penyerapan periode Januari – Desember 2014 mencapai ekuivalen USD 2.923,74 juta atau 75,60% dari target penyerapan TA 2014 sebesar ekuivalen USD 3.867,19 juta;
- Permasalahan yang masih terjadi dalam pelaksanaan proyek di triwulan ini adalah: i) pengadaan tanah yang masih menjadi kendala di Kementerian Pekerjaan Umum dan PT.PLN; ii) pengadaan barang dan jasa yang masih menjadi hambatan di Kementerian Pekerjaan Umum, PT.PLN dan BPKP; iii) proses pencairan dan pencatatan masih menjadi penyebab keterlambatan penyerapan di Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan BMKG; iv) kekurangan alokasi anggaran dalam DIPA yang memerlukan revisi masih menjadi penghambat proyek-proyek yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Pelaksanaan kegiatan hibah dalam Triwulan IV TA 2014 dilaporkan oleh 24 Kementerian/Lembaga. Jumlah kegiatan hibah mencapai 229 proyek dengan total nilai hibah sebesar ekuivalen USD 1.479,50 juta;
- *Lesson learned* dari proyekyang telah selesai sebagaimana terdapat dalam laporan akhir proyek *Rural Empowerment and Agricultural Development* (READ), antara lain i) Desain kegiatan dibuat dengan mengadopsi konsep *livelihood* (penghidupan) yang memperhatikan kesinambungan semua aspek, yaitu *human capital, social capital, natural capital, physical capital, dan finacial capital*. Desain proyek yang sangat holistik tersebut mampu membantu mengatasi berbagai permasalahan mendasar di masyarakat. Proyek juga dirancang lintas sektor dan sesuai dengan kapasitas masyarakat;ii)Metode dan pendekatan yang digunakan dalam proyek ini adalah metode partisipasi yang dimulai sejak perencanaan proyek, pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasi proyek. Hal tersebut mampu menumbuhkan rasa kepemilikan yang tinggi di masyarakat, sehingga target-target kegiatan dapat dicapai dengan baik;iii)Penguatan jejaring serta akses terhadap inovasi dan teknologi, karena proyek ini melibatkan banyak mitra kerja yang kompeten di bidangnya sehingga dapat membuka jejaring yang luas serta memungkinkan untuk terjadinya *transfer of knowledge*; dan iv) Proyek ini menerapkan *Result Based Management* sehingga implementasi program berfokus pada hasil. Kapasitas pelaksana proyek juga ditingkatkan melalui berbagai pelatihan sehingga dapat menjalankan proyek dengan efektif.

TINDAK LANJUT

Upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah tindak lanjut untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman/hibah luar negeri adalah:

- Kapasitas SDM pelaksana proyek masih perlu ditingkatkan untuk dapat menjaga konsistensi perencanaan kegiatan, termasuk rencana penyerapan yang perlu selalu dijaga supaya ketepatan waktu penyelesaian proyek dapat tercapai. Selain itu, rencana pelaksanaan kegiatan maupun rencana penyerapan perlu segera diperbarui apabila terjadi perubahan;
- Komunikasi yang baik antara instansi pelaksana proyek, mitra pembangunan dan pemangku kepentingan lainnya perlu terus ditingkatkan untuk menjaga sinergitas, terutama untuk mempercepat penyelesaian setiap permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam hal ini, proyek-proyek yang mengalami permasalahan serius perlu mendapat perhatian khusus melalui pembahasan lebih lanjut secara intensif;
- Koordinasi yang lebih intensif perlu lebih ditingkatkan antar pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan proyek, termasuk Pemerintah Daerah dalam mengatasi permasalahan pengadaan lahan dan masalah sosial lainnya;
- Dokumentasi yang baik dari setiap tahapan proyek perlu terus dilakukan sebagai bahan pembelajaran dan perbaikan dalam perencanaan replikasi proyek.